



Rencana Kerja Pemerintah Daerah

RKPD

TAHUN 2025



BUPATI MINAHASA TENGGARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara.
2. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
5. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

1. RKPD Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir tanggal 31 Desember 2025.
2. RKPD disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.
3. RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. rancangan kerangka ekonomi Daerah;
 - b. program prioritas pembangunan Daerah; dan
 - c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman

kepada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Pasal 3

1. RKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. bab I yang memuat pendahuluan;
 - b. bab II yang memuat gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. bab III yang memuat kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - d. bab IV yang memuat sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 - e. bab V yang memuat rencana kerja dan pendanaan Daerah;
 - f. bab VI yang memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
 - g. bab VII yang memuat penutup.
2. Uraian RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai:

- a. dasar penyusunan kebijakan umum anggaran, prioritas plafon anggaran sementara dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja Perangkat Daerah.

Pasal 5

1. Pengendalian dan evaluasi RKPD dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah dibidang perencanaan pembangunan Daerah.
2. Pengendalian dan evaluasi sebagaimana pada ayat (1) mencakup sasaran dan prioritas pembangunan

tahunan Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah, serta pagu indikatif.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Ditetapkan di Ratahan
pada tanggal 3 Juli 2024

PJ. BUPATI MINAHASA TENGGARA,



RONALD TEDDY HENDRA SORONGAN

Diundangkan di Ratahan
pada tanggal 3 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

DAVID HARRYWAN LALANDOS
BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2024
NOMOR 906

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MINAHASA
TENGGERA
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2025

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun serta menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD).

Penyusunan RKPD Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2025 mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang disusun dengan memperhatikan Pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, bottom up dan top down, holistik-tematik, integratif, dan spasial serta pendekatan penganggaran yang terintegrasi yakni "*Money Follow Program*".

Dengan Tema : "**MEMPERKUAT DAN MENINGKATKAN INVESTASI MELALUI PENGEMBANGAN SEKTOR JASA, PARIWISATA DAN INDUSTRI**"; RKPD Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2025 merupakan penjabaran tahun ke-2 dalam periode dokumen RPD 2024-2026.

Ucapan terima kasih dan penghargaan diberikan kepada semua pihak atas kerjasama dan partisipasi aktif dalam mendukung penyelesaian penyusunan dokumen RKPD ini. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa akan senantiasa memberkati cita – cita dan usaha kita untuk membangun Minahasa Tenggara Yang lebih Baik untuk pencapaian Visi "**KABUPATEN MINAHASA TENGGARA YANG MANDIRI, ADIL, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN**".

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	xii
Daftar Lampiran	xiv
I. Pendahuluan.....	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum.....	I-3
1.3. Hubungan antar Dokumen	I-6
1.4. Maksud dan Tujuan.....	I-7
1.5. Sistematika Dokumen RKPD.....	I-8
II. Gambaran Umum.....	II-1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-17
2.3. Aspek Pelayanan Umum	II-34
2.4. Aspek Daya Saing Daerah.....	II-146
III. Kerangka Ekonomi Dan Keuangan Daerah	III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-
55	
IV. Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah	IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-2
4.2. Prioritas dan Sararan Pembangunan Tahun 2023	IV-15
V. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah.....	V-1
VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	VI-1
VII. Penutup	VII-1

DAFTAR TABEL

No	Judul	Hal.
2.1	Luas Wilayah Administratif	II-2
2.2	Sungai-Sungai di Kabupaten Minahasa Tenggara	II-5
2.3	Danau di Kabupaten Minahasa Tenggara	II-5
2.4	Suhu Rata-Rata Bulanan Di Kabupaten Minahasa Tenggara	II-7
2.5	Data Kelembaban Udara Nisbi Rata-Rata di Kabupaten Minahasa Tenggara	II-7
2.6	Perkembangan Jumlah Penduduk Tahun 2019-2023 Kabupaten Minahasa Tenggara	II-15
2.7	Jumlah Penduduk Berdasarkan Luas dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2023 Kabupaten Minahasa Tenggara	II-15
2.8	Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2023 di Kabupaten Minahasa Tenggara	II-16
2.9	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2019-2023 Kabupaten Minahasa Tenggara Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar Rupiah)	II-17
2.10	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2019-2023 Kabupaten Minahasa Tenggara Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010 (Milyar Rupiah)	II-18
2.11	Distribusi Persentase PDRB ADHB Kabupaten Minahasa Tenggara Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023	II-19
2.12	Nilai inflasi Rata-rata Tahun 2019-2023 Kabupaten Minahasa Tenggara	II-21
2.13	PDRB Perkapita ADHB Tahun 2019-2023 Kabupaten Minahasa Tenggara	II-21
2.14	PDRB Perkapita ADHK Tahun 2019-2023 Kabupaten Minahasa Tenggara	II-21
2.15	Indeks Gini Tahun 2019-2023 Kabupaten Minahasa Tenggara	II-22
2.16	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	II-23
2.17	Komponen pembentuk IPM Tahun 2019-2023 Kabupaten Minahasa Tenggara	II-25
2.18	Kinerja Makro Urusan Pendidikan Fokus Kesejahteraan Sosial Tahun 2019-2023	II-27
2.19	Kinerja Makro Urusan Kesehatan Fokus Kesejahteraan Sosial Tahun 2019-2023	II-28
2.20	Kinerja Makro Urusan Ketenagakerjaan Fokus Kesejahteraan Sosial Tahun 2019-2023	II-29
2.21	Kinerja Makro Urusan Kesejahteraan Keluarga Fokus Kesejahteraan Sosial Tahun 2019-2023	II-30
2.22	Kinerja Makro Urusan Pengelolaan Keuangan Fokus	II-31

	Kesejahteraan Sosial Tahun 2019-2023	
2.23	Kinerja Makro Urusan Ketahanan Pangan Fokus Kesejahteraan Sosial Tahun 2019-2023	II-31
2.24	Kinerja Makro Urusan Ketahanan Pangan Fokus Kesejahteraan Sosial Tahun 2019-2023	II-32
2.25	Perkembangan Seni, Budaya Tahun 2019-2023 Kabupaten Minahasa Tenggara	II-33
2.26	Jumlah Klub dan Gedung Olahraga Tahun 2019-2023	II-34
2.27	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019-2023	II-34
2.28	APK Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019-2023	II-35
2.29	Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT) Tahun 2019-2023 Berdasarkan Penduduk Yang Berusia 15 Tahun ke Atas Kabupaten Minahasa Tenggara	II-36
2.30	APM Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019-2023	II-36
2.31	Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019-2023	II-37
2.32	Angka Putus Sekolah (APS) % Tahun 2019-2023 Kabupaten Minahasa Tenggara	II-37
2.33	Angka Kelulusan Tahun Ajaran 2018/2019-2022/2023 Kabupaten Minahasa Tenggara	II-38
2.34	Angka Melanjutkan Pendidikan Tahun Ajaran 2018/2019-2022/2023 Kabupaten Minahasa Tenggara	II-39
2.35	Persentase Sekolah Kondisi Bangunan Baik Tahun 2019-2023 Kabupaten Minahasa Tenggara	II-39
2.36	Rasio Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2022-2023	II-40
2.37	Rasio Guru dan Siswa Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019-2023	II-41
2.38	Proporsi Murid yang Berhasil Menamatkan sekolah Dasar Tahun 2019-2023 Kabupaten Minahasa Tenggara	II-41
2.39	Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019-2023	II-42
2.40	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Tahun 2019-2023 Kabupaten Minahasa Tenggara	II-42
2.41	Angka Kematian Bayi Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019 - 2023	II-43
2.42	Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019-2023	II-44
2.43	Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019-2023	II-44
2.44	Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2019-2023 Kabupaten Minahasa Tenggara	II-45
2.45	Angka Kematian Ibu Per 100,000 Kelahiran Hidup Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019-2023	II-46
2.46	Rasio Posyandu Persatuan Balita Tahun 2019-2023	II-46
2.47	Rasio, Puskesmas, Poskesdes, Per Satuan Penduduk Tahun 2019-2023	II-47
2.48	Rasio Rumah Sakit, Puskesmas, Poskesdes,	II-48

	Per Satuan Penduduk Tahun 2019-2023	
2.49	Rasio Dokter dan Tenaga Medis Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019-2023	II-49
2.50	Rasio Perawat Tahun Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019-2023	II-49
2.51	Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani 2019-2023	II-50
2.52	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Tahun 2019 - 2023	II-50
2.53	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization(UCI) Tahun 2019-2023	II-51
2.54	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Tahun 2019-2023	II-51
2.55	Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak Tahun 2019-2023	II-52
2.56	Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk Tahun 2019-2023	II-52
2.57	Cakupan Balita Pneumonia Yang Ditangani Tahun 2019-2023	II-53
2.58	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Tahunh 2019-2022	II-53
2.59	Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk) Tahun 2019-2023	II-54
2.60	Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk) Tahun 2019-2023	II-54
2.61	Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS Tahun 2019-2023	II-55
2.62	Proporsi Kasus Tuberkulosis Yang Diobati Dan Sembuh Dalam Program DOTS Tahun 2019-2023	II-55
2.63	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Tahun 2019-2023	II-56
2.64	Penderita Diare Yang Ditangani Tahun 2019-2023	II-56
2.65	Angka Kejadian Malaria Tahun 2019-2023	II-57
2.66	Tingkat Kematian Akibat Malaria Tahun 2019-2023	II-57
2.67	Proporsi Anak Balita Dengan Demam Yang Diobati Dengan Obat Anti Malaria Yang Tepat Tahun 2019-2023	II-57
2.68	Prevalensi HIV/AIDS (Persen) Dari Total Populasi Tahun 2019-2023	II-58
2.69	Penggunaan Kondom Pada Hubungan Seks Berisiko Tinggi Terakhir Tahun 2019-2023	II-58
2.70	Cakupan Kunjungan Bayi Tahun 2019-2023	II-59
2.71	Cakupan Puskesmas Tahun 2019-2023	II-59
2.72	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Tahun 2019-2023	II-59
2.73	Cakupan Pelayanan Nifas Tahun 2019-2023	II-60
2.74	Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani Tahun 2019-2023	II-60
2.75	Cakupan Pelayanan Anak Balita Tahun 2019-2023	II-61

2.76	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping Asi Pada Anak Usia 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin Tahun 2019-2023	II-61
2.77	Cakupan Penjangkaran Kesehatan Siswa SD Dan Setingkat Tahun 2019-2023	II-62
2.78	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin Tahun 2019-2023	II-62
2.79	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 Yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS) Tahun 2019-2023	II-62
2.80	Cakupan Desa/ Kelurahan Mengalami KLB Yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam Tahun 2019-2023	II-63
2.81	Prevalensi Stunting Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019-2023	II-63
2.82	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik Tahun 2019-2023	II-65
2.83	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk Tahun 2019-2023	II-65
2.84	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 Km/Jam) Tahun 2019-2023	II-66
2.85	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi baik Tahun 2019-2023	II-66
2.86	Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2019-2023	II-67
2.87	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak Tahun 2019-2023	II-67
2.88	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan Tahun 2019-2023	II-68
2.89	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk Tahun 2019-2023	II-68
2.90	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha Tahun 2019-2023	II-69
2.91	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Tahun 2019-2023	II-69
2.92	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten Tahun 2019-2023	II-70
2.93	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU Tahun 2019-2023	II-70
2.94	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Tahun 2019-2023	II-71
2.95	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/kota Tahun 2019-2023	II-72
2.96	Tingkat Waktu Tanggap (<i>response time rate</i>) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Tahun 2019-2023	II-72
2.97	Persentase Penegakan PERDA Tahun 2019-2023	II-73
2.98	Pemenuhan Sarpras Penanggulangan Bencana Tahun 2019-2023	II-73
2.99	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial Tahun 2019-2023	II-74
2.100	Persentase PMKS Yang Tertangani Tahun 2019-2023	II-74

2.101	Persentase PMKS Skala Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Beras Sejahtera (Rastra) Tahun 2019-2023	II-74
2.102	Korban Bencana Tahun 2019-2023	II-75
2.103	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tahun 2020-2023	II-76
2.104	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun, Tahun 2020-2023	II-77
2.105	Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB) Tahun 2019-2023	II-77
2.106	Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan Tahun 2019-2023	II-78
2.107	Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek Tahun 2019-2023	II-78
2.108	Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Tahun 2019-2023	II-79
2.109	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Tahun 2019-2023	II-79
2.110	Persentase Perguruan Tinggi Tahun 2019-2021	II-80
2.111	Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah dan Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan di DPRD dan Partisipasi Perempuan Di Swasta Tahun 2019-2023	II-81
2.112	Rasio KDRT Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019-2023	II-82
2.113	Persentase Tenaga Kerja di Bawah Umur Tahun 2019-2023	II-83
2.114	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2019-2023	II-83
2.115	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Tahun 2019-2023	II-84
2.116	Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT /PKT di Rumah Sakit Tahun 2019-2023	II-85
2.117	Layanan Reabsos Yang Diberikan Oleh Petugas Reabsos Terlatih Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Didalam Unit Pelayanan Terpadu Tahun 2019-2023	II-85
2.118	Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Tahun 2019-2023	II-86
2.119	Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Tahun 2019-2023	II-86

2.120	Layanan Pemulangan Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Tahun 2019-2023	II-87
2.121	Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Tahun 2019-2023	II-87
2.122	Cakupan Rasio APM Perempuan/Laki-Laki Di SD dan SMP Serta Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-Laki Pada Kelompok Usia 15-24 Dan Kontribusi Perempuan Tahun 2019-2023	II-88
2.123	Ketersediaan Pangan Utama, Ketersediaan Energi, Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH), Penguatan Cadangan Pangan Tahun 2019-2023	II-89
2.124	Jumlah Sertifikat Hak Milik Atas Tanah di Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2020-2022	II-90
2.125	Capaian Kinerja Lingkungan Hidup Tahun 2019-2023	II-91
2.126	Distribusi Luas Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Air Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Minahasa Tenggara	II-96
2.127	Distribusi Luas Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Air Berdasarkan Bentang alam Kabupaten Minahasa Tenggara	II-97
2.128	Distribusi Luas Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Air Berdasarkan Vegetasi Alami Kabupaten Minahasa Tenggara	II-98
2.129	Distribusi Luas Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Air Berdasarkan Penutupan Lahan Kabupaten Minahasa Tenggara	II-99
2.130	Distribusi Luas Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Minahasa Tenggara	II-101
2.131	Distribusi Luas Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Berdasarkan Bentang Alam Kabupaten Minahasa Tenggara	II-102
2.132	Distribusi Luas Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Berdasarkan Vegetasi Alami Kabupaten Minahasa Tenggara	II-104
2.133	Distribusi Luas Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Berdasarkan Penutupan Lahan Kabupaten Minahasa Tenggara	II-105
2.134	Realisasi Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2019-2023	II-107
2.135	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik Tahun 2019-2023	II-108
2.136	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Tahun 2019-2023	II-109
2.137	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Tahun 2019-2023	II-109
2.138	Persentase PKK aktif Tahun 2019-2023	II-110
2.139	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat Tahun 2019 –2023	II-110
2.140	Realisasi Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019 – 2023	II-111

2.141	Kondisi Umum Perkembangan Urusan Perhubungan Tahun 2019 – 2023	II-113
2.142	Realisasi Kinerja Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 – 2023	II-116
2.143	Jumlah Koperasi Aktiv Tahun 2019-2023	II-117
2.144	Capaian Kinerja Urusan Usaha Kecil Dan Menengah Tahun 2019-2023	II-118
2.145	Realisasi Kinerja urusan Penanaman Modal Tahun 2019-2023	II-118
2.146	Realisasi Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020-2023	II-120
2.147	Realisasi Kinerja Urusan Statistik Tahun 2019-2023	II-121
2.148	Realisasi Kinerja Urusan Persandian Tahun 2019-2023	II-121
2.149	Realisasi Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2019-2023	II-122
2.150	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun, Tahun 2019-2023	II-123
2.151	Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Tahun 2019-2023	II-124
2.152	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk Tahun 2019-2023	II-124
2.153	Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan Tahun 2019-2023	II-124
2.154	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan Tahun 2019-2023	II-125
2.155	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat Tahun 2019-2023	II-125
2.156	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku Tahun 2019-2023	II-126
2.157	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Tahun 2019-2023	II-126
2.158	Capaian Kinerja Pariwisata Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019-2023	II-127
2.159	Capaian Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2019-2023	II-128
2.160	Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2023	II-130
2.161	Indikator Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik dan Rasio Ketersediaan Daya Listrik Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2019 – 2023	II-130
2.162	Jumlah Pasar Yang di Bangun Tahun 2019-2023	II-131
2.163	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal Tahun 2020-2023	II-131
2.164	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Tahun 2019-2023	II-132
2.165	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Tahun 2019-2023	II-132
2.166	Jumlah IKM Tahun 2019-2023	II-133
2.167	Perkembangan Data Indikator Capaian Kinerja Bidang Transmigrasi Tahun 2019 – 2022	II-133
2.168	Produksi Perikanan Tahun 2019-2023	II-134

2.169	Konsumsi Ikan Tahun 2019-2023	II-135
2.170	Cakupan Bina Kelompok Nelayan Tahun 2019-2023	II-135
2.171	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Tahun 2019-2023	II-135
2.172	Perencanaan Pembangunan Tahun 2019-2023	II-136
2.173	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Tahun 2019-2023	II-137
2.174	Persentase SILPA Tahun 2019-2023	II-137
2.175	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Tahun 2019-2023	II-138
2.176	Persentase Belanja Pendidikan (20%) Tahun 2019-2023	II-138
2.177	Persentase Belanja Kesehatan (10%) Tahun 2018-2022	II-139
2.178	Belanja Langsung Tahun 2019-2021	II-139
2.179	Belanja Tidak Langsung Tahun 2019-2021	II-140
2.180	Penetapan APBD Tahun 2019-2023	II-140
2.181	Kinerja Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2019-2023	II-141
2.182	Kinerja Bidang Pengawasan Tahun 2019-2023	II-142
2.183	Kinerja Pelaksanaan Fungsi Sekretariat Dewan Tahun 2019-2023	II-143
2.184	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan Tahun 2019-2023	II-143
2.185	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Tahun 2019-2023	II-144
2.186	Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah Tahun 2019-2023	II-144
2.187	Persentase Kebijakan Inovasi Yang Diterapkan di Daerah Tahun 2019-2023	II-145
2.188	Realisasi Kinerja Fungsi Penunjang Kewilayahan Tahun 2019-2023	II-145
2.189	Angka Konsumsi RT per Kapita Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019-2023	II-147
2.190	Persentase Pengeluaran Konsumsi RT non-Pangan dan Pangan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019-2023	II-147
2.191	Rasio Luas Wilayah Produktif Kabupaten Minahasa Tenggara	II-148
2.192	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Tahun 2019-2023 Kabupaten Minahasa Tenggara	II-148
2.193	Angka Kriminalitas Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019-2023	II-149
2.194	Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Bank Umum Tahun 2019-2023	II-149
2.195	Produktivitas Total Daerah Tahun 2019-2013	II-150
2.196	Rasio Ketergantungan Tahun 2020-2023	II-151
2.197	Evaluasi Capaian Indikator Makro Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2023	II-151
2.198	Evaluasi Capaian Penyelenggaraan Urusan Tahun 2023	II-153

	Kabupaten Minahasa Tenggara	
2.199	Rekapitulasi Evaluasi Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan dan Kinerja Hasil Program Tahun 2023	II-218
2.200	Rumusan Permasalahan Yang Berhubungan Dengan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Masih Perlu Ditingkatkan	II-219
2.201	Rumusan Permasalahan: Inovasi daya saing Meningkatkan Nilai Tambah dan Produktivitas diBarengi Efisiensi Pada Sektor Perekonomian Masih Perlu Ditingkatkan	II-220
2.202	Rumusan Permasalahan : Belum Optimalnya Penanganan Tata Ruang dan Penyediaan Infrastruktur Dasar	II-221
2.203	Rumusan Permasalahan : Belum Optimalnya Penanganan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	II-222
2.204	Rumusan Permasalahan: Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>) Masih Belum Optimal dan Masih tingginya gangguan ketentraman dan ketertiban Masyarakat	II-222
3.1	Suku Bungan Acuan Beberapa Negara	III-7
3.2	Pembentukan Modal Tetap Bruto Triwulann IV Tahun 2023	III-16
3.3	Perdagangan Besar Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	III-20
3.4	Realisasi Investasi Sektor Sekunder	III-23
3.5	Realisasi PMA Terbesar Berdasarkan negara Asal	III-24
3.6	Realisasi Komponen Pendapatan Negara dan Hibah	III-31
3.7	Realisasi Komponen PNPB	III-32
3.8	Realisasi Komponen Belanja Pemerintah Pusat	III-34
3.9	Komposisi Transfer Daerah	III-36
3.10	Tingkat Inflasi Domestik	III-39
3.11	Perkembangan Penyaluran Kredit Produktif Bank Umum Konvensional	III-41
3.12	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Sulawesi Utara Menurut Lapangan Usaha (Persen) tahun 2019-2023	III-47
3.13	Distribusi PDRB Atas Dasar harga Berlaku Tahun 2019-2023	III-51
3.14	Kontribusi, Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2023	III-52
3.15	Produk Domestik Reginal Bruto dan PDRB per Kapita Tahun 2019-2023	III-54
3.16	Proyeksi Asumsi Ekonomi Makro Minahasa Tenggara Tahun 2024-2026	III-54
3.17	Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten Miahasa Tenggara Tahun 2019-2023	III-58
3.18	Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2025	III-62

3.19	Realisasi Belanja Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019-2023	III-66
3.20	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2025	III-67
3.21	Realisasi Pembiayaan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019-2023	III-71
4.1	Tujuan Pembangunan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024-2026	IV-8
4.2	Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2025	IV-11
4.3	Strategis dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Minahasa Tenggara 2025	IV-26
4.4	Keselarasan Tema RKP, RKPD Provinsi Sulawesi Utara Dan RKPD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2025	IV-31
4.5	Keterkaitan isu strategis dan Prioritas daerah dengan Prioritas Provinsi dan Prioritas Nasional	IV-32
4.6	Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 Kabupaten Minahasa Tenggara	IV-34
4.7	Keterkaitan Sasaran Pembangunan Tahun 2025 Antara RKPD Kabupaten Minahasa Tenggara, RKPD Provinsi Sulawesi Utara dan RKP Nasional	IV-41
4.8	Keterkaitan Dimensi Pembangunan, Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara dan Prioritas Pembangunan kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2025	IV-46
4.9	Keterhubungan Prioritas Pembangunan Dan Program Prioritas Daerah serta Pagu Indikatif Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2025	IV-48
4.10	Keterkaitan antara Prioritas Nasional dan Prioritas Kabupaten Minahasa Tenggara dalam RKPD Tahun 2025	IV-52
4.11	Keterkaitan antara Prioritas Provinsi Sulawesi Utara dan Prioritas Kabupaten Minahasa Tenggara dalam RKPD Tahun 2025	IV-59
4.12	Inovasi Kebijakan Pembangunan	IV-69
5.1	Proyeksi Belanja Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2025	V-1
5.2	Rencana Program dan Pendanaan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2025	V-3
5.3	Pagu Indikatif Per Perangkat Daerah Tahun 2025	V-15
5.4	Rekapitulasi Usulan Masyarakat	V-18
5.5	Rekapitulasi Hasil Pemetaan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	V-18
6.1	Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2025	VI-1
6.2	Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2025	VI-2
6.3	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Dampak/ <i>Impact</i> Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2025	VI-6
6.4	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian	VI-9

	Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Hasil/ <i>Outcome</i> Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2025	
--	--	--

DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Hal.
2.1	Peta Administrasi Kabupaten Minahasa Tenggara	II-2
2.2	Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019-2023	II-20
2.3	Grafik Perkembangan Angka Kemiskinan	II-23
2.4	Peta Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Air Kabupaten Minahasa Tenggara	II-95
2.5	Diagram Persentase Distribusi Luas Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Air Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Minahasa Tenggara	II-96
2.6	Diagram Persentase Distribusi Luas Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Air Berdasarkan Bentang Alam Kabupaten Minahasa Tenggara	II-97
2.7	Diagram Persentase Distribusi Luas Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Air Berdasarkan Vegetasi Alam Kabupaten Minahasa Tenggara	II-99
2.8	Diagram Persentase Distribusi Luas Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Air Berdasarkan Penutupan Lahan Kabupaten Minahasa Tenggara	II-99
2.9	Peta Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Kabupaten Minahasa Tenggara	II-101
2.10	Diagram Persentase Distribusi Luas Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Berdasarkan Kecamatan	II-102
2.11	Diagram Persentase Distribusi Luas Kinerja JL Penyedia Pangan Berdasarkan Bentang Alam di Kabupaten Minahasa Tenggara	II-103
2.12	Diagram Persentase Distribusi Luas Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Berdasarkan Tipe Vegetasi Alami di Kabupaten Minahasa Tenggara	II-105
2.13	Diagram Persentase Distribusi Luas Kinerja JL Penyedia Pangan Berdasarkan Penutupan Lahan di Kabupaten Minahasa Tenggara	II-106
2.14	Permasalahan Utama dan permasalahan Pokok Pembangunan Kabupaten Minahasa Tenggara	II-219
2.15	Fokus Kebijakan Setiap Tahapan dalam RPJPN 2005-2025	II-245
3.1	Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara	III-2
3.2	Perkembangan Harga Minyak Mentah	III-9
3.3	Perkembangan Harga Gas Alam dan Batu Bara	III-9
3.4	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	III-13
3.5	Pertumbuhan PDB Sisi Pengeluaran Triwulan IV Tahun 2023	III-14
3.6	Perkembangan Konsumsi Rumah Tangga dan Investasi PDB triwulan IV Tahun 2023	III-15
3.7	Pertumbuhan PDB Sisi Produksi Triwulan IV Tahun 2023	III-17

3.8	Realisasi Investasi	III-21
3.9	Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor	III-21
3.10	Pertumbuhan Industri Pengolahan Triwulan IV Tahun 2023	III-25
3.11	Pertumbuhan Subsektor Industri Pengolahan Non Migas Triwulan IV Tahun 2023	III-26
3.12	Pemulihan Wisatawan Internasional Triwulan IV Tahun 2023	III-27
3.13	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (ribu orang)	III-27
3.14	Nilai Devisa Pariwisata dan Rerata Pengeluaran Wisman (ASPA)	III-28
3.15	Ekspor Ekonomi Kreatif	III-29
3.16	Pertumbuhan dan Kontribusi Wilayah	III-30
3.17	Perkembangan Komponen Belanja Negara	III-34
3.18	Perkembangan Nilai Tukar Rupiah Terhadap USD	III-38
3.19	Kontribusi BUMN	III-42
3.20	Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Utara (persen) Tahun 2019-2023	III-49
3.21	Kontribusi dan Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2023	III-49
3.22	Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019	III-56
4.1	Arah Kebijakan Kabupaten Minahasa Tenggara 2024-2026	IV-26

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran : Matriks Rancangan Akhir Renja Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2025
- Lampiran : Daftar Usulan Masyarakat Untuk RKPD Tahun 2025
- Lampiran : Daftar Pokok-Pokok Pikiran DPRD Untuk RKPD Tahun 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPD untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), RKPD Provinsi dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, isu strategis nasional yang sedang berkembang, pelayanan dasar, visi dan misi, serta program.

Dengan demikian RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab masing- masing kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja PD; dan

4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam menyusun RKPD digunakan empat pendekatan perencanaan pembangunan yang meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratis dalam penyusunan RKPD dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional. Selain itu, perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilakukan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sedangkan pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Penyusunan dokumen RKPD 2025 ini, mengacu pada Pasal 16 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengamanatkan bahwa RKPD disusun dengan tahapan yaitu: persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan Musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD, dan penetapan RKPD. Sebagai catatan, tahun 2025 merupakan tahun ke-II (kedua) dari pelaksanaan periodisasi RPD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024-2026.



Muatan dalam dokumen RKPD tahun 2025 merupakan penjabaran secara operasional per tahun dari dokumen RPD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024-2026, yang memuat sasaran dan prioritas pembangunan tahunan, serta berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyempurnaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

1.2 Dasar Hukum

Peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan RKPD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembarana Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014





- tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan





- Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);



23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 Nomor 98), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019 Nomor 123);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.
27. Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 Kabupaten Minahasa Tenggara (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 881).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan RKPD Kabupaten Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2025 sejalan dengan arah pembangunan yang dimuat dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan. Dokumen tersebut meliputi dokumen perencanaan pembangunan nasional, dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Utara dan dokumen perencanaan Kabupaten Minahasa Tenggara. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2025 juga memperhatikan sinergitas dengan dokumen

BAB II**GAMBARAN UMUM**

Setiap daerah memiliki karakteristik dan fenomena yang berbeda-beda dalam membangun daerahnya tergantung dari struktur kewilayahan maupun kebudayaan regionalnya. Hal tersebut tentu saja menjadi nilai positif bagi pengembangan daerah jika dioptimalkan kemanfaatannya dalam kerangka pembangunan daerah, tak terkecuali bagi Kabupaten Minahasa Tenggara yang merupakan salah satu dari 15 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara.

Dalam merencanakan pembangunan dibutuhkan adanya gambaran umum kondisi daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara yang akan memberikan pengetahuan dan potret pada aspek fisik (aspek geografi dan demografi), aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah masyarakat di Kabupaten Minahasa Tenggara. Gambaran umum kondisi daerah ini akan menjadi pijakan awal dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah melalui pemetaan secara objektif dan analisis data yang valid.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi**2.1.1. Karakteristik Lokasi Dan Wilayah****2.1.1.1 Luas Dan Batas Wilayah Administrasi**

Kabupaten Minahasa Tenggara memiliki luas wilayah sebesar 730,62 Km² atau 73.062 Ha, (BPS Kabupaten Minahasa Selatan) yang lokasinya berbatasan langsung dengan Kecamatan Amurang Timur dan Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan disebelah Utara, dengan Kecamatan Langowan Kabupaten Minahasa dan Laut Maluku disebelah Timur, dengan Laut Maluku dan Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow di sebelah Selatan, dengan Kecamatan Ranoyapo dan Kecamatan Kumelembuai Kabupaten Minahasa Selatan di sebelah Barat.



Secara administratif, Kabupaten Minahasa Tenggara terbagi atas 12 wilayah kecamatan dan 9 kelurahan serta 135 Desa. Dari jumlah tersebut, terdapat 2 (dua) kecamatan yang mempunyai wilayah terluas yaitu Kecamatan Ratatotok dengan luas wilayah sebesar 10.418 km² (14,26%) dan Kecamatan Touluaan Selatan dengan luas wilayah sebesar 10.180 km² (13,93%). Kecamatan Ratatotok merupakan wilayah pesisir yang sebagian besar wilayahnya masih memiliki potensi perikanan pertanian dan perkebunan, Pariwisata dan Pertambangan, sedangkan Kecamatan Touluaan Selatan merupakan daerah yang memiliki potensi, pertanian, kehutanan dan pertambangan. Sementara itu wilayah kecamatan yang mempunyai luas terkecil adalah Kecamatan Tombatu Timur dengan luas wilayah 1.881 km² (2,55%) dan Kecamatan Tombatu Utara dengan luas wilayah sebesar 3.717 km² (5,08%), dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Luas Wilayah Administratif

No	Kecamatan	Luas Wilayah Administratif (Ha)	Prosentase(%)
1.	Belang	7.517	10,28
2.	Pasan	4.979	6,81
3.	Pusomaen	5.363	7,34

RKPD 2025			
No	Kecamatan	Luas Wilayah Administratif (Ha)	Prosentase(%)
4.	Ratahan	6.163	8,43
5.	Ratahan Timur	6.399	8,76
6.	Ratatotok	10.418	14,26
7.	Silian Raya	4.375	5,98
8.	Tombatu	6.795	9,30
9.	Tombatu Timur	1.881	2,55
10.	Tombatu Utara	3.717	5,08
11.	Touluaan	5.276	7,22
12.	Touluaan Selatan	10.180	13,93
Luas Total		73.063	100

Sumber : Mitra Dalam Angka 2024

2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Minahasa Tenggara dilihat berdasarkan posisi astronomi berada di antara garis 124⁰ 30'24" - 124⁰ 56'24" BT dan 1⁰ 08'19" - 0⁰50'46" LU. Dalam konteks pembangunan Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara juga merupakan daerah yang menjadi lajur rel kereta api dari Makassar-Gorontalo dan Sulawesi Utara. Kawasan pesisir yang terdapat di wilayah Kecamatan Belang, Ratatotok, dan Pusomaen. Kawasan perbukitan/pegunungan sebagai kawasan resapan air Rencana penetapan dan pengelolaan Kawasan sekitar DAS (daerah aliran sungai) dan kawasan perbukitan/pegunungan sebagai kawasan resapan air Tersebar di seluruh wilayah Kabupaten. Kawasan strategis konservasi kepulauan di Kecamatan Ratatotok, Belang dan Pusomaen.

2.1.1.3 Topografi

Sebagaian besar wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara adalah bergunung-gunung dan berbukit-bukit yang membentang dari Utara sampai ke selatan. Diantaranya terdapat beberapa gunung berapi yang masih aktif hingga sekarang, salah satu gunung yang masih aktif tersebut adalah gunung api Soputan dengan tinggi 1.780 m yang terletak di antara perbatasan Kabupaten Minahasa Tenggara dan Minahasa Selatan serta Kabupaten Minahasa.

Topografi Kabupaten Minahasa Tenggara antara lain terdiri dari:

a. Kemiringan Lahan

Untuk lereng antara 0 – 2 % yang relatif datar terdapat di sepanjang pantai selatan yang meliputi Kec. Ratatotok, Belang dan Pusomaen. Juga



terdapat di Sekitar daerah Rasi, Tosuraya, Wawali, Pasan di Kec. Ratahan, Molompar dan Tombatu di Kec. Tombatu, disekitar Ranoketang Atas, Lobu Kec. Touluaan dan Silian di Kecamatan Silian Raya.

b. Ketinggian Lahan

Ketinggian lahan Kabupaten Minahasa Tenggara antara 0 m (pantai Kecamatan Ratatotok, Belang, Posumaen) hingga ketinggian 1.750 m (lereng Gunung Soputan di Kecamatan Ratahan dan Kecamatan Silian Raya. Lereng wilayah Minahasa Tenggara sebagian besar adalah antara 15 – 25 % yakni sebanyak 35 % dari luas Wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara yang meliputi hampir di seluruh Kecamatan yang ada di Minahasa Tenggara. Juga lereng antara 25 – 40 % yakni sebanyak 31 %.

2.1.1.4 Geologi

a. Struktur dan karakteristik;

Dari Peta Geologi dan Potensi Bahan Galian Sulawesi Utara (Dep. Pertambangan dan Energi, Tahun 1995) berdasarkan formasi batuan wilayah Minahasa Tenggara terdiri dari :

- Formasi Aluvium dan endapan pantai (Qa)
- Formasi Batuan Gunung Api Muda (Tmv, Qv)
- Formasi Batuan Gunung api Bilungala (Tmbv)
- Formasi Batuan Gunung Api Pinogu (TQpv)
- Batuan Gunung api (Tmv)

Dari Peta Geologi dan Potensi Bahan Galian Sulawesi Utara (Dep. Pertambangan dan Energi, Tahun 1995) berdasarkan faktor Lithologi, wilayah Minahasa Tenggara terdiri dari jenis batuan: Alluvium, Basalt, Tefra, Andesit.

2.1.1.5 Hidrologi

a. Daerah Aliran Sungai

Daerah aliran sungai yang ada di Minahasa Tenggara adalah : DAS Sosoan, DAS Ranoako, DAS Kayuuling, DAS Kalait, DAS Ranoyapo, DAS Suhuyon, DAS Sasano, DAS Lamangi, DAS Lowatag, DAS Surat Kedong, DAS Limbole, DAS Sue, DAS Pangasu, DAS Mamaya, DAS Kalewaha, DAS Limbale, DAS Tutud, DAS Tiwalad, DAS Malebu, DAS Yarorongan, DAS Katawae, DAS Pinamangkulan, DAS Lahaus, DAS Konga, DAS Waasu, DAS Pantua, DAS Palaus, DAS Kawira, DAS Puta, DAS Makalu, DAS Konde, DAS Nipung, DAS



Kosal, DAS Tawang, DAS Abuang, DAS Hais, DAS Nunuk, DAS Kawiwi, DAS Poniki, DAS Minanga, DAS Paderen, DAS Toulunik, DAS Wawesan, DAS Kaanon, DAS Binuang, DAS Koker, DAS Tonsawang, DAS Totok, DAS Matuahtua, DAS Koserangan, DAS Tembaga, DAS Limpoda, DAS Ropada, DAS lahendung, DAS Wongangaan, DAS Mongawo, DAS Wawesen II, DAS Mopsalkaw, DAS Mopsaleleng, DAS Basaan dan DAS Morea.

b. Sungai, Danau dan Rawa;

Kabupaten Minahasa Tenggara secara Hidrologi memiliki 13 sungai dan 16 danau.

Tabel. 2.2
Sungai- Sungai di Kabupaten Minahasa Tenggara

No	Nama Kecamatan	Nama Sungai
1	Kec. Ratahan	Kuala Lahendong
2	Kec. Pusomaen	Kuala Makalu
3	Kec.Pasan	Kuala Kokor, Kuala Raligh, Kuala Loy
4.	Kec. Tombatu	Dungusan Keleweng, Londola Ranoako, Dahera.
5.	Kec. Touluaan	Dungusan Dokoliuan, Kuni Lomanggi.
6.	Kec. Belang	Kuala Wowesen,
7.	Kec. Ratatotok	Kuala Totok
8.	Kec. Silian Raya	Londola, Mamaya, Kuala Kelewaha
9.	Kec. Tombatu Timur	Kuala Kasarengan, Londola Solasang
10.	Kec. Tombatu Utara	Kuala Londolimbale, Kuala Teponga
11.	Kec. Ratahan Timur	Kuala Kaluya
12.	Kec. Ratahan Timur	Kuala Poniki
13.	Kec.Touluaan Selatan	Londola Ranoako

Sumber : RTRW Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2033

Tabel. 2.3
Danau di Kabupaten Minahasa Tenggara

NO	NAMA DANAU	LOKASI	LUAS (HA)	KET
1	Lumpias	Ratahan	25	
2	Wongangaan	Pasan	15	
3	Mongawo	Pasan	15	
4	Kalowenan	Pusomaen	3	
5	Bulilin	Tombatu	10	
6	Sosongkasa	Tombatu	5	
7	Pomubuan	Tombatu	5	
8	Lolos	Tombatu	2	
9	Useban	Tombatu	1,5	
10	Kuyanga	Tombatu	0,75	
11	Tutud	Tombatu	4	
12	Selek dan	Touluaan	4	
13	Derel	Touluaan	3	
14	Kawelaan	Touluaan	5	
15	Belang	Touluaan	5	
16	Pakioan	Touluaan	15	
	TOTAL		116	

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Minahasa Tenggara Tahun 2024



c. Debit

Debit air di kabupaten Minahasa Tenggara terdiri atas :

- Sumber Mata Air (SMA) di kalatin Ratahan dengan debit kurang lebih 60 l/dtk
- Sumber Air Sungai dan Danau (SASD) di sungai Makalu dengan debit kurang lebih 250 l/dtk dan sungai belang dengan debit kurang lebih 200 l/dtk
- Instalasi Pengolahan Air di sungai Makalu dengan debit kurang lebih 250 l/dtk dan sungai belang dengan debit kurang lebih 200 l/dtk.

2.1.1.6 Klimatologi

a. Tipe

Iklim daerah Minahasa Tenggara termasuk tropis yang dipengaruhi oleh angin muzon. Pada bulan November sampai dengan April bertiup angin barat yang membawa hujan di pantai utara, pada bulan Mei sampai Oktober terjadi perubahan angin selatan yang kering. Pada umumnya, kondisi iklim di Minahasa Tenggara sama dengan kondisi iklim wilayah Indonesia lainnya, yaitu memiliki dua musim, musim kemarau dan musim hujan.

b. Curah Hujan

Curah hujan; Dari data yang diperoleh dari stasiun Klimatologi Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara, diketahui bahwa curah hujan tahunan di Kabupaten Minahasa Tenggara sebanyak 3.429 mm, dengan penyebaran curah hujan rata-rata bulanan 286,75 mm yaitu berkisar antara 102,4 – 451,9 mm dan jumlah hari hujan rata-rata bulanan sebanyak 22,92 hari hujan yaitu berkisar antara 17 – 27 hari hujan. Data data yang ada menunjukkan bahwa Kabupaten Minahasa Tenggara tidak mempunyai bulan kering (curah hujan rata-rata bulanan < 100 mm) dari stasiun pengamatan tersebut. Oleh karena itu iklim Kabupaten Minahasa Tenggara menurut Koppen diklasifikasikan Af dimana total curah hujan tahunan > 2,500 mm/tahun dan curah hujan bulan terkering > 60 mm.

c. Suhu

Dari data yang ada menunjukkan bahwa suhu rata-rata tahunan Kabupaten Minahasa Tenggara adalah 27,60 °C dengan suhu rata-rata maksimum 33,82 °C dan suhu rata-rata minimum 21,38 °C. Ketinggian



suatu tempat di atas permukaan laut di daerah katulistiwa merupakan faktor yang paling penting mempengaruhi suhu udara. Udara yang bebas bergerak akan turun temperaturnya pada umumnya dengan 1 °C untuk setiap 100 m naik di atas permukaan laut, penurunan ini rata-rata 0,61 °C (Arsyad, 1989).

Tabel 2.4
Suhu Rata-Rata Bulanan Di Kabupaten Minahasa Tenggara

No	Bulan	Suhu (°c)		
		Maksimum	Minimum	Rata-Rata
1	Januari	33,40	20,90	27,15
2	Februari	34,70	20,80	27,15
3	Maret	33,10	21,70	27,40
4	April	32,80	20,40	26,60
5	Mei	34,60	22,20	28,40
6	Juni	33,90	21,40	27,65
7	Juli	32,90	22,20	27,55
8	Agustus	34,40	21,80	28,10
9	September	34,20	21,80	28,00
10	Oktober	34,20	20,80	27,50
11	Nopember	34,40	21,00	27,70
12	Desember	33,20	21,60	27,40
Jumlah		405,80	256,60	331,20
Raat-rata		33,82	21,38	27,60

Sumber : BPS Minahasa Tenggara 2024

d. *Kelembaban*

Kelembaban udara merupakan salah satu komponen iklim yang berpengaruh di Kabupaten Minahasa Tenggara, dimana kelembaban udara relatif rata-rata yaitu sebesar 76,87 % atau berkisar antara 69,41– 80,20 %. Kelembaban udara ini cocok untuk mendukung pertumbuhan makluk hidup dan sekaligus tidak terhadap laju evapotranspirasi dan perkembangan penyakit. Dari data yang ada menunjukkan bahwa Kabupaten Minahasa Tenggara cukup basah untuk perkembangan penyakit.

Tabel 2.5
Data Kelembaban Udara Nisbi Rata-Rata di Kabupaten Minahasa Tenggara

No	Bulan	Kelembaban Nisbi (%)
1	Januari	79,17
2	Februari	78,83
3	Maret	80,20
4	April	79,29
5	Mei	75,75
6	Juni	78,87
7	Juli	74,94
8	Agustus	69,41

RKPD 2025		
No	Bulan	Kelembaban Nisbi (%)
9	September	74,54
10	Oktober	75,62
11	Nopember	76,17
12	Desember	79,65
Jumlah		922,44
Rata-rata		76,87

Sumber : BPS Minahasa Tenggara 2024

2.1.1.7 Penggunaan Lahan

a. Kawasan budidaya;

Penetapan kawasan ini dititik beratkan pada usaha untuk memberikan arahan pengembangan berbagai kegiatan budidaya sesuai dengan potensi sumber daya yang ada dengan memperhatikan optimasi pemanfaatannya.Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan Budidaya terdiri dari; kawasan hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, industrim pariwisata, permukiman dan lainnya.

b. Kawasan lindung;

Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan yang terdiri atas:

- 1) Kawasan Hutan Lindung, adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.

Kawasan hutan lindung, terdiri atas: a. kawasan hutan lindung Gunung Soputan di Kecamatan Silian Raya, Kecamatan Tombatu Utara, Kecamatan Pasan, Kecamatan Ratahan, dan Kecamatan Ratahan Timur dengan luas kurang lebih 4.139 (empat ribu seratus tiga puluh sembilan) hektar; dan b. kawasan hutan lindung Gunung Kawatak di Kecamatan Ratahan Timur dengan luas kurang lebih 737 (tujuh ratus tiga puluh



- tujuh) hektar. c. Kawasan Hutan lindung bakau di Kecamatan Posumaen, Belang dan Ratatotok
- 2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi: kawasan resapan air, yang terdiri atas: a. kawasan sekitar Sungai Lahendong, Sungai Kaluya, Dungusan Keleweng, Londola Mamaya, Kelewaha, Londola Ranoako, Solasang, Sungai Kokor, sekitar Tonsawang, Dungusan Dahera, Kasarengan, Dungusan Dokoliuan, sekitar Lowatag, Kuni, Lomanggi, sekitar Minanga, sekitar gunung Kaanom, Gunung Walintang, Sungai Binuang dan Mangkit, sekitar Sungai Wewesen, Gunung Manembo, Gunung Hais, Limpoga, Gunung Pasoloilobogan; b. daerah yang memiliki kemiringan lahan diatas 30° ditetapkan sebagai kawasan resapan air yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten; dan c. Kawasan Hutan Bakau yang berada di daerah pesisir pantai. d. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya perlu memperhatikan ketentuan perundangan yang mengatur status tanah pasini.
- 3) Kawasan perlindungan setempat, terdiri atas: a. kawasan sempadan pantai, dengan lebar 200 (dua ratus) meter dari pasang muka air laut tertinggi, mencakup seluruh garis pantai terutama yang berpotensi abrasi di seluruh wilayah pesisir kabupaten yang berlokasi di wilayah Kecamatan Ratatotok, Belang, dan Pusomaen; b. kawasan sempadan sungai, dengan lebar 50 (lima puluh) meter dari muka air sungai seperti Sungai Ranoyapo, di luar wilayah permukiman adalah minimal 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai, sedangkan untuk sungai dan anak sungai misalnya Sungai Molompar, Sungai Kaluya, dan lain-lain, lebar sempadan adalah 5 (lima) meter di kawasan permukiman dan 50 (lima puluh) meter di luar kawasan permukiman, dari tepi sungai; c. kawasan sempadan danau yaitu kawasan sekitar Danaudanau di Kabupaten Minahasa Tenggara antara lain Danau Bulilin yang terletak di Kecamatan Tombatu dan Danau Kawelaan di Kecamatan Touluaan, yakni tepian selebar antara 50 (lima puluh) meter hingga 100 (seratus) meter yang ditetapkan berdasarkan bentuk dan kondisi fisik tepian danau; dan d. kawasan sekitar mata air, dengan lebar 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air, meliputi semua wilayah yang ada di wilayah kabupaten, seperti sekitar mata-mata air di lereng gunung Kawatak, kawasan sekitar Pangu,





sekitar Tiwalad dan sekitar Derel di Tombatu.

- 4) Kawasan suaka alam, adalah kawasan yang mewakili ekosistem khas yang merupakan habitat alami yang memberikan perlindungan bagi perkembangan flora dan fauna yang khas dan beraneka ragam, pelestarian alam dan cagar budaya Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya, terdiri atas: a. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi: 1. Kawasan Budaya Batulesung, Ratuoki, Kali, di Tombatu; 2. Kawasan Kubur Raja Bantik di Kecamatan Pasan; 3. Kawasan Batu Koya di Kecamatan Ratahan; 4. Kawasan Kubur Keramat di Kecamatan Belang; 5. Kawasan Budaya Pesta Adat Labuang Bentenan; dan 6. Kawasan-kawasan lainnya berdasarkan hasil kajian khusus tentang kepariwisataan. b. kawasan pantai berhutan bakau, meliputi kawasan di sekitar Teluk Totok, kawasan Teluk Bohungan, kawasan Teluk Ratatotok, kawasan Bentenan, kawasan sekitar Teluk Sompini serta kawasan seputar Desa Tumbak dan Desa Tumbak Madani.

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.

2.1.2.1 Kawasan Strategis Bidang Pertumbuhan Ekonomi

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas:

- a. Kawasan strategis pusat pemerintahan dan Pendidikan di Kecamatan Ratahan;
- b. Kawasan pusat perdagangan dan jasa di wilayah Kecamatan Ratahan yang ditetapkan sebagai PKW;
- c. Kawasan pusat pengembangan industri perikanan untuk menunjang pengembangan Minapolitan di kawasan pesisir pantai Pusomaen, Belang, dan Ratatotok; dan





- d. Kawasan pusat pengembangan industri pertanian di Kecamatan Ratahan Timur, Pasan, Tombatu, Tombatu Timur, Tombatu Utara, Silian Raya, Touluaan, dan Touluaan Selatan, disesuaikan dengan potensi unggulan dari masing-masing wilayah.

2.1.2.2 Kawasan Strategis Bidang Sosial Budaya

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya terdiri atas:

- a. Kawasan Budaya Batulesung, Ratu Oki, Kali, diTombatu;
- b. Kawasan Kubur Raja Bantik Kecamatan Ratahan;
- c. Kawasan Budaya Pesta Adat Labuang Bentenan Kecamatan Pusomaen;
- d. Kawasan Sport Centre di Kecamatan Ratahan, Pasan,Belang dan Ratatotok; dan
- e. Kawasan strategis pariwisata bahari yang berlokasi di Bentenan, Hais, Lakban, Lumintang; pariwisata tirta yang berlokasi di Air Konde, Danau Lumpias.

2.1.2.3 Kawasan Strategis Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sumber daya alam terdiri atas:

- a. Kawasan Strategis DAS Molompar sebagai sumber energi listrik bagi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Desa Poniki;
- b. Kawasan Strategis Bendungan dan Daerah Irigasi Ranombolay yang berfungsi sebagai penyedia kebutuhan air bagi kegiatan pertanian yang mampu melayani area seluas kurang lebih 1.157 Hektar;
- c. Kawasan Strategis Pengembangan Sumber Mata Air yang terletak di Kalatin-Ratahan dengan debit kurang lebih 60 liter per detik serta di Kecamatan Tombatu Timur, Kecamatan Tombatu Utara, Kecamatan Belang, Kecamatan Touluaan dan Kecamatan Ratatotok; serta
- d. Kawasan Strategis Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) di Sungai Makalu dengan debit air kurang lebih 250 liter per detik dan di Sungai Belang dengan debit air kurang lebih 200 liter per detik;





2.1.2.4 Kawasan Strategis Bidang Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Kawasan strategis dari fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas

- a. Kawasan Strategis Konservasi Kepulauan di Kecamatan Ratatotok, Belang dan kawasan strategis konservasi bawah laut di Pulau Batutoli di Ratatotok, Taman Laut Tumbak, dan Pantai Bentenan di Kecamatan Pusomaen;
- b. Kawasan Pantai Lakban, Pantai Lumintang dan Teluk Buyat di Kecamatan Ratatotok;
- c. Kawasan Strategis Konservasi Pulau Kepulauan di Kecamatan Ratatotok, Belang dan Pusomaen;
- d. Kawasan Strategis Gunung Berapi Soputan di Kecamatan Ratahan, Pasan, Ratahan Timur, Silian Raya, Tombatu, Tombatu Timur, Tombatu Utara dan kecamatan Touluaan;
- e. Kawasan Strategis Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang berlokasi di Kecamatan Ratahan, Kecamatan Belang dan kecamatan lainnya sesuai kebutuhan.
- f. Kawasan Strategis Sungai di Tababo dan Kalait (Pemanfaatan sumber daya air untuk atau danau buatan sebagai sumber air irigasi dan perikanan darat); dan
- g. Kawasan Danau Bulilin di Wilayah Kecamatan Tombatu.

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan karakteristik wilayah di Kabupaten Minahasa Tenggara diidentifikasi wilayah yang berpotensi rawan bencana alam yaitu bencana longsor, bencana Letusan Gunung Berapi dan Gempa bumi, bencana Banjir, Bencana Pesisir.

2.1.3.1 Rawan bencana longsor

Dengan topografi bergunung dan berbukit-bukit, juga faktor geologi dan jenis tanahnya, Kabupaten Minahasa Tenggara memiliki beberapa wilayah yang rawan bencana longsor. Gerakan longsor diartikan proses berpindahnya sejumlah besar massa batuan dan atau tanah dari lereng bagian atas ke bagian lereng yang letaknya lebih rendah karena pengaruh



gravitasi bumi (Sartohadi, 2005). Adanya hal-hal lain yang menumpang dan atau terdapat di dalam massa batuan dan atau tanah seperti vegetasi, timbunan material tambang, pemukiman, dan lain-lain dapat meningkatkan kerawanan longsor. Hal lain yang tidak kalah penting dalam longsor adalah karakteristik material yang mencakup jenis batuan, karakteristik tanah, dan kondisi geologis (Wilopo, 2005). Terakhir pada Juli 2007 terjadi banjir dan tanah longsor di Kec. Belang, Ratatotok dan Ratahan, yakni di Sub-DAS Molompar (Belang), dan sub-DAS Ratatotok.

2.1.3.2. Rawan Bencana Letusan Gunung Api Dan Gempa Bumi

Kabupaten Minahasa Tenggara terletak dekat dengan Gunung api Soputan (1783 m). Gunung soputan adalah salah satu Gunung api Aktif Tipe A dari 10 Gunung Api aktif di Provinsi Minahasa Tenggara. Terakhir kali Gunung Soputan meletus tahun 2004 dan 2007. Walaupun tidak terjadi erupsi magmatik yang besar, namun pada tahun 2007 letusan Gunung Soputan mengeluarkan hawa panas dan menyemburkan debu yang mencapai radius 6 Km. Letusan tahun 2007 juga menimbulkan gempa bumi vulkanik serta guguran lava. Daerah-daerah yang rawan terkena dampak jika terjadi letusan GunungSoputan adalah Kec. Ratahan dan Kec. Touluaan.

2.1.3.3. Rawan Bencana Banjir

Banjir merupakan peristiwa bencana alam yang tidak bisa dilihat dari satu sisi penyebab. Banjir merupakan akumulasi dari *surface run off* yang ada di hulu akibat dari penyebab multifaktor. Penyebab multifaktor ini memberikan kontribusi banjir yang berbeda satu sama lain. Terdapat berbagai faktor penyebab yang mempengaruhi terjadinya banjir, yaitu : curah hujan harian yang tinggi, perubahan penggunaan lahan di hulu dari hutan menjadi non hutan, adanya perambahan hutan dan penebangan hutan secara liar. Di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara terdapat daerah-daerah rawan banjir. Diantaranya di Daerah Aliran Sungai Molompar (Kec. Belang) dan Daerah Aliran Sungai Ratatotok (Kec. Ratatotok). Kejadian banjir terakhir terjadi pada tanggal 6 April 2022, yang dipicu oleh meluapnya sungai wewesen di Kecamatan Belang dimana desa desa yang terdampak yaitu desa Buku, Buku Utara, Buku Tengah, Buku Selatan, Buku Tenggara, Belang, Ponosakan Belang dan Borgo Satu. Kemudian akibat meluapnya sungai



Soyowan di Kecamatan Ratatotok dimana desa desa yang terdampak yaitu desa Soyowan, Basaan, Basaan Satu, Moreah dan Moreah Satu. Mengakibatkan 2.291 KK yang terdampak serta 42 KK yang mengungsi, dengan kerugian material antara lain 8 unit rumah rusak berat, 2 unit rumah rusak sedang dan 4 unit rumah rusak ringan.

2.1.3.4. *Rawan Bencana Pesisir*

Pesisir selatan Kabupaten Minahasa Tenggara, yang mencakup Kec. Ratatotok, Belang dan Pusomaen, yang rawan terhadap bencana gelombang pasang. Hal ini disebabkan pesisir pantai tersebut langsung menghadap laut lepas (Laut Maluku), tidak ada bentang alam penghalang dan pemukiman nelayan yang ada di 3 Kecamatan tersebut umumnya dekat dengan garis pantai. Pada hari kamis tanggal 31 Mei 2018 telah terjadi banjir pesisir dengan ketinggian antara 5-6 meter di desa Minanga Tiga Kecamatan Pusomaen dimana sebanyak 19 rumah penduduk yang terdampak dengan rincian 3 rusak berat dan 16 rusak sedang.

2.1.3.5 *Kawasan Rawan Gelombang Pasang*

Kawasan rawan gelombang pasang di pesisir selatan Kabupaten Minahasa Tenggara meliputi pesisir pantai kecamatan Ratatotok, Belang dan Pusomaen. Kawasan Rawan Bencana Alam adalah kawasan yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu meliputi: kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir terdiri atas:

- a. Kawasan rawan gelombang pasang terdapat di pesisir Selatan meliputi pantai Kecamatan Ratatotok, Belang, dan Pusomaen;
- b. Kawasan rawan longsor dan gerakan tanah meliputi kawasan sekitar Suhuyon, Lowatag, Lomangi, Amburumalad, Maimbeng, Kaluya, Pangu, Wongkai, Wioi, Gunung Wolitang;
- c. Kawasan rawan banjir, meliputi kawasan di sekitar Kecamatan Belang, Kecamatan Pusomaen; Kecamatan Tombatu Utara dan Kawasan Sungai Kawiwi.



2.1.4 Aspek Demografi

Pertumbuhan penduduk dapat dipengaruhi oleh kelahiran, kematian dan migrasi. Pada Tahun 2023 jumlah penduduk Kabupaten Minahasa Tenggara mencapai 118.946 jiwa. Dilihat dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2023 sebanyak 61.478 jiwa, lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan yaitu sebanyak 57.468 jiwa. Oleh karenanya, Kabupaten Minahasa Tenggara pada tahun 2023 memiliki *sex ratio* sebesar 106,98 penduduk laki-laki per100 penduduk perempuan. Rincian perkembangan komposisi penduduk dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perkembangan Jumlah Penduduk Tahun 2019-2023
Kabupaten Minahasa Tenggara

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Laki-Laki	55.001	60.249	60.598	61.043	61.478
2	Perempuan	53.302	56.074	56.481	56.980	57.468
3	Jumlah	106.899	116.323	117.079	118.023	118.946
4	Pertumbuhan	0,56	1,43	0,65	0,81	0,78
5	Densitas (Ribu Jiwa/Km2)	145,0	159,21	160,24	161,54	162,8
6	Sex Ratio	107,2	107,4	107,29	107,1	106,98

Sumber : Minahasa Tenggara Dalam Angka Tahun 2024

Jumlah penduduk Kabupaten Minahasa Tenggara cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun, demikian juga dengan Kepadatan Penduduk (Densitas) terus meningkat dengan kepadatan penduduk tahun 2023 sebesar 162,8 ribu jiwa/km².

Tabel 2.7
Jumlah Penduduk Berdasarkan Luas dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2023 Kabupaten Minahasa Tenggara

No	Kecamatan	Wilayah		Penduduk		
		Luas	Persen	Jumlah	Persen	Kepadatan Per KM2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Ratatotok	10.418	14,26	14.604	12,28	140,18
2	Tombatu	6.795	9,30	10.296	8,66	151,52
3	Touluaan	5.276	7,22	7.651	6,43	145,02
4	Belang	7.517	10,28	17.571	14,77	233,75
5	Ratahan	6.163	8,43	13.921	11,7	225,88
6	Pusomaen	5.363	7,34	9.817	8,25	183,08
7	Pasan	4.979	6,81	7.720	6,49	155,05
8	Ratahan Timur	6.399	8,76	6.240	5,25	97,52
9	Touluaan Selatan	10.180	13,93	5.034	4,23	49,45
10	Silian Raya	4.375	5,98	6.847	5,76	156,5
11	Tombatu Timur	1.881	2,55	10.020	8,42	532,7

RKPD 2025						
12	Tombatu Utara	3.717	5,08	9.225	7,76	248,18
JUMLAH		73.063	100	118.946	100	162,8

Sumber : Minahasa Tenggara Dalam Angka 2024

Komposisi penduduk tahun 2023 didominasi oleh penduduk usia 15 tahun hingga 59 tahun. Menunjukkan bahwa Kabupaten Minahasa Tenggara memiliki penduduk usia produktif yang besar. Komposisi penduduk usia produktif ini memiliki persentase terbesar yaitu 62,17 %, dibandingkan tahun 2022 persentase penduduk usia 15 sampai 59 tahun sebesar 62,36 %. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Minahasa Tenggara pada tahun 2023 ada penambahan rasio ketergantungan sebesar 0,19 %.

Tabel 2.8
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Tahun 2023 Di Kabupaten Minahasa Tenggara

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Laki-Laki + Perempuan
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	5.085	4.857	9.942
5-9	4.995	4.603	9.598
10-14	5.040	4.897	9.937
15-19	4.984	4.583	9.567
20-24	4.916	4.546	9.462
25-29	4.680	4.093	8.773
30-34	4.240	3.773	8.013
35-39	3.990	3.686	7.676
40-44	4.010	4.019	8.272
45-49	4.308	3.907	8.215
50-54	4.016	3.566	7.582
55-59	3.411	2.979	6.390
60-64	2.592	2.526	5.118
65-69	2.010	2.142	4.153
70-74	1.487	1.553	3.040
75+	1.451	1.724	3.175
Jumlah/Total	61.478	57.468	118.946

Sumber : Minahasa Tenggara dalam Angka Tahun 2024

Jika dikaitkan dengan angka ketergantungan, besarnya proporsi usia produktif (>50%) menanggung sedikit penduduk usia non produktif seringkali disebut sebagai bonus demografi. Berdasarkan kondisi tersebut, bonus demografi dapat menjadi aset terbesar bagi Kabupaten Minahasa Tenggara apabila penduduk usia produktifnya memiliki kualitas yang cukup baik (tingkat pendidikan, keterampilan, profesionalitas dan kreativitas) sehingga mampu menekan beban ketergantungan sampai tingkat terendah yang pada akhirnya berguna untuk mendorong pembangunan ekonomi.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggi merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap daerah. Namun manfaat tersebut harus juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, aspek pemerataan juga menjadi pertimbangan penting dalam keberhasilan pembangunan. Dalam bagian ini akan diuraikan beberapa indikator yang menggambarkan kondisi tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara.

2.2.1.1 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

Salah satau indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian Kabupaten Minahasa Tenggara secara makro adalah melalui data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Terdapat 2 (dua) jenis penilaian PDRB yaitu Atas Dasar harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. sedang PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB ADHB digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi. Sementara itu PDRB ADHK digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

Tabel 2.9
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2019-2023
Kabupaten Minahasa Tenggara Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar Rupiah)

NO	Sektor	2019	2020	2021	2022	2023
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	1.503,52	1.603,02	1.745,65	1.893,06	2.053,80
2	Pertambangan & Penggalian	334,27	345,88	372,88	396,32	425,48
3	Industri Pengolahan	234,81	260,49	296,03	334,22	366,92
4	Pengadaan Listrik,Gas	5,48	5,98	6,41	7,07	7,63
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,33	3,68	4,02	4,26	4,48
6	Konstruksi	1.090,51	1.068,85	1.142,53	1.253,22	1.336,92
7	Perdagangan Besar dan Eceran,Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	401,06	419,33	457,49	506,35	567,19
8	Transportasi dan Pergudangan	525,50	474,87	500,81	586,38	687,5
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	16,75	14,27	15,32	17,54	19,65
10	Informasi dan Komunikasi	28,32	30,78	32,53	34,69	34,14

RKPD 2025						
NO	Sektor	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,54	7,84	8,42	8,76	8,95
12	Real Estate	299,72	299,85	309,50	326,21	357,22
13	Jasa Perusahaan	0,54	0,52	0,56	0,60	0,65
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	411,59	412,90	441,17	467,53	500,17
15	Jasa Pendidikan	86,42	90,28	95,71	102,59	116,75
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	130,76	145,25	162,60	173,54	188,14
17	Jasa lainnya	31,95	29,74	32,00	35,04	40,45
PDRB		5.112,06	5.213,52	5.623,63	6.147,38	6.719,97

Sumber : Minahasa Tenggara Dalam Angka 2024

Besaran PDRB ADHB dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2019–2023) mengalami peningkatan dari Rp 5.112,05 miliar rupiah pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp. 6.719,97 miliar rupiah pada tahun 2023 sebagaimana terlihat pada tabel 2.9 diatas.

Tabel 2.10
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2019-2023
Kabupaten Minahasa Tenggara Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun
2010 (Milyar Rupiah)

NO	Sektor	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
1	Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	1.087,40	1.128,03	1.178,49	1.255,20	1.311,89
2	Pertambangan & Penggalian	283,29	280,34	296,78	298,57	311,10
3	Industri Pengolahan	171,76	178,41	191,86	207,08	219,76
4	Pengadaan Listrik,Gas	5,10	5,41	5,73	6,24	6,52
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,39	2,59	2,78	2,86	2,91
6	Konstruksi	802,24	776,43	802,30	840,28	884,91
7	Perdagangan Besar dan Eceran,Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	272,14	269,03	279,64	300,78	323,23
8	Transportasi dan Pergudangan	326,60	286,25	291,91	316,43	338,42
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12,09	10,37	11,06	12,05	12,79
10	Informasi dan Komunikasi	21,50	23,41	24,16	25,3	27,1
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,53	5,76	5,95	5,77	5,79
12	Real Estate	221,17	218,83	220,21	225,91	239,92
13	Jasa Perusahaan	0,34	0,32	0,34	0,35	0,37
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	244,25	240,38	256,66	261,84	271,8
15	Jasa Pendidikan	60,60	61,26	63,30	65,89	72,01
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	99,04	107,41	117,05	121,94	128,79
17	Jasa lainnya	22,27	20,19	21,26	22,7	25,5
PDRB		3.637,72	3.614,41	3.769,49	3.969,27	4.182,82

Sumber : Minahasa Tenggara Dalam Angka 2024

Perkembangan PDRB ADHK berdasarkan tabel 2.10 diatas menunjukkan bahwa adanya peningkatan PDRB ADHK 2010 yaitu dari Rp. 3.637,72 miliar rupiah pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp. 4.182,82 miliar rupiah pada tahun 2023.

Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara masih terbesar dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan

Perikanan yang terus mengalami peningkatan setiap tahun dari 29,89 % ditahun 2019 ke 31,36 % ditahun 2023. Lapangan usaha ekonomi lainnya yang terlihat meningkat perannya di setiap tahun terhadap pembentukan PDRB yaitu Perdagangan besar dan eceran dari 7,48 % ditahun 2019 naik menjadi 7,73 % ditahun 2023. Sumbangan terbesar lain juga pada sektor konstruksi walaupun mengalami penurunan yaitu tahun 2019 sebesar 22,05 % menjadi 21,16 % pada Tahun 2023.

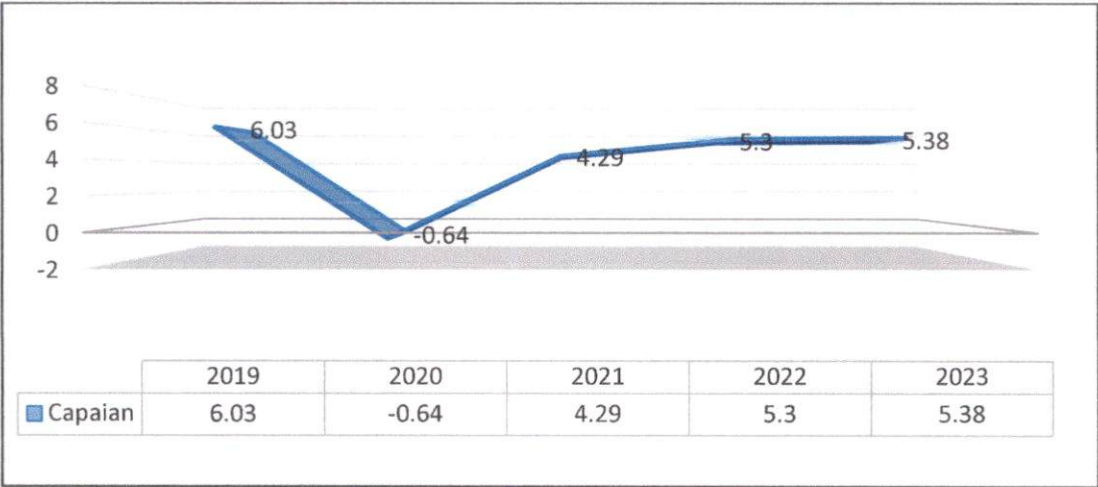
Tabel 2.11
Distribusi Persentase PDRB ADHB Kabupaten Minahasa Tenggara
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

Kategori	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
A	Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	29,89	31,21	31,26	31,62	31,36
B	Pertambangan & Penggalian	7,79	7,76	7,87	7,52	7,44
C	Industri Pengolahan	4,72	4,94	5,09	5,22	5,25
D	Pengadaan Listrik,Gas	0,14	0,15	0,15	0,16	0,16
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
F	Konstruksi	22,05	21,48	21,28	21,17	21,16
G	Perdagangan Besar dan Eceran,Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,48	7,44	7,42	7,58	7,73
H	Transportasi dan Pergudangan	8,98	7,92	7,74	7,97	8,09
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,33	0,29	0,29	0,30	0,31
J	Informasi dan Komunikasi	0,59	0,65	0,64	0,64	0,65
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,15	0,16	0,16	0,15	0,14
L	Real Estate	6,08	6,05	5,84	5,69	5,74
M,N	Jasa Perusahaan	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,71	6,65	6,81	6,60	6,50
P	Jasa Pendidikan	1,67	1,69	1,68	1,66	1,72
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,72	2,97	3,11	3,07	3,08
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,61	0,56	0,56	0,57	0,61
	PDRB	100	100	100	100	100

Sumber : Minahasa Tenggara Dalam Angka 2024

Struktur perekonomian Kabupaten Minahasa Tenggara dapat dilihat dari peranan masing-masing sektor terhadap pembentukan total PDRB Kabupaten Minahasa Tenggara. Sektor Primer yang terdiri dari sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Pertambangan dan Penggalian adalah sebagai penyedia kebutuhan dasar dan bahan, pada tahun 2023 peranannya sebesar 38,8 %, mengalami penurunan dibandingkan tahun

2022 sebesar 39,14 %. Sektor Sekunder yang terdiri dari sektor Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik, Gas; Pengadaan Air serta sektor Konstruksi peranannya meningkat dari 26,62 % pada tahun 2022 menjadi 26,64 % pada tahun 2023. Sektor Tersier yang sifat kegiatannya sebagai jasa, peranannya meningkat dari 34,24 % pada Tahun 2022 menjadi 34,58 % dari tahun 2023.



Gambar 2.2
Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun 2019 s.d. 2023

Sumber : Minahasa Tenggara Dalam Angka 2024

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2023 kembali mengalami kenaikan menjadi 5,38 % dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 5,30 %.

2.2.1.2 Laju Inflasi

Inflasi adalah meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Dampak dari inflasi salah satunya adalah menurunnya daya beli masyarakat yang dapat diartikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat terganggu karena ketidakmampuan penduduk dalam mengkonsumsi barang ataupun jasa. Kondisi inflasi di Kabupaten Minahasa Tenggara mengacu pada inflasi Kota Manado. Berdasarkan data BPS selama periode tahun 2019 – 2023, angka inflasi mengalami fluktuasi dimana tahun 2019 sebesar 3,52 persen sempat turun jauh pada Tahun 2020 sebesar -0,18 persen tapi meningkat cukup tinggi pada Tahun 2022 sebesar 4,00 persen dan turun lagi tahun 2023 sebesar 2,83 persen. Naik turunnya inflasi

dipengaruhi oleh indeks kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan dan penurunan, terutama kenaikan dan penurunan indeks kelompok bahan makanan dan indeks kelompok transportasi. Perkembangan tingkat inflasi selanjutnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.12
Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2019-2023
Kabupaten Minahasa Tenggara

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Inflasi Kabupaten	3,52	-0.18	2,65	4,00	2,83

Sumber : BPS Prov. Sulut Tahun 2024

2.2.1.3 PDRB Perkapita

PDRB perkapita merupakan PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun yang tinggal di daerah tersebut. PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Tabel 2.13
PDRB Perkapita ADHB Tahun 2019-2023
Kabupaten Minahasa Tenggara

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
Nilai PDRB (Juta)	5.112,06	5.213,52	5.623,63	6.147,38	6.719,97
Jumlah Penduduk	106.899	116.323	117.079	118.023	118.946
PDRB perkapita (Miliar/jiwa)	0,047	0,044	0,048	0,052	0,056

Sumber : Minahasa Tenggara Dalam Angka 2024

Jika dilihat dari pertumbuhannya, PDRB per kapita ADHB Kabupaten Minahasa Tenggara dari tahun 2019 hingga 2023 mengalami pergerakan yang fluktuatif . Pada tahun 2019 sebesar 0,047 miliar perjiwa, menurun di tahun 2020 menjadi 0,044 miliar perjiwa berikutnya terus mengalami peningkatan di tahun 2021 menjadi 0,048 miliar perjiwa kemudian naik ditahun 2022 menjadi 0,052 miliar perjiwa dan terakhir di tahun 2023 menjadi 0,056 miliar perjiwa.

Tabel 2.14
PDRB Perkapita ADHK Tahun 2019-2023
Kabupaten Minahasa Tenggara

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nilai PDRB (Rp)	3.637,72	3.614,41	3.769,49	3.969,27	4.182,82
Jumlah Penduduk	106.899	116.323	117.079	118.023	118.946

RKPD 2025					
PDRB perkapita (miliar/jiwa)	0,034	0,031	0,032	0,033	0,035

Sumber : Minahasa Tenggara Dalam Angka 2024

Jika dilihat dari pertumbuhannya, PDRB per kapita ADHK Kabupaten Minahasa Tenggara dari tahun 2019 hingga 2023 mengalami pergerakan yang fluktuatif. Tahun 2019 sebesar 0,034 miliar perjiwa, menurun di tahun 2020 menjadi 0,031 miliar perjiwa berikutnya terus mengalami peningkatan yaitu di tahun 2021 menjadi 0,032 miliar perjiwa, tahun 2022 naik lagi menjadi 0,033 miliar perjiwa dan terakhir di tahun 2023 menjadi 0,035 miliar perjiwa.

2.2.1.3 Indeks Gini

Indeks Gini atau Koefisien Gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi. Indeks Gini memiliki kisaran 0 sampai 1. Nilai 0 menunjukkan distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan semua orang lain tidak memiliki apa-apa.

Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Minahasa Tenggara selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan tingkat pemerataan pendapatan dan kekayaan dalam kondisi sedang. Pada tahun 2019 Indeks Gini sebesar 0,380 turun menjadi 0,360 di tahun 2020, tahun 2021 kembali turun menjadi 0,357, tahun 2022 kembali turun menjadi 0,351 dan terakhir di tahun 2023 mengalami penurunan yang cukup besar menjadi 0,320. Kondisi Indeks Gini Kabupaten Minahasa Tenggara dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.15
Indeks Gini Tahun 2019-2023
Kabupaten Minahasa Tenggara

Indeks Gini (%)	2019	2020	2021	2022	2023
	0,380	0,360	0,357	0,351	0,320

Sumber : BPS Sulawesi Utara 2024

2.2.1.4 Kemiskinan

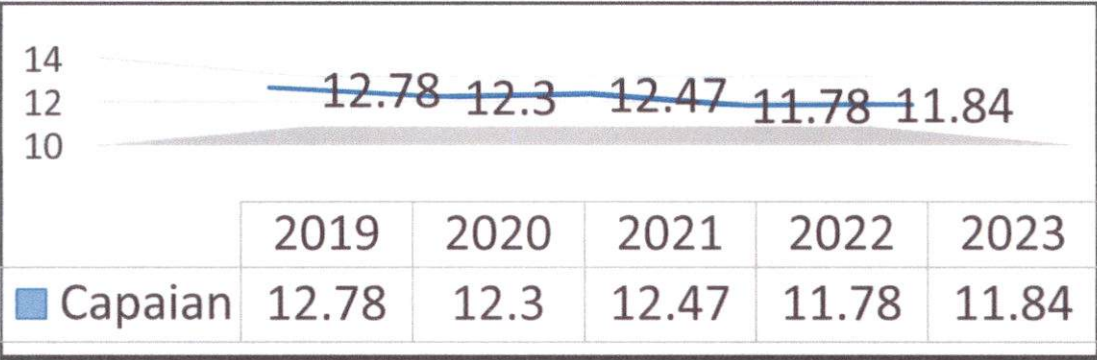
Dalam menentukan penduduk kategori miskin, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Garis

kemiskinan merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan. Angka kemiskinan tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2019 sebesar 12,78% kemudian tahun 2020 turun menjadi sebesar 12,30 % namun di tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 12,47% dan mengalami penurunan ditahun 2022 menjadi 11,78 % namun meningkat lagi di tahun 2023 menjadi 11,84 %. Perkembangan tingkat persentase kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.16
Persentase penduduk di atas garis kemiskinan

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp)	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan (Penduduk Miskin)	Kedalaman Kemiskinan	Keparahan Kemiskinan	Jumlah Penduduk di atas garis kemiskinan
2019	325.896	87,22	12,78	1,70	0,32	93.237
2020	332.966	87,70	12,30	2,27	0,61	102.015
2021	346.746	87,53	12,47	2,39	0,67	102.479
2022	356.988	88,28	11,78	1,89	0,42	104.191
2023	385.636	88,16	11,84	1,47	0,29	104.863

Sumber : Minahasa Tenggara Dalam Angka 2024



Gambar 2.3
Grafik Perkembangan Angka Kemiskinan

Sumber : Minahasa Tenggara Dalam Angka 2024

Sampai saat ini, kemiskinan masih menjadi tantangan besar bagi setiap daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Masih perlunya peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin menjadi salah satu masalah sosial perkotaan yang harus diselesaikan pemerintah secara konsisten melalui sinergitas program pembangunan daerah. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah melalui program dan kegiatan untuk menurunkan angka kemiskinan. Upaya-upaya tersebut baik dilakukan oleh



pemerintah pusat maupun daerah. Dalam melaksanakan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan perlu adanya ketepaduan antara pemerintah kabupaten, dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat yang peduli terhadap pengentasan kemiskinan.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks yang dipakai untuk menunjukkan aspek-aspek peluang hidup panjang dan sehat, mempunyai pengetahuan dan ketrampilan yang memadai, serta hidup layak adalah IPM. Indikator ini merupakan kemudahan dalam aspek sosial, budaya dan aspek ekonomi.

Sebelumnya, komponen penyusun IPM adalah : Angka harapan hidup (e0) Angka melek huruf (AMH), rata-rata lama sekolah (RLS), kombinasi APK serta PDB per kapita. Namun pada tahun 2010, UNDP merubah metodologi IPM, beberapa perubahan yang dilakukan yakni :

- Mengganti Angka melek huruf (AMH) dengan Harapan lama sekolah (HLS).
- Mengganti Produk Domestik Bruto (PDB) perkapita menjadi Produk Nasional Bruto (PNB) perkapita.
- Metode agregasi diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik.

Perubahan metodologi IPM tahun 2010 oleh UNDP tersebut diadopsi oleh BPS dalam penghitungan IPM 2014 keatas dengan alasan: Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka Melek Huruf (AMH) sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena AMH di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik. Indikator selanjutnya, Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.

Berdasarkan komponen penyusun IPM, Angka Harapan Hidup Rata-rata Masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara pada Tahun 2022 adalah 70,52 tahun meningkat naik menjadi 70,86 tahun di 2023, Angka Harapan



Lama Sekolah adalah 12,44 tahun di tahun 2022 meningkat menjadi 12,45 tahun di tahun 2023. Untuk rata-rata lama sekolah ditahun 2022 berada pada 9,12 tahun meningkat menjadi 9,13 tahun di tahun 2023, sedangkan pengeluaran per kapita rata-rata adalah Rp. 10.753 di tahun 2022 dan meningkat menjadi 11.034 di tahun 2023.

Pencapaian IPM Minahasa Tenggara dalam 3 tahun terakhir masuk kedalam kategori tinggi dengan angka capaian ≥ 70 dan <80 . Hal ini menunjukkan bahwa bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pembangunan manusia di Kabupaten Minahasa Tenggara, antara lain yaitu: harus selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat dalam kehidupan masyarakat, hal ini merupakan salah satu penentu perbaikan derajat kesehatan masyarakat namun dalam kenyataannya hal ini cukup sulit diintervensi. Peran Pemerintah harus terus ditingkatkan dalam hal sosialisasi Pola Hidup Sehat. Penuntasan buta huruf dan penurunan angka putus sekolah harus tetap ditingkatkan. Beasiswa pendidikan dan penyediaan infrastruktur pendidikan harus terus dikawal oleh Pemerintah. Dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat, upaya pengembangan skala mikro dan usaha kecil menengah merupakan alternatif untuk menaikkan pendapatan masyarakat yang masih rendah dan bermuara pada peningkatan daya beli.

Tabel 2.17
Komponen pembentuk IPM Tahun 2019-2023
Kabupaten Minahasa Tenggara

IPM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA						
Tahun	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah)	IPM	Peringkat Provinsi IPM
2019	70,07	12,04	8,87	10.665	70,47	10
2020	70,15	12,27	8,88	10.408	70,51	10
2021	70,21	12,43	9,11	10.479	71.06	10
2022	70,52	12,44	9,12	10.753	71.48	10
2023	70,86	12,45	9,13	11.034	71.93	10

Sumber : BPS Sulawesi Utara 2024

2.2.2.2 Aspek Pendidikan

Strategi pembangunan pendidikan dijabarkan melalui 4 (empat) sendi pokok yaitu:

- 1. Pemerataan kesempatan
- 2. Relevansi pendidikan dengan pembangunan



3. Kualitas pendidikan
4. Efisiensi pengelolaan

Pemerataan kesempatan pendidikan diupayakan melalui penyediaan sarana dan prasarana belajar seperti membangun sekolah baru dan penambahan tenaga pengajar mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Relevansi pendidikan merupakan konsep *link and match*, yaitu pendekatan atau strategi meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja. Kualitas pendidikan adalah menghasilkan manusia terdidik yang bermutu dan handal sesuai dengan tuntutan zaman. Sedangkan efisiensi pengelolaan pendidikan dimaksudkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara berdayaguna dan berhasil guna.

Angka Melek Huruf (AMH) adalah proposi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya. Di Kabupaten Minahasa Tenggara AMH mengalami fluktuasi yakni Tahun 2019 sebesar 99,60 % yang artinya bahwa di Kabupaten Minahasa Tenggara untuk tahun 2019 masih ada buta huruf sebanyak 0,40 %. Tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 100 % yang artinya tidak ada lagi buta huruf, namun di tahun 2021 AMH turun menjadi sebesar 99,92% dengan demikian masih ada buta huruf sebesar 0.08% untuk Kabupaten Minahasa Tenggara. Tingkat AMH yang rendah ini menunjukkan adanya pendidikan dasar yang efektif atau program keaksaraan memungkinkan sebagian besar penduduk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajaran. Persentase AMH di Kabupaten Minahasa Tenggara berfluktuasi dari Tahun ke Tahun yang menunjukkan hasil memuaskan. Tercapainya target kinerja AMH di Kabupaten Minahasa Tenggara dapat mengindikasikan ketersediaan sarana dan prasana pendidikan yang sudah cukup memadai dan di tahun 2022 AMH meningkat lagi menjadi 99,9 % dan di tahun 2023 naik menjadi 100 %.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS digunakan untuk mengetahui kualitas Pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. RLS penduduk Minahasa Tenggara Tahun 2019-2023 dari Tahun ke Tahun mengalami terus mengalami peningkatan, Tahun 2019 rata-rata lama sekolah 8,87 tahun meningkat menjadi 8,88 tahun di Tahun 2020. Tahun



2021 mengalami peningkatan menjadi 9,11 tahun, terus meningkat di tahun 2022 menjadi 9,12 tahun, dan terakhir di tahun 2023 menjadi 9,13 tahun. Peningkatan ini menunjukkan kinerja Dinas Pendidikan yang semakin baik.

Pada Tahun 2019 Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan SD/MI mencapai 99 % untuk APK SD dan 98 % untuk SMP, Tahun 2020 APK SD 199,95 %, SMP 99,89 %, tahun 2021 APK SD menjadi 102,06 % dan SMP menjadi 97,64 % kemudian tahun 2022 APK SD sebesar 95 % sama sperti SMP sebesar 95% dan terakhir ditahun 2023 APK SD sebesar 102,26 % dan APK SMP sebesar 100,49%.

Angka Partisipasi Murni (APM) pada Tahun 2019 bagi jenjang pendidikan SD/MI/ sederajat mencapai 91,27%, jenjang pendidikan SMP mencapai 83,80%. Pada Tahun 2020 APM SD sebesar 98,99 %, jenjang pendidikan SMP sebesar 98,64 % Tahun 2021 APM jenjang SD sebesar 96,65 %, jenjang SMP sebesar 76,17%. Dan pada Tahun 2022 APM jenjang SD sebesar 89%, jenjang SMP sebesar 70% kemudian terakhir APM jenjang SD sebesar 92,97 dan jenjang SMP sebesar 67,59 %.

Tahun 2019-2023 penduduk yang berusia 15 Tahun keatas menyelesaikan pendidikan SD sampai SMP berfluktuatif, dimana Penduduk yang menamatkan SD Tahun 2019 sebesar 98%, Tahun 2020 sebesar 91.73 %, Tahun 2022 sebesar 99 % dan terakhir tahun 2023 sebesar 75,82 Angka yang menamatkan SMP tahun 2019 sebesar 98 %, Tahun 2020 sebesar 82,74 % Tahun 2022 sebesar 99 %, dan Tahun 2023 sebesar 75,82 %.

Tabel 2.18
Kinerja Makro Urusan Pendidikan Fokus Kesejahteraan Sosial
Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Angka Melek Huruf	99,60	100	99,92	99,99	100
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,87	8,88	9,11	9,12	9,13
/.Angka Partisipasi Murni:					
SD (%)	91,27	98,99	96,65	89	92,97
SMP (%)	83,80	98,64	76,17	70	67,59
Angka Partisipasi Kasar :					
SD (%)	99	99,95	102,6	95	102,26
SMP (%)	98	99,89	97,64	95	100,49
Jumlah Penduduk Yang Menamatkan SD (%)	98	91.73	19,9	99	75,82
Jumlah Penduduk Yang Menamatkan SMP (%)	98	82.74	33,2	99	75,82

Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2024

2.2.2.3 Aspek Kesehatan

Derajat Kesehatan merupakan salah satu faktor penting sebagai indikator Kabupaten Sehat. Peningkatan derajat kesehatan dipengaruhi oleh 4 (empat) faktor penentu, antara lain:

- 1. Faktor lingkungan,
- 2. Perilaku kesehatan,
- 3. Pelayanan kesehatan dan
- 4. Kependudukan/keturunan.

Dari 4 (empat) faktor tersebut yang dapat diintervensi dengan cepat yaitu faktor kesehatan lingkungan dan faktor pelayanan kesehatan.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan sesuai tabel di bawah ini terlihat bahwa indikator Angka Usia Harapan Hidup meningkat dari 70,07 tahun di tahun 2019 menjadi 70,15 di tahun 2020 kemudian terus mengalami peningkatan ditahun 2021 dan 2022 dan terakhir di tahun 2023 menjadi 70,86. Persentase balita gizi buruk tahun 2019 sebesar 0,02% sedangkan ditahun 2020 s/d 2021 terjadi 0,01% namunmeningkat lagi di Tahun 2022 dan 2023 menjadi sebesar 0,02 %. Prevalensi Balita Gizi Kurang dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi dari 0,91 % di tahun 2019, meningkat di tahun 2020 sebesar 0,92 kemudian turun di Tahun 2021 sebesar 0,2 namun meningkat di dua tahun terakhir yakni tahun 2022 sebsar 1,1 dan 2023 sebesar 1,3, untuk Cakupan Desa Siaga Aktif dari Tahun 2019 sampai tahun 2023 tetap pada pada 100%.

Tabel 2.19
Kinerja Makro Urusan Kesehatan Fokus Kesejahteraan Sosial
Tahun 2019-2023

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	70,07	70,15	70,15	70,52	70,52
Persentase Balita Gizi Buruk	%	0.02	0.01	0.01	0,02	0,02
Prevalensi Balita Gizi Kurang	%	0,91	0,92	0.2	1,1	1,3
Cakupan Desa Siaga Aktif	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2024

2.2.2.4 Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja. Hal ini berlangsung pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja adalah orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu. Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan

kesempatan kerja, dengan demikian, dapat menyerap pertambahan angkatan kerja. Secara singkat dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mempengaruhi ketenagakerjaan dari sisi permintaan (menciptakan lapangan kerja) dan sisi penawaran (meningkatkan kualitas tenaga kerja).

Dalam ilmu ekonomi, kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Kesempatan kerja (*demand for labour*) adalah suatu keadaan yang menggambarkan/ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja). Gambaran ketenagakerjaan di Kabupaten Minahasa Tenggara terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.20
Kinerja Makro Urusan Ketenagakerjaan Fokus Kesejahteraan Sosial
Tahun 2019-2023

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	67,58	64,34	64,87	67,45	67,97
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,03	3,31	3,39	3,43	2,84

Sumber : BPS Sulut 2024

- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja/TPAK

TPAK adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survey. TPAK di suatu wilayah dapat mengindikasikan seberapa besar kesempatan kerja di wilayah tersebut, semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja maka mengindikasikan semakin luas kesempatan kerja.

Perkembangan TPAK Kabupaten Minahasa Tenggara menunjukkan *trend* yang fluktuatif, sebagaimana dapat dilihat pada table 2.20. Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin besarnya jumlah penduduk yang berpotensi bekerja, memproduksi barang dan jasa. Pada tahun 2019 TPAK Kabupaten Miahasa Tenggara adalah sebesar 67.58 %, dengan *trend* turun pada tahun 2020 menjadi 64,34 %, selanjutnya terus mengalami kenaikan sampai pada tahun 2023 mencapai angka 67,97 %.

- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

TPT adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. TPT secara langsung mengindikasikan seberapa luas kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut, semakin tinggi tingkat pengangguran terbuka di suatu wilayah maka dapat mengindikasikan bahwa semakin sempitnya kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut. Di Kabupaten Minahasa Tenggara TPT dari tahun 2019-2023 menunjukkan *trend* yang fluktuatif dimana pada tahun 2019 sebesar 3,03 %, mengalami kenaikan di tahun 2020 menjadi 3,31 % terus meningkat sampai tahun 2022 menjadi 3,43 % adanya pandemic Covid-19, akan tetapi tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 2,84 %.

2.2.2.5 Kesejahteraan Keluarga

Tujuan urusan kesejahteraan keluarga yaitu bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang didalamnya adalah keluarga-keluarga. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I kurun waktu tahun 2019-2023 yaitu pada tahun 2019 sebesar 35,11 terus turun hingga tahun 2023 mencapai 34,50.

Tabel 2.21
Kinerja Makro Urusan Kesejahteraan Keluarga Fokus Kesejahteraan Sosial
Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	35,11	35,00	34,50	34,50	34,50

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024

2.2.2.6 Pengelolaan Keuangan

Persentase PAD terhadap pendapatan kurun waktu tahun 2019-2023 berfluktuasi dimana pada tahun 2019 sebesar 2,94 namun tahun 2020 terus turun sampai tahun 2021 menjadi 2,02 dan naik lagi di tahun 2022 sebesar 2,18 namun turun lagi di tahun 2023 sebesar 1,88. Sedangkan untuk Opini BPK ditahun 2019-2023 terus meraih WTP.

Tabel 2.22
Kinerja Makro Urusan Pengelolaan Keuangan
Fokus Kesejahteraan Sosial Tahun 2019-2023

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase PAD terhadap pendapatan	%	2,94	2,58	2,02	2,18	1,88
Opini BPK	Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : BPKPD Kab. Mitra Tahun 2024

2.2.2.7 Ketahanan Pangan

Kinerja pelayanan urusan ketahanan pangan dapat terlihat dari beberapa indikator yaitu Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH), penguatan cadangan pangan dan penanganan daerah rawan pangan.

PPH adalah indikator untuk mengukur pola konsumsi pangan masyarakat berdasarkan gizi yang cukup dan seimbang. Semakin tinggi skor pola pangan harapan menunjukkan satuan pangan yang semakin beragam dan semakin baik komposisi dan mutu gizinya.

Berdasarkan Tabel 2.23 dapat disampaikan bahwa PPH masyarakat Minahasa Tenggara pada tahun 2023 sebesar 85,0 %, hal ini menunjukkan bahwa satuan pangan yang dikonsumsi masyarakat menyangkut keragaman, komposisi dan mutu gizinya mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022, namun dibandingkan dengan tahun 2019 HPH 2023 mengalami penurunan sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.23
Kinerja Makro Urusan Ketahanan Pangan Fokus Kesejahteraan Sosial
Tahun 2019-2023

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	92,5	91,1	86,6	83,4	85,00
Penguatan cadangan pangan	%	3,5	8	8,8	8	4
Penanganan daerah rawan pangan	Desa	3	2	2	2	2

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024

2.2.2.8 Pertanian, Perikanan, Industri dan Perdagangan

Perkembangan pertanian di Kabupaten Minahasa Tenggara dapat dilihat dari kontribusi sub kategori pertanian terhadap perekonomian Minahasa Tenggara dan produktivitas serta hasil produksi pertanian di Minahasa Tenggara.

Kontribusi kategori pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB di Minahasa Tenggara terhadap PDRB Kabupaten Minahasa Tenggara

dari tahun 2019-2021 terjadi kenaikan namun tahun 2022 sampai 2023 mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena semakin banyaknya alihguna lahan pertanian menjadi pemukiman atau untuk industri dan masih adanya lahan tidur yang tidak tergarap akibat ongkos produksi tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh serta mulai beralihnya mata pencaharian petani ke sektor yang lain yang lebih menjanjikan dari segi ekonomi. Hal ini perlu dilakukan upaya yang dapat meningkatkan produktivitas hasil pertanian dengan mengaplikasikan teknologi tepat guna, pemilihan jenis komoditi serta penyuluhan dan pendampingan yang intensif.

Jumlah produksi padi/bahan pangan utama lainnya di Minahasa Tenggara pada tahun 2019-2023 mengalami peningkatan setiap tahunnya kenaikan produktivitas dan produksi padi dikarenakan adanya penerapan teknologi Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT), intensitas penyinaran yang optimal, serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) rendah, dan tidak adanya puso/gagal panen, namun di tahun 2022 dan 2023 mengalami penurunan.

Kontribusi Sektor Industri bagi PDRB Kabupaten Minahasa Tenggara kontribusinya terhadap PDRB terus mengalami peningkatan dimana tahun 2019 menjadi 4,59 namun terus meningkat mulai tahun 2020 sebesar 5,00 dan terakhir tahun 2023 menjadi 5,46.

Kontribusi sektor Perdagangan bagi PDRB Kabupaten Minahasa Tenggara terus mengalami peningkatan dari tahun 2019-2023, dimana pada tahun 2019 sebesar 7,85 % terus meningkat sampai tahun 2023 pada kisaran 8,44 %. Pertumbuhan industri Kabupaten Minahasa Tenggara berfluktuatif dimana meningkat dari tahun 2019 sebesar 0,96 % menjadi 7,54 % pada tahun 2021 selanjutnya menurun di tahun 2022 sebesar 7,31 % dan tahun 2023 menjadi 6,13 %.

Tabel 2.24
Kinerja Makro Urusan Ketahanan Pangan Fokus Kesejahteraan Sosial
Tahun 2019-2023

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB	%	29,41	30,75	31,04	30,79	30,56
Produksi sektor pertanian Padi	Ton	55.887,8	56.011,2	57.575,9	53.073,4	45.309,2
Produksi sektor pertanian Jagung		68.799,2	81.532,2	89.295,6	66.670,7	72.833,7
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	7,85	8,04	8,14	8,24	8,44
Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	4,59	5,00	5,26	5,44	5,46
Pertumbuhan Industri	%	0,96	3,87	7,54	7,31	6,13

Sumber : BPS Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2024, Dinas Pertanian 2024

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

2.2.3.1 Kebudayaan

Kebudayaan merupakan keseluruhan gagasan, perilaku, dan karya cipta manusia yang dapat menuntun kehidupan manusia agar lebih bermartabat. Pembangunan kebudayaan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya baru di era globalisasi, namun demikian harus tetap berpijak pada nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, sehingga terwujud karya-karya seni budaya yang memiliki kepribadian. Disisi lain kesenian merupakan hasil karya yang mengacu pada nilai keindahan (estetika) dan mewujudkan dari proses pengendapan makna relasi antar manusia dan manusia dengan lingkungan hidupnya. Berkaitan dengan aktivitas seni budaya di Kabupaten Minahasa Tenggara, terlihat bahwa dalam kurun waktu 2019 – 2023 jumlah grup kesenian ada 45, sedangkan untuk gedung kesenian masih sama dengan tahun lalu yaitu sebanyak 1 buah. Perkembangan kesenian selama kurun waktu lima tahun terakhir tertera pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.25
Perkembangan Seni, Budaya Tahun 2019-2023
Kabupaten Minahasa Tenggara

NO	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah grup kesenian	45	45	45	45	45
2	Jumlah gedung kesenian	1 Buah	1 Buah	1buah	1buah	1buah

Sumber :Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2024

2.2.3.2 Olahraga

Perkembangan sarana olahraga di Kabupaten Minahasa Tenggara selama 5 tahun terakhir ini belum mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan jumlah penduduk yang terus meningkat tiap tahunnya. Upaya untuk mengoptimalkan sarpras olahraga harus terus digalakkan baik dari sisi kualitas pada sarpras yang sudah ada maupun menambah jumlah/ kuantitasnya. Dari upaya perbaikan sarana prasarana keolahragaan ini diharapkan mampu memberikan banyak pilihan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan keolahragaan serta diharapkan juga semakin meningkatnya penyelenggaran event-event keolahragaan yang secara otomatis akan meningkatkan minat masyarakat untuk hidup sehat melalui berolahraga.

Tabel 2.26
Jumlah Klub dan Gedung Olahraga
Tahun 2019-2023

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah klub olahraga	23	15	8	12	23
Jumlah Gedung olahraga	30	17	10	11	30
Jumlah lapangan olahraga	45	11	10	14	45

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024

Dari tabel diatas dilihat bahwa Minahasa Tenggara sampai tahun 2023 memiliki klub olahraga sebanyak 23 buah, 30 gedung olahraga dan 45 lapangan olahraga.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

2.3.1.1 Urusan Pendidikan

1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan anak tidak hanya pada sekolah formal seperti SD, SMP dan SMA namun pendidikan anak dimulai sejak anak usia balita (bawah lima tahun), bahkan batita (bawah tiga tahun). Dimasa keemasan ini jika pertumbuhan anak dirangsang dengan benar dan baik maka akan sangat berpengaruh saat mereka nantinya dewasa. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah salah satu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Mengingat pentingnya perkembangan anak pada masa emas pertumbuhannya tersebut, pemerintah saat ini menggalakkan program satu desa satu PAUD.

Tabel 2.27
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
	Siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					
1	TK	2442	2472	2349	2.133	2147
2	KB	1698	1430	1840	1.644	1543
3	SPS	437	369	281	252	242
4	TPA	30	32	29	27	25
	Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					
1	TK	92	92	97	97	97
2	KB	56	56	60	60	60
3	SPS	17	17	17	17	17

RKPD 2025						
4	TPA	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2024

Pada Tahun 2019 siswa PAUD berjumlah 4.607 kemudian turun di tahun 2020 dengan jumlah siswa PAUD 4.303 siswa kemudian meningkat lagi di tahun 2021 mencapai 4.499 Siswa namun kembali turun di tahun 2022 menjadi 4.056 siswa dan terakhir turun ditahun 2023 menjadi 3.957. Tahun 2019 lembaga PAUD sebanyak 166 sama seperti tahun 2020, meningkatr di tahun 2021 lembaga PAUD berjumlah 175 lembaga yang terdiri dari TK sebanyak 97 lembaga, KB 60 lembaga, SPS 17 lembaga dan TPA sebanyak 1 lembaga sama dengan keadaan lembaga di tahun 2022 dan 2023.

2) Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah persentase jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang menempuh pendidikan di jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Data perkembangan APK Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019–2023 telah disajikan di atas pada Tabel 2.28 berikut ini :

Tabel 2.28
APK Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Angka Partisipasi Kasar :		
	SD	99	99,95
	SMP	98	99,89
NO	URAIAN	Tahun 2021	Tahun 2022
2	Angka Partisipasi Kasar :		
	SD	94,15	95
	SMP	101,2	95
NO	URAIAN	Tahun 2023	
3	Angka Partisipasi Kasar :		
	SD	102,26	
	SMP	100,49	

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2024

3) Angka Pendidikan Yang ditamatkan

Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) merupakan persentase jumlah penduduk baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan. APT bermanfaat untuk menunjukkan pencapaian pembangunan pendidikan di suatu daerah, juga berguna untuk melakukan perencanaan penawaran tenaga kerja, terutama

untuk melihat kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu wilayah. Perkembangan APT di Kabupaten Minahasa Tenggara dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.29
Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT) Tahun 2019- 2023
Berdasarkan Penduduk Yang Berusia 15 Tahun ke Atas
Kabupaten MInahasa Tenggara

Tingkat Pendidikan	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk Yang Menamatkan SD (%)	98	91.73	19,9	99	75,82
Jumlah Penduduk Yang Menamatkan SMP (%)	98	82.74	33,2	99	75,82

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2024

4) Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase (%) siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Perkembangan APK dan APM Kabupaten Minahasa Tenggara selama kurun waktu 2019-2023 tersaji dalam tabel 2.30 berikut :

Tabel 2.30
APM Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Angka Partisipasi Murni :		
	SD	91,27	98,99
	SMP	83,80	98,64
NO	URAIAN	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Angka Partisipasi Murni :		
	SD	96,65	89
	SMP	76,17	70
NO	URAIAN	Tahun 2023	
1	Angka Partisipasi Murni :		
	SD	92,87	
	SMP	67,59	

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2024

5) Angka Partisipasi Sekolah

Capaian APS Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019-2023 untuk jenjang pendidikan SD/MI (usia 7-12 Tahun) dan SMP/MTs (usia 13-15 Tahun) sudah tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam hal pendidikan sudah baik, namun untuk jenjang pendidikan SMP/MTs perlu ditingkatkan untuk mencapai wajib belajar sembilan Tahun. Selengkapny dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.31

ANGKA PARTISIPAS I SEKOLAH	2019			2020			2021		
	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH
APS (7-12)	97,53	98,19	97,53	96,55	98,84	97,67	107	95,7	101,2
APS (13-15)	92,38	96,82	92,75	85,	98,97	92,55	111	105	108,5
ANGKA PARTISIPAS I SEKOLAH	2022			2023					
	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH			
APS (7-12)	99,67	99,86	99,76			99,49			
APS (13-15)	99,98	99,92	99,95			92,77			

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2024

6) Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah (APS) di Kabupaten Minahasa Tenggara selama periode 2019-2023 cenderung mengalami penurunan untuk semua jenjang pendidikan. Penurunan APS ini disebabkan karena optimalnya upaya-upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui program-program Bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten berupa BOS Pusat, BOSDA Provinsi, BOSDA Kabupaten, bantuan untuk penyelesaian studi, beasiswa miskin, dan beasiswa berprestasi bagi siswa berprestasi mempunyai korelasi positif terhadap penurunan APS.

Tabel 2.32

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	SD	0,13	0,03	0,005	0,02	0,003
2	SMP	0.8	0.015	0.027	0.004	0.001

Sumber : Dinas Pendidikan Kab Minahasa Tenggara 2024

7) Angka Kelulusan

Angka Kelulusan (AL) untuk jenjang SD/MI tahun ajaran 2018 sampai 2019 mencapai angka 96,94%, tahun 2019/2020 naik mencapai 100 % namun turun di tahun 2020/2021 menjadi 97,70 % kembali naik di tahun 2021/2022 menjadi 99,83 dan terakhir di tahun 2022/2023 menjadi 100 %. Sedangkan AL untuk jenjang SMP/MTs tahun ajaran 2018/2019 sebesar 99,90 % sama seperti tahun 2019/2020, kemudian turun di tahun 2020/2021 menjadi 99,52 dan naik menjadi 99,62 dan terakhir naik lagi di tahun 2022/2023 menjadi 100, seperti disajikan pada table 2.33. Kelulusan Siswa

ditentukan oleh masing-masing sekolah, alat ukur kelulusan tidak lagi berdasarkan Nilai Ujian Nasional, akan tetapi juga ditentukan proses pembelajaran dan prestasi Siswa selama bersekolah dijenjang masing-masing. Rata-rata Siswa yang mengikuti ujian tingkat akhir dinyatakan lulus. Angka kelulusan siswa tahun ajaran 2018/2019 sampai dengan tahun ajaran 2022/2023 terlihat pada tabel 2.33 berikut :

Tabel 2.33
Angka Kelulusan Tahun Ajaran 2018/2019-2022/2023
Kabupaten Minahasa Tenggara

NO	URAIAN	TAHUN		
		2018/2019	2019/2020	2020/2021
1	SD			
	Jumlah Siswa yang lulus SD Tahun berkenan	2.161	1.926	2.088
	Jumlah Seluruh Siswa Kelas Enam Sekolah SD tahun sebelum ujian (Pada awal tahun ajaran)	2.229	1.926	2.137
	Persentase	96,94	100	97,70
2	SMP			
	Jumlah Siswa yang lulus SMP Tahun berkenan	1.990	1.990	1.900
	Jumlah Seluruh Siswa Kelas Sembilan Sekolah SMP tahun sebelum ujian (Pada awal tahun ajaran)	1.992	1.992	1.909
	Persentase	99,90	99,90	99,52
	URAIAN	2021/2022	2022/2023	
1	SD			
	Jumlah Siswa yang lulus SD Tahun berkenan	1813	1628	
	Jumlah Seluruh Siswa Kelas Enam Sekolah SD tahun sebelum ujian (Pada awal tahun ajaran)	1816	1628	
	Persentase	99,83	100	
2	SMP			
	Jumlah Siswa yang lulus SMPN Tahun berkenan	1850	1626	
	Jumlah Seluruh Siswa Kelas sembilan Sekolah SMPN tahun sebelum ujian (Pada awal tahun ajaran)	1857	1626	
	Persentase	99,62	100	

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Minahasa Tenggara 2024

8) Angka Melanjutkan

Keberhasilan upaya perluasan cakupan pendidikan formal juga ditunjukkan dengan meningkatnya angka melanjutkan, baik dari SD/MI ke SMP/MTs maupun dari SMP/MTs ke SMA/MA. AM diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah siswa yang melanjutkan ke jenjang lebih tinggi

dengan jumlah siswa yang lulus ujian. Untuk angka melanjutkan SD/MI ke jenjang SMP/MTs diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah siswa baru kelas 7 SMP/MTs dengan jumlah lulusan SD/MI. Angka Melanjutkan SD/MI ke janjang SMP/MTs pada tahun Ajaran 2018/2019 sebesar 97,70 %. Data Angka Melanjutkan SD/MI ke janjang SMP/MTs tahun 2019/2020 sebesar 103,4%.dan tahun 2020/2021 melonjak menjadi 109% namun turun di tahun 2021/2022 sama seperti tahun 2022/2023, tergambar pada table berikut ini 2.34.

Tabel 2.34
Angka Melanjutkan Pendidikan Kab.Minahasa Tenggara
Tahun Ajaran 2018/2019-2022/2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
1	SD ke SMP (%)	97,70	103.4	109	100	100

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Minahasa Tenggara 2024

9) Fasilitas Pendidikan

Bangunan sekolah untuk jenjang pendidikan SD sampai SMA/SMK umumnya dalam kondisi baik dan pemerintah senantiasa terus membangun dan memperbaiki ruang kelas sekolah agar senantiasa dalam kondisi baik untuk digunakan.

Tabel 2.35
Persentase Sekolah Kondisi Bangunan Baik
Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	SD/MI					
	Jumlah Sekolah Pendidikan SD Kondisi Bangunan Baik	98	98	98	98	98
	Jumlah Seluruh Sekolah SD	98	98	98	98	98
	Persentase	100	100	100	100	100
2	SMP/MTS					
	Jumlah Sekolah Pendidikan SMP Kondisi Bangunan Baik	43	43	43	43	43
	Jumlah Seluruh Sekolah SMP	43	43	43	43	43
	Persentase	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan, Kab. Minahasa Tenggara 2024

10) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar dan Menegah

Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan juga merupakan faktor penting dalam upaya pemerataan dan perluasan pendidikan, baik dari ketersediaan sekolah, kelas ataupun guru. Dengan demikian jika

ketersediaan ruang kelas dan guru pengajar masih kurang memadai maka dibutuhkan perhatian untuk memperlancar proses belajar mengajar pada tingkat pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar dan menengah. Semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin baik kesempatan belajar/sekolah bagi penduduk usia pendidikan dasar.

Kecamatan yang ketersediaan sekolahnya rendah justru menjadi tujuan bagi penduduk usia sekolah di wilayah kecamatan lain untuk sekolah di wilayah tersebut sehingga menyebabkan APK dan APM di wilayah kecamatan tersebut tinggi. Sedangkan untuk wilayah yang memiliki rasio ketersediaan sekolahnya tinggi perlu direncanakan penyediaan fasilitas pendidikan baru atau mengembangkan daya tampung sekolah yang ada agar penduduk usia sekolah dapat tertampung pendidikannya.

Tabel 2.36
Rasio Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2022-2023

NO	Jenjang Pendidikan	Tahun	
		2022	2023
	SD dan SMP		
1	Jumlah Gedung Sekolah	922	922
	Gedung Sekolah Milik Pemerintah	664	664
	Gedung Sekolah Milik Swasta	258	258
2	Jumlah Penduduk Usia 7-15 Tahun	17.887	15.537
	Rasio	515,42	593,42

Sumber: Dinas Pendidikan Tahun 2024

11) Rasio Guru Murid Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah

Rasio guru terhadap murid adalah perbandingan guru kelas tingkat pendidikan dasar atau menengah terhadap jumlah murid pendidikan dasar atau menengah secara keseluruhan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar per kelas atau tingkat kecukupan guru per kelas. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Semakin besar rasio guru terhadap murid maka semakin banyak jumlah pendidik pada pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) yang tersedia, rasio guru dan siswa tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 terlihat pada tabel 2.37 berikut :

Tabel 2.37
Rasio Guru dan Siswa Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun 2019 - 2023

Tahun	Jumlah Murid		Jumlah Guru		Rasio	
	SD	SMP	SD	SMP	SD	SMP
2019	10.309	5.880	646	476	0,063	0,081
2020	10.203	5.858	670	441	0,066	0,075
2021	10,197	5,253	705	481	0,069	0,091
2022	10.563	5.686	615	512	0,058	0,090
2023	10.260	5.456	852	543	0,083	0,099

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Minahasa Tenggara 2024

12) Proporsi Murid Kelas 1 yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar

Pada tahun 2019, jumlah Siswa Sekolah Dasar yang lulus sebanyak 2.161 dengan jumlah penduduk berusia 12 tahun sebanyak 2.196 sehingga proporsi yang berhasil menamatkan Sekolah Dasar sebesar 96,40%. Pada tahun 2020 jumlah Siswa Sekolah Dasar yang lulus sebanyak 1.926 dengan jumlah Penduduk berusia 12 tahun sebanyak 1.940 sehingga proporsi yang berhasil menamatkan Sekolah Dasar sebesar 99,27%. Pada tahun 2021 jumlah Siswa Sekolah Dasar yang lulus sebanyak 2.088 dengan jumlah Penduduk berusia 12 tahun sebanyak 2.137 sehingga proporsi yang berhasil menamatkan Sekolah Dasar sebesar 97,70%. Pada tahun 2022 jumlah Siswa Sekolah Dasar yang lulus sebanyak 1.813 dengan jumlah Penduduk berusia 12 tahun sebanyak 1.844 sehingga proporsi yang berhasil menamatkan Sekolah Dasar sebesar 98,31 %. Pada tahun 2023 jumlah Siswa Sekolah Dasar yang lulus sebanyak 1.628 dengan jumlah Penduduk berusia 12 tahun sebanyak 1.893 sehingga proporsi yang berhasil menamatkan Sekolah Dasar sebesar 86,00 %.

Tabel 2.38
Proporsi Murid yang Berhasil menamatkan Sekolah Dasar
Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Sekolah SD yang Lulus	2.161	1.926	2.088	1813	1628
2	Jumlah Penduduk Usia 12 tahun	2.196	1.940	2.137	1844	1893
3	Persentase	96,4	99,27	97,70	98,31	86,00

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Minahasa Tenggara 2024

13) Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Keatas

Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana

dalam hidupnya sehari-hari. Angka melek huruf penduduk Kabupaten Minahasa Tenggara pada tahun 2019 sebesar 99,77%, tahun 2020 naik mencapai 100% dan tahun 2021 turun menjadi 99,92% demikian juga di tahun 2022 turun menjadi 99,7 % akan tetapi naik lagi tahun 2023 mencapai 100 %. Rekapitulasi data perkembangan AMH Kabupaten Minahasa Tenggara disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.39
Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka melek huruf	99,77	100	99,92	99,7	100

Sumber : Dinas Pendidkan Kab Minahasa Tenggara 2024

14) Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Kebutuhan guru yang memenuhi kualifikasi menjadi sangat penting dalam upaya peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan di semua jenjang pendidikan. Dengan pendidikan guru yang sesuai dengan standar kualifikasi maka diharapkan akan mampu menghasilkan kualitas siswa didik yang lebih berkualitas pula. Dan tentunya juga dibutuhkan ketersediaan guru yang berkompetensi di setiap sekolah. Terkait dengan kualitas guru dapat dilihat dari jenjang pendidikan guru sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.40
Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	SD/MI					
	Jumlah Guru	688	664	670	557	615
	Jumlah Guru Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Keatas	652	614	544	552	595
	Persentase	94	92,46	81,19	99,10	96,74
2	SMP/MTS					
	Jumlah Guru	420	448	476	829	512
	Jumlah Guru Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Keatas	336	444	440	695	507
	Persentase	80	99,10	92,43	83,83	99,02

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2024

2.3.1.1.2. Kesehatan

1) Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi dilahirkan sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Angka kematian bayi

dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah satu tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama

Capaian indikator Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2019 sebesar 8,43 per 1.000 kelahiran hidup, terdapat 16 bayi meninggal dari 1.896 kelahiran hidup. Capaian tahun 2020 menunjukkan adanya peningkatan pelayanan kesehatan anak, dibandingkan pada tahun 2019 dengan AKB sebesar 5,88 per 1.000 kelahiran hidup. Namun tahun 2021 mengalami peningkatan kematian bayi yaitu 18 bayi meninggal dari 1.701 kelahiran kemudian dengan capaian indicator sebesar 10,58, tahun 2022 terdapat 21 kematian bayi dari 1.689 kelahiran dengan capaian indikator sebesar 12,43, dan terakhir tahun 2023 terdapat 16 kematian bayi dengan capaian indicator sebesar 9,53. Dengan demikian perlu ada upaya mempercepat penurunan kematian bayi melalui keterpaduan lintas program antara lain Program Pencegahan Penyakit melalui imunisasi pada bayi, Program Perbaikan Gizi Masyarakat, yaitu peningkatan pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif bagi bayi sampai umur 6 bulan, dan pemberian makanan pendamping ASI dari keluarga miskin.

Tabel 2.41
Angka Kematian Bayi Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun	Jumlah Kelahiran Hidup	Angka Kematian Bayi
2019	16	1.896	8,43
2020	11	1.869	5,88
2021	18	1.701	10,58
2022	21	1.689	12,43
2023	16	1.678	9,53

Sumber Dinas Kesehatan Kab. Minahasa Tenggara 2024

2) Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Per 1000 Kelahiran Hidup

Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi = (1-angka kematian bayi). AKB dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.

Angka kelangsungan hidup bayi per 1000 kelahiran hidup fluktuatif dimana tahun 2019-2020 sebesar 992 turun menjadi 823 di tahun 2021 namun meningkat lagi di tahun 2022 menjadi 988 demikian pula di tahun 2023 sebesar 990. Pemerataan pelayanan kesehatan harus sampai ke Desa,

serta ditunjang dengan program penempatan tenaga medis, Paramedis khususnya bidan sampai ke wilayah terpencil.

Tabel 2.42
Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun	Jumlah Kelahiran Hidup	Angka Kelangsungan Hidup Bayi
2019	16	1.896	992
2020	11	1.869	992
2021	18	1.701	823
2022	21	1.689	988
2023	16	1.678	990

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Minahasa Tenggara 2024

3) Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup

Capaian tahun 2023 sebesar 2,9 per 1.000 kelahiran hidup lebih kecil dari tahun 2022 sebesar 3,5 per 1000 kelahiran hidup. Jumlah balita 0-5 Tahun yang meninggal di Tahun 2023 sebanyak 5 balita, menurun dibandingkan Tahun 2022 yang sebanyak 6 balita. Penyebab kematian balita ini antara lain: diare, pneumonia, *meningitis* (radang selaput otak), kasus, dan Demam Berdarah Dengue (DBD).

Tabel 2.43
Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup
Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah kematian bayi berumur kurang dari 5 tahun	Jumlah Kelahiran Hidup	Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup
2019	19	1.896	10,0
2020	14	1.869	2,00
2021	3	1.701	1,07
2022	6	1.689	3,5
2023	5	1.678	2,9

Sumber Dinas Kesehatan Kab. Minahasa Tenggara 2024

4) Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup

Kematian bayi *endogen* atau yang umum disebut dengan kematian *neo-natal* adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan. Kematian bayi *eksogen* atau kematian *post neonatal*, adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktorfaktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar.

Kematian *neo-natal* disebabkan oleh faktor endogen yang berhubungan dengan kehamilan maka program-program untuk mengurangi angka kematian *neo-natal* adalah yang bersangkutan dengan program pelayanan kesehatan ibu hamil, misalnya program pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus. Sedangkan angka kematian *Post-Neo Natal* dan angka kematian anak serta balita berguna untuk mengembangkan program imunisasi, serta program-program pencegahan penyakit menular terutama pada anak-anak, program penerangan tentang gizi dan pemberian makanan sehat untuk anak balita.

Capaian Tahun 2023 sebesar 9,5 per 1000 kelahiran hidup. Angka ini meningkat di bandingkan dengan tahun 2022 dimana Angka Kematian Neonatal sebesar 6,5 per 1000 kelahiran hidup.

Tabel 2.44
Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup
Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 bulan)	Jumlah Kelahiran Hidup	Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup
2019	16	1896	8,44
2020	11	1869	5
2021	18	1701	10,5
2022	11	1689	6,5
2023	16	1678	9,5

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Minahasa Tenggara 2024

5. Angka Kematian Ibu Per 100,000 Kelahiran Hidup

Selain angka kematian bayi, indikator yang digunakan untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat adalah angka kematian ibu (AKI). Kematian Ibu disebabkan oleh pendarahan, tekanan darah yang tinggi saat hamil, infeksi, persalinan dengan komplikasi yang menyebabkan keguguran. Pada Tahun 2023 AKI di Kabupaten Minahasa Tenggara sebanyak 59 kasus per 100.000 kelahiran hidup. Angka tersebut menurun dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya. Penurunan angka kematian ibu dapat diupayakan antara lain dengan adanya keterpaduan lintas programyaitu Program Perbaikan gizi Masyarakat, khususnya pada ibu hamil melalui pemberian PMT Pemulihan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK), Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui penyiapan masyarakat dalam Desa Siaga, Ambulance Desa dan Donor Darah. Partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan kader kesehatan untuk pendampingan ibu hamil resiko tinggi

dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan serta sumber daya manusia juga sangat diperlukan.

Perkembangan angka kematian ibu (AKI) di Kabupaten Minahasa Tenggara pada Tahun 2019 – 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.45
Angka Kematian Ibu Per 100,000 Kelahiran Hidup
Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun	7	4	5	3	1
2	Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama	1.607	1.869	1.701	1.858	1678
3	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	435	214	293	161	59

Sumber : Dinas Kesehatan Kab.Minahasa Tenggara 2024

6) Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Keberadaan posyandu sangatlah penting karena merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, bersama masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya, maka diharapkan pula strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini dapat dilakukan di setiap posyandu. Pembentukan Posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan Puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai dan idealnya satu Posyandu melayani 100 balita. Pada Tahun 2023 rasio posyandu per 1000 balita sebesar 18 balita dalam 1 posyandu.

Tabel 2.46
Rasio Posyandu Persatuan Balita
Tahun 2019 -2023

URAIAN	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Posyandu	144	144	144	144	144
Jumlah Balita	7.828	7.525	8.137	7.948	7.696
Rasio Posyandu persatuan Balita	18,39	19,13	17,69	18,11	18,71

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Minahasa Tenggara 2024

7) Rasio Puskesmas, Pustu Per Satuan Penduduk

Keberhasilan program pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dapat diketahui dengan semakin meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah seperti rumah sakit umum, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Mobil Rumah Sakit Berjalan.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap sarana pelayanan kesehatan dasar di Kabupaten Minahasa Tenggara yang terus meningkat, maka Pemerintah Minahasa Tenggara meningkatkan pelayanan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap yaitu Puskesmas Ratahan dan di tahun 2017 satu Puskesmas terakreditasi. Jika ditinjau dari skala wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara dengan data jumlah penduduk Minahasa Tenggara sampai dengan tahun 2023 sejumlah 118.946 jiwa, maka 1 Puskesmas kurang lebih melayani 9.150 jiwa. Apabila dibandingkan dengan standar nasional bahwa 1 Puskemas melayani 30.000 jiwa (Rasio ideal 0,000333), maka pada saat ini sarana kesehatan dasar di Minahasa Tenggara telah mencukupi.

Tabel 2.47
Rasio, Puskesmas, Poskesdes, Per Satuan Penduduk Tahun 2019 - 2023

Tahun	Jumlah Puskesmas	Jumlah PUSTU	Jumlah Puskesmas dan PUSTU	Jumlah Penduduk	Rasio puskesmas, PUSTU per satuan penduduk
2019	13	9	22	106.899	0,000206
2020	13	8	21	116.323	0,000181
2021	13	5	18	117.079	0,000154
2022	13	5	18	118.023	0,000153
2023	13	5	18	118.946	0,000151

Sumber : Minahasa Tenggara Dalam Angka 2024

8) Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Sebagai fasilitas kesehatan rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, rumah sakit berperan dalam memberikan layanan kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif. Data rumah sakit dapat dilihat pada Tabel 2.48.

Tabel 2.48
Rasio Rumah Sakit, Puskesmas, Poskesdes, Per Satuan Penduduk
Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Rumah Sakit	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Sakit per satuan penduduk
2019	2	117.800	0.0000169
2020	2	116.323	0.0000171
2021	2	117.079	0.0000170
2022	2	118.023	0.0000169
2023	2	118.946	0.0000168

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2024

9) Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Salah satu unsur yang berperan dalam percepatan pembangunan kesehatan adalah SDM tenaga kesehatan yang bertugas di sarana pelayanan kesehatan di masyarakat.

Ketersediaan tenaga kesehatan menunjukkan ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan tenaga kesehatan akibat peningkatan keberadaan fasilitas pelayanan kesehatan tentunya akan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Namun. kondisi ini perlu diimbangi dengan regulasi agar tenaga kerja benar-benar kompetendibidangnya, sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pelayanan yang dapat berakibat fatal. Regulasi tersebut antara lain dengan menerbitkan aturan bahwa setiap tenaga yang bekerja di sektor kesehatan (dokter, dokter gigi, perawat, bidan, apoteker, nutrisisionis, analis, *radiographer*, fisioterapis dan sanitarian) wajib memiliki surat izin sebelum melakukan pekerjaan sesuai kompetensinya.

Secara khusus, ketersediaan tenaga kesehatan erat kaitannya dengan rasio dokter per jumlah penduduk. Rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Menurut standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu dokter melayani 2.500 penduduk atau dengan kata lain rasio dokter per 1000 penduduk adalah $\geq 0,4$. Untuk rasio Dokter Umum pada Tahun 2023 sudah memenuhi angka ideal sedangkan untuk Dokter gigi dan Dokter spesialis dari Tahun 2023 belum mencapai rasio ideal.

Tabel 2.49
Rasio Dokter dan Tenaga Medis
Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019 - 2023

URAIAN	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk	106.899	116.323	117.079	118.023	118.946
Dokter Umum	44	29	29	32	54
Rasio Dokter Umum per 1.000 satuan penduduk	0,411	0,249	0,248	0,271	0,453
Dokter Spesialis	2	2	2	4	8
Rasio Dokter Spesialis per 1.000 satuan penduduk	0,0187	0,0172	0,0170	0,0338	0,0672
Dokter Gigi	3	3	3	5	6
Rasio Dokter gigi per 1.000 satuan penduduk	0,0280	0,0257	0,0256	0,0423	0,0504

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Minahasa Tenggara 2024

10) Rasio Perawat Per Satuan Penduduk

Rasio perawat per satuan penduduk mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dari hanya 1,441 pada Tahun 2019 naik tahun 2020 menjadi 1,238 lalu menurun tahun 2021 menjadi 1,230 namun ditahun 2022 naik menjadi 1,389.

Tabel 2.50
Rasio Perawat Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019 -2023

URAIAN	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk	117.800	116.323	117.079	118.023	118.946
Jumlah Perawat	154	144	144	164	142
Rasio Perawat per 1.000 satuan penduduk	1,441	1,238	1,230	1,389	1,193

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Minahasa Tenggara 2024 dan Mitra Dalam Angka 2024

11) Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani

Pada tahun 2019 cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani sebesar 81 % dengan jumlah kasus komplikasi kebidanan sebesar 421 kasus dan yang mendapat penanganan definitif sebesar 341 kasus. Pada tahun 2020 mengalami penurunan di banding tahun sebelumnya yaitu 72,9. Tetapi Pada Tahun 2021 dan 2022 terjadi peningkatan signifikan yang ditangani menjadi 100 %. Hal penentu keberhasilan tercapainya indikator ini adalah kegiatan deteksi dini ibu hamil resiko tinggi yang harus berjalan dengan baik sehingga ibu hamil resiko tinggi tidak terlambat ditangani. Kegiatan deteksi dini yang dilakukan antara lain pelaksanaan kelas ibu hamil, pelaksanaan Program PerencanaanPersalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K),

Antenatal Care (ANC) terintegrasi, pendampingan ibu hamil resiko tinggi, pemantauan lewatbuku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), dan pelatihan bidan desasebagai fasilitator kelas ibu.

Tabel 2.51
Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani 2019 -2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	341	313	236	145	328
2	Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	421	429	236	145	328
3	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	81	72,9	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Minahasa Tenggara 2024

12) Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Cakupan pertolongan oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Minahasa Tenggara cenderung mengalami fluktuasi dari Tahun 2019-2023 yaitu dari angka 73,4 di tahun 2019 meningkat di tahun 2020 menjadi 74,4 namun turun di tahun 2021 menjadi 68,6, sedangkan pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 86,9 namun turun lagi di tahun 2023 menjadi 85,2. Hal ini menunjukkan bahwa persalinan di Minahasa Tenggara belum sepenuhnya ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain akses terhadap sarana dan pelayanan kesehatan khususnya pertolongan persalinan, perlunya peningkatan kesadaran masyarakat untuk melakukan persalinan dengan ditolong oleh tenaga kesehatan.

Tabel 2.52
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Tahun 2019 - 2023

URAIAN	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Ibu yang Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan	1.497	1.561	1284	1541	1502
Jumlah Seluruh Sasaran Ibu Bersalin	2.040	1.936	1871	1773	1762
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki kompetensi Kebidanan (%)	73,4	74,4	68,6	86,9	85,2

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Minahasa Tenggara 2024

13) Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2019 yaitu 130, kemudian tahun 2020 turun menjadi 65 desa dan kembali meningkat di tahun 2021 sebanyak 75 desa serta ditahun 2022 menjadi 97 desa dan terakhir turun menjadi 51 desa ditahun 2023.

Tabel 2.53
Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization(UCI)
Tahun 2019 - 2023

URAIAN	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization(UCI)	130	65	75	97	51

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Minahasa Tenggara 2024

14) Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Balita gizi buruk adalah balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Secara sederhana, status gizi balita dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan.

Tabel 2.54
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
Tahun 2019 -2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	0	2	1	1	2
2	Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama	0	2	1	1	2
3	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Minahasa Tenggara 2024

Jumlah seluruh balita gizi buruk di Kabupaten Minahasa Tenggara terjadi 0 kasus pada tahun 2019 namun terdapat 2 kasus di Tahun 2020. Sementara itu di tahun 2021 dan 2022 turun menjadi 1 kasus dan terakhir bertambah lagi menjadi 2 kasus di tahun 2023. Kasus Balita Gizi Buruk langsung mendapat perawatan mencapai 100%.

15) *Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak*

Imunisasi campak perlu diberikan kepada Anak Usia Satu Tahun agar mendapat kekebalan terhadap penyakit campak yang bisa membawa kematian bagi bayi. Persentase anak usia 1 tahun yang di imunisasi campak berfluktuatif dari tahun 2019-2023, dimana ditahun 2018 sebesar 96,3 %, turun menjadi 84,9 % tahun 2020 dan turun lagi pada tahun 2021 menjadi 84,7 % namun kembali meningkat menjadi 94,7 % di tahun 2022 dan terakhir turun lagi menjadi 84,9 di tahun 2023.

Tabel 2.55
Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak
2019 -2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah anak usia 1 tahun yang mendapat imunisasi campak di suatu wilayah selama 1 tahun	1.711	1.484	1.440	1.600	1.425
2	Jumlah anak usia 1 tahun pada wilayah dan tahun yang sama	1.777	1.748	1.658	1.630	1.609
3	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	96,3	84,9	84,7	94,7	84,9

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Minahasa Tenggara 2024

16) *Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk*

Non polio AFP adalah kasus lumpuh layuh akut yang diduga kasus Polio sampai dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium bukan kasus Polio. Selama 5 tahun dari Tahun 2019 sampai 2021 tidak ada kasus, namun ditemukan 1 kasus tahun 2022 dan 6 kausus tahun 2023 namun sudah ditangani < 24 jam.

Tabel 2.56
Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk
Tahun 2019 -2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kasus AFP non Polio yang dilaporkan	0	0	0	1	6
2	jumlah penduduk < 15 tahun	29.350	28.742	29.154	29.527	29.478
3	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	0	0	0	3,38	20,35

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Minahasa Tenggara 2024

17) *Cakupan Balita Pneumonia Yang Ditangani*

Pneumonia merupakan kondisi dimana salah satu paru-paru mengalami peradangan yang dapat disebabkan oleh banyak hal seperti jamur, bakteri dan virus. Umumnya gejala Pneumonia berkembang dalam waktu satu

hingga dua hari. Data di tahun 2019 tidak ada kasus namun tahun 2020 terdapat 5 kasus, terus menurun secara fluktuatif yaitu tahun 2021 tanpa kasus, tahun 2022 menjadi 2 kasus, dan tahun 2023 ada 1 kasus.

Tabel 2.57
Cakupan Balita Pneumonia Yang Ditangani
2019 -2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah penderita neumonia balita yang ditangani di suatu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun	0	5	0	2	1
2	Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	289	286	286	281	281
3	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan kab.Minahasa Tenggara 2024

18) Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit Tbc Bta

Untuk menurunkan angka penyebaran penyakit TBC diperlukan usaha meningkatkan pengendalian, penemuan dan tatalaksana penyakit TBC, penyakit *Zoonosis*, serta penyakit menular dan tidak menular lainnya. Persentase cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA berfluktuasi dari tahun 2019-2023, dimana tahun 2018 mencapai 60,35 kemudian pada tahun 2020 turun menjadi 40,00 dan naik menjadi 42,23 pada tahun 2021 kemudian kembali naik di tahun 2022 menjadi 63,84 dan terakhir tahun 2023 turun menjadi 57,84.

Tabel 2.58
Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA
Tahun 2019 -2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukandan diobati di satu wilayah kerja selama 1 Tahun	204	152	161	242	214
2	Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam Kurun wkt yang sama	338	380	364	380	370
3	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	60,35	40,00	42,23	63,84	57,84

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Minahasa Tenggara 2024

19) Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)

Tingkat prevalensi Tuberkolosis sebesar 205 per 100.000 penduduk pada tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun 2022 yaitu sebanyak 25.

Tabel 2.59
Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)
Tahun 2019 -2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama)	224	152	161	242	214
2	Jumlah Penduduk pada kurun waktu yang sama	106.303	116.323	117.079	118.023	118.946
3	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	210	130	137	205	180

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Minahasa Tenggara 2024

20) Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)

Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk) pada tahun 2019 sebesar 4,68, namun tahun 2020 turun menjadi 4,29 dengan jumlah pasien yang meninggal sebanyak 5 orang, kemudian meningkat lagi di tahun 2021 menjadi 5,97 dengan jumlah yang meninggal sebanyak 7 pasien, tahun 2022 menjadi 8,47 dengan jumlah pasien yang meninggal sebanyak 10 orang dan terakhir tahun 2023 turun menjadi 6,73 dengan jumlah pasien yang meninggal sebanyak 6,73.

Tabel 2.60
Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)
Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Paisen TB yang meninggal	5	5	7	10	8
2	Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama	106.899	116.323	117.079	118.023	118.946
3	Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)	4,68	4,29	5,97	8,47	6,73

Sumber : Dinas Kesehatan Kab.Minahasa Tenggara 2024

21) Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS

Proporsi jumlah kasus Tuberkolosis yang terdeteksi dalam program DOTS fluktuatif selama 5 tahun terakhir dimana pada tahun 2019 sebesar 60,35 dan mengalami penurunan di tahun 2020. Sementara itu di tahun 2021 sampai 2022 terus mengalami peningkatan dibanding tahun 2020 pada angka 64 di tahun 2022 namunkembali turun di tahun 2023 menjadi 57,84.

Tabel 2.61
Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah pasien tuberkulosis BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS	204	152	161	242	214
2	Jumlah pasien baru TB paru BTA yang diperkirakan ada dalam wilayah tersebut	338	380	364	380	370
3	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	60,35	40	42	64	57,84

Sumber : Dinas Kesehatan Kab.Minahasa Tenggara 2024

22) Proporsi Kasus Tuberkulosis Yang Diobati Dan Sembuh Dalam Program DOTS

Proporsi Kasus Tuberkulosis Yang Diobati Dan Sembuh Dalam Program DOTS selang tahun 2019-2023 berfluatiasi, dimana ditahun 2019 sebesar 90,61 lalu turun di tahun 2020 menjadi 86,45 tapi naik di tahun 2021 menjadi 89,85, namun kemudian meningkat lagi di tahun 2022 menjadi 94,35 tapi kembali turun di tahun 2023 menjadi 51,40.

Tabel 2.62
Proporsi Kasus Tuberkulosis Yang Diobati Dan Sembuh Dalam Program DOTS Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah pasien tuberkulosis paru BTA yang sembuh disuatu wilayah selama 1 tahun	193	166	174	234	110
2	Jumlah Jumlah pasien TB Paru BTA yang diobati diwilayah dan pada kurun waktu yang sama	213	192	194	246	214
3	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	90,61	86,45	89,85	94,35	51,40

Sumber : Dinas Kesehatan Kab.Minahasa Tenggara 2024

23) Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Demam berdarah merupakan salah satu penyakit menular yang banyak memakan korban jiwa terutama bagi anak-anak dan balita. Jumlah kasus DBD selama 5 tahun terakhir fluktuatif dari tahun 2019 sebanyak 75 kasus, kemudian terus turun di tahun 2020 turun sebanyak 48 kasus dan tahun 2021 turun menjadi 26 kasus, namun kembali meningkat di tahun 2022 menjadi 43 kasus dan kembali turun di tahun 2023 menjadi 38. Upaya yang telah dilakukan untuk menekan kasus DBD antara lain penyelidikan epidemiologi di sekitar kasus DBD, melakukan abatisasi selektif, dan melaksanakan *fogging focus*.

Tabel 2.63
Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 Tahun	75	48	26	43	38
2	Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun waktu yang sama	75	48	26	43	38
3	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Minahasa Tenggara 2024

24) Penderita Diare Yang Ditangani

Penyakit Diare merupakan penyakit akibat kekurangan cairan yang bisa mengakibatkan kematian, penyakit ini sangat berbahaya bila diderita oleh bayi dan balita serta anak-anak. Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani disarana kesehatan ditahun 2019 mencapai 990 terus mengalami penurunan sampai tahun 2021 menjadi 453 namun meningkat lagi ditahun 2022 menjadi 646 kasus apalagi di tahun 2023 menjadi 1.214 kasus.

Tabel 2.64
Penderita Diare Yang Ditangani
Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani disaran kesehatan dan kader di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun	990	772	453	646	1.214

RKPD 2025						
NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
2	Jumlah perkiraan penderita diare pada satu wilayah tertentu dalam waktu yang sama (10% dari angka kesakitan diare)	99	77	45	65	121
3	Penderita diare yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Minahasa Tenggara 2024

25) *Angka Kejadian Malaria*

Angka kejadian malaria dari tahun ke tahun mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2019 sebanyak 0,9 kejadian, pada tahun 2020 mengalami kenaikan 3,06 namun turun di tahun 2021 menjadi 2,55 turun lagi di tahun 2022 menjadi 0,75, namun kembali meningkat ditahun 2023 menjadi 2,47.

Tabel 2.65
Angka Kejadian Malaria Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka kejadian Malaria	0,9	3,06	2,55	0,75	2,47

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Minahasa Tenggara 2024

26) *Tingkat Kematian Akibat Malaria*

Tingkat Kematian Malaria dari Tahun 2019 – 2023 sebanyak 0 kasus, ini menunjukkan setiap kejadian penyakit malaria di Kabupaten Minahasa Tenggara mampu diatasi atau ditangani sampai sembuh.

Tabel 2.66
Tingkat Kematian Akibat Malaria
Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kematian tersangka malaria	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Minahasa Tenggara 2024

27) *Proporsi Anak Balita Dengan Demam Yang Diobati Dengan Obat Anti Malaria Yang Tepat*

Proporsi Anak Balita Dengan Demam Yang Diobati Dengan Obat Anti Malaria Yang Tepat di tahun 2020 sampai tahun 2022 sebesar 100%. Sementara di tahun 2019 dan 2023 tidak ada kasus.

Tabel 2.67
Proporsi Anak Balita Dengan Demam Yang Diobati
Dengan Obat Anti Malaria Yang Tepat Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN
----	--------	-------

RKPD 2025						
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah penderita diobati dengan ACT dalam 1 tahun	0	36	268	67	0
2	Jumlah penderita positif dalam 1 tahun	0	36	268	67	0
3	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	0	100	100	100	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Minahasa Tenggara 2024

28) Prevalensi HIV/AIDS (persen) Dari Total Populasi

Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari tahun cenderung meningkat. Pada tahun 2019 sebesar 0,052 meningkat di Tahun 2020 menjadi 0,058 namun turun ditahun 2020 menjadi 0 namun kembali meningkat ditahun 2022 pada angka 0,065 dan terakhir tahun 2023 menjadi 0,085.

Tabel 2.68
Prevalensi HIV/AIDS (Persen) Dari Total Populasi Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah pasien HIV dan AIDS di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	56	68	0	77	102
2	Jumlah penduduk disatu wiayah kerja pada kurun waktu yang sama	106.899	116.323	117.079	118.023	118.946
3	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	0,052	0,058	0,00	0,065	0,085

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Minahasa Tenggara 2024

29) Penggunaan Kondom Pada Hubungan Seks Berisiko Tinggi Terakhir

Penggunaan Kondom Pada Hubungan Seks Berisiko Tinggi terakhir dari tahun 2019 – 2023 di Kabupten Minahasa Tenggara tidak ada.

Tabel 2.69
Penggunaan Kondom Pada Hubungan Seks Berisiko Tinggi Terakhir 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Banyaknya penduduk usia 15-24 thn yang memakai kondom berhubungan seks dengan pasangan tidak tetap selama 12 bulan terakhir	0	0	0	0	0
2	Banyaknya penduduk usia 15-24 tahun yang melakukan hubungan seks dengan pasangan tidak tetap selama 12 bulan terakhir	0	0	0	0	0
3	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Minahasa Tenggara 2024

30) Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan kunjungan bayi 5 tahun terakhir berfluktuatif, dimana ditahun 2019 sebanyak 47,68 %, tahun 2020 meningkat menjadi 95,3% selanjutnya tahun 2021 menjadi 95,2% dan turun ditahun 2022 menjadi 77 % tetapi meningkat lagi di tahun 2023 menjadi 95,2 persen.

Tabel 2.70
Cakupan Kunjungan Bayi Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kes. sesuai standard di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	915	1.792	1.621	1.303	1.609
2	Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	1919	1.869	1.701	1.689	1.690
3	Cakupan kunjungan bayi	47,68	95,3	95,2%	77%	95.2%

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Minahasa Tenggara 2024

31) Cakupan Puskesmas

Cakupan Puskesmas tahun 2019 sampai Tahun 2023 sebesar 9,02.

Tabel 2.71
Cakupan Puskesmas Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah puskesmas	13	13	13	13	13
2	Jumlah seluruh kecamatan	144	144	144	144	144
3	Cakupan puskesmas	9.02	9.02	9,02	9,02	9,02

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Minahasa Tenggara 2024

32) Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 sebesar 78%, naik ditahun 2020 menjadi 78,9, turun pada tahun 2021 cakupan kunjungan ibu hamil sebesar 68,5% dan mengalami kenaikan di tahun 2022 sebesar 85,09% namun terakhir turun lagi di tahun 2023 menjadi 55,2.

Tabel 2.72
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 di satu wilayah kerja pada waktu tertentu	1.676	1.639	1.282	1.581	1.748
2	Jumlah sasaran ibu hamil di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu	2.137	2.076	1.871	1.858	3.166

 RKPD 2025 						
NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
	sama					
3	Cakupan kunjungan Ibu hamil	78	78,9	68,5	85,09	55.2

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Minahasa Tenggara 2024

33) Cakupan Pelayanan Nifas

Cakupan pelayanan Ibu Nifas mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 85,7, mengalami penurunan di angka 80,9 pada tahun 2020 dan kembali turun pada tahun 2021 menjadi 73,7 akan tetapi ditahun 2022 kembali mengalami peningkatan menjadi 86,3 namun turun lagi di tahun 2023 menjadi 64,08.

Tabel 2.73
Cakupan Pelayanan Nifas Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	1.414	1.568	1.271	1.531	1.129
2	seluruh ibu nifas di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	1.650	1.936	1.723	1.773	1.762
3	Cakupan pelayanan nifas	85,7	80,9	73,7	86,3	64.08

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Minahasa Tenggara 2024

34) Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani

Cakupan Neonatus dengan kompilkasi yang ditangani 5 tahun terakhir berfluktuatif, dimana tahun 2019 dan 2021-2023 mencapai 100 %, hanya di tahun 2020 cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani sebesar 55%. Sebagaimana yang terlihat pada tabel 2.74 berikut :

Tabel 2.74
Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani
Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani	91	155	75	147	83
2	Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada	91	280	75	147	83
3	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	100	55	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Minahasa Tenggara 2024

35) Cakupan Pelayanan Anak Balita

Cakupan Pelayanan Anak Balita 5 tahun terakhir berfluktuatif, dimana di tahun 2019 sebesar 84,4 % turun sampai tahun 2020 menjadi 62 % kemudian mulai dari tahun 2021-2022 mengalami kenaikan hingga mencapai 90,9% namun di tahun 2023 kembali turun menjadi 88,42 %.

Tabel 2.75
Cakupan Pelayanan Anak Balita Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali di satu wilayah kerja ada waktu tertentu	6.415	4.662	6.214	7.948	6.805
2	Jumlah seluruh anak balita disatu wilayah kerja dalam waktu yang sama	7.601	7.525	8.137	8.742	7.696
3	Cakupan pelayanan anak balita (%)	84,4	62%	76,3	90,9	88,42

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Minahasa Tenggara 2024

36) Cakupan Pemberian Makanan Pendamping Asi Pada Anak Usia 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin

Cakupan Pemberian Makanan Pendamping Asi Pada Anak Usia 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin tahun 2019 dan 2021-2023 adalah sebesar 100%, sementara di tahun 2020 capaian hanya 98,9%.

Tabel 2.76
Cakupan Pemberian Makanan Pendamping Asi Pada Anak Usia 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah anak usia 6-24 bulan keluarga miskin yang mendapat MP-ASI	218	177	223	154	183
2	Jumlah seluruh anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	218	179	223	154	183
3	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	100%	98,9%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2024

37) Cakupan Penjangkaran Kesehatan Siswa SD Dan Setingkat

Cakupan Penjangkaran Kesehatan Siswa SD Dan Setingkat pada tahun 2019 mencapai 70,05 %, setelah itu pada tahun tahun selanjutnya menurun hingga pada tahun 2021 menyentuh angka 60,6 tapi selanjutnya kembali naik sampai tahun 2023 mencapai 95,90.

Tabel 2.77
Cakupan Penjangkaran Kesehatan Siswa SD Dan Setingkat Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	4.311	3.749	3.729	10.083	10.198
2	Jumlah murid SD dan setingkat di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	6.154	5.646	6.154	10.953	10.988
3	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	70,05	66,4	60,6	92,06	95.90

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Minahasa Tenggara 2024

38) Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin

Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin tahun 2019 - 2023 mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2019 di angka 99,58 % terus meningkat sampai terakhir tahun 2023 menyentuh angka 100 %.

Tabel 2.78
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kunjungan pasien miskin di sarkes strata 1	42.617	42.623	42.638	42.724	42.821
2	Jumlah seluruh masyarakat miskin	42.798	42.801	42.801	42.801	42.821
3	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	99,58	99,63	99,62	99,76	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Minahasa Tenggara 2024

39) Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 Yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)

Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 Yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS) tahun 2019-2023 sebesar 50.

Tabel 2.79
Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 Yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS) Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pelayanan gawat darurat level 1	1	1	1	1	1
2	Jumlah RS	2	2	2	2	2
3	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	50	50	50	50	50

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Minahasa Tenggara 2024

40) Cakupan Desa/ kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24 jam

Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi kurang dari 24 jam untuk kejadian pada tahun 2019,2021-2022 dari semua desa yang mengalami KLB dapat dilakukan penyelidikan ditunjukkan dengan angka cakupan 100%.

Tabel 2.80
Cakupan Desa/ Kelurahan Mengalami KLB Yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah KLB di desa/kelurahan yang ditangani > 24 jam dalam periode tertentu	2	0	3	4	6
2	Jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi pada periode yang sama	2	0	3	4	6
3	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100	0	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Minahasa Tenggara 2024

41) Angka Prevalensi Stunting

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya. Salah satu fokus pemerintah saat ini adalah pencegahan stunting. Upaya ini bertujuan agar anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal, dengan disertai kemampuan emosional, sosial, dan fisik yang siap untuk belajar, serta mampu berinovasi dan berkompetisi di tingkat global. Berdasarkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI Nomor 10/M.PPN/HK/02/2021 tentang perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2022, bahwa 15 Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara telah ditetapkan menjadi Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2022. Berikut data prevalensi stunting Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2019-2023.

Tabel 2.81
Prevalensi Stunting Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023

 RKPD 2025 						
NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka Prevalensi Stunting	10,1%	8,4%	2,25%	1,6%	1,1

Sumber : Dinas Kesehatan kab.Minahasa Tenggara 2024

Berdasarkan data diatas, angka Prevalensi Stunting Kabupaten Minahasa Tenggara pada tahun 2023 mengalami penurunan dibanding tahun 2022, dimana pada tahun 2023 capaian stunting sebesar 1,1 % sementara di tahun 2022 dengan capaian berada pada angka 1,6 %.

2.3.1.1.3. *Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

2.3.1.1.3.1. *Pekerjaan Umum*

Urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan untuk menyediakan dan memenuhi pelayanan yang mendasar dan mutlak yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan seperti sumber daya air, jalan, air minum, dan lingkungan (air limbah, drainase, dan persampahan) yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Ruang lingkup urusan pekerjaan umum dan penataan umum ruang mencakup bina marga, cipta karya, dan tata ruang, serta sumber daya air.

1) *Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik*

Salah satu capaian kinerja bina marga yaitu proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi panjang jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, dan kabupaten). Jalan dianggap dalam kondisi baik juga jika masih dapat dimanfaatkan secara optimal dan belum membutuhkan perbaikan yang mendasar. Untuk meningkatkan dan mempertahankan infrastruktur jalan dalam kondisi baik sebagai pendukung sarana transportasi dan peningkatan aksesibilitas kawasan perlu dilakukan upaya pembangunan dan pemeliharaan jalan.

Pada tahun 2023 dari total panjang jalan 881,821 kilometer, jalan yang dalam kondisi baik mencapai 490,1 sehingga proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah 0,56 berdasarkan keputusan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 600/268/PUPR/2023. Namun demikian masih terdapat ruas-ruas jalan dengan kondisi sedang, rusak, ataupun rusak berat khususnya jalan Nasional dan Provinsi dimana proporsinya menurun dari tahun ke tahun. Panjang jaringan jalan berdasarkan kondisi di ditunjukkan pada table berikut:

Tabel 2.82
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik
Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Panjang jalan kondisi baik	444,05	480,75	484,28	490,1	490,1
2	Panjang jalan seluruhnya	832,64	832,64	892,489	881,821	881,821
3	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (1:2)	0,53	0,57	0,54	0,56	0,56

Sumber : Dinas PU & PR Kab. Minahasa Tenggara 2024

2) Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk

Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan. Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara. Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk mengalami fluktuatif dimana pada tahun 2018 dan 2019 mencapai 0,78 dan di tahun 2020 naik menjadi 0,71 api naik lagi tahun 2021 sebesar 0,76 namun turun lagi di tahun 2022 menjadi 0,69 ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.83
Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk
Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah panjang jalan	832,64	822.327	822.327	821.877	821.877
2	Jumlah Penduduk	106.899	116.323	117.079	118.023	118.946
3	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	0,77	0,71	0,76	0,69	0,69

Sumber : Dinas PU & PR Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2024

3) Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 Km/Jam)

Melihat perkembangan kabupaten minahasa tenggara yang semakin baik, telah sangat berdampak pada persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik pula. Pada tahun 2019 dari total panjang jalan Kabupaten sepanjang 700,95 kilometer, jalan yang dalam kondisi baik mencapai 437,97 kilometer dengan persentase 60,48 %. Jalan Kabupaten dalam kondisi baik mengalami peningkatan setiap tahunnya terakhir ditahun 2023 menjadi 69,92%. Panjang jaringan jalan kabupaten kondisi baik di Kabupaten Minahasa Tenggara ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2.84
Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 Km/Jam)
Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	434,59	437,97	451,437	490,11	490,097
2	Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut	700,95	700,95	700,95	700,95	700,95
3	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	62	62,48	64,40	69,92	69,92

Sumber : Dinas PU & PR Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2024

4) Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik

Jaringan irigasi adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya. Secara operasional, jaringan irigasi dibedakan ke dalam tiga kategori, yaitu jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier. Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan pertanian. Pajang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder dan tersier.

Tabel 2.85
Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik
Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik (Ha)	1.680,0	1.858,8	2.028	1.761,12	2.166
2	Luas irigasi kabupaten (Ha)	2.257	2.257	2.398	2.257	2.398
3	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	74,44	82,36	84,57	78	90,32

Sumber : Dinas PU & PR Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2024

Melihat tabel diatas, maka untuk Persentasi jaringan irigasi Kabupaten Minahasa Tenggara dalam kondisi baik mengalami peningkatan setiap tahun dari tahun 2019 sebesar 74,44 sampai tahun 2021 mencapai 84,57, namun di tahun 2022 turun menjadi 78 % tetapi kembali meningkat di tahun 2023 menjadi 90,32 %.

5) Rasio Jaringan Irigasi

Melihat tabel dibawah, maka untuk Rasio jaringan irigasi Kabupaten Minahasa Tenggara dari tahun 2019 – 2023 sebesar 28,58. Adanya

peningkatan anggaran untuk pemeliharaan jaringan irigasi serta penanganan di titik beratkan pada peningkatan penambahan saluran tanah menjadi saluran pasangan berdampak pada bertambahnya luas areal sawah yang terairi irigasi.

Tabel 2.86
Rasio Jaringan Irigasi
Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Panjang saluran irigasi	64.500	64.500	64.000	64.000	64.500
2	Luas lahan budidaya pertanian	2.331	2.331	2.331	2.331	2.331
3	Rasio Jaringan Irigasi	28,58	28,58	28,58	28,58	28,58

Sumber : Dinas PU & PR Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2024

6) *Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak*

Upaya untuk meningkatkan akses terhadap air bersih diantaranya dengan menambah jumlah sambungan rumah ke jaringan PDAM dan membangun instalasi Sistem Penyediaan Air Sederhana (SIPAS) melalui Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) di daerah yang rawan air bersih.

Capaian persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih realisasi Tahun 2023 sebesar 90,90 %, mengalami peningkatan dari tahun 2019 yang hanya sebesar 86,00 %, hal ini dikarenakan adanya peningkatan capaian rumah tangga yang menggunakan air bersih dari PDAM dan program Pamsimas. Proporsi jumlah penduduk yang mendapat air bersih disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.87
Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Penduduk berakses air minum	91.933	101.783	106.366	106.699	108.121
2	Jumlah Penduduk	106.899	116.323	117.079	118.023	118.946
3	Persentase penduduk berakses air minum	86,00	87,50	90,85	90,41	90,90

Sumber : Dinas PU & PR Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2024

7) *Proporsi Penduduk dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan*

Untuk pelayanan umum terhadap fasilitas air bersih di Kabupaten Minahasa Tenggara dapat dikatakan mengalami peningkatan lebih baik. Jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi

dan berkelanjutan pada tahun 2023 sebanyak 49,18 % turun bila dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 52,86 % namun meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya 48,82 %.

Tabel 2.88
Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan	52.192	59.164	60.289	62.388	58.503
2	Jumlah Penduduk	106.899	116.323	117.079	118.023	118.946
3	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	48,82	50,86	51,49	52,86	49,18

Sumber : Dinas PU & PR Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2024

8) Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk

Sarana tempat ibadah di Kabupaten Minahasa Tenggara pada Tahun 2019 meliputi Masjid, Mushola, Gereja. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk adalah jumlah ketersediaan tempat ibadah per 1000 jumlah penduduk. Rasio tempat ibadah di Kabupaten Minahasa Tenggara sampai tahun 2023 adalah 3,11 yang dapat dilihat pada tabel 2.89.

Tabel 2.89
Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah tempat ibadah	355	358	358	369	370
2	Jumlah Penduduk	106.899	116.323	117.079	118.023	118.946
3	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	3,32	3,08	3,06	3,13	3,11

Sumber : Minahasa Tenggara Dalam Angka 2020-2024

2.3.1.1.3. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

1) Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha

Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Sedangkan permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi

syarat. Melihat capaian persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha dari tahun 2019 sebesar 6,26 % terus mengalami penurunan sampai tahun 2023 menjadi 2,01 %.

Tabel 2.90
Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha
Tahun 2019 - 2023

NO	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	Luas Kawasan Permukiman Kumuh	64,37	56,65	48,64	42,19	20,67
2	Luas Wilayah Permukiman	1028,31	1028,31	1.028,31	1.028,31	1.028,31
3	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha	6,26%	5,51%	4,73%	4,12%	2,01

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2024

2) Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Dalam mengentaskan kemiskinan, salah satunya adalah pelaksanaan kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni, ini merupakan bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin yang menempati rumah tidak layak huni dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan / atau keluarga miskin. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kabupaten Minahasa Tenggara terus meningkat sampai pada tahun 2023 capaian sebesar 94,55 % yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.91
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni
Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah seluruh rumah layak huni disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	25.500	25.820	25.834	27.833	27.620
2	Jumlah rumah di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	28.396	28.512	28.550	29.807	29.213
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	89,80	90,56	90,49	93,38	94,55

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2024

3) Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten

Penyediaan dan rehabilitas rumah layak huni bagi korban bencana adalah salah satu jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Capaian untuk

penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana pada tahun 2019, 2020 dan 2023 adalah nol, karena di Kabupaten Minahasa Tenggara tidak terjadi bencana alam yang berdampak signifikan bagi masyarakat, namun tahun 2021 ada sebanyak 6 buah dan tahun 2022 sebanyak 2 buah.

Tabel 2.92
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni
Bagi Korban Bencana Kabupaten Tahun 2019-2023
Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah rumah yang direhabilitasi karena rusak akibat bencana alam	0	0	6	2	0

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2024

4) Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)

Pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni dan lingkungan yang sehat, aman dan nyaman, bagi masyarakat serta terintegrasinya sarana prasarana permukiman dan mendorong tercapainya pengelolaan Kawasan perumahan permukiman berbasis masyarakat. Sampai tahun 2023 Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) sebesar 93 %.

Tabel 2.93
Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman
Yang Didukung Dengan PSU Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu	480	500	530	550	558
2	Jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu	594	594	594	594	594
3	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	82%	84%	86%	87%	93%

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2024

2.3.1.1.4. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

1) Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)

Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara mengupayakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat melalui penegakan perda, penyelesaian pelanggaran K3, pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta upaya-upaya lainnya terkait pencegahan

dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan warga masyarakat.

Tabel 2.94
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3
(Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)
Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pelanggaran K3 yang terselesaikan	5	46	4	7	3
2	Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP	5	46	4	7	3
3	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	100	100	100	100	100

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2024

Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan demokratis, sesuai Peraturan Daerah yang ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram serta menjaga keindahan. Pelanggaran perda/K-3, antara lain, pelanggaran HO, IMB, Reklame, Kebersihan, Parkir Umum, Anjal/Gepeng, PKL, PSK dan Perda lainnya. Pada tahun 2019 penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) sebanyak 5 kasus atau 100%. Hal ini dapat menggambarkan kinerja aparat dalam penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) berhasil. Demikian pula pada tahun 2020, dari pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) sejumlah 46 kasus, keseluruhannya telah dapat diselesaikan. Sementara pada tahun 2023, tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) adalah 100% dari 3 kasus.

2) Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota

Salah satu pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam menangani bencana kebakaran yakni cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Minahasa Tenggara. Cakupan tersebut diukur dari peningkatan jumlah mobil pemadam kebakaran terhadap jumlah penduduk. Selain itu Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara terus berupaya dalam meningkatkan cakupan pelayanan wilayah manajemen kebakaran. Peningkatan dari cakupan pelayanan bencana tersebut tercantum dalam Tabel dibawah ini.

Tabel 2.95
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota
Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran	6.163	6.163	6.163	6.163	6.163
2	Luas wilayah kabupaten/kota	73.063	73.063	73.063	73.063	73.063
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2024

3) *Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)*

Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) merupakan salah satu indicator SPM dalam penanggulangan bencana kebakaran. Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) merupakan perbandingan antara jumlah kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu tanggap terhadap jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK.

Tabel 2.96
Tingkat Waktu Tanggap (*response time rate*)
Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit	3	1	1	0	1
2	Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK	10	2	2	0	1
3	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	30	50	50	0	100

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2024

Cakupan pelayanan wilayah manajemen kebakaran Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019 – 2023 dapat dilihat bahwa jumlah pos pemadam kebakaran sampai dengan tahun 2023 baru 1 pos, belum sebanding dengan luas wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara serta jumlah mobil pemadam kebakaran yang baru satu unit. Untuk itu Pemerintah perlu berupaya dalam menambah jumlah pos pemadam kebakaran dan kendaraan pemadam kebakaran untuk memperluas skala pelayanan kebakaran Kabupaten Minahasa Tenggara.

4) *Presentase Penegakan Perda*

Sebagai salah satu unsur strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah kepatuhan masyarakat dan disiplin aparatur dalam menegakkan peraturan. Untuk melihat sejauh mana penyelesaian penegakan pelanggaran PERDA yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 2.97
Persentase Penegakan PERDA
Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah penyelesaian penegakan PERDA	3	3	4	7	3
2	Jumlah pelanggaran PERDA	3	3	4	7	3
3	Persentase Penegakan PERDA	100	100	100	100	100

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2024

Berdasarkan data diatas penyelesaian penegakan pelanggaran PERDA yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara berjalan dengan baik dimana persentase penegakan PERDA mencapai 100% atau dapat dikategorikan berhasil.

5) *Pemenuhan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana*

Pemenuhan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana di Kabupaten Minahasa Tenggara masih jauh dari yang diharapkan. Dapat dilihat dari tabel dibawah ini bahwa untuk capaian tahun 2021 hanya 27,8% dan meningkat di tahun 2022 menjadi 28,87 %.

Tabel 2.98
Pemenuhan Sarpras Penanggulangan Bencana Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Sarana Prasarana Yang Telah Ada	26	41	52	54	55
2	Jumlah Yang Harus Ada	187	187	187	187	187
3	Persentase Pemenuhan Sarpras Penanggulangan Bencana	13,90	21,92	27,8	28,87	29,41

Sumber : BPBD Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2024

2.3.1.1.6. Sosial

1) *Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)*

Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara telah berupaya untuk menangani permasalahan sosial khususnya Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS). PMKS adalah seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dengan lingkungan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup (jasmani, rohani, dan sosial) secara wajar. Bentuk penanganan yang diterima PMKS antara lain berupa pembinaan dan pelatihan keterampilan, pemulangan PMKS ke daerah asal, perbaikan rumah tidak layak huni, pemberian permakanan, pembinaan mental, pemberian beasiswa. Indikator PMKS dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.99
Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial
Tahun 2019 - 2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah PMKS yang diberikan bantuan	370	310	280	240	210
2	Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan	10.295	9.356	8.765	7.725	8.770
3	Prosentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	3,59	3,31	3,19	3,17	2,95

Sumber : Dinas Sosial Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2024

Tabel 2.100
Persentase PMKS Yang Tertangani
Tahun 2019 - 2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah PMKS yang tertangani	370	310	280	240	250
2	Jumlah PMKS yang ada	10.295	9.356	8.765	7.725	8.770
3	Persentase PMKS yang tertangani	3,59	3,31	3,19	3,17	2,85

Sumber : Dinas Sosial Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2024

Tingkat kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari jumlah PMKS yang ada dan ditangani. Semakin banyak jumlah PMKS semakin rendah tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Pada tahun 2019 jumlah PMKS di Kabupaten Minahasa Tenggara sebanyak 10.295 orang dengan jumlah yang tertangani sebanyak 370 orang. Sampai tahun 2022 jumlah PMKS terus menurun menjadi 7.725 namun ditahun 2023 meningkat menjadi 8.770 dari dengan presentase PMKS yang tertangan mengalami penurunan menjadi 2,85 %.

Tabel 2.101
Prosentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial
Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Beras Sejahtera (Rastra)
Tahun 2019 - 2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023

RKPD 2025						
1	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan dalam 1 tahun	8,650	7,350	6,490	5,340	5,400
2	Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial	8,650	7,350	6,490	5,340	5,400
3	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2024

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa penanganan PMKS oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara meningkat tetapi belum dapat melayani seluruh PMKS di Kabupaten Minahasa Tenggara. Tahun 2023 jumlah PMKS yang memperoleh bantuan dalam 1 tahun sebesar 5.400 dari Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial sebesar 5.400 sehingga Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar di Kabupaten Minahasa Tenggara sebanyak 100%.

2) Korban Bencana

Dalam Penanggulangan Bencana, khususnya dalam penanganan tanggap darurat diperlukan kecepatan dan ketepatan untuk memenuhi kebutuhan barang dan/atau jasa kepada para korban bencana. Sampai dengan saat ini Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara belum memiliki instrument yang mengatur secara khusus tentang mekanisme penyediaan anggaran dan mekanisme pembelanjaan dana siap pakai untuk pengadaan barang dan/atau jasa pada saat tanggap darurat. Indikator Korban Bencana dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.102
Korban Bencana Tahun 2019 - 2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun	7	269	824	2.214	159
2	Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun	7	269	824	2.214	159
3	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2024

Dari data diatas dapat dilihat bahwa Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat di Kab. Minahasa Tenggara sebesar 100%.

3) Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial

Untuk Peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara melaksanakan dan mengembangkan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial.

Tabel 2.103
Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tahun 2020-2023

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun	0	140 orang	447 orang	453 orang
2	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 tahun	513 orang	820 orang	1127 orang	1132 orang
3	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 tahun	0 %	0,85 %	0,39 %	0,40 %

Sumber : Dinas Sosial Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2024

2.3.2. Layanan Urusan Wajib Non Dasar

2.3.2.1. Tenaga Kerja

1) Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Pertahun

Faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa antara pekerja dengan pengusaha antara lain adanya pengaduan terkait masalah jamsostek, masalah upah pekerja, dan sistem kontrak kerja waktu tertentu. Secara rinci rasio jumlah sengketa pekerja pengusaha terhadap jumlah perusahaan, dapat dilihat pada table 2.104.

Tabel 2.104
Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun 2020-2023

NO	URAIAN	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Jumlah sengketa pengusaha pekerja	3	2	4	4
2	Jumlah perusahaan	157	9	9	9
3	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	3.01	2	4	11

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2024

2) *Besaran Kasus Yang diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama*

Dalam menghadapi sengketa pekerja pengusaha dilaksanakan secara Tripartid dengan adanya perjanjian Bersama antara Pekerja-Pengusaha dan Pemerintah.

Tabel 2.105
Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)
Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)	0	3	2	4	0
2	Jumlah kasus yang dicatatkan	0	3	2	4	11
3	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	100	100	2	4	0

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2024

3) *Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar dan Ditempatkan*

Pencari kerja yang ditempatkan merupakan besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan. Besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan merupakan indicator SPM bidang ketenagakerjaan pelayanan penempatan tenaga kerja. Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan adalah persentasi jumlah pencari kerja yang mendaftarkan dan tercatat pada dinas Kabupaten/Kota yang menangani bidang ketenagakerjaan dan jumlah pencari kerja yang diterima bekerja oleh pemberi kerja dalam hal ini perusahaan yang mendaftarkan lowongan pekerjaannya pada dinas kabupaten/kota.

Untuk menurunkan angka pengangguran terbuka, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara berupaya mengurangi angka tersebut dengan cara memfasilitasi para pencari kerja dengan kegiatan pelatihan ketrampilan kerja, pemagangan, bimbingan *softskill*, bursa kerja, dan sebagainya.Kegiatan tersebut diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran terbuka dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi

para pengangguran. Dengan adanya pelatihan, jumlah angkatan kerja yang ditempatkan semakin meningkat setiap tahunnya.

Tabel 2.106
Besaran Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan
Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	35	66	275	449	944

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2024

4) Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja perlindungan tenaga kerja adalah besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek. Capaian besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek Tahun 2019-2023 Kabupaten Minahasa Tenggara adalah sebagai berikut :

Tabel 2.107
Besaran pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek
Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Jumlah pekerja/buruh JAMSOSTEK	232	438	754	2.810	610
2	Jumlah pekerja/buruh	232	438	754	2.810	610
3	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2024

5) Perselisihan Buruh Dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah

Perselisihan Buruh Dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah antara lain karena Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Walikota yang diterbitkan dirasakan oleh buruh tidak berpihak kepada mereka dan Penetapan Upah Minimum Regional/UMR oleh Pemerintah yang dirasakan oleh buruh rendah tidak sesuai dengan aspirasi mereka. Besaran Perselisihan Buruh Dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara adalah sebagai berikut :

Tabel 2.108
Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap
Kebijakan Pemerintah Daerah
Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Jumlah penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan pemda	1	0	2	4	0
2	Jumlah kejadian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan pemda	2	0	2	4	0
3	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	50	0	2	4	0

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2024

6) Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan.

Tenaga kerja yang terdaftar di Kabupaten Minahasa Tenggara cenderung masih didominasi oleh lulusan SMP, SMA dan SMK. Sehingga, tenaga kerja di Kabupaten Minahasa Tenggara masih tergolong tenaga kerja terampil. Sedangkan tenaga kerja lulusan S1/S2/S3 yang merupakan tenaga kerja ahli hanya sedikit bila dibandingkan dengan lulusan SLTA,SLTP maupun SD. Dengan demikian, program pelatihan tenaga kerja mutlak diperlukan sehingga tenaga kerja di Kabupaten Minahasa Tenggara dapat bersaing di dunia kerja.

Tabel 2.109
Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan
Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah tenaga kerja yang dilatih	50	95	110	6	14
2	Jumlah Pendaftar pelatihan berbasis kompetensi	50	95	110	6	14
3	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	50	95	110	6	14
4	Jumlah pendaftar pelatihan kewirausahaan	50	95	110	16	0
5	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	50	95	110	6	0

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2024

Dengan adanya pelatihan, jumlah angkatan kerja yang ditempatkan semakin meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019 pencari kerja yang

dilatih sebanyak 50 orang, sedangkan pada 2020 jumlah pencari kerja yang dilatih sebanyak 95 orang, terus meningkat di tahun 2021 menjadi 110 orang, namun tahun 2022 turun drastic menjadi 6 dan 2023 sedikit meningkat menjadi 14 orang.

7) *Rasio Lulusan S1/S2/S3*

Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan perguruan tinggi.

Tabel 2.110
Persentase Perguruan Tinggi
Tahun 2019-2021

NO	URAIAN	TAHUN		
		2019	2020	2021
1	Persentase Lulusan Perguruan Tinggi	6,22	7,20	7,90

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Sulut Tahun 2022

2.3.2.2. **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Dalam rangka mengoptimalkan implementasi pengarusutamaan gender dan hak anak, diperlukan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui perluasan akses terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan serta pemenuhan hak anak. Indikator untuk mengukur keberhasilan pengarusutamaan gender dan hak anak adalah jumlah perempuan yang bekerja, jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan, jumlah tindak kekerasan dalam rumah tangga.

1) *Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah dan DPRD Serta Swasta*

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah di Kabupaten Minahasa Tenggara diwakili dengan persentase pegawai negeri sipil perempuan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara yang disajikan pada gambar berikut:

Tabel 2.111

Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah dan Proporsi Kursi yang diduduki Perempuan di DPRD dan Partisipasi Perempuan Di Swasta

Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pekerja perempuan di lembaga pemerintah	1.503	1.801	1.801	1920	1950
2	Jumlah pekerja perempuan	13.585	16.159	16.159	16.478	16.570
3	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	11,06	11,14	11,14	11,20	11,77
4	Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan	7	7	7	7	7
5	Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD	25	25	25	25	25
6	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	28	28	28	28	28
7	Jumlah perempuan yang bekerja di lembaga swasta	1,892	1,942	1,942	2.848	2.855
8	Jumlah pekerja perempuan	14,690	16,159	16,159	16.478	16.520
9	Persentase pekerja perempuan di lembaga swasta	12,92	12,01	12,01	17.28	17.28

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah di Kabupaten Minahasa Tenggara diwakili dengan persentase pegawai negeri sipil perempuan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa tingkat partisipasi dan pemberdayaan perempuan di lembaga pemerintah semakin meningkat. Pada tahun 2019 jumlah pekerja perempuan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Minahasa Tenggara sebanyak 1,503 orang terus mengalami peningkatan yaitu tahun 2020 sebanyak 1.801 dan terakhir tahun 2022 dan 2023 menjadi 1.920.

Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan di DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara telah mendekati batas minimal keterwakilan perempuan dilembaga DPRD yaitu 28% dari 30% yang disyaratkan. Diharapkan dengan ilmu pengetahuan, ketrampilan serta kealian yang mempuni didukung oleh penguasaan manajerial diharapkan banyak perempuan Minahasa Tenggara menduduki posisi strategis di lembaga swasta.

2) Rasio KDRT

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kasus KDRT secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.112 di bawah ini.

Tabel 2.112
Rasio KDRT Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah KDRT	3	2	5	5	3
2	Jumlah Rumah Tangga	37.110	38.872	38.872	38.872	38.882
3	Rasio KDRT	0,008	0,005	0,013	0,013	0,008

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024

Fenomena KDRT ibarat fenomena gunung es, kasus yang dilaporkan dengan fakta yang ada di masyarakat berbeda. Meskipun dari data pada Tabel di atas rasio KDRT mengalami penurunan dari 0,008 ditahun 2019 menjadi 0,005 diakhir tahun 2020, namun mengalami peningkatan di tahun 2021 dan 2022 menjadi 0,013 dan turun lagi di tahun 2023 menjadi 0,008. Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara memfasilitasi terhadap semua kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penanganan atas tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut dilakukan dengan tindakan konseling, medis berupa rujukan ke pusat pelayanan terpadu/rumah sakit, hukum berupa konsultasi hukum serta pendampingan ke Polisi, Pengadilan Agama (PA) maupun Pengadilan Negeri (PN), Psikososial meliputi identifikasi kasus, konseling, *home visit*, *outreach*, sosialisasi serta reintegrasi (pelatihan keterampilan) dan pemberdayaan *dishelter* (rumah aman).

3) Persentase Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur

Anak yang seharusnya bisa bermain dan bersekolah tidak seharusnya bekerja untuk membantu orang tuanya dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka, untuk itu perlu mengurangi pekerja anak dibawah usia kerja.

Tabel 2.113
Persentase Tenaga Kerja di Bawah Umur
Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pekerja anak Usia 5 - 14 Tahun	237	232	232	202	150
2	Jumlah Pekerja Usia 5 Tahun Keatas	43.935	52.449	52.449	52.455	52.500
3	Presentase Jumlah Tenaga Kerja dibawah Umur	0,53	0,44	0,44	0.38	0.28

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindugnan Anak Tahun 2024

Dari data diatas pekerja anak harus dikurangi dimana tahun 2019 sebesar 0,53 terus mengalami penurunan sampai terakhir tahun 2023 sebesar 0,28 %.

4) Persentase Angkatan Kerja Perempuan

Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk perempuan usia kerja. Angka tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Minahasa Tenggara menunjukkan persentase angkatan kerja perempuan di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Tabel 2.114
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	14.653	11.600	11.600	3.938	4.016
2	Jumlah angkatan Kerja Perempuan	36.708	17.332	17.332	17.760	18.115
3	Partiisipasi Angkatan Kerja Perempuan	39,92	66,93	66,93	22,17	22,17

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024

Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Minahasa Tenggara pada tahun 2019 sebesar 14.653 orang atau 39,92 % dari jumlah angkatan kerja perempuan. Sementara itu pada tahun 2023, jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan mengalami penurunan yang sangat signifikan menjadi 4.016 orang atau 22,17% dari jumlah angkatan kerja perempuan.

5) Penanganan, Layanan Kesehatan, Cakupan Rehabilitasi Sosial Serta Cakupan Pelayanan Hukum dan Pemulangan dan Cakupan Layanan Reintegrasi

Pemberian pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang bersedia melaporkan kasus dan mengalami tindak kekerasan/KDRT akan menjadi solusi yang tepat. Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara telah memfasilitasi terhadap semua kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penanganan atas tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut dilakukan dengan tindakan konseling, medis berupa rujukan ke pusat pelayanan terpadu/rumah sakit, hukum berupa konsultasi hukum serta pendampingan ke Polisi, Pengadilan Agama (PA) maupun Pengadilan Negeri (PN), Psikososial meliputi identifikasi kasus, konseling, *home visit*, *outreach*, sosialisasi serta reintegrasi (pelatihan keterampilan) dan pemberdayaan *dishelter* (rumah aman).

Tabel 2.115
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Pengaduan/Laporan yang ditindaklanjuti oleh unit Pelayanan Terpadu	20	9	27	30	30
2	Jumlah laporan/ Pengaduan yang masuk ke Unit pelayanan terpadu	20	9	27	30	30
3	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam unit Pelayanan terpadu	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024

Dari Tabel 2.115 Terlihat selang tahun 2019 terdapat 20 laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu dan pada tahun 2023 terdapat 30 laporan/pengaduan ini menunjukkan perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan mengalami peningkatan, dari setiap laporan/pengaduan yang masuk mampu ditangani semua ditunjukkan dengan nilai cakupan dari tahun 2019 – 2023 sebesar 100%.

Tabel 2.116
Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT /PKT di Rumah Sakit Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	Tahun				2023
		2019	2020	2021	2022	
1	Jumlah Korban KtP/A yang memperoleh Layanan kesehatan oleh tenaga Kesehatan Terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KTP/A atau PPT/PKT di RS di suatu wilayah tertentu pada kurun waktu tertentu	7	7	11	13	13
2	Jumlah Seluruh Korban KtP/A yang terdata datang ke puskesmas mampu tatalaksana Kasus KtP/A dan Ke RS di Suatu wilayah Kerja Tertentu dalm Kurun Waktu tertentu	7	7	11	13	13
3	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Kesehatan oleh tenaga Kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT /PKT di Rumah Sakit	100%	100%	100%	100%	100 %

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024

Dari tabel 2.116 terlihat selang tahun 2019 – 2023 perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat pelayanan kesehatan mengalami peningkatan dimana tahun 2019 sebanyak 7 korban sama seperti tahun 2020 namun tahun 2021 meningkat menjadi 11 demikian juga di tahun 2022 dan 2023 menjadi 13 korban ini menunjukkan masyarakat Minahasa Tenggara semakin sadar dan merasa tidak tabuh untuk melaporkan dan membawa ke petugas yang terlatih setiap kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak, hal ini didukung juga dengan tingkat penanganan yang maksimal dari petugas ditujukan dengan nilai cakupan dari tahun 2019 – 2023 sebesar 100%.

Tabel 2.117
Layanan Rehabsos Yang Diberikan Oleh Petugas Rehabsos Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Korban Kekerasan yang memperoleh Pelayanan rehabsos	5	9	9	1	0
2	Jumlah Korban Kekerasan yang membutuhkan rehabsos	5	9	9	1	0
3	Cakupan Layanan rehabsos yang di berikan oleh petugas rehabsos terlatih bagi perempuan dan anak	100%	100%	100%	100%	0

 RKPD 2025 						
	korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu					

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024

Tabel 2.117 menunjukan jumlah korban yang membutuhkan rehabsos tahun 2019 sebanyak 9 korban dan tahun 2022 sebanyak 1 korban dan kesemuanya dapat ditangani, ditunjukan dengan nilai cakupan dari tahun 2019 – 2023 sebesar 100%, sementara itu di tahun 2023 tidak ada korban kekerasan yang memperoleh pelayana rehabsos.

Tabel 2.118
Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Putusan
Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan
Anak
Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah perkara yang di putusan pengadilan dengan dasar perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak	5	3	6	10	3
2	Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang di sidangkan	5	3	6	10	3
3	Cakupan Penegakan Hukum dari tingkat Penyidikan sampai putusan Pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024

Tabel 2.118 menunjukan jumlah perkara terhadap kekerasan perempuan dan anak yang disidangkan pada tahun 2019 sebanyak 5 perkara dan pada tahun 2023 sebanyak 3 perkara. Dari jumlah perkara yang disidangkan pada tahun 2019-2023 semuanya dapat diputuskan pengadilan, ditunjukan dengan cakupan penegakan hukum menunjukan angka 100%.

Tabel 2.119
Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang
Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum
Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Koban mendapat layanan bantuan hokum	4	3	6	13	10
2	jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum	20	9	12	13	10
3	Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan Layanan Bantuan	20%	33,3 %	50%	100%	100%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024

Tabel 2.119 menunjukan jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum pada tahun 2019 sebanyak 20 Korban dan yang mendapatkan bantuan hukum baru sektira 4 orang, ditujukan dengan cakupan perempuan dan korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan 20 persen, tingkat cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan bantuan hukum terus meningkat dari tahun, dimana pada tahun 2023 yang mencapai 100 %.

Tabel 2.120
Layanan Pemulangan Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.	11	9	27	1	31
2	Jumlah Perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di UPT	11	9	27	1	31
3	Cakupan Layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024

Tabel 2.120 menunjukan jumlah korban yang tercatat di UPT pada tahun 2019 sebanyak 11 Korban dan yang dipulangkan pada tahun 2019 sebanyak 11 korban sedangkan pada tahun 2023 sebanyak 31 korban dan yang dipulangkan sebanyak 31 korban, kemudian cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan pemulangan pada tahun 2019-2023 sebesar 100 %.

Tabel 2.121
Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya	11	9	27	1	2
2	Jumlah Korban yang membutuhkan reintegrasi sosial	11	9	27	1	2
3	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak	100%	100%	100%	100 %	100%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024

Tabel 2.121 menunjukan jumlah korban yang membutuhkan reintegrasi sosial pada tahun 2019 sebanyak 11 Korban dan pada tahun 2023 sebanyak 2 korban dan yang disatukan kembali dengan keluarga pada tahun 2019 sebanyak 11 Orang dan pada tahun 2023 sebanyak 2 korban, ditujukan dengan cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan reintegrasi pada tahun 2019 dan tahun 2023 sebesar 100%.

6) Cakupan Rasio APM Perempuan/Laki-Laki Di SD dan SMP Serta Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-Laki Pada Kelompok Usia 15-24 Dan Kontribusi Perempuan Dalam Pekerjaan Upahan Di Sector Non pertanian.

Cakupan Rasio APM Perempuan/laki-Laki di SD mengalami penurunan yaitu dari tahun 2019 Sebesar 94 % menurun di tahun 2020 sampai tahun 2023 menjadi sebesar 93,45 %. Cakupan APM Perempuan/Laki-Laki SMP mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 104% sama dengan tahun 2020. Tahun 2021 - 2023 naik menjadi 105%. Untuk rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun rata-rata dari tahun 2019 sebesar 97%, turun di tahun 2020 menjadi 92 % kemudian Tahun 2021 dan Tahun 2023 turun lagi menjadi 91,2 %.

Tabel 2.122
Cakupan Rasio APM Perempuan/Laki-Laki Di SD dan SMP Serta Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-Laki Pada Kelompok Usia 15-24 Dan Kontribusi Perempuan Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	APM Perempuan/Laki-Laki SD					
1	APM-SD perempuan	85,3	84,2	84,2	84,2	84,2
2	APM-SD laki-laki	90,3	90,1	90,1	90,1	90,1
3	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	94%	93,45	93,45	93,45	93,45
B	APM Perempuan/Laki-Laki SMP					
4	APM-SMP perempuan	88,7	88,2	88,2	88,2	88,2
5	APM-SMP laki-laki	84,6	84,2	84,2	84,2	84,2
6	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	104%	104%	105%	105%	105%
C	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun					
7	AMH15-24 perempuan	10.642	96.369	96.369	96.369	96,369
8	AMH15-24 laki-laki	10.960	10.477	10.477	10.477	10,477
9	Rasio melek huruf perempuan	97%	92%	91,2%	91,2%	91,2%

 RKPD 2025 						
NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
	terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun					

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024

2.3.2.3. Ketahanan Pangan

Ketersediaan pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber yaitu (1) produksi dalam negeri; (2) pasokan pangan; (3) pengelolaan cadangan pangan. Kinerja pada Urusan Pangan, secara lengkap terlihat pada tabel 2.123.

Tabel 2.123
Ketersediaan Pangan Utama, Ketersediaan Energi, Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH), Penguatan Cadangan Pangan Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Ketersedian pangan utama					
1	Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun (kg)	260,62	244,33	117,930	144,900	138,68
2	Jumlah penduduk	106.889	116.323	117.079	118.023	118.946
3	Persentase Ketersediaan pangan utama	243,82	210,04	100,72	122,77	116,59
B	Ketersediaan energi (kkal)	5.057	9.595	9.690	2.539	2.191
C	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	92,5	91,1	91,1	83,4	85,00
D	Penguatan cadangan pangan	3,5	8	8,8	8	4

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2024

Pada Tabel di atas menunjukkan bahwa ketersediaan pangan utama di Kabupaten Minahasa Tenggara dari tahun 2019 sampai 2023 mengalami tren fluktuatif. Pada tahun 2019 sebesar 243,82 persen dan tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 210,04 persen demikian juga di tahun 2021 menjadi 100,72 persen namun naik di tahun 2022 menjadi 122,73 persen tapi turun lagi di tahun 2023 menjadi 116,59 persen.

2.3.2.4. Pertanian

Jumlah sertifikat hak milik atas tanah di Kabupaten Minahasa Tenggara dari Tahun ketahun terus mengalami peningkatan yang cukup besar seperti tersaji dalam Tabel 2.124 di bawah ini:

Tabel 2.124
Jumlah Sertifikat Hak Milik Atas Tanah
di Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun 2020-2022

Kecamatan	Jumlah Sertifikat Hak Milik Atas Tanah di Kabupaten Minahasa Tenggara		
	2020	2021	2022
Ratatotok	478	1.633	3.029
Pusomaen	1.010	4.793	5.555
Belang	3.121	4.162	6.057
Ratahan	1.825	2.140	2.258
Pasan	1.210	1.157	1.226
Ratahan Timur	234	303	2.379
Tombatu	2.100	2.173	2.691
Tombatu Timur	182	617	1.028
Tombatu Utara	1.338	1.524	2.022
Touluaan	1.087	1.208	1.245
Touluaan Selatan	62	833	1.330
Silian Raya	815	806	1.178
Minahasa Tenggara	13.462	21.349	29.998

Sumber: BPS Minahasa Tenggara 2024

Dari tabel ini terlihat bahwa kesadaran masyarakat untuk mengurus hak milik atas tanah dalam bentuk sertifikat cukup besar.

2.3.2.5. Lingkungan Hidup

1) *Kinierja Urusan Lingkungan Hidup*

Kinerja urusan lingkungan hidup terjabarkan dalam program-program untuk mencapai target capaian kinerja dan sasaran-sasarannya. Salah satu target yang akan dicapai yaitu memperoleh penghargaan Adipura untuk kategori kota kecil. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten memiliki kepedulian dalam pengendalian pencemaran serta memiliki komitmen dalam mewujudkan kota bersih dan hijau (*clean and green city*). Berikut capaian kinerja urusan lingkungan hidup dari tahun 2019-2023, yang secara umum kondisinya ditunjukkan pada tabel-tabel dibawah ini.

Tabel 2.125
Capaian Kinerja Lingkungan Hidup
Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota					
1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
B	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/ kota					
1	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/ kota	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
C	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah Kabupaten					
1	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah Kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
D	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)					
1	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air			54,44	48,18	50,00
2	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	N/A	92,19	92,78	90,21	94,20
3	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan			41,48	39,66	39,49
E	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/ kota					
1	Jumlah Ketaatan terhadap izin lingkungan,izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang ditangani	N/A	N/A	1	1	1
2	Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang di bina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	4	4	1	1	1
3	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penang-gung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	4	4	1	1	2
F	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kot					
1	Pengaduan Masyarakat yang tertangani	2	4	1	1	3
2	Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi	2	6	1	1	0
3	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

RKPD 2025						
NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
G	jumlah sampah yang tertangani					
1	Jumlah sampah yang tertangani (Ton)	6.643	8.502,38	11.632,01	8.365,96	10,228,26
2	Total jumlah Timbunan Sampah di Kabupaten/Kota (Ton)	16.010,52	16.282,70	16.559,47	16.840,95	17.127
3	Persentase jumlah sampah yang tertangani	41,49	52,22	70,24	49,68	59,72
H	Pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan					
1	Jumlah pengelolaan sampah oleh swasta yang taat pada peraturan jumlah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Peraturan jumlah pengelolaan sampah oleh swasta	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2024

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Minahasa Tenggara menyebabkan terjadinya peningkatan pembangunan dan penggunaan kendaraan bermotor yang menjadi pemicu terjadinya pencemaran lingkungan, antara lain tingginya produksi sampah serta pencemaran udara dan air, sehingga pengendalian pencemaran lingkungan, pengelolaan persampahan dan optimalisasi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau menjadi upaya yang utama untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Volume produksi sampah Kabupaten Minahasa Tenggara didasarkan pada asumsi timbunan sampah yang dihasilkan tiap orang per hari. Volume produksi sampah Kabupaten Minahasa Tenggara yaitu pada tahun 2019 sebanyak 16.010,52 Ton, dengan Jumlah sampah yang tertangani tahun 2019 sebanyak 6.643 ton, sehingga persentase jumlah sampah yang tertangani sebesar 41,49 %, terus mengalami peningkatan sampai tahun 2021 sebesar 11.632,01 ton jumlah sampah yang tertangani dari jumlah timbunan sampah sebanyak 16.559,47 ton, sehingga persentase jumlah sampah yang tertangani sebanyak 70,24 %, dan di tahun 2023 jumlah sampah yang tertangani turun dengan hanya 59,72 %.

Seiring dengan peningkatan volume produksi sampah diperlukan adanya peningkatan daya tampung TPS yang dapat melayani pertumbuhan penduduk dan perlunya upaya pengoptimalan fungsi TPS dalam mereduksi volume sampah yang akan diangkut ke TPA melalui pembangunan TPS 3R.

2) Kondisi Lingkungan Hidup

Kajian ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan suatu ekosistem untuk mendukung satu/rangkaian aktivitas dan ambang batas kemampuannya berdasarkan kondisi yang ada. Kepentingan kajian ini terutama adalah untuk menentukan apakah intensitas pembangunan masih dapat dikembangkan atau ditambahkan.

Daya dukung lingkungan merupakan batas kondisi kemampuan dari lingkungan untuk dapat menunjang kehidupan manusia. Penentuan daya dukung lingkungan dapat dijadikan sebagai patokan besarnya kemampuan suatu wilayah dengan kondisi lingkungan tertentu dapat mendukung kegiatan atau aktivitas manusia. Kebijakan pembangunan yang didasarkan dengan pertimbangan daya dukung lingkungan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih ramah terhadap lingkungan sehingga kerusakan lingkungan dapat diminimalkan.

Banyak metode yang telah dikembangkan dalam menentukan daya dukung lingkungan suatu wilayah. Sampai saat ini metode yang kerap digunakan yaitu metode penentuan daya dukung lingkungan yang berbasis pada potensi lingkungan seperti kapasitas bioekologi, kapasitas lahan, air, dan udara dalam menyerap karbondioksida. Penentuan daya dukung berbasis potensi terkadang kurang dapat menggambarkan kondisi daya dukung secara komprehensif dan kurang dapat menggambarkan data secara spasial kewilayahan. Hasil penentuan daya dukung lingkungan yang berbasis potensi ini terkadang kurang dapat dimanfaatkan secara tepat guna dalam penentuan kebijakan pembangunan di suatu daerah pada wilayah tertentu. Hal ini terjadi karena penentuan daya dukung berbasis potensi hanya menggambarkan kondisi kapasitas lingkungan berbasis wilayah administrasi saja.

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menjawab kelemahan metode daya dukung berbasis potensi yaitu dengan berbasis pada jasa ekosistem. Penilaian daya dukung lingkungan berbasis jasa ekosistem dilakukan dengan mendasarkan pada manfaat yang dapat dihasilkan dari suatu ekosistem. Pendekatan nilai jasa ekosistem dalam perhitungan daya dukung lingkungan didasarkan pada fungsi dari sumberdaya alam dan lingkungan yaitu berbentuk barang (*goods*) dan pelayanan (*services*). Produk berupa barang yang dinilai berupa hasil



langsung dari sumberdaya alam dan lingkungan seperti kayu, bahan tambang, minyak, gas, pangan, dan sebagainya. Sedangkan, produk jasa yang dinilai berupa hasil tidak langsung atau disebut pula jasa lingkungan (jasa ekosistem) berupa fungsi lingkungan seperti tata air, iklim, air bersih, biodiversitas, keindahan, kesejukan, dan lain sebagainya. Pendekatan nilai jasa ekosistem yang digunakan dalam perhitungan daya dukung lingkungan dapat dikategorikan dalam empat aspek yaitu :

- Jasa penyediaan (*provisioning*);
- Jasa pengaturan (*regulating*);
- Jasa budaya (*cultural*);
- Jasa pendukung (*supporting*).

Konsep perhitungan daya dukung lingkungan dengan pendekatan nilai jasa ekosistem dihitung dengan mempertimbangkan dari kondisi penggunaan atau tutupan lahan. Penggunaan atau tutupan lahan inilah yang dipertimbangkan sebagai aspek penilaian jasa ekosistem untuk berbagai aspek perhitungan daya dukung. Asumsi yang digunakan dimana setiap penggunaan lahan memiliki nilai kemampuan tersendiri dalam mendukung berbagai kebutuhan hidup manusia. Nilai kemampuan suatu sumberdaya alam dan lingkungan ditampilkan dalam bentuk nilai indeks jasa ekosistem dengan rentang nilai 0 – 1, dimana semakin mendekati 1 (satu), semakin baik fungsi wilayah dalam menyediakan jasa lingkungan.

Penilaian daya dukung lingkungan berbasis jasa ekosistem secara gamblang dapat memperlihatkan kondisi spasial nilai manfaat dari tiap ruang pada suatu wilayah. Sebaran nilai manfaat dari setiap ruang dapat tergambar dengan jelas sehingga dalam penentuan arahan kebijakan pembangunan dapat langsung dioverlaykan untuk mengetahui kecocokan suatu ruang untuk suatu peruntukan lahan. Disamping itu, penilaian jasa ekosistem ini juga menghasilkan nilai manfaat dari suatu ruang baik secara langsung dan tidak langsung yang dapat digunakan dalam penentuan kebijakan pembangunan suatu wilayah. Penentuan kebijakan pembangunan dengan melihat nilai manfaat suatu ruang secara komprehensif dapat menghasilkan kebijakan yang lebih tepat guna, efektif, dan efisien sehingga pada akhirnya kebijakan pembangunan tidak hanya berkiblat pada nilai ekonomis saja, tetapi juga aspek lingkungan dan sosial kemasyarakatan juga ikut diperhatikan.

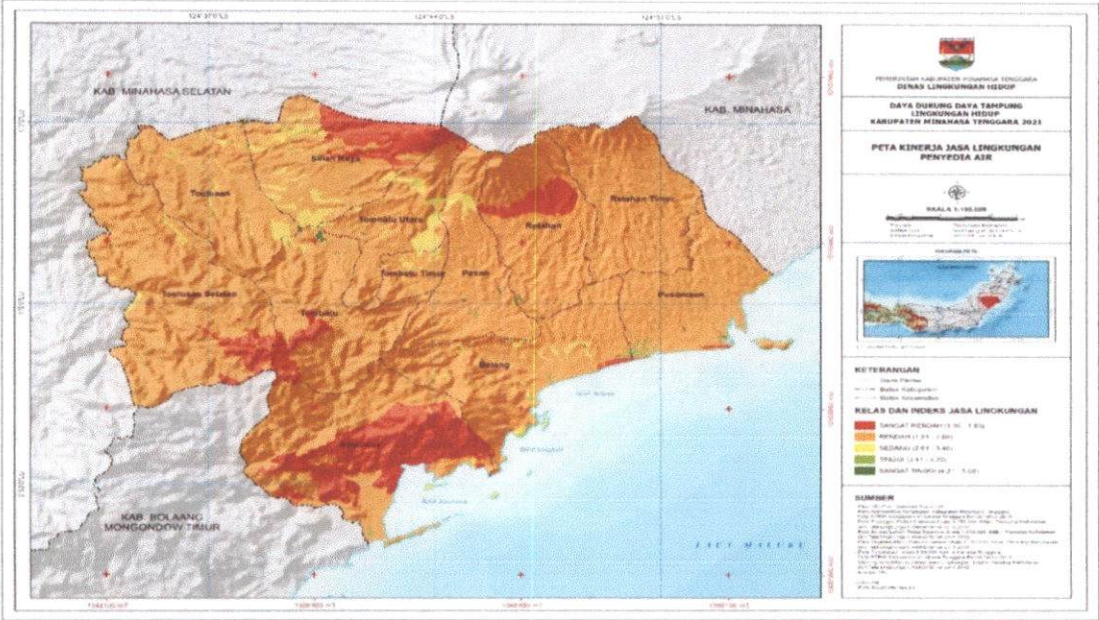


3) Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Pada laporan ini, kajian daya dukung Kabupaten Minahasa Tenggara akan disajikan daya dukung yang berbasis potensi dan jasa ekosistem. Untuk berbasis potensi, daya dukung ditentukan pada kemampuan lahan di Kabupaten Minahasa Tenggara. Sementara untuk jasa ekosistem ditentukan melalui penetapan status ketersediaan air di wilayah Kabupaten dengan pendekatan jasa ekosistem.

Peran ekosistem dalam penyediaan air bermakna manfaat yang diberikan untuk penyediaan air baik yang berasal dari air permukaan maupun air tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya), bahkan air hujan yang dapat dipergunakan untuk kepentingan domestik, pertanian, industri maupun jasa. Penyediaan jasa air sangat dipengaruhi oleh kondisi curah hujan dan lapisan tanah atau batuan yang dapat menyimpan air (akuifer) serta faktor yang dapat mempengaruhi sistem penyimpanan air tanah seperti bentang alam.

Berdasarkan hasil perhitungan kinerja jasa lingkungan penyediaan air, sebaran wilayah fungsi ekosistem penyediaan air di Kabupaten Minahasa Tenggara dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut:



Gambar 2.4 Peta Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Air Kabupaten Minahasa Tenggara
(Sumber : Hasil Pengolahan D3TLH Kab. MinahasaTenggara Tahun 2021)

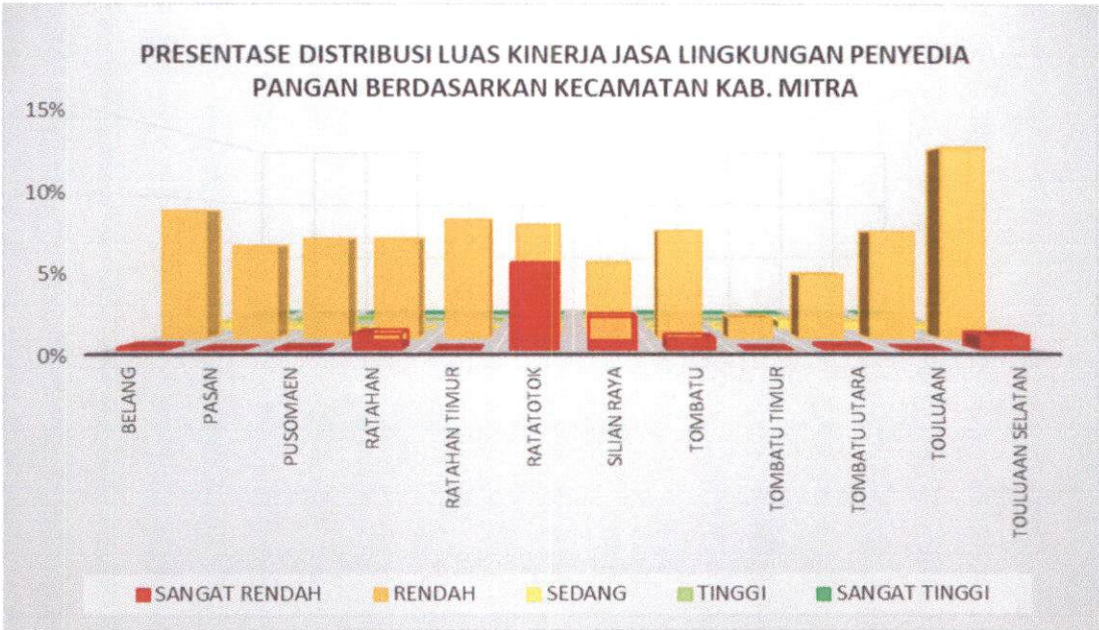
Dari hasil pengolahan data, layanan penyedia air di Kabupaten Minahasa Tenggara dominan berada di rentang kelas berpotensi Rendah (rendah – sangat rendah) dengan luas sebesar 96,28%, kelas berpotensi Sedang sebesar 3,32% dan kelas berpotensi Tinggi (tinggi – sangat

tinggi) dalam memberikan layanan penyedia air hanya sebesar 0,40% dari total luas Kabupaten Minahasa Tenggara.

Tabel 2.126
Distribusi Luas Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Air Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Minahasa Tenggara

DISTRIBUSI LUAS KINERJA JASA LINGKUNGAN PENYEDIA AIR BERDASARKAN KECAMATAN KAB. MITRA													
NO	KECAMATAN	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI		TOTAL	
		(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)
1	Belang	135.46	0.18%	6,762.79	8.98%	286.12	0.38%	57.31	0.08%	4.79	0.01%	7,246.47	9.62%
2	Pasan	0.05	0.00%	4,878.19	6.48%	166.52	0.22%	13.37	0.02%	10.61	0.01%	5,068.75	6.73%
3	Pusomaen	51.04	0.07%	5,266.22	6.99%	-	-	90.97	0.12%	16.06	0.02%	5,424.29	7.20%
4	Ratahan	787.96	1.05%	5,277.78	7.01%	-	-	-	-	7.91	0.01%	6,073.65	8.06%
5	Ratahan Timur	4.23	0.01%	6,293.23	8.36%	-	-	-	-	-	-	6,297.46	8.36%
6	Ratatotok	4,137.33	5.49%	6,030.29	8.01%	61.43	0.08%	18.03	0.02%	1.50	0.002%	10,248.59	13.61%
7	Silian Raya	1,595.17	2.12%	4,003.82	5.32%	804.24	1.07%	-	-	7.06	0.01%	6,410.29	8.51%
8	Tombatu	575.50	0.76%	5,701.86	7.57%	69.51	0.09%	-	-	31.56	0.04%	6,378.44	8.47%
9	Tombatu Timur	-	-	1,084.10	1.44%	112.72	0.15%	1.47	0.002%	-	-	1,198.29	1.59%
10	Tombatu Utara	128.43	0.17%	3,367.70	4.47%	469.86	0.62%	-	-	6.08	0.01%	3,972.08	5.27%
11	Touluaan	-	-	5,650.30	7.50%	369.35	0.49%	-	-	15.03	0.02%	6,034.68	8.01%
12	Touluaan Selatan	688.38	0.91%	10,088.28	13.40%	161.83	0.21%	-	-	20.11	0.03%	10,958.60	14.55%
TOTAL		8,103.55	10.76%	64,404.58	85.52%	2,501.59	3.32%	181.16	0.24%	120.72	0.16%	75,311.60	100%

(Sumber : Hasil Pengolahan)



Gambar 2.5 Diagram Persentase Distribusi Luas Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Air Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Minahasa Tenggara (Sumber : Hasil Pengolahan)

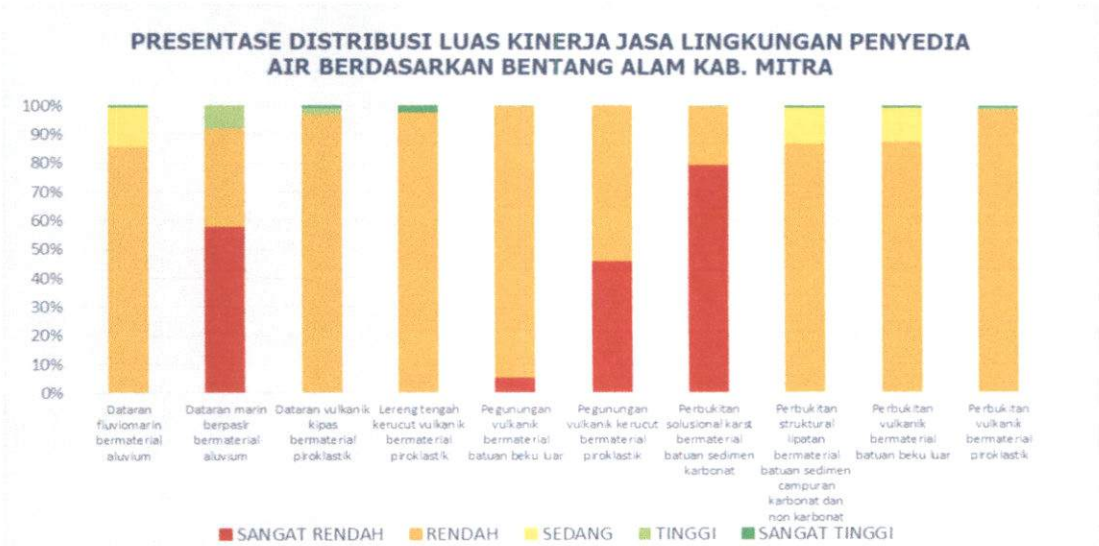
Kecamatan yang memberikan kontribusi wilayah dengan tingkat kinerja jasa lingkungan penyedia air kategori kelas berpotensi tinggi (tinggi – sangat tinggi) hanya di Kecamatan Pusomaen dan Kecamatan Belang dengan

luas masing-masing sebesar 0,14% dan 0,08% dari total luas Kabupaten Minahasa Tenggara.

Tabel 2.127
Distribusi Luas Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Air Berdasarkan Bentang Alam Kabupaten Minahasa Tenggara

DISTRIBUSI LUAS KINERJA JASA LINGKUNGAN PENYEDIA AIR BERDASARKAN BENTANG ALAM KAB. MITRA													
NO	BENTANG ALAM	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI		TOTAL	
		(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)
1	Dataran fluvio-marine bermaterial aluvium	-		282.91	0.38%	44.65	0.06%	-		1.50	0.002%	329.07	0.44%
2	Dataran marin berpasir bermaterial aluvium	126.64	0.17%	74.33	0.10%	-		16.89	0.02%	-		217.86	0.29%
3	Dataran vulkanik kipas bermaterial piroklastik	0.003	0.00%	1,890.62	2.51%	-		35.93	0.05%	15.59	0.02%	1,942.15	2.58%
4	Lereng tengah kerucut vulkanik bermaterial piroklastik	-		224.49	0.30%	-		-		4.94	0.01%	229.43	0.30%
5	Pegunungan vulkanik bermaterial batuan beku luar	1,290.93	1.71%	21,893.05	29.07%	-		1.04	0.001%	-		23,185.02	30.79%
6	Pegunungan vulkanik kerucut bermaterial piroklastik	2,511.43	3.33%	2,951.62	3.92%	-		-		-		5,463.05	7.25%
7	Perbukitan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat	4,174.55	5.54%	1,062.61	1.41%	-		4.25	0.01%	-		5,241.41	6.96%
8	Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen campuran karbonat dan non karbonat	-		669.08	0.89%	96.95	0.13%	1.57	0.002%	2.23	0.003%	769.82	1.02%
9	Perbukitan vulkanik bermaterial batuan beku luar	-		16,847.19	22.37%	2,359.99	3.13%	5.66	0.01%	30.07	0.04%	19,242.91	25.55%
10	Perbukitan vulkanik bermaterial piroklastik	-		18,508.68	24.58%	-		115.80	0.15%	66.39	0.09%	18,690.87	24.82%
TOTAL		8,103.55	10.76%	64,404.58	85.52%	2,501.59	3.32%	181.16	0.24%	120.72	0.16%	75,311.60	100%

Sumber : Hasil Pengolahan



Gambar 2.6 Diagram Persentase Distribusi Luas Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Air Berdasarkan Bentang Alam Kabupaten Minahasa Tenggara (Sumber: Hasil Pengolahan)

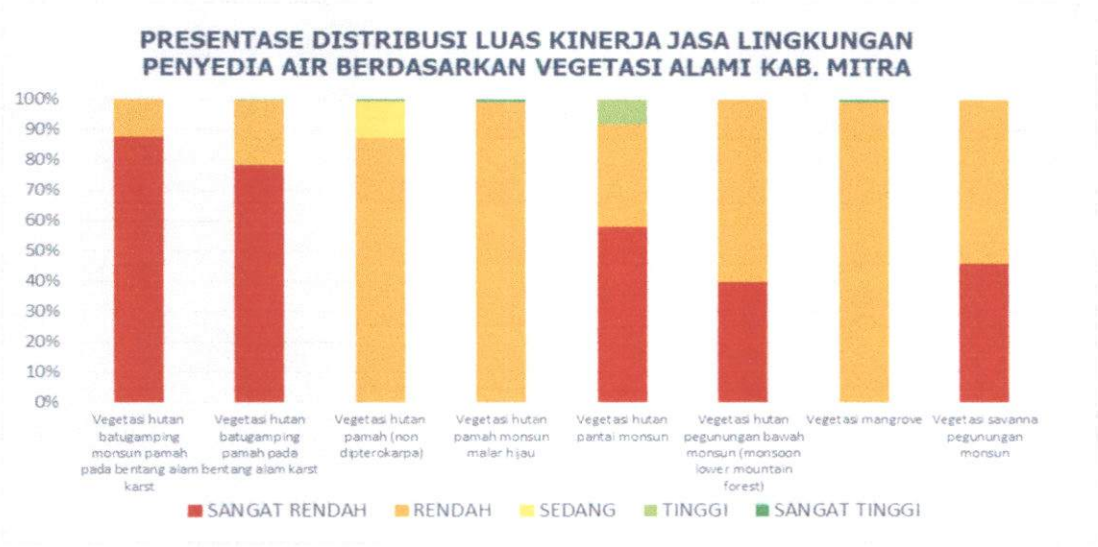
Wilayah yang memiliki tingkat kinerja jasa lingkungan penyediaan air kelas kategori Tinggi (tinggi – sangat tinggi) sebagian besar berada pada jenis bentang alam Perbukitan vulkanik bermaterial piroklastik dengan luas sebesar 0,24% dari total luas Kabupaten Minahasa Tenggara. Wilayah yang memiliki tingkat kinerja jasa lingkungan penyediaan air kelas berpotensi

Sedang berada pada jenis bentang alam perbukitan vulkanik bermaterial batuan beku luar dengan luas sebesar 3,13%, sedangkan wilayah yang memiliki tingkat kinerja jasa lingkungan penyediaan air kelas berpotensi Rendah (sangat rendah – rendah) berada pada jenis bentang alam pegunungan vulkanik bermaterial batuan beku luar dengan luas sebesar 30,78% dari total luas Kabupaten Minahasa Tenggara.

Tabel 2.128
Distribusi Luas Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Air Berdasarkan Tipe Vegetasi Alami Kabupaten Minahasa Tenggara

DISTRIBUSI LUAS KINERJA JASA LINGKUNGAN PENYEDIA AIR BERDASARKAN VEGETASI ALAMI KAB. MITRA													
NO	VEGETASI ALAMI	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI		TOTAL	
		(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)
1	Vegetasi hutan batugamping monsun pamah pada bentang alam karst	573.10	0.76%	80.49	0.11%	-	-	-	-	-	-	653.59	0.87%
2	Vegetasi hutan batugamping pamah pada bentang alam k	3,601.45	4.78%	982.12	1.30%	-	-	4.25	0.01%	-	-	4,587.82	6.09%
3	Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	-	-	17,516.27	23.26%	2,482.73	3.30%	7.23	0.01%	32.29	0.04%	20,038.53	26.61%
4	Vegetasi hutan pamah monsun malar hijau	-	-	40,569.14	53.87%	18.86	0.03%	152.78	0.20%	86.92	0.12%	40,827.69	54.21%
5	Vegetasi hutan pantai monsun	126.64	0.17%	74.24	0.10%	-	-	16.89	0.02%	-	-	217.78	0.29%
6	Vegetasi hutan pegunungan bawah monsun (monsoon lower mountain forest)	1,290.93	1.71%	1,947.80	2.59%	-	-	-	-	-	-	3,238.72	4.30%
7	Vegetasi mangrove	0.003	0.00%	282.91	0.38%	-	-	-	-	1.50	0.002%	284.42	0.38%
8	Vegetasi savanna pegunungan monsun	2,511.43	3.33%	2,951.62	3.92%	-	-	-	-	-	-	5,463.05	7.25%
TOTAL		8,103.55	10.76%	64,404.58	85.52%	2,501.59	3.32%	181.16	0.24%	120.72	0.16%	75,311.60	100%

Sumber : Hasil Pengolahan



Gambar 2.7 Diagram Persentase Distribusi Luas Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Air Berdasarkan Vegetasi Alami Kabupaten Minahasa Tenggara (Sumber: Hasil Pengolahan)

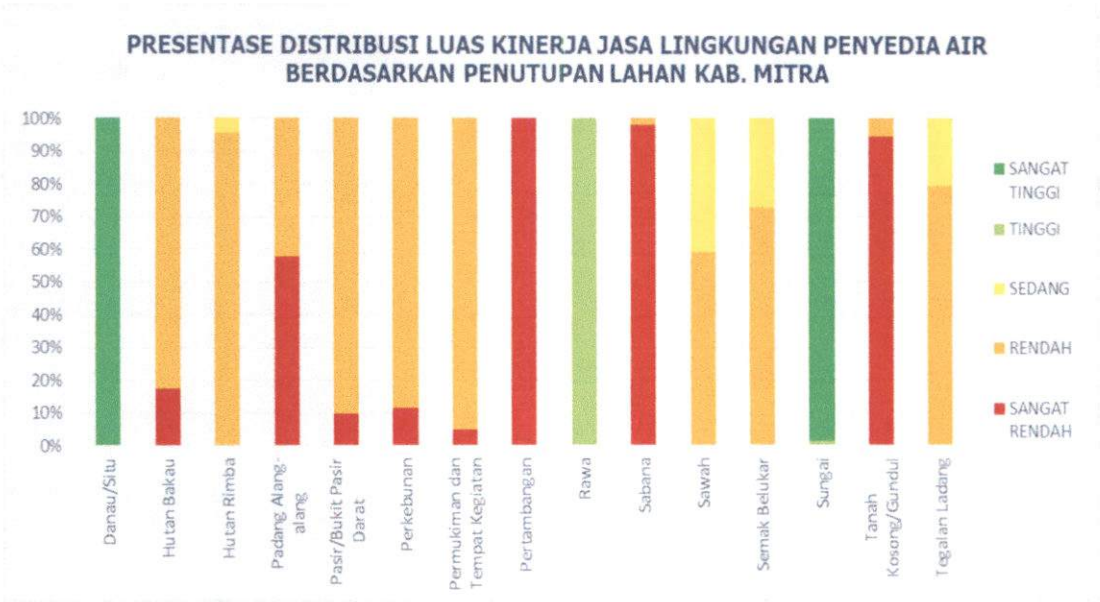
Tingkat kinerja jasa lingkungan penyediaan air di Kabupaten Minahasa Tenggara kelas kategori Tinggi (tinggi – sangat tinggi) dipengaruhi oleh jenis vegetasi hutan pamah monsun malar hijau dengan luas sebesar 0,32% dari total luas Kabupaten Minahasa Tenggara. Kelas kategori Sedang juga dipengaruhi oleh vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa) sebesar

3,30%, sedangkan kelas kategori Rendah (sangat rendah – rendah) sebagian besar juga dipengaruhi oleh vegetasi hutan pamah monsun malar hijau dengan luas sebesar 53,87% dari total luas Kabupaten Minahasa Tenggara.

Tabel 2.129
Distribusi Luas Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Air
Berdasarkan Penutupan Lahan Kabupaten Minahasa Tenggara

DISTRIBUSI LUAS KINERJA JASA LINGKUNGAN PENYEDIA AIR BERDASARKAN PENUTUPAN LAHAN KAB. MITRA													
NO	KECAMATAN	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI		TOTAL	
		(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)
1	Danau/Situ	-		-		-		-		75.27	0.10%	75.27	0.10%
2	Hutan Bakau	84.84	0.11%	400.47	0.53%	-		-		-		485.31	0.64%
3	Hutan Rimba	-		9,129.99	12.12%	385.44	0.51%	-		-		9,515.43	12.63%
4	Padang Alang-alang	537.01	0.71%	389.85	0.52%	-		-		-		926.85	1.23%
5	Pasir/Bukit Pasir Darat	3.91	0.01%	35.36	0.05%	-		-		-		39.26	0.05%
6	Perkebunan/Kebun	6,364.86	8.45%	47,996.32	63.73%	-		-		-		54,361.18	72.18%
7	Permukiman dan Tempat Kegiatan	75.45	0.10%	1,412.89	1.88%	-		-		-		1,488.33	1.98%
8	Pertambangan	71.48	0.09%	-		-		-		-		71.48	0.09%
9	Rawa	-		-		-		180.49	0.24%	-		180.49	0.24%
10	Sabana	464.64	0.62%	7.86	0.01%	-		-		-		472.50	0.63%
11	Sawah	-		1,699.83	2.26%	1,159.32	1.54%	-		-		2,859.15	3.80%
12	Semak Belukar	-		1,004.81	1.33%	372.62	0.49%	-		-		1,377.43	1.83%
13	Sungai	-		-		-		0.67	0.00%	45.45	0.06%	46.12	0.06%
14	Tanah Kosong/Gundul	501.38	0.67%	27.82	0.04%	-		-		-		529.20	0.70%
15	Tegalan/Ladang	-		2,299.39	3.05%	584.20	0.78%	-		-		2,883.60	3.83%
TOTAL		8,103.55	10.76%	64,404.58	85.52%	2,501.59	3.32%	181.16	0.24%	120.72	0.16%	75,311.60	100%

Sumber : Hasil Pengolahan



Gambar 2.8 Diagram Persentase Distribusi Luas Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Air Berdasarkan Penutupan Lahan Kabupaten Minahasa Tenggara (Sumber: Hasil Pengolahan)

Wilayah yang memiliki tingkat kinerja jasa lingkungan penyediaan air kelas kategori Tinggi (tinggi – sangat tinggi) di Kabupaten Minahasa Tenggara hanya dipengaruhi oleh jenis penutupan lahan berupa rawa dengan luas sebesar 0,24% dari total luas Kabupaten Minahasa Tenggara. Kelas kategori Sedang sebagian besar berada pada penutupan lahan sawah



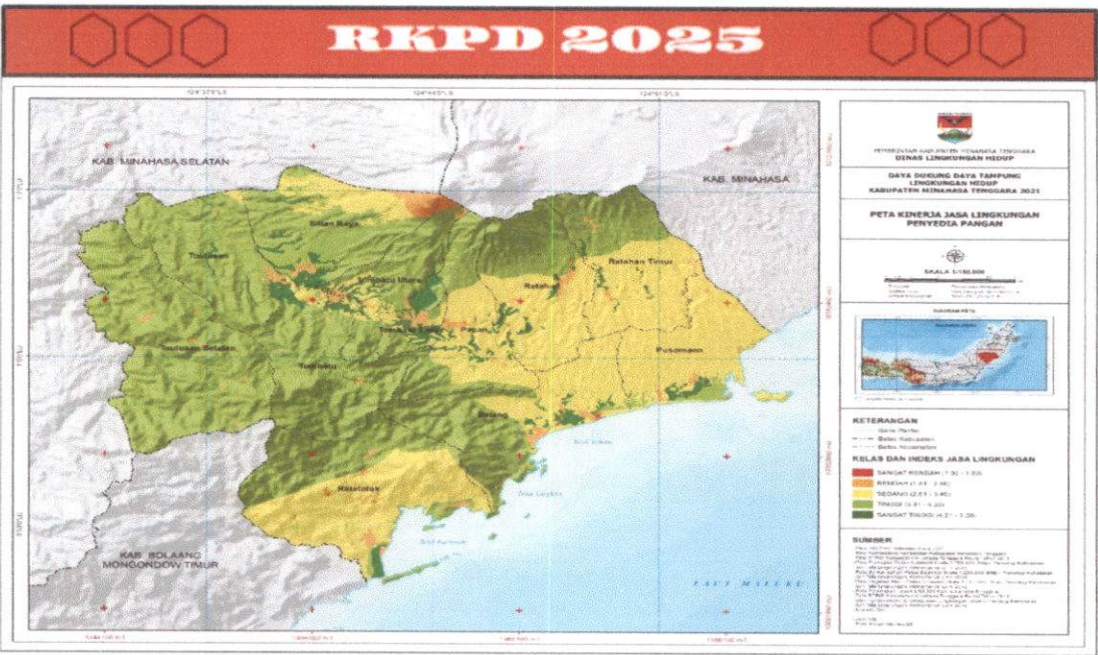
dengan luas sebesar 1,54% dari total luas Kabupaten Minahasa Tenggara. Sedangkan kelas kategori Rendah (rendah – sangat rendah) dominan dipengaruhi oleh pemanfaatan lahan berupa perkebunan/kebun dengan luas sebesar 72,18% dari total luas Kabupaten Minahasa Tenggara.

Sebaran daya dukung jasa lingkungan penyediaan air ini memberikan informasi penting bagi kita dalam menentukan pengelolaan lingkungan hidup khususnya terkait sektor sumberdaya air di Kabupaten Minahasa Tenggara. Pemanfaatan wilayah pada kawasan dimana daya dukungnya sangat tinggi dan tinggi atas jasa penyediaan air dapat diarahkan untuk tidak diubah fungsi pemanfaatan lahannya untuk tujuan pembangunan. Sedangkan pada wilayah dimana daya dukungnya rendah, diperlukan upaya adaptasi dan mitigasi dalam rangka meningkatkan layanan jasa lingkungan yang rendah dalam menyediakan air.

Jasa lingkungan penyediaan pangan menggambarkan tingkat kondisi ekosistem dalam memberikan manfaat penyediaan bahan pangan yang berasal dari sumber hayati (tanaman dan hewan) dan air (ikan), baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Jenis-jenis pangan di Indonesia sangat bervariasi diantaranya seperti beras, jagung, ketela, gandum, sagu, segala macam buah, ikan, daging, telur dan sebagainya. Penyediaan pangan oleh ekosistem dapat berasal dari hasil pertanian dan perkebunan, hasil peternakan, hasil laut dan termasuk pangan dari hutan. Jasa lingkungan penyediaan pangan di Kabupaten Minahasa Tenggara tentunya menggambarkan kondisi wilayah dalam mendukung layanan penyediaan pangan yang akan dipengaruhi oleh kondisi bentang alam dan kondisi aktifitas pemanfaatan lahan.

Berdasarkan hasil perhitungan kinerja jasa lingkungan penyediaan pangan, sebaran wilayah fungsi ekosistem penyediaan pangan di Kabupaten Minahasa Tenggara dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut:





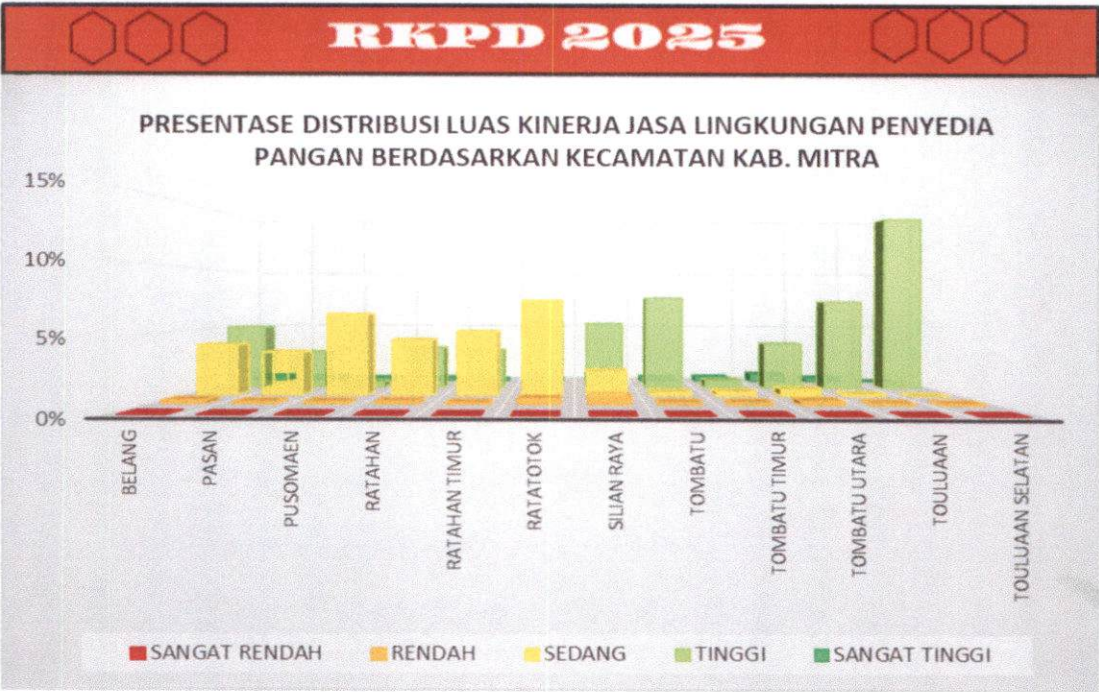
Gambar 2.9 Peta Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Kabupaten Minahasa TenggaraSumber : Hasil Pengolahan

Jasa lingkungan penyedia pangan di Kabupaten Minahasa Tenggara sangat dipengaruhi oleh karakteristik wilayah dan pemanfaatan lahan yang dapat menghasilkan bahan pangan seperti lahan pertanian dan perikanan. Berdasarkan hasil pengolahan data, kondisi layanan penyedia pangan di Kabupaten Minahasa Tenggara saat ini dikategorikan dominan berada di rentang kelas berpotensi Tinggi (tinggi – sangat tinggi) dengan luasan sebesar 63,79%, kelas berpotensi Sedang sebesar 33,38% dan kelas berpotensi Rendah (sangat rendah – rendah) sebesar 2,83% dari total luas Kabupaten Minahasa Tenggara.

Tabel 2.130 Distribusi Luas Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Minahasa Tenggara

DISTRIBUSI LUAS KINERJA JASA LINGKUNGAN PENYEDIA PANGAN BERDASARKAN KECAMATAN KAB. MITRA													
NO	KECAMATAN	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI		TOTAL	
		(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)
1	Belang	17.45	0.02%	196.38	0.26%	2,907.61	3.86%	3,838.26	5.10%	286.77	0.38%	7,246.47	9.62%
2	Pasan	-		114.60	0.15%	2,481.34	3.29%	2,210.80	2.94%	262.01	0.35%	5,068.75	6.73%
3	Pusomaen	6.19	0.01%	125.35	0.17%	4,772.27	6.34%	328.51	0.44%	191.96	0.25%	5,424.29	7.20%
4	Ratahan	-		158.10	0.21%	3,226.64	4.28%	2,484.02	3.30%	204.89	0.27%	6,073.65	8.06%
5	Ratahan Timur	-		90.69	0.12%	3,742.32	4.97%	2,354.62	3.13%	109.84	0.15%	6,297.46	8.36%
6	Ratatotok	-		313.04	0.42%	5,616.99	7.46%	4,186.57	5.56%	132.00	0.18%	10,248.59	13.61%
7	Silian Raya	-		460.64	0.61%	1,413.92	1.88%	4,102.31	5.45%	433.43	0.58%	6,410.29	8.51%
8	Tombatu	-		120.29	0.16%	214.34	0.28%	5,783.07	7.68%	260.75	0.35%	6,378.44	8.47%
9	Tombatu Timur	-		126.99	0.17%	257.50	0.34%	510.04	0.68%	303.76	0.40%	1,198.29	1.59%
10	Tombatu Utara	-		220.94	0.29%	406.04	0.54%	2,827.62	3.75%	517.48	0.69%	3,972.08	5.27%
11	Touluaan	-		96.74	0.13%	100.95	0.13%	5,582.56	7.41%	254.43	0.34%	6,034.68	8.01%
12	Touluaan Selatan	-		80.90	0.11%	-		10,877.70	14.44%	-		10,958.60	14.55%
TOTAL		23.64	0.03%	2,104.65	2.79%	25,139.92	33.38%	45,086.08	59.87%	2,957.32	3.93%	75,311.60	100%

Sumber : Hasil Pengolahan



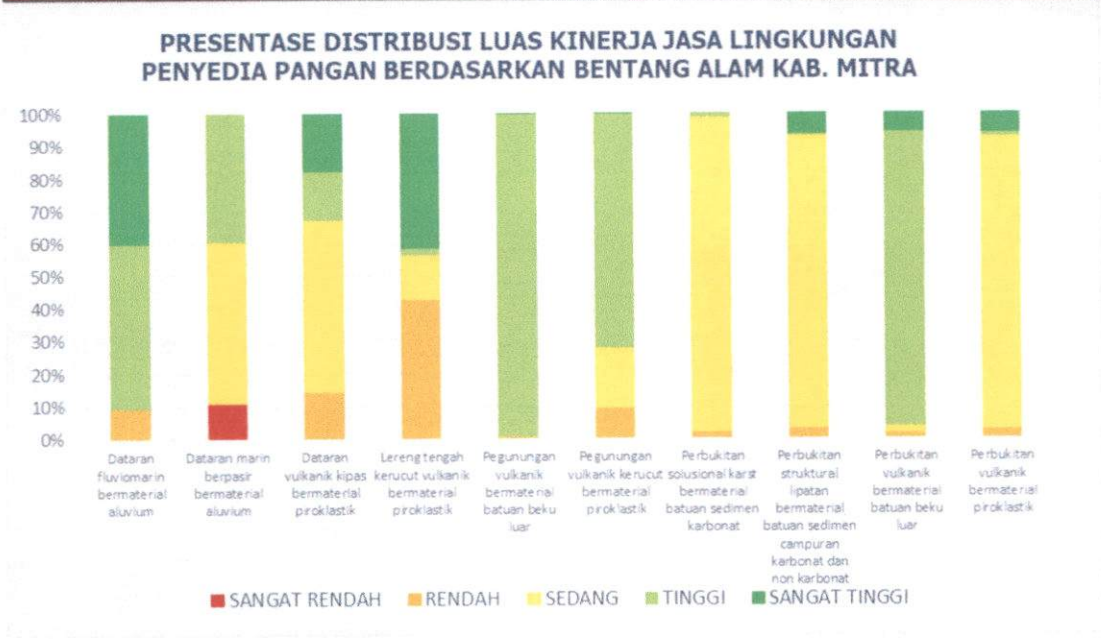
Gambar 2.10 Diagram Persentase Distribusi Luas Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Minahasa Tenggara(Sumber : Hasil Pengolahan)

Kecamatan yang memiliki distribusi luasan dengan tingkat kinerja jasa lingkungan penyedia pangan kategori kelas berpotensi Tinggi (tinggi – sangat tinggi) sebagian besar berada di wilayah Kecamatan Touluaan Selatan dengan luas sebesar 14,44%, Kecamatan Tombatu dengan luas sebesar 8,03%, Kecamatan Touluaan dengan luas sebesar 7,75% dan Kecamatan Silian Raya dengan luas sebesar 6,02% dari total luas Kabupaten Minahasa Tenggara.

Tabel. 2.131
Distribusi Luas Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Berdasarkan Bentang Alam Kabupaten Minahasa Tenggara

DISTRIBUSI LUAS KINERJA JASA LINGKUNGAN PENYEDIA PANGAN BERDASARKAN BENTANG ALAM KAB. MITRA													
NO	BENTANG ALAM	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI		TOTAL	
		(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)
1	Dataran fluviomarim bermaterial aluvium	-		31.06	0.04%	-		166.01	0.22%	132.00	0.18%	329.07	0.44%
2	Dataran marin berpasir bermaterial aluvium	23.64	0.03%	0.03	0.00%	108.49	0.14%	85.71	0.11%	-		217.86	0.29%
3	Dataran vulkanik kipas bermaterial piroklastik	-		282.41	0.37%	1,024.28	1.36%	289.33	0.38%	346.13	0.46%	1,942.15	2.58%
4	Lereng tengah kerucut vulkanik bermaterial piroklastik	-		98.18	0.13%	31.28	0.04%	4.94	0.01%	95.03	0.13%	229.43	0.30%
5	Pegunungan vulkanik bermaterial batuan beku luar	-		170.63	0.23%	-		22,964.37	30.49%	50.03	0.07%	23,185.02	30.79%
6	Pegunungan vulkanik kerucut bermaterial piroklastik	-		519.49	0.69%	1,001.64	1.33%	3,936.12	5.23%	5.80	0.01%	5,463.05	7.25%
7	Perbukitan solusional karst bermaterial batuan sedimen k	-		103.86	0.14%	5,082.41	6.75%	55.14	0.07%	-		5,241.41	6.96%
8	Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen campuran karbonat dan non karbonat	-		22.96	0.03%	693.38	0.92%	3.80	0.01%	49.68	0.07%	769.82	1.02%
9	Perbukitan vulkanik bermaterial batuan beku luar	-		347.02	0.46%	397.71	0.53%	17,388.55	23.09%	1,109.63	1.47%	19,242.91	25.55%
10	Perbukitan vulkanik bermaterial piroklastik	-		529.01	0.70%	16,800.73	22.31%	192.11	0.26%	1,169.02	1.55%	18,690.87	24.82%
TOTAL		23.64	0.03%	2,104.65	2.79%	25,139.92	33.38%	45,086.08	59.87%	2,957.32	3.93%	75,311.60	100%

Sumber : Hasil Pengolahan



Gambar 2.11 Diagram Persentase Distribusi Luas Kinerja JL Penyedia Pangan Berdasarkan Bentang Alam di Kabupaten Minahasa Tenggara (Sumber : Hasil Pengolahan)

Wilayah yang memiliki tingkat kinerja jasa lingkungan penyediaan pangan Tinggi (tinggi – sangat tinggi) di Kabupaten Minahasa Tenggara, sebagian besar berada pada jenis bentang alam pegunungan vulkanik bermaterial batuan beku luar dengan luas sebesar 30,56%, dan Perbukitan vulkanik bermaterial batuan beku luar dengan luas sebesar 24,56% dari total luas Kabupaten Minahasa Tenggara.

Sumberdaya lahan pegunungan vulkanik memiliki potensi yang tinggi untuk mendukung tujuan pengembangan sosial-ekonomi. Lahan-lahan di pegunungan vulkan biasanya memiliki kandungan mineral yang masih tinggi sebagai hasil dari aliran material dan debu vulkanik dari puncak gunung pada saat erupsi sehingga sangat bagus untuk pertanian. Daya dukung lahan yang tinggi disertai dengan kelerengan yang tidak terlalu curam memungkinkan untuk dilakukan pengelolaan budidaya lahan dengan tanaman komersial bernilai tinggi baik berupa pertanian lahan basah, pertanian lahan kering maupun perkebunan.

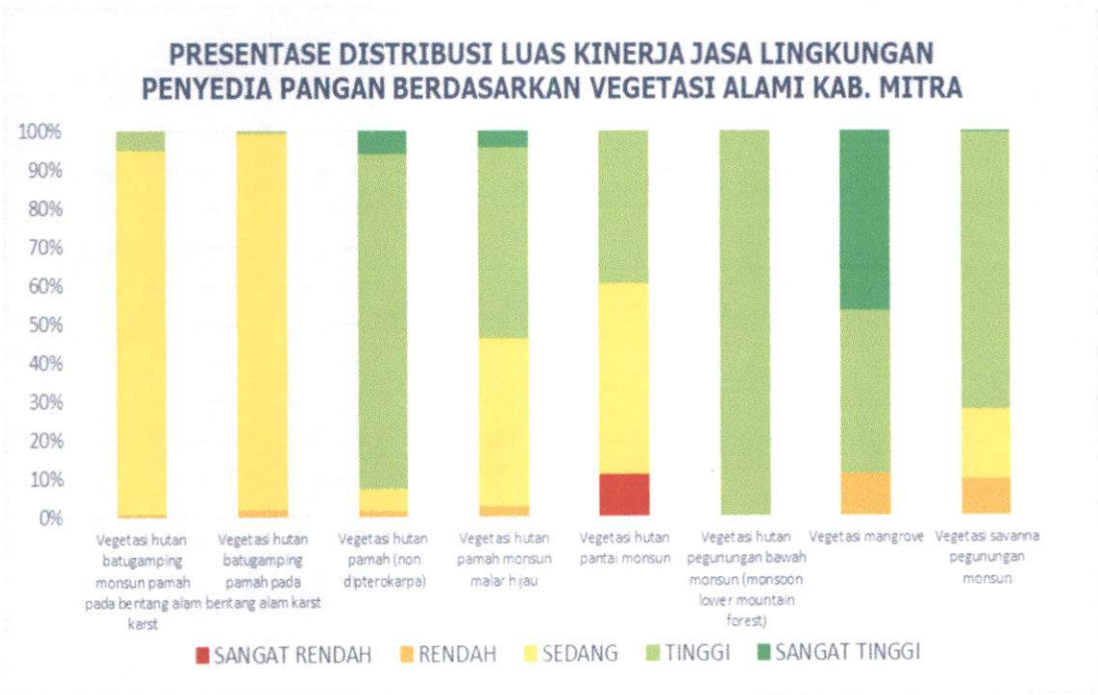
Namun demikian, mengingat kondisi lahannya yang masih berombak maka menuntut pola pengelolaan lahan yang mengedepankan prinsip-prinsip konservasi agar tidak terjadi degradasi lahan. Jika prinsip-prinsip konservasi lahan ini ditinggalkan, maka degradasi lahan yang berlangsung secara terus menerus akan dapat juga menyebabkan merosotnya daya dukung lahan yang mengarah pada kehancuran.

Wilayah yang memiliki tingkat kinerja jasa lingkungan penyediaan pangan kategori Sedang di Kabupaten Minahasa Tenggara, sebagian besar berada pada jenis bentang alam perbukitan vulkanik bermaterial piroklastik dengan luas sebesar 22,31%, dan perbukitan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat dengan luas sebesar 6,75% dari total luas Kabupaten Minahasa Tenggara.

Tabel 2.132
Distribusi Luas Kinerja JL Penyedia Pangan Berdasarkan Tipe Vegetasi Alami
Kabupaten Minahasa Tenggara

DISTRIBUSI LUAS KINERJA JASA LINGKUNGAN PENYEDIA PANGAN BERDASARKAN VEGETASI ALAMI KAB. MITRA													
NO	VEGETASI ALAMI	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI		TOTAL	
		(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)
1	Vegetasi hutan batugamping monsun pamah pada bentang alam karst	-		5.23	0.01%	618.15	0.82%	30.20	0.04%	-		653.59	0.87%
2	Vegetasi hutan batugamping pamah pada bentang alam k	-		98.63	0.13%	4,464.25	5.93%	24.94	0.03%	-		4,587.82	6.09%
3	Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	-		369.98	0.49%	1,091.09	1.45%	17,418.14	23.13%	1,159.32	1.54%	20,038.53	26.61%
4	Vegetasi hutan pamah monsun malar hijau	-		1,075.03	1.43%	17,856.35	23.71%	20,236.11	26.87%	1,660.21	2.20%	40,827.69	54.21%
5	Vegetasi hutan pantai monsun	23.64	0.03%	-	0.00%	108.43	0.14%	85.71	0.11%	-		217.78	0.29%
6	Vegetasi hutan pegunungan bawah monsun (monsoon lower mountain forest)	-		5.23	0.01%	-		3,233.49	4.29%	-		3,238.72	4.30%
7	Vegetasi mangrove	-		31.06	0.04%	0.002	0.00%	121.36	0.16%	132.00	0.18%	284.42	0.38%
8	Vegetasi savanna pegunungan monsun	-		519.49	0.69%	1,001.64	1.33%	3,936.12	5.23%	5.80	0.01%	5,463.05	7.25%
TOTAL		23.64	0.03%	2,104.65	2.79%	25,139.92	33.38%	45,086.08	59.87%	2,957.32	3.93%	75,311.60	100%

Sumber : Hasil Pengolahan



Gambar 2.12 Diagram Persentase Distribusi Luas Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Berdasarkan Tipe Vegetasi Alami di Kabupaten Minahasa Tenggara (Sumber : Hasil Pengolahan)

Wilayah yang memiliki tingkat kinerja jasa lingkungan penyediaan pangan Tinggi (tinggi – sangat tinggi) dipengaruhi oleh vegetasi hutan pamah monsun malar hijau yaitu vegetasi dengan komunitas hutan yang tumbuh dan berkembang pada lahan kering pamah pada wilayah yang beriklim monsun dengan karakteristik hutan-hutan yang selalu hijau atau malar hijau meskipun pada musim kemarau yang kering. Struktur dan komposisi floristik hutan tersebut mirip seperti hutan hujan meskipun perawakannya lebih kecil dan stratifikasi pohon tidak terlalu kompleks dengan luas sebesar 29,07% dari total luas Kabupaten Minahasa Tenggara. Selain itu juga didominasi oleh vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa) yaitu komunitas vegetasi dengan tegakan pohon-pohon tinggi 30–45 m, batangnya lurus dan relatif ramping, tajuknya lebat berdaun kecil, sedang sampai lebar dan selalu hijau, tumbuh pada tanah pada tanah podsolik merah kuning dan gugus tanah yang beraneka (kompleks) pada elevasi 0 - 1000 m, dengan luas sebesar 24,67% dari total luas Kabupaten Minahasa Tenggara.

Tabel 2.133
Distribusi Luas Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Pangan
Berdasarkan Penutupan Lahan Kabupaten Minahasa Tenggara

DISTRIBUSI LUAS KINERJA JASA LINGKUNGAN PENYEDIA PANGAN BERDASARKAN PENUTUPAN LAHAN KAB. MITRA													
NO	KECAMATAN	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI		TOTAL	
		(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)
1	Danau/Situ	-		-		-		75.27	0.10%	-		75.27	0.10%
2	Hutan Bakau	-		-		-		354.81	0.47%	130.49	0.17%	485.31	0.64%
3	Hutan Rimba	-		-		631.30	0.84%	8,884.13	11.80%	-		9,515.43	12.63%
4	Padang Alang-alang	-		-		926.85	1.23%	-		-		926.85	1.23%
5	Pasir/Bukit Pasir Darat	-		39.26	0.05%	-	0.00%	-		-		39.26	0.05%
6	Perkebunan/Kebun	-		-		20,970.00	27.84%	33,391.18	44.34%	-		54,361.18	72.18%
7	Permukiman dan Tempat Kegiatan	23.64	0.03%	1,464.70	1.94%	-		-		-		1,488.33	1.98%
8	Pertambangan	-		71.48	0.09%	-		-		-		71.48	0.09%
9	Rawa	-		-		-		179.45	0.24%	1.04	0.001%	180.49	0.24%
10	Sabana	-		-		472.50	0.63%	-		-		472.50	0.63%
11	Sawah	-		-		-		34.87	0.05%	2,824.27	3.75%	2,859.15	3.80%
12	Semak Belukar	-		-		583.87	0.78%	793.56	1.05%	-		1,377.43	1.83%
13	Sungai	-		-		-		44.61	0.06%	1.50	0.002%	46.12	0.06%
14	Tanah Kosong/Gundul	-		529.20	0.70%	-		-		-		529.20	0.70%
15	Tegalan/Ladang	-		-		1,555.40	2.07%	1,328.19	1.76%	-		2,883.60	3.83%
TOTAL		23.64	0.03%	2,104.65	2.79%	25,139.92	33.38%	45,086.08	59.87%	2,957.32	3.93%	75,311.60	100%

Sumber : Hasil Pengolahan



Gambar 2.13 Diagram Persentase Distribusi Luas Kinerja JL Penyedia Pangan Berdasarkan Penutupan Lahan di Kabupaten Minahasa Tenggara (Sumber : Hasil Pengolahan)

Kinerja jasa lingkungan penyediaan pangan di Kabupaten Minahasa Tenggara yang berada pada kategori Tinggi (tinggi – sangat tinggi) sangat dipengaruhi oleh bentuk pemanfaatan lahan yang terdapat diwilayah tersebut yang didominasi oleh perkebunan/kebun dengan luas sebesar 44,34%, hutan rimba dengan luas sebesar 11,80%, sawah dengan luas sebesar 3,80%, serta tegalan/ladang dengan luas sebesar 1,76% dari total luas Kabupaten Minahasa Tenggara.

Kinerja jasa lingkungan penyediaan pangan kategori Sedang sebagian besar juga dipengaruhi oleh bentuk pemanfaatan lahan berupa perkebunan/kebun dengan luas sebesar 27,84% dari total luas Kabupaten Minahasa Tenggara. Dimasa yang akan datang, layanan jasa ekosistem penyediaan pangan di Kabupaten Minahasa Tenggara sangat ditentukan oleh peran penggunaan lahan yang diterapkan, khususnya terhadap penggunaan lahan yang berpotensi dalam memproduksi hasil pangan. Diharapkan dalam perencanaan pembangunan ke depannya, khususnya di sektor pertanian agar lebih mempertimbangkan karakteristik bentang alam agar lahan-lahan yang secara struktur dan sifatnya sangat baik untuk mendukung produksi pangan bisa dimaksimalkan.

2.3.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Minahasa Tenggara menerapkan KTP Nasional berbasis NIK yang didukung dengan ketersediaan database kependudukan skala kota. Untuk Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk dengan terbitnya

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 yang mengatur bahwa KTP Non Elektronik berlaku sampai dengan 31 Desember 2014, sehingga mulai tahun 2016 kepemilikan KTP yang dihitung adalah e-KTP atau KTP elektronik yaitu 79,52. Namun sudah kembali naik di tahun 2018 menjadi sebesar 82,067% terus meningkat sampaim tahun 2022 menjadi 85,087 %. Sedangkan kenaikan Rasio Bayi Berakte Kelahiran disebabkan karena meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan akte kelahiran dan usaha jemput bola dan pemerintah telah membuka pelayanan Tempat Pelayanan Data Kependudukan (TPDK) di setiap Kecamatan. Realisasi kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilihat tabel-tabel dibawah ini :

Tabel 2.134
Realisasi kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk					
1	Jumlah penduduk usia > 17 yang ber KTP	83.862	85,572	87,17	85.087	85.214
2	Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah	85.476	86,863	87,86	89.081	91.720
3	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	98,11	98,51	99,21	95,52	92,91
B	Rasio bayi berakte kelahiran					
1	Jumlah bayi berakte kelahiran	3.728	3.473	3.613	3.291	9.178
2	Jumlah bayi	3.767	3.507	3.658	3.360	9.210
3	Rasio bayi berakte kelahiran	98,96	99,03	98,76	97,94	99,65
C	Rasio pasangan berakte nikah					
1	Jumlah pasangan nikah berakte nikah	13577	14.819	16.569	18.287	19.173
2	Jumlah keseluruhan pasangan nikah	27.059	26.917	27.532	28.397	29.088
3	Rasio pasangan berakte nikah	50,17	55,05	60,18	64.40	65,91
D	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi					
1	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
E	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK					
1	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	SUDAH	SUDAH	SUDAH	SUDAH	SUDAH
F	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk					
1	Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan	83.862	85.512	87,17	85.087	85.214
2	Jumlah penduduk wajib KTP	85.476	86.863	87,86	89.081	91.720
3	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (1:2 X100)	98,1	98,5	99,21	95,52	92,91
G	Cakupan penerbitan akta kelahiran					
1	jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan	1.099	946	959	3.291	2.564
2	Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan	1.101	954	959	3.321	2.564
3	Cakupan penerbitan akta kelahiran (KTP)	99,81	99,16	100	99,09	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2024

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan catatan sipil mengamanatkan bahwa pada Tahun 2020 seluruh penduduk yang lahir di tahun yang bersangkutan memperoleh akta kelahiran. Pada Tahun 2019 cakupan penerbitan akta kelahiran mencapai 98,81 % Sementara pada Tahun 2023 penerbitan akta kelahiran mengalami kenaikan hingga menjadi 100 %. Kenaikan tersebut dipicu dengan adanya program pemerintah dengan memberikan pelayanan pembuatan akte tanpa biaya serta melakukan sosialisasi di kecamatan tentang dokumen kependudukan.

2.3.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat. Jenis Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari a) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain; b) Lembaga Adat; c) Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan; d) RT/RW; e) Karang Taruna; f) Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Tabel 2.135
Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik
2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Kantor Pemerintahan Desa yang baik	125	125	125	125	125
2	Jumlah Seluruh Pemerintah Desa	135	135	135	135	135
3	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan desa yang baik	92,6	92,6	92,6	92,6	92,6

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2024

Dari data diatas bahwa Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan desa yang baik sejak tahun 2019 sampai tahun 2023 adalah sama pada 92,6 persen.

Tabel 2.136
Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) 2019 -2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Rata-rata Jumlah kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	20	20	20	20	20
2	Jumlah Kelompok Binaan LPM	20	20	20	20	20
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2024

Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui LPM. Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM di Kabupaten Minahasa Tenggara dari Tahun 2019 hingga tahun 2023 cenderung tetap sama, yaitu sebesar 100. Hal ini berarti bahwa rata-rata satu LPM membina 20 kelompok.

Tabel 2.137
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	PKK Aktif	144	144	144	144	144
2	Jumlah Kelompok PKK	144	144	144	144	144
3	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	1	1	1	1	1

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2024

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolanya dari, oleh dan untuk masyarakat. Kelompok binaan PKK adalah kelompok masyarakat yang berada di bawah Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan, yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan seperti kelompok dasa wisma dan kelompok sejenis, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui PKK. Pada tahun 2023 ini jumlah kelompok binaan PKK 140, sedangkan jumlah PKK aktif sebanyak 144. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.138
Persentase PKK aktif
2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah PKK Aktif	144	144	144	144	144
2	Jumlah PKK	144	144	144	144	144
3	Persentase PKK aktif	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2024

Jumlah Swadaya masyarakat dan program pemberdayaan masyarakat tahun 2019 sebanyak 20 dan tetap sampai tahun 2023 Untuk Swadaya Masyarakat terhadap program Pemberdayaan masyarakat sebesar 100% dari tahun 2019– 2023.

Tabel 2.139
Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan
Masyarakat Tahun 2019 –2023

NO	URAIAN	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Swadaya Masyarakat mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat	20	20	20	20	20
2	Total Program Pemberdayaan Masyarakat	20	20	20	20	20
3	Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2024

Sampai dengan tahun 2023, Program Pemberdayaan Masyarakat yang dikembangkan dan dipelihara masyarakat sebanyak 100 persen dari total Program Pemberdayaan Masyarakat

2.3.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga yang berkualitas dilakukan melalui pengendalian angka kelahiran. Keberhasilan pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dapat diukur melalui indikator jumlah akseptor KB, jumlah cakupan peserta KB aktif, dan jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I. Hasil yang dicapai pada pelaksanaan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera selama tahun 2019 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.140

Realisasi Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019 – 2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)					
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	0,18	0,71	0,65	0,65	0,78
B	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB					
1	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	15	15	15	15	15
C	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk					
	Persentase perangkat daerah yang Mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	1	1	1	1	1
D	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan					
	Jumlah Sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	15	15	15	15	15
E	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan					
	Jumlah kerja sama pendidikan kependudukan	7	7	7	7	7
F	Rata-rata jumlah anak per keluarga					
	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,65	3,1	2,52	2,33	2,26
G	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49					
	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 tahun	65	97,5	97,5	97,5	97,5
H	Ratio Akseptor KB					
	Ratio Akseptor KB	65	89,6	89,6	89	89
I	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun					
	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	3019 jiwa	489 jiwa	489 Jiwa	285 jiwa	4.797 jiwa
J	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)					
	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)			5,90 %	4,17%	6,80 %
K	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)					
	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	51,6	40,92	41,95	82,65 %	80%
L	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi					
	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	52	88	88	99,57	75
M	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB					
	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	44 Klpk	44 Klpk	44 Klpk	44 Klpk	20 Klpk
N	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB					
	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	28 Klpk	44 Klpk	17 Klpk	17 Klpk	13 Klpk
O	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB					
	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	12 Klpk	12 Klpk	21 Klpk	23 Klpk	12 Klpk
P	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan					
	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	12 Klpk	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

RKPD 2025						
NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
			PPKS	PPKS	PPKS	PPKS
Q	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa					
	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	21 Klpk	21 Klpk	21 Klpk	21 Klpk	24 Klpk
R	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I					
1	Jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I	2.107	2.107	1.800	1.800	1.108
2	Jumlah keluarga	4.509	4.509	33.765	33.765	35.426
S	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk					
	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	13 orang	19 Orang	16 Orang	16 orang	15 orang
T	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri					
	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	76 Klpk	13 Klpk	13 Klpk	13 Klpk	13 Klpk
U	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan					
	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	144	144	144	144	144
Z	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat					
	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	29	29	29	29	29
V	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan					
	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	18	18	18	18	18
W	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa					
	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	144	144	144	144	144
X	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga					
	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	100	100	100	100	100
Y	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak					
	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	76	76	76	76	76
Z	Rata-rata usia kawin pertama Wanita					
	Rata-rata usia kawin pertama wanita	19 thn	19 thn	19 thn	19 thn	19 thn
AA	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes					

RKPD 2025						
NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	1,02	1,40	1,06	1,43	1,03

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2024

Akseptor KB merupakan akseptor KB baru yaitu pasangan usia subur (PUS) yang pertama kali menggunakan alat kontrasepsi atau PUS yang kembali menggunakan alat kontrasepsi setelah mengalami keguguran/melahirkan. Ratio Akseptor KB pada tahun 2019 sebesar 65 pada tahun 2023 menjadi 89, sedangkan Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun di tahun 2023 mencapai 4.797 jiwa. Peserta KB aktif mengalami penurunan dari tahun ke tahun yang diakibatkan oleh adanya angka *drop out* peserta KB jenis pil, suntik dan kondom. Upaya yang dilakukan untuk menekan turunnya angka peserta KB aktif adalah revitalisasi Keluarga Berencana melalui pembinaan kelompok KB pria dan pembentukan Kampung KB. Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 tahun ditahun 2023 mencapai 97,5 sama dengan angka tahun 2020-2022. Sedangkan Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) pada tahun 2023 mencapai 6,80 %.

Pada tahun 2019, jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I sebesar 2.107, dan Pada tahun 2023, jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I sebesar menurun menjadi 1.108 jiwa. Dalam hal mewujudkan keluarga yang sejahtera, maka memerlukan peran aktif dari berbagai pihak, utamanya kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL). BKB Pada tahun 2023 sebanyak 20 kelompok, BKR 13 kelompok dan BKL tidak ada kelompok yang aktif melakukan kegiatan.

2.3.2.9. Perhubungan

Kondisi umum perkembangan Urusan perhubungan sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2.141
Kondisi Umum Perkembangan Urusan Perhubungan
Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023

RKPD 2025						
No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Jumlah arus penumpang angkutan umum					
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum (bis/kereta api/kapal laut/pesawat udara yang masuk/keluar daerah selama 1 (satu) tahun	81.713	63.840	47.012	82.560	76.560
2	Jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar daerah	17,591	12,768	47.012	82.560	76.560
B	Rasio ijin trayek					
1	Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan	7	7	92	1	1
2	Jumlah Penduduk	106.899	116.323	117.079	118.023	118.946
3	Rasio ijin trayek	0,0065	0,0060	0.0786	0,0008	0,0008
C	Jumlah uji kir angkutan umum					
1	Jumlah uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan	2	2	-	-	1
D	Persentase layanan angkutan darat					
1	Jumlah angkutan darat	95	92	92	52	52
2	Jumlah penumpang angkutan darat	16.271	63.840	47.012	99.840	76.560
3	Persentase layanan angkutan darat	5,83	1,44	1,95	0,52	0,67
E	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum					
1	Jumlah angkutan umum yang memiliki KIR	7	7	8	4	1
2	Jumlah angkutan umum pada tahun	7	7	9	9	9
3	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	100	100	88,8	44,4	11,11
F	Pemasangan Rambu-rambu					
1	Jumlah pemasangan rambu-rambu	36	49	51	56	44
2	Jumlah rambu-rambu yang seharusnya ada	198	198	198	198	288
3	Persentase Pemasangan rambu-rambu	18,18	24,74	25,75	28,28	15,27
G	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan					
1	Panjang jalan	832,64	832,64	891,929	891,929	891,929
2	Jumlah kendaraan	19.279	21.142	24.675	25,007	23,461
3	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,043	0,039	0,036	0,035	0,038
H	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum					

RKPD 2025						
No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	17,591	12,768	44,280	82,560	75,60

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2024

Jumlah arus penumpang angkutan umum terutama angkutan darat dalam 5 tahun terakhir ini mengalami fluktuasi. Arus penumpang angkutan umum selama periode tahun 2019-2023 cukup signifikan, dimana pada Tahun 2019 sebanyak 17.591 kali dan pada ditahun 2020 menurun menjadi 12.768 kali namun ditahun 2021 meningkat menjadi 47.012 kali dan tahun 2022 meningkat lagi menjadi 82.560 kali kemudian terakhir di tahun 2023 mengalami penurunan sedikit menjadi 76.560 kali. Hal ini terjadi karena tahun 2020 Kabupaten Minahasa Tenggara mengalami dampak dari pandemic covid-19 sehingga peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum massal serta pengoptimalan pengelolaan sarana dan prasarana transportasi sangat perlu dilakukan oleh pemerintah. Upaya yang dilakukan antara lain dengan mempercepat dan mempermudah proses uji kelayakan untuk angkutan umum dengan tetap berpegang pada aturan perundangan serta pengenaan biaya yang tidak membebani pelaku angkutan umum yang pada tahun 2019 sampai 2020 persentase uji KIR mencapai 100% namun di tahun 2021 turun menjadi 88,8 % demikijan pula tahun 2022 menurun dengan hanya pada angka 44,4 % sampai akhirnya tahun 2023 menjadi 11,11 %. Selain itu, upaya perbaikan-perbaikan sarana prasarana perhubungan seperti penambahan jumlah rambu lalu lintas harus di tingkatkan. Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian pemasangan rambu-rambu lalu lintas mengalami kenaikan dari 18,18 % tahun 2019 sampai menjadi 28,28% di tahun 2022, namun tahun 2023 turun pada angka 15,27 %. Untuk pencapaian pemasangan rambu-rambu lalu lintas masih sangat jauh dari yang diharapkan dikarenakan adanya rasionalisasi/*refocussing* anggaran akibat pandemi covid-19. Sedangkan sesuai dengan peruntukan dan manfaatnya, rambu lalu lintas sangat membantu dalam kelancaran lalu lintas di dalam kota dan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas.

2.3.2.10. Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika dalam era globalisasi saat ini sangat penting dan strategis dalam memenuhi tuntutan

masyarakat akan adanya akses informasi yang cepat,akurat dan mudah dijangkau terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik serta terselurnya aspirasi masyarakat. Realisai Kinerja Pada urusan Komunikasi dan Informatika sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2.142
Realisasi Kinerja Komunikasi dan Informatika
Tahun 2019 – 2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Cakupan Layanan Telekomunikasi					
1	Luas Wilayah Yang Tercoverage	670	670	670	670	670
2	Luas Wilayah Keseluruhan	730,62	730,62	730,62	730,62	730,62
3	Cakupan Layanan Telekomunikasi	91,70%	91,70%	91,80%	91,90%	97,61%
B	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon					
1	Jumlah penduduk menggunakan HP/telepon	114,270	114,300	114,300	114,400	114,500
2	Jumlah Penduduk	106.899	116.323	117.079	118.023	118.946
3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	106,89	98,26	97,63	96,93	92,26
C	Proporsi rumah tangga dengan akses internet					
1	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses internet	34,280	34,320	34,330	34,390	35,000
2	Jumlah rumah tangga	38,366	38,870	39,306	39,360	39,500
3	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	88	88,2	88,2	88,5	88
D	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi					
1	Jumlah rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	25,350	25,400	25,420	25,500	25,600
2	Jumlah rumah tangga	38,366	38,872	38,877	39,360	40,000
3	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	65%	65,34%	65,35%	70,00%	72%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informasi Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2024

Untuk fasilitas telepon seiring dengan perkembangan teknologi untuk jaringan tetap (jaringan telepon lokal, SLI, SLJJ, dan tertutup) mengalami kecenderungan menurun. Tetapi untuk jaringan bergerak yakni satelit dan telepon seluler mengalami perkembangan cukup pesat. Jangkauan komunikasi saat ini tidak menjadi suatu permasalahan, melalui layanan jaringan bergerak yang ditawarkan oleh perusahaan penyedia jaringan telepon antara lain Telkomsel, Indosat, XL, Axis, Tri, dll pelanggan secara cepat dapat menggunakannya. Dimana sampai tahun 2023 Persentase

penduduk yang menggunakan HP sebanyak 92,26 % menurun dibandingkan tahun 2019 sampai tahun 2022. Untuk proporsi rumah tangga dengan akses internet sampai tahun 2023 menjadi 88 % sama dengan tahun 2019, menurun bila dibandingkan tahun 2020 sampai 2022.

Program yang dilaksanakan untuk meningkatkan aksesibilitas informasi dengan pengembangan jaringan informasi dan pengendalian terhadap prasarana komunikasi. Pengendalian dan pengawasan pembangunan menara telekomunikasi dilaksanakan melalui kegiatankegiatan: pemberian fasilitasi perijinan berdasarkan verifikasi titik koordinat bakal calon lokasi menara telekomunikasi oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi, monitoring eksisting menara telekomunikasi untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan yang mungkin ada di lapangan, pemungutan retribusi menara telekomunikasi. Monitoring menara telekomunikasi dilaksanakan dengan melakukan verifikasi data menara dan memberikan stiker pengawasan yang mencantumkan data menara dan informasi kepada pemilik menara terhadap tindak lanjut hasil pengawasan.

2.3.2.11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK) serta Koperasi merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian. Daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif di Kabupaten Minahasa Tenggara adalah daya saing UMK pada sektor pertanian, barang dan jasa serta koperasi. UMK menjadi satu sektor yang memiliki peran strategis terhadap perekonomian Kabupaten Minahasa Tenggara. Urusan Koperasi, UMKM sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat seperti yang ditunjukkan pada table 2.143.

Tabel 2.143
Jumlah Koperasi Aktif Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Persentase koperasi aktif					
1	Jumlah koperasi aktif	156	156	168	192	213
2	Jumlah seluruh koperasi	330	330	342	353	359
3	Persentase koperasi aktif	47,2	47,2	49,1	54,4	59.3

Sumber : Dinas Koperasi UKM Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2024

Capaian kinerja koperasi 5 tahun terakhir mengalami peningkatan dimana persentase koperasi aktif tahun 2019 sebesar 46,8 % terus mengalami peningkatan hingga menjadi 59,3 % di tahun 2023.

Untuk usaha mikro dan kecil dari data Tabel 2.144 terlihat sangat dominan dari jumlah seluruh Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Minahasa Tenggara dari data tahun 2019 - 2023 dapat dilihat persentasi usaha kecil dan menengah meningkat ditahun 2019 sebesar 98,66 % menjadi 99,9 % ditahun 2023 namun ada penurunan di tahun 2022 menjadi 96,67 %.

Tabel 2.144
Capaian Kinerja Urusan Usaha Kecil Dan Menengah
Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Persentase Usaha Mikro dan Kecil					
1	Jumlah usaha mikro dan kecil	3.168	3.478	3.478	3.695	3.835
2	Jumlah seluruh UKM	3.211	3.521	3.521	3.822	3.840
3	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	98,66	98,77	98,77	96,67	99.9

Sumber : Dinas Koperasi UKM Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2024

2.3.2.12. Penanaman Modal

Perkembangan jumlah investor di Kabupaten Minahasa Tenggara menunjukkan angka yang berfluktuatif di 5 tahun terakhir, begitupun dengan jumlah investasi. Hal ini menunjukkan sebenarnya nilai investasi terutama untuk yang PMA masih dapat dioptimalkan dan masih dapat ditingkatkan lagi. Realisasi Kinerja urusan Penanaman Modal sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2.145
Realisasi Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)					
1	Jumlah investor berskala nasional PMDN	5	184	168	326	566
2	Jumlah investor berskala nasional PMA	-	3	0	1	-
B	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)					
1	Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN	4.950.000.000	21.749.200.000	20.942.900.000	895.939.331.889	275.532.387.268
2	Jumlah nilai	0	32.500.000.000	0	10.050.000.000	-

RKPD 2025						
NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
	investasi berskala nasional PMA					
C Rasio daya serap tenaga kerja						
1	Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMDN/PMA					
2	Jumlah seluruh PMA/PMDN	5	187	168	327	2.199
3	Rasio daya serap tenaga kerja					
D Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)						
1	Realisasi PMDN Tahun evaluasi – Realisasi PMDN Tahun sebelum evaluasi	-1.182.500.000	16.799.200.000	-806.300.000	885.046.431.889	-13.920.654.890
2	Realisasi PMDN sebelum evaluasi	16.132.500.000	4.950.000.000	21.749.200.000	20.942.900.000	144.714.300.000
3	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)(1:2 X100)	69	339	3,7	4.225	-96,1

Sumber : DPMPTSP Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2024

Jumlah investor berskala nasional baik PMDN maupun PMA demikian pula dengan nilai investasi dari tahun 2019 sampai tahun 2023 berfluktuasi, ditahun 2023 khusus untuk PMDN mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya yaitu mencapai 566 investor.

2.3.2.13. Kepemudaan dan Olahraga

Pemerintah akan terus meningkatkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Minahasa Tenggara mengingat jumlah gelanggang olahraga yang dimiliki pemerintah sampai saat ini masih belum bertambah. Upaya lain yang dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat melalui olahraga dilakukan dengan menambah jumlah dan mengoptimalkan lapangan olahraga di setiap wilayah/ kecamatan. Realisasi Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat seperti yang ditunjukkan pada tabel-tabel berikut :

Tabel 2.146
Realisasi Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Tahun 2020-2023

NO	URAIAN	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
A	Persentase organisasi pemuda yang aktif				
1	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	16 OKP	16 OKP	65 OKP	70 OKP
2	Jumlah seluruh organisasi pemuda	20 OKP	20 OKP	80 OKP	85 OKP
3	Persentase organisasi pemuda yang aktif	80%	80%	81,2%	82,3%
B	Persentase wirausaha muda				
1	Jumlah wirausaha muda	249	249	1175	1205
2	Jumlah seluruh wirausaha muda	850	1050	1.300	1.350
3	Persentase wirausaha muda	29,29%	23,71%	90,38%	89,26%
C	Cakupan pembinaan olahraga				
1	Jumlah cabang olahraga yang dibina	9	9	13	13
2	Jumlah seluruh cabang olahraga yang terdaftar	15	16	20	21
3	Cakupan pembinaan olahraga	60%	56,25%	65%	62 %
D	% Pelatih yang bersertifikasi				
1	Jumlah pelatih bersertifikat	9	45	40	40
2	Jumlah seluruh pelatih	25	56	65	65
3	Cakupan pelatih yang bersertifikat	36%	80,35%	61,53%	61,53%

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2024

Data yang tersaji menggambarkan ada peningkatan kinerja dalam urusan kepemudaan dan olahraga diantaranya terkait dengan jumlah organisasi pemuda aktif yakni baru 16 OKP ditahun 2020 meningkat signifikan ditahun 2023 menjadi 70 OKP mengindikasikan bahwa minat pemuda untuk terlibat dalam organisasi dan pembangunan cukup tinggi. Demikian pula dalam jumlah wirausahawan muda dari 249 di tahun 2020 menjadi 1.350 ditahun 2023.

Pemerintah akan terus meningkatkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Minahasa Tenggara mengingat jumlah gelanggang olahraga yang dimiliki pemerintah sampai saat ini masih belum bertambah. Upaya lain yang dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat melalui olahraga dilakukan dengan menambah jumlah dan mengoptimalkan lapangan olahraga di setiap wilayah/ kecamatan.

2.5.2.14. Statistik

Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar untuk Statistik sebelumnya dilaksanakan melalui Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan melaksanakan kegiatan penyusunan dan

analisa data dan informasi perencanaan pembangunan. Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara telah menyusun buku PDRB Kabupaten Minahasa Tenggara dan buku Kabupaten Minahasa Tenggara Dalam Angka. Realisasi kinerja urusan statistik sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat seperti yang ditunjukkan pada tabel-tabel berikut :

Tabel 2.147
Realisasi Kinerja Urusan Statistik
Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku "PDRB"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Kominfo SP Tahun 2024

2.5.2.15. Persandian

Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait etika profesi sandi. Pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi di Kabupaten Minahasa Tenggara bertujuan untuk menciptakan harmonisasi dalam melaksanakan persandian untuk pengamanan informasi antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah serta meningkatkan komitmen, efektivitas, dan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi.

Tabel 2.148
Realisasi Kinerja Urusan Persandian
Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah	43	43	43	43	43
2	Jumlah Total Perangkat Daerah	43	43	43	43	43
3	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kominfo SP Tahun 2024

2.3.2.16. Kebudayaan

Urusan kebudayaan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara. Pengembangan kesenian memberikan warna tersendiri dengan adanya penyelenggaraan festival seni dan budaya serta tetap eksisnya grup-grupkesenian yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara. Target dan capaian indikator kinerja urusan kebudayaan sampai tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.149
Realisasi Kinerja Urusan Kebudayaan
Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Penyelenggaraan festival seni dan budaya					
1	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	1 Iven	-	-	-	1 Iven
B	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	2	2	-	-	-
C	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan					
1	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	30	36	38	38	39
2	Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah	38	38	40	41	41
3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	78,95	94,74	95	92,68	95,12
D	cagar budaya yang dikelola secara terpadu					
1	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2024

Capaian kinerja urusan kebudayaan dapat dilihat dari jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya yang perlu dilaksanakan lagi pada tahun berikutnya. Untuk itu diperlukan fasilitas yang representatif sesuai standar pagelaran. Hal yang perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah yaitu kurang tertariknya minat generasi muda terhadap seni dan budaya lokal, untuk itu pemerintah berupaya menumbuhkan minat generasi muda dengan selalu mencoba melibatkan dan memperkenalkan budaya lokal melalui kegiatan atraksi seni dan budaya yang lebih atraktif serta kreatif antara lain melalui media sekolah, lembaga kepemudaan dan sanggar seni budaya.

2.3.2.17. Perpustakaan

Perpustakaan di Kabupaten Minahasa Tenggara terdiri dari satu perpustakaan daerah dan layanan perpustakaan keliling. Kegiatan

peningkatan pelayanan perpustakaan dilakukan pada pelayanan perpustakaan di kantor perpustakaan dan layanan perpustakaan keliling. Jumlah pengunjung perpustakaan yang menggambarkan budaya baca di daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.150
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun, Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 Tahun	1.405 orang	36 orang	100 Orang	210 Orang	2.565 Orang
2	Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani	63.000 orang	63.000 orang	63.000 orang	63.000 orang	63.000 orang
3	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun %	2,23	0,06	0,16	0,33	4,071

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2024

Jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Minahasa Tenggara cenderung mengalami penurunan. Data lima tahun terakhir jumlah kunjungan berfluktuasi dimana untuk tahun 2019 jumlah pengunjung sebanyak 1.405 orang menurun tajam ditahun 2020 yang hanya 36 orang namun terus mengalami peningkatan mulai tahun 2021 sampai tahun 2023 dimana yang berkunjung sejumlah 2.565 orang pengunjung. Hal ini mengindikasikan bahwa minat budaya baca di Kabupaten Minahasa Tenggara mengalami kenaikan. Penurunan budaya baca di perpustakaan diakibatkan oleh pandemi Covid 19 hingga ditutupnya sarana dan prasaran pemerintah dan juga pengaruh kemajuan teknologi saat ini dimana masyarakat cenderung menggunakan internet melalui android untuk memperoleh informasi dari pada sekedar membaca buku di perpustakaan

Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara lewat Dinas Kearsipan dan Perpustakaan terus berupaya untuk menarik minat baca masyarakat dengan menambah buku yang variatif dan koleksi baru. Jumlah koleksi judul buku sampai dengan tahun 2023 sebanyak 3.198 buku yang tersedia dan Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di Perpustakaan daerah sebanyak 7.200 sampai dengan tahun 2023, sebagaimna terlihat pada tabel 2.151.

Tabel 2.151
Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan daerah	1.704	1.704	1.698	2.448	3.198
2	Jumlah koleksi jumlah buku yang	4.365	4.365	4.200	5.700	7.200

RKPD 2025						
	tersedia di Perpustakaan daerah					
3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	39,04	39,04	40,43	42,95	44,42

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2024

Dari data diatas jumlah koleksi buku yang tersedia pada tahun 2023 di perpustakaan tersedianya koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah sebesar 44,42 %.

Tabel 2.152
Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah perpustakaan	263	263	263	263	321
2	Jumlah penduduk	106.303	116.323	117.079	118.023	118.946
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	0,25	0,23	0,22	0,22	0,27

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2024

Dari data diatas bahwa jumlah perpustakaan sejak tahun 2019 sampai tahun 2022 cenderung stabil di angka 263 jumlah perpustakaan sedangkan rasio perpustakaan per satuan penduduk hingga pada tahun 2022 yaitu 0,22% nanti tahun 2023 jumlah perpustakaan meningkat menjadi 321 dengan rasio 0,27 %.

Tabel 2.153
Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Rata-rata jumlah pengunjung pepustakaan/tahun	1.405 orang	36 orang	101 orang	105 orang	788 orang

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2024

Rata-rata jumlah pengunjung pepustakaan selama setahun diperpustakaan Kabupaten Minahasa Tenggara berfluktuasi sampai 2023 dimana tahun 2019 sebanyak 1.405 orang turun drastic di tahun 2020 dengan hanya 36 orang akibat adanya pandemic covid 19. Selanjutnya semenjak tahun 2021 mulai mengalami peningkatan menjadi 101 orang, tahun 2022 berjumlah 105 orang dan terakhir ditahun 2023 menjadi 788 orang. Harus diakui memang proses menuju transformasi digital, oleh sebab itu Dinas Kearsipan dan Perpustakaan akan melaksanakan transformasi digital dalam rangka menjawab akses perpustakaan yang memadai.

Tabel 2.154
Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	1.704	1.704	1.698	2.448	3.198

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2024

Koleksi judul buku perpustakaan di Minahasa Tenggara berfluktuasi dimana tahun 2019 dan 2020 sama sebanyak 1.704, sedangkan tahun 2021 mengalami penurunan sebanyak 1.698 diakibatkan beberapa buku yang sudah tidak layak untuk digunakan, namun meningkat lagi tahun 2022 menjadi 2.448 dan terakhir tahun 2023 menjadi 3.198 judul buku.

Tabel 2.155
Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat	1	1	0	0	0
2	Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai	1	1	0	0	0
3	Persentase Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	100	100	0	0	0

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2024

Untuk menambah kunjungan di Perpustakaan diperlukan jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat untuk memberikan pelayanan yang maksimal bagi pengunjung perpustakaan. Dimana sampai tahun 2020 Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat baru 1 orang, sedangkan tahun 2021 sampai 2023 jumlah pustakawan 0 diakibatkan telah pensiun.

2.3.2.18. Kearsipan

Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip dalam suatu system kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta pendampingan dan monitoring penerapan penggunaan sistem pola baru yang dikembangkan dengan sistem aplikasi kearsipan berbasis IT sesuai dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Tabel 2.156
Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku
Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan arsip secara baku arsip secara baku	43	43	43	43	43
2	Jumlah Perangkat Daerah	43	43	43	43	43
3	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2024

Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku dari tahun 2019 sampai tahun 2023 mencapai 43 Perangkat Daerah.

Tabel 2.157
Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Tahun 2018-2022

NO	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	-	1	-	1	1

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2024

Untuk pengelolaan arsip sesuai dengan pola baru diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kompeten pada kearsipan atau yang pernah dilaksanakan. Tabel diatas menunjukan jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan Kabupaten Minahasa Tenggara. Pada tahun 2019 dan 2021 tidak pernah melakukan Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan dan pada tahun 2020, 2022 dan 2023 ada 1 (satu) kali kegiatan, dan pada tahun 2021 tidak bisa dilaksanakan karena ada peningkatan Covid 19 di Kabupaten Minahasa Tenggara.

2.3.3. Layanan Urusan Pilihan

2.3.3.1. Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis di Kabupaten Minahasa Tenggara. Selain sebagai lokomotif penggerak peningkatan perekonomian masyarakat, sektor ini juga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besarnya kontribusi sektor ini sangat tergantung pada jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Minahasa Tenggara. Meningkatnya jumlah wisatawan ke Kabupaten Minahasa Tenggara akan meningkatkan PAD dari sektor pariwisata.

Tabel 2.158

Capaian Kinerja Pariwisata Kabupaten Minahasa Tenggara

Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Kunjungan wisata					
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	48.245	321	4.566	61.822	36.243
2	Jumlah Kunjungan Wisatawan mancanegara	612	34	0	99	928
B	Lama kunjungan Wisata					
1	Rata-rata kunjungan wisata dalam satu tahun	1 Hari	1 Hari	1 Hari	1 hari	1 hari
	Rata-rata kunjungan wisata dalam satu tahun	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari
C	PAD sektor pariwisata					
1	PAD sektor pariwisata	30.391.000	10.812.000	19.155.000	42.888.000	26.957.000

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2024

Jika dilihat dari sisi jumlah daya tarik wisata dan usaha pariwisata menunjukkan perkembangan yang cukup baik, dalam arti terdapat penambahan yang cukup signifikan dalam jumlah daya tarik wisata budaya dan usaha pariwisata dalam bentuk restoran/rumah makan sampai tahun 2022 walaupun agak menurun di tahun 2023. Tapi tetap diperlukan upaya yang lebih komprehensif baik melalui penggalian sumberdaya wisata baru, peningkatan kerjasama pengembangan pariwisata, maupun peningkatan promosi investasi dan kemitraan di bidang pariwisata untuk membangun kepariwisataan Kabupaten Minahasa Tenggara di masa mendatang.

2.3.3.2. Pertanian

Tujuan pembangunan pertanian sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024, adalah meningkatkan pemantapan ketahanan pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, meningkatkan kehidupan petani dan keluarganya yang lebih baik dan sejahtera, serta meningkatkan kualitas SDM dan Prasarana.

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara telah melaksanakan pembangunan pertanian dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada, yaitu pemanfaatan teknologi pertanian, SDM pertanian dan sarana produksi yang memadai.

Perkembangan pertanian di Minahasa Tenggara dapat dilihat dari kontribusi sub kategori pertanian terhadap perekonomian Minahasa Tenggara dan produktivitas serta hasil produksi pertanian di Minahasa Tenggara, sebagaimana dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Tabel 2.159
Capaian Kinerja Urusan Pertanian
Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Kontribusi PDRB dari sektor pertanian/ perkebunan					
1	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian/ perkebunan (juta rupiah)	894.610,71	1.044.900,65	1.548.765,92	1.319.372,89	1.230.146,732
2	Jumlah PDRB (juta rupiah)	5.112.061,2	5.213.518,9	5.623.625	6.147.380	6.719.970
3	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	17,5	20,04	27,54	21,46	18,30
B	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB					
1	Jumlah Kontribusi sektor pertanian (palawija)	214.264	260.548,6	554.435,1	784.371,91	876.501,53
2	Jumlah PDRB	894.610,71	1.044.900,65	1.548.765,92	1.319.372,89	1.230.146,732
3	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	23,95	24,93	35,79	59,45	71,25
C	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB					
1	Jumlah Kontribusi perkebunan (tanaman keras)	277.968,55	367.048,85	522.392,88	365.653,69	237.089,24
2	Jumlah PDRB sektor pertanian/ perkebunan	894.610,71	1.044.900,65	1.548.765,92	1.319.372,89	1.230.146,732
3	Kontribusi sektor pertanian (tanaman keras) terhadap PDRB	31,07	35,13	33,73	27,71	19,27
D	Produksi Sektor Pertanian					
	Jumlah produksi komoditas pertanian/ ton	125.092	139.537,4	149.654,3	101.638,16	105.425,52
E	Produksi Sektor Perkebunan					
	Jumlah produksi komoditas perkebunan/ton	36.699,79	34.832,77	37.642,52	38.426,97	29.478,9
F	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB					
1	Jumlah Produksi padi/bahan pangan utama local hasil kelompok petani (ton)	30.931	44.209	30.750	17.700	15.081
2	Jumlah produksi padi/bahan pangan utamadi daerah (ton)	55.887,8	56.011,2	57.575,9	53.073,40	45.309,2
3	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	55,34	78,92	53,40	33,35	33,28
G	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar					
1	Produksi Padi (Ton)	55.887,8	56.011,2	57.575,9	53.073,40	45.309,2
2	Luas Area Tanaman Padi (Ha)	11.363,77	11.086	11.041,8	10.313,5	9.103
3	Produktivitas padi	4,91	5,05	5,76	5,14	5,13

RKPD 2025						
NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
4	Produksi Jagung (Ton)	68.799,2	81.532,2	89.295,6	66.670,7	72.833,7
5	Luas Area Tanaman Jagung (Ha)	19.975,2	26.333	29.132	15.256,45	17.869
6	Produktivitas jagung	3,44	3,09	3,1	4,2	3,96
H	Cakupan bina kelompok petani					
1	Jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan pemda	5	1	51	22	63
2	jumlah kelompok tani	1232	1412	1635	1722	1.749
3	Cakupan bina kelompok petani	0,40	0,07	3,12	1,27	3,60
I	Nilai Tukar Petani					
	Nilai Tukar Petani	94,33	98,8	110,8	110,51	112,84

Sumber : Dinas Pertanian Tahun 2024

Kontribusi sub sektor pertanian di Minahasa Tenggara terhadap PDRB Minahasa Tenggara dari tahun ke tahun relatif berfluktuatif yaitu tahun 2019 sebesar 17,5 % meningkat di tahun 2020 sebesar 20,04% meningkat lagi di tahun 2021 menjadi 27,54, namun di tahun 2022 turun menjadi 21,46% dan kembali turun di tahun 2023 menjadi 18,30 %. Hal ini dikarenakan naik turunnya produksi komoditi pertanian dari tahun 2019-2023 khususnya padi dan jagung sehingga mempengaruhi angka kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB.

Pada tahun 2019 produksi padi sebesar 55.887,8 ton dengan luas areal tanaman padi sebesar 11.362,77 ha dengan produktivitas sebanyak 4,91 ton/ha meningkat di tahun 2020 menjadi 56.011,2 ton dengan luas areal tanaman padi 11.086 ha, sehingga produktivitas padi sebesar 5,05 ton/ha. Tahun 2021 produksi padi sebesar 57.575,9 ton dengan luas areal tanaman padi 11.041,8 Ha, sehingga produktivitas padi sebesar 5,76 ton/ha kemudian tahun 2022 produksi padi sebesar 53.073,40 ton dengan luas areal tanaman padi 10.313,5 Ha sehingga produktivitas padi sebesar 5,14 ton/ha dan terakhir tahun 2023 produksi padi sebanyak 45.309,2 ton dengan luas areal tanaman padi 9.103 ha sehingga produktivitas sebesar 5,13 ton/ha.

Selain tanaman padi, komoditas yang termasuk tanaman pangan adalah jagung. Produksi jagung pada tahun 2019 sebesar 68.799,2 ton meningkat di tahun 2020 menjadi sebesar 81.532,2 ton dan mengalami kenaikan sebesar 7.763,4 ton pada tahun 2021 menjadi 89.295,6 ton, namun di tahun 2022 turun menjadi 66.670,7 ton dan terakhir meningkat lagi di tahun 2023 menjadi 72.833,7 ton.

2.3.3.3. Kehutanan

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang berupa hutan, yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum mengenai status kawasan hutan, letak batas dan luas suatu wilayah tertentu yang sudah ditunjuk menjadi kawasan hutan tetap. Saat ini urusan kehutanan sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Secara umum Urusan Kehutanan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.160
Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun 2023

No.	Kawasan	Luas (Ha)	Keterangan
1	HPT Gn. Surat	14. 430,26	Sesuai SK.359. MENLHK.SETJEN.PLA.0. 7. 2021 Tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Provinsi Sulawesi Utara
2	HP S Ranoyapo	2.330,06	
3	HL Gn Sopotan	4.899,76	
4	HL Gn Kawatak	663.27	
5	HL Tg Popaya	439,82	
6	HL Pulau Bentenan	125.33	
7	HL Pulau Babi I dan II	31,83	
8	HL Tg. Kerak Bobong I, II, III	274,68	
9	HL Pulau Hogouw	13.59	
10	HL Pulau Tanjung Putus I, II, III	6.50	
11	HL S Buyat	132.17	
	Jumlah	23.347,27	

Sumber : UPTD KPH Wilayah V Tahun 2024

2.3.3.4. Energi Sumber Daya Mineral

Pada tahun 2019 persentase rumah tangga pengguna listrik tercatat sejumlah 66,21 % terus mengalami peningkatan sampai tahun 2023 menyentuh pada angka % pelanggan listrik PLN yang tersebar di 12 Kecamatan. Untuk tahun 2019 sampai 2023 indikator Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik dan Rasio Ketersediaan Daya Listrik dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel.2.161
Indikator Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik dan Rasio Ketersediaan Daya Listrik Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
----	--------	------------	------------	------------	------------	------------

 RKPD 2025 						
1.	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik (%)	66,21	70,68	73,66	75,91	78,34
2.	Rasio Ketersediaan Daya Listrik (MegaWatt)	16,4	16,3	17	17,6	18,1

Sumber : PLN Cab. Minahasa Tenggara Tahun 2024

2.3.3.5. Perdagangan

Perdagangan di Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan salah satu sektor/kategori yang memberikan kontribusi dalam perekonomian Minahasa Tenggara,hal ini ditunjukkan dengan perkembangan jumlah pasar yang terbangun selama ini.

Kondisi pasar yang baik dan semakin bertambahnya jumlah pasar diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian di Kabupaten Minahasa Tenggara. Untuk menumbuhkan pusat-pusat kegiatan ekonomi, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara juga melakukan pembangunan pasar-pasar tradisional modern. Jumlah pasar yang terbangun di Kabupaten Minahasa Tenggara sejak tahun 2019 sampai tahun 2023 berjumlah 1 pasar. Hal ini disajikan pada tabel dibawah ini berikut:

Tabel 2.162
Jumlah Pasar Yang di Bangun
Tahun 2018-2023

Perdagangan	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Pasar yang dibangun	1	0	0	0	0

Sumber : DKUKMPP Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2024

Untuk meningkatkan jumlah pedagang/usaha informal diperlukan pengadaan bantuan bagi UKM. Tahun 2020 jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapat bantuan sebanyak 254 dan tahun 2021 sebanyak 319 kemudian untuk tahun 2022 dan 2023 tidak ada kelompok yang mendapatkan bantuan binaan.

Tabel 2.163
Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal
Tahun 2020-2023

NO	URAIAN	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan pemda	254	319	0	0

Sumber : DKUKMPP Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2024

Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB dalam selang waktu tahun 2019-2023 mengalami kenaikan, dimana tahun 2019 berada pada 7,48 % ditahun 2023 menjadi 8,73%.

Tabel 2.164
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB
Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Perdagangan	401.061,1	419.25,2	45.,492,5	506.350	567.198,5
2	Jumlah PDRB	5.112.061,2	5.213.518,9	5.623.625	6.147.384	6.719.977
3	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	7,48	7,44	7,42	7,58	7,73

Sumber : Minahasa Tenggara Dalam Angka Tahun 2024

2.3.3.4. Industri

Pembangunan urusan industri diarahkan untuk menumbuh kembangkan industri secara intensif dengan mengutamakan industri/usaha kecil dan menengah melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan sumber daya manusia. Perkembangan urusan industri dapat dilihat dari beberapa variabel yaitu kontribusi sektor industri terhadap PDRB dan pertumbuhan industri. Perkembangan pelayanan pada urusan industri dapat dilihat dari perkembangan jumlah industri dan jumlah kelompok pengrajin yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Tabel 2.165
Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB
Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor industri	234.808,4	260.485,4	296.025,6	334.216,8	366.924,3
2	Jumlah PDRB	5.112.061,2	5.213.518,9	5.623.625	6.147.384	6.719.977
3	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	4,72	4,94	5,09	5,22	5,25

Sumber : Minahasa Tenggara Dalam Angka Tahun 2024

Pada tabel 2.165 dapat dilihat jumlah kontribusi PDRB dari sektor industri terhadap jumlah PDRB yang menghasilkan angka kontribusi sektor industri terhadap PDRB. Pada poin jumlah Kontribusi PDRB dari Sektor Industri mengalami kenaikan dari tahun ke tahun yaitu sebesar Rp 234.808,4 pada tahun 2019, menjadi Rp. 6.719.977 pada tahun 2023. Apabila melihat jumlah kontribusi PDRB dari sektor industri terhadap Jumlah PDRB yang juga

meningkat dari tahun ke tahun dapat dihasilkan angka Kontribusi sektor industri terhadap PDRB.

Tabel 2.166
Jumlah IKM Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah IKM	827	841	847	1.309	1.350

Sumber : DKUKMPP Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2024

Pembangunan urusan industri diarahkan untuk menumbuh kembangkan industri secara intensif dengan mengutamakan industri/usaha kecil dan menengah melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan sumber daya manusia. Perkembangan urusan industri dapat dilihat dari beberapa variabel yaitu kontribusi sektor industri terhadap PDRB dan pertumbuhan industri.

Semakin bertambahnya jumlah IKM dan industri kecil menimbulkan tuntutan baru terhadap dibutuhkannya sentra-sentra usaha ekonomi dalam mempermudah pemasaran dari produk-produk yang dihasilkan. Selain itu sentra ekonomi juga mempunyai fungsi untuk meningkatkan transaksi penjualan.

Hal lain yang menjadi tuntutan kebutuhan yaitu terkait kemudahan pelaku usaha ekonomi untuk mengakses permodalan dalam upaya pengembangan produk dan hasil usahanya khususnya untuk industri-industri kecil dan menengah yang jumlahnya saat ini sesuai data terakhir tahun 2023 sebanyak 1.350.

2.3.3.4. Transmigrasi

Trasmigrasi, sampai pada saat ini, belum ada Transmigran yang bertambah, malahan ada keluarga-keluarga yang sudah meninggalkan lokasi transmigrasi. Karena itu saat ini pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara sedang menyusun program transmigrasi lokal untuk mengganti para transmigran yang sudah kembali ke daerah asal mereka sebanyak 50 Kepala Keluarga.

Tabel 2.167
Perkembangan Data Indikator Capaian Kinerja
Bidang Transmigasi Tahun 2019 – 2022

NO	INDIKATOR	SATUAN	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Transmigran yang di tempatkan	KK	50	50	50	50
2	Jumlah Transmigran	Jiwa	50	50	10	15

2.3.3.5. Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2020-2024, sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan dijabarkan dalam empat misi yakni :

1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia kelautan dan perikanan dan pengembangan inovasi dan riset kelautan dan perikanan.
2. Peningkatan kontribusi ekonomi sector kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional.
3. Peningkatan kelesatarian sumber daya kelautan dan perikanan
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Perkembangan kelautan dan perikanan di Kabupaten Minahasa Tenggara dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Tabel 2.168
Produksi Perikanan Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Produksi Ikan (Ton)	31.835	17.791,99	25.359,43	32.566	32.099
2	Target Daerah (Ton)	30.400	30.950	30.667	32.000	33.600
	Produktivitas perikanan	104,72	57,49	83	102	96

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2024

Berdasarkan data produksi Perikanan pada Tabel. 2.168 diatas dapat disajikan bahwa jumlah produksi perikanan sampai dengan 2023 yaitu 32.099 ton mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 yaitu 35.566 ton. Oleh karena perlu adanya upaya peningkatan produktivitas dengan pemanfaatan teknologi tepat guna, penyuluhan dan pendampingan yang intensif sehingga pada tahun 2024 jumlah produksi perikanan dapat meningkat lagi.

Untuk tingkat konsumsi ikan Kabupaten Minahasa Tenggara pada tahun 2023 sebesar 110 kg/kapita/thn mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022 sebesar 102 kg/kapita/thn. Upaya memasyarakatkan gemar makan ikan terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara

baik melalui sosialisasi /penyuluhan dan pelatihan diversifikasi pangan berbahan baku ikan. Perkembangan tingkat konsumsi ikan disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.169
Konsumsi Ikan Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Konsumsi Ikan (Kg)	67,25	60,42	63.20	57	64
2	Target Daerah (Kg)	50	52	53	56	58
3	Konsumsi ikan	134,5	116,19	119,25	102	110

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2024

Pada tabel 2.169 tentang Konsumsi Ikan 2019-2023 Jumlah Konsumsi Ikan terhadap Target Daerah dari tahun ke tahun berfluktuatif. Untuk melihat prosentase konsumsi ikan ($\text{Jumlah konsumsi ikan : target daerah} \times 100$) kita dapat memperoleh angka yang tertera dalam tabel diatas.

Tabel 2.170
Cakupan Bina Kelompok Nelayan Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemda Tahun	26	17	26	87	1
2	Jumlah kelompok nelayan	87	115	115	132	135
3	Cakupan bina kelompok nelayan	29,89	14,78	22,61	66,91	0,74

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2024

Cakupan bina kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan dari tahun 2019–2023 tertuang dalam table 2.170 diatas, terdiri dari jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemda. Jumlah kelompok nelayan dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa cakupan bina kelompok nelayan dari tahun ke tahun mengalami tren yang fluktuatif. Hal ini di dasarkan kepada jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan dari tahun ke tahun tergantung pada alokasi anggaran yang tersedia di Pemda baik melalui APBN maupun APBD serta kelompok-kelompok nelayan yang mengusulkan proposal yang di verifikasi dan divalidasi oleh pusat.

Tabel 2.171
Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Produksi Ikan (Ton) kontribusi hasil kelompok nelayan	993,8	1.393,28	1.424,25	1.450	1469

 RKPD 2025 						
2	Jumlah produksi ikan di daerah	31.835	17.791,99	18.825,05	28.988	28.488
	Produksi perikanan kelompok nelayan	3,12	7,83	7,57	5	5

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2024

Produksi perikanan kelompok nelayan tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada tabel 2.171 dimana Jumlah produksi Ikan kontribusi hasil kelompok nelayan terhadap Jumlah produksi ikan di daerah dikalikan dengan 100% memperoleh angka Produksi perikanan kelompok nelayan dari tahun 2019-2023 tren yang fluktuatif.

2.3.4. Fokus Fungsi Penunjang

2.3.4.1.Perencanaan Pembangunan

Pada tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara telah menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025 dengan Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 8 tahun 2014 yang kemudian dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Minahasa Tenggara ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 tahun 2023, tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 sehingga dengan ditetapkan dokumen perencanaan tersebut dalam peraturan Bupati, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara telah memiliki dokumen perencanaan yang memiliki kekuatan hukum.

Tabel 2.172
Perencanaan Pembangunan Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100	100	100	100	100
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100	100	100	100	100

RKPD 2025						
NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW (%)	80	85	98	100	100

Sumber : Bappeda Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2024

2.3.4.2. Keuangan

Belum optimalnya upaya peningkatan potensi pendapatan daerah terutama dari pajak daerah, terutama dari sisi kesadaran wajib pajak, keterbatasan SDM pemeriksa pajak dan Perda Pajak daerah yang sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Masih kurangnya pengelolaan dan tertib keuangan daerah yang ditunjukkan dengan masih sering terlambatnya pelaporan keuangan daerah, belum optimalnya integrasi sistem pengelolaan keuangan on line, juklak juknis Dana DAK yang selalu terlambat, dan masih banyaknya permintaan pembayaran yang bertumpu di akhir tahun. Pengelolaan aset daerah belum optimal terkait dengan masih rendahnya koordinasi antar OPD dalam penghapusan aset daerah dan masih kurangnya tenaga teknis pengukuran aset menggunakan GIS. Dari permasalahan tersebut diatas menyebabkan masih rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah.

Tabel.2.173
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Hasil Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2024

Hasil Opini BPK terhadap Laporan Keuangan selang tahun 2019-2023 menunjukkan bahwa sejak tahun 2019 sampai tahun 2023 Hasil opini BPK adalah Wajar Tanpa Pengecualian.

Tabel 2.174
Persentase SILPA 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2023
1	Total SILPA	70,843,072,528.96	33.517.299.226
2	Total APBD	691,565,753,004.04	614.363.864.553
3	Persentase SILPA	10.24	5,46
NO	URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2022
1	Total SILPA	67.464.080.087,75	33.506.341.003,77
2	Total APBD	777,862,994,369.75	690.937.169.431,17
3	Persentase SILPA	8.67	4,85
NO	URAIAN	TAHUN 2023	
1	Total SILPA	33.517.299.226	

2	Total APBD	614.363.864.553
3	Persentase SILPA	5,46

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2024

Dari Data diatas menunjukkan bahwa Persentase SILPA berfluktuasi dari tahun 2019 - 2023.

Tabel 2.175
Persentase PAD Terhadap Pendapatan
Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020
1	PAD	21.152.244.742,60	17.451.219.839,69
2	Jumlah pendapatan daerah	717,487,942.89,247.60	676.667.945.695,69
3	Persentase PAD terhadap pendapatan	2,94	2,58
NO	URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2022
1	PAD	13.474.846.511,45	13.686.886.392,00
2	Jumlah pendapatan daerah	667.850.883.686,45	674.691.647.584,00
3	Persentase PAD terhadap pendapatan	2,02	2,03
NO	URAIAN	TAHUN 2023	
1	PAD	11.892.582.584,00	
2	Jumlah pendapatan daerah	629.963.149.940,00	
3	Persentase PAD terhadap pendapatan	1,88	

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2024

Berdasarkan tabel 2.175 Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan tahun 2019-2023 fluktuatif.

Tabel 2.176
Persentase Belanja Pendidikan (20%)
Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020
1	Jumlah Belanja Bidang Urusan Pendidikan	141,650,111,565,75	11,754,510,000.00
2	Total APBD	770,365,808,235,40	617,182,250,522.50
3	Persentase belanja pendidikan (20%) (1:2 X100)	18.38	1.90
NO	URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2022
1	Jumlah Belanja Bidang Urusan Pendidikan	73,895,159,962.00	131.211.826.628,00
2	Total APBD	777,862,994,369.75	690.937.169.431,17
3	Persentase belanja pendidikan (20%) (1:2 X100)	9.50	18,99
NO	URAIAN	TAHUN 2023	
1	Jumlah Belanja Bidang Urusan Pendidikan	62.289.484.047	

RKPD 2025			
2	Total APBD	614.363.864.553,00	
3	Persentase belanja pendidikan (20%) (1:2 X100)	10,14	

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2024

Pada tabel 2.176 prosentase belanja pendidikan dari tahun ke tahun mengalami tren yang fluktuatif disesuaikan dengan total APBD yang diperoleh setiap tahun.

Tabel 2.177
Persentase Belanja Kesehatan (10%) 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020
1	Jumlah Belanja Bidang Urusan Kesehatan	97,308,014,303,88	3,499,106,700.00
2	Total APBD	770,365,808,235,40	617,182,250,522.50
3	Persentase belanja kesehatan	12.63	0.57
NO	URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2022
1	Jumlah Belanja Bidang Urusan Kesehatan	19,206,287,000.00	79.663.759.823,00
2	Total APBD	777,862,994,369.75	690.937.169.431,17
3	Persentase belanja kesehatan	2.47	11,53
NO	URAIAN	TAHUN 2023	
1	Jumlah Belanja Bidang Urusan Kesehatan	44.020.147.349	
2	Total APBD	614.363.864.553,00	
3	Persentase belanja kesehatan	7,17	

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2024

Tabel 2.177 menyajikan prosentase belanja kesehatan dari tahun 2019-2023. Alokasi untuk anggaran kesehatan yakni sebesar 10% dari APBD dan dari tahun ke tahun mengalami tren yang fluktuatif dikarenakan Jumlah Belanja Bidang urusan kesehatan terhadap total APBD.

Tabel 2.178
Belanja Langsung Tahun 2019-2021

NO	URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020
1	Jumlah Belanja Langsung	270,599,986,546.04	291,444,762,228.50
2	Total APBD	691,565,753,004.04	617,182,250,522.50
3	Belanja langsung	39.12	47.22
NO	URAIAN	TAHUN 2021	
1	Jumlah Belanja Langsung	232,563,575,558.00	
2	Total APBD	686,536,474,357.00	
3	Belanja langsung	33.87	
NO	URAIAN	TAHUN 2022	TAHUN 2023
1			
2	Total APBD	690.937.169.431,17	612.689.642.536,00
3			

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2024

Belanja langsung sejak tahun 2019-2021 fluktuatif.

Tabel 2.179
Belanja Tidak Langsung Tahun 2019-2021

NO	URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020
1	Jumlah Belanja tidak Langsung	420,965,766,458.00	325,737,488,294.00
2	Total APBD	691,565,753,004.04	617,182,250,522.50
3	belanja tidak langsung	60.87	52.77
NO	URAIAN	TAHUN 2021	
1	Jumlah Belanja tidak Langsung	453,972,898,799.00	
2	Total APBD	686,536,474,357.00	
3	belanja tidak langsung	66.13	
NO	URAIAN	TAHUN 2022	TAHUN 2023
1			
2	Total APBD	690.937.169.431,17	612.689.642.536,00
3			

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2024

Berdasarkan tabel 2.179 tentang belanja tidak langsung trendnya fluktuatif dari tahun 2019-2021.

Tabel 2.180
Penetapan APBD 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2024

Berdasarkan tabel 2.180 penetapan APBD selalu tepat waktu sejak tahun 2019-2023.

2.3.4.3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Fungsi kepegawaian dalam manajemen adalah suatu proses pengelolaan struktur organsasi melalui tahap seleksi, penilaian, dan pengembangan sumber daya manusia yang tepat dan efektif untuk mengisi jabatan. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur, salah satunya melalui pelaksanaan diklat. Untuk melihat kinerja bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan selang waktu 2019-2023 dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 2.181
Kinerja Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan	9 thn	9 thn	9 thn	9 thn	9 thn
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	100	58,34	58,34	100	100
3	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	34	36	37	37	37
4	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	587	911	596	159	305
5	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	1445	1412	1479	231	232
6	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	33,18	7,4	7,4	35,43	46,19

Sumber : BKPSDM Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2024

Dari tabel 2.181 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan
- Pengembangan SDM (development personnel) pada dasarnya merupakan kegiatan terpadu yang dilakukan manajemen dalam rangka meningkatkan nilai tambah pegawai guna meningkatkan produktivitas organisasi dan sekaligus dalam rangka mempersiapkan pegawai untuk melaksanakan tugas pada jenjang yang lebih tinggi. Untuk rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dari tahun ke tahun adalah selama 9 Tahun.
2. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
- Menurut Dr. Nanang Fattah Pendidikan adalah proses seseorang mengembangkan kemampuan, sikap, dan tingkah laku lainnya di dalam masyarakat tempat mereka lahir.

Sedangkan Pendidikan Formal adalah segenap bentuk pendidikan atau pelatihan yang diberikan secara terorganisasi dan berjenjang, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sebanyak 100 %.
3. Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah
- Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi dalam instansi pemerintah, dengan kategori pimpinan utama untuk tingkat pusat, pimpinan madya untuk tingkat provinsi dan pimpinan pratama untuk tingkat kabupaten / kota. Gampangnya, pimpinan tinggi itu setara dengan eselon II di Kabupaten/Kota yang menjadi Sekretaris Daerah (1
- 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

II-141

- jabatan), Sekretaris DPRD (1 jabatan), Kepala Dinas/Badan (29 jabatan), Asisten Sekretaris Daerah (3 jabatan) dan Staf Ahli Bupati (3 jabatan), jumlah jabatan pimpinan tinggi pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara adalah 37 jabatan, dan semuanya telah terisi (tidak ada kekosongan)
4. Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah
- Jabatan administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah Tahun 2023 ada sebanyak 305 jabatan.
5. Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah tahun 2023 sebanyak 232.
6. Persentase Pejabat ASN yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural tahun 2023 sebanyak 46,19 %.

2.3.4.4. Pengawasan

Capaian dalam Urusan Fungsi Penunjang Pengawasan sangat memuaskan. Dalam 5 (empat) tahun terakhir Kabupaten Minahasa Tenggara selalu mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah. Tercapainya tingkat opini tertinggi yang diberikan oleh BPK tersebut menunjukkan efektifnya pelaksanaan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Untuk melihat kinerja bidang pengawasan sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.182
Kinerja Bidang Pengawasan Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah temuan yang ditindaklanjuti	325	558	718	741	767
2	Jumlah total temuan	630	825	903	921	969
3	Persentase tindak lanjut temuan	51,6	67,6	79,51	80,45	79,15
4	Jumlah temuan BPK	17	9	9	9	8

Sumber : Inspektorat Daerah Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2024

Selain peningkatan kapasitas dan kompetensi APIP, diperlukan unsur pengawasan internal guna mendisiplinkan aparatur dalam menindaklanjuti temuan yang ada.

2.3.4.5. Unsur Pendukung

Selama tahun 2019-2023 pelaksanaan fungsi sekretariat Dewan seperti tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.183
Kinerja Pelaksanaan Fungsi Sekretariat Dewan
Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber :Sekretariat DPRD Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja pelaksanaan fungsi Sekretariat DPRD telah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan bahwa telah tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran ke dalam dokumen-dokumen perencanaan.

2.3.4.6. Penelitian dan Pengembangan

Untuk tercapainya kualitas perencanaan perlu didukung penelitian dan pengembangan yang salah satu caranya melalui semakin berkembangnya jejaring /network dengan stakeholder lain yang terkait (pemerintah, swasta, akademisi). Untuk mewujudkan hal tersebut terdapat beberapa kendala antara lain masih terdapatnya kesenjangan antara implementasi dan kebijakan dan belum optimalnya data/informasi dan hasil-hasil kajian penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah.

Tabel 2.184
Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kelitbangan dalam RKPD	4	4	6	12	1

RKPD 2025						
2	Jumlah kelitbangan dalam RPJMD	4	6	6	42	1
3	Persentase implementasi rencana kelitbangan	100	66,6	100	28,57	100

Sumber : Balitbang Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2024

Selama tahun 2019 sampai tahun 2023 pelaksanaan fungsi Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan menghasilkan kinerja yaitu Jumlah kelitbangan dalam RKPD tahun 2023 sebanyak 1, dengan jumlah kelitbangan dalam RPJMD sebanyak 1 buah, menurun dibandingkan dengan tahun 2022. Persentase implementasi rencana kelitbangan tahun 2023 sebesar 100%.

Tabel 2.185
Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti	2	4	4	5	3
2	Jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah	6	6	8	12	5
3	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	33,33	66,67	50,00	41,67	60,00

Sumber : Balitbang Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2024

Pada tahun 2023 persentase pemanfaatan hasil kelitbangan sebesar 60,00 %. Apabila dibandingkan pada tahun 2022, Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan mengalami peningkatan sebesar 18,33%.

Tabel 2.186
Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi	-	7	7	23	13
2	Jumlah total perangkat daerah	-	44	43	43	43
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	-	15	16,27	53,48	30,23

Sumber : Balitbang Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2024

Agar Sistem Inovasi Daerah dapat efektif dan bermakna, seluruh Agenda Kebijakan Inovasi harus dilaksanakan secara lengkap, serentak dan bertahap. Di tahun 2023 persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah sebesar 30,23 % sedangkan pada tahun 2019 tidak ada penerapan inovasi daerah.

Tabel 2.187
Persentase Kebijakan Inovasi Yang Diterapkan di Daerah
Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan	-	8	3	23	12
2	Jumlah inovasi yang diusulkan	-	8	3	23	12
3	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	-	100	100	100	100

Sumber : Balitbang Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2024

Budaya inovasi adalah proses internalisasi dan pemasyarakatan nilai-nilai inovasi bagi pelaku agenda inovasi dan penikmat hasil-hasil pembangunan. Budaya inovasi merupakan usaha yang dilakukan secara berkelanjutan untuk menguatkan nilai-nilai inovasi yang telah tumbuh dan berkembang. Ditahun 2023 ada 12 inovasi yang diterapkan dari 12 kebijakan inovasi yang diusulkan sehingga Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah tahun 2023 mencapai 100%.

2.3.4.6 Kewilayahan

Fungsi Penunjang Kewilayahan ditangani oleh 12 Kecamatan di Kabupaten Minahasa Tenggara. Sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan, kecamatan melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi. Realisasi kinerjanya dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.188
Realisasi Kinerja Fungsi Penunjang Kewilayahan
Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan & pelaksanaan pembangunan	%	86	88	90	90	90
2	Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan Yang Terakomodir Dalam Renja Perangkat Daerah	%	86	88	90	96,23	51,48

Sumber : Bappeda Kab. Minahasa Tenggara 2024



2.3.5 Fokus Urusan Pemerintahan Umum

Urusan pemerintahan umum di daerah lebih menyangkut kepada hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk diantaranya kehidupan berpolitik. Menurunnya penerapan nilai-nilai kebangsaan/nasionalisme, gotong royong, budi pekerti, dan kesetiakawanan sosial di kalangan masyarakat serta belum optimalnya pengawasan dan pendataan terkait dengan pendidikan ideologi asing, dan organisasi sosial politik masyarakat masih sering menjadi simpul-simpul masalah yang berkembang di masyarakat.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.4.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Kebutuhan makanan merupakan kebutuhan utama, sehingga kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan tersebut akan semakin meningkat. Namun kebutuhan ini mempunyai titik jenuh, sehingga pada tingkat pendapatan yang lebih tinggi pengeluaran akan dialihkan ke kebutuhan lain. Oleh karena itu persentase pengeluaran makanan dan non makanan dapat dijadikan sebagai indikator tingkat kesejahteraan penduduk. Besarnya konsumsi untuk makanan menandakan bahwa sebagian besar penduduk masih mementingkan kebutuhan pokok. Kemampuan ekonomi dapat diukur dari tingkat konsumsi rumah tangga, produktivitas perkategori lapangan usaha. Konsumsi Rumah tangga setiap tahunnya menunjukkan angka yang fluktuatif karena adanya penurunan di tahun 2020 dan 2022.



Tabel 2.189
Angka Konsumsi RT per Kapita Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun 2019-2023

NO	Uraian	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Total Pengeluaran RT	2.763.274,82	2.743.668,40	2.939.588,19	3.274.306,07	3.654.084,78
2.	Jumlah RT	27.259	28.099	29.126	33.765	35.426
3.	Pengeluaran Konsumsi RT per Kapita	10.137	9.763	10.093	9.697	10.315

Sumber : Bappeda Minahasa Tenggara 2024 (diolah)

2.4.1.2 Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Rumah Tangga Per Kapita

Semakin tinggi pendapatan masyarakat maka relatif tinggi pengeluaran masyarakat untuk kebutuhan non pangan, hal ini terjadi pada masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana kondisi yang ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.190
Persentase Pengeluaran Konsumsi RT non-Pangan dan Pangan
Tahun 2019-2023 Kabupaten Minahasa Tenggara

NO	Uraian	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Total Pengeluaran RT non Pangan	499.608	505.761	478.541	418.114	506.702
2.	Total Pengeluaran	942.535	1.077.154	1.064.890	1.040.418	1.186.927
3.	Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per kapita	47,70	46,95	44,93	40,19	42,69

Sumber : Bappeda Minahasa Tenggara 2024 (diolah)

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur

2.4.2.1 Ketaatan Terhadap RTRW

Pembangunan terkait aspek keruangan di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Minahasa Tenggara. RTRW dipandang sangat penting dalam penyusunan RPJMD Kabupaten. Proses penilaian ketaaan terhadap RTRW direalisasikan dengan sinkronisasi indikasi program RTRW dalam RPJMD yang dilakukan dengan menghitung realisasi RTRW terhadap rencana peruntukan RTRW.

2.4.2.2 Luas Wilayah Produktif

Luas wilayah yang produktif seperti wilayah perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Minahasa Tenggara mengalami pertumbuhan, perkembangan yang pesat di semua wilayah Kecamatan diantaranya di Kecamatan Ratahan dan Tombatu. Selama kurun waktu 15 tahun perkembangan wilayah mengalami perubahan yang signifikan dengan adanya pemanfaatan ruang. Perubahan struktur tata ruang baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan infrastruktur.

Tabel 2.191
Rasio Luas Wilayah Produktif Kabupaten Minahasa Tenggara

NO	KABUPATEN	LUAS WILAYAH PRODUKTIF	LUAS SELURUH WILAYAH BUDAYA	RASIO
1	Minahasa Tenggara	3.069,00	47.628,90	0,07

Sumber : RPJMD Provinsi Sulawesi Utara

2.4.2.3 Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jenis pelayanan dasar pada SPM pekerjaan umum dan penataan ruang pada Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

Tabel 2.192
Presentase Penduduk Berakses Air Minum Tahun 2019-2023
Kabupaten Minahasa Tenggara

SPM	INDIKATOR	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase penduduk berakses air minum	86,00	87,50	89,78	90,00	91,26
	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	48,82	50,86	50,89	50,91	49,38

Sumber : Dinas PUPR Kab. Minahasa Tenggara 2024

2.4.2.4 Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM perumahan rakyat pada Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- 1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
- 2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

2.4.3.1 Angka Kriminalitas

Penanganan angka kriminalitas berhubungan erat dengan penciptaan stabilitas ditengah masyarakat dan menjamin ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Tabel di bawah ini akan memperlihatkan jumlah kriminalitas di Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2020-2023.

Tabel 2.193
Angka Kriminalitas Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun 2020-2023

URAIAN	SATUAN	TAHUN			
		2020	2021	2022	2023
Jumlah Tindak Kriminal	Kasus	456	448	368	351
Jumlah Penduduk	Jiwa	116.323	117.079	118.023	118.946
Angka Kriminalitas	%	0,39	0,38	0,31	0,29

Sumber : Polres Minahasa Tenggara 2024

2.4.3.2 Rasio Pinjaman terhadap simpanan di Bank Umum

Dalam menggiatkan ekonomi di Minahasa Tenggara diperlukan adanya dukungan/sokongan lembaga perbankan dan lembaga non perbankan dalam menumbuhkan dan mengembangkan dunia usaha dan iklim Investasi lewat Pemberian Pinjaman bagi para pengusaha khususnya UMKM dan Pengusaha Pemula dan Muda serta menghimpun dana pihak ketiga/masyarakat untuk dapat berhemat lewat menabung simpanan uang dan barang berharga di Bank

Tabel 2.194
Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan Di Bank Umum
Tahun 2019 s.d 2023

NO	Uraian	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah pinjaman di bank umum (Miliar Rp)	613,218	681,838	675,572	633,367 *	
2.	Dana pihak ketiga di bank umum (Miliar Rp)	182,844	205,831	251,23	178,008	
3.	Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan Di Bank Umum	3,35	3,31	2,69	3,55	

Sumber : Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara 2023

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

2.4.4.1 Produktivitas Total daerah

Untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor per angkatan kerja yang menunjukkan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam

mendorong ekonomi daerah per sektor dihitunglah produktivitas total daerah .

Produktivitas total Kabupaten Minahasa Tenggara selama tahun 2019-2023 menunjukkan tren yang fluktuatif, dimana tahun 2019 berada di 68,98 % naik di 2020 sebesar 75,74 namun turun di tahun 2021 sebesar 72,54 kemudian naik ditahun 2022 sebesar 75,77 dan terakhir naik lagi di tahun 2023 sebesar 77,11.

Tabel 2.195
Produktivitas Total Daerah
Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	PDRB	Rp.	3.200.747,2	3.605.129,6	3.769.488,2	3.969.267,33	4.182.815,50
2	Jumlah Angkatan Kerja	Orang	46.398	47.593	51.959	52.384	54.242
3	Produktivitas total daerah	%	68,98	75,74	72,54	75,77	77,11

Sumber : Bappeda Minahasa Tenggara 2024 (diolah)

2.4.4.2 Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia produktif, yaitu usia 15-64 tahun dengan jumlah penduduk yang belum/tidak produktif, yaitu penduduk usia 0-14 tahun dan penduduk usia 65 tahun ke atas. Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif, demikian pula sebaliknya.

Dari data rasio ketergantungan pada tabel. 2.196, Komposisi penduduk Minahasa Tenggara Tahun 2023, berdasarkan kelompok usia non produktif usia (0-14 th) sebesar 29.477 orang, dan usia (65+) sebesar 10.368 orang sedangkan kelompok usia produktifnya (15-64th) sebesar 79.068 orang. Sehingga rasio ketergantungannya sebesar 50,39 % di tahun 2023 dalam arti setiap 100 orang yang berusia kerja/produktif mempunyai tanggungan sebanyak 50 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

Tabel. 2.196
Rasio Ketergantungan Tahun 2020-2023

No	Tahun	Penduduk Kelompok Umur			Rasio Ketergantungan (%)		
		Jumlah Penduduk Usia 0-14 thn	Penduduk Usia 15-64 thn	Jumlah Penduduk Usia 65 thn keatas	Anak	Lansia	Total
1	2020	29.707	77.481	9.135	38,34	11,78	50,12
2	2021	29.584	77.975	9.520	37,98	12,21	50,19
3	2022	29.527	78.560	9.936	37,59	12,65	50,24
4	2023	29.477	79.068	10.368	37,28	13,11	50,39

Sumber : Bappeda Minahasa Tenggara 2024 (diolah)

2.5. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.

Pelaksanaan evaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dilaksanakan setiap awal tahun terhadap kinerja tahun sebelumnya adalah untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai acuan untuk perbaikan kinerja daerah dan peningkatan akuntabilitas kinerja serta untuk penentuan kebijakan pembangunan tahun yang akan datang. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa ekonomi Minahasa Tenggara Tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 5,38 % dibandingkan tahun 2022 yang 5,3 %, sebagai efek dari pertumbuhan sebagian besar lapangan usaha. Bertumbuhnya perekonomian Minahasa Tenggara tahun 2023 disebabkan oleh adanya pertumbuhan beberapa sektor lapangan usaha yaitu lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum, transportasi dan pergudangan, serta jasa lainnya. Dari sisi pengeluaran, komponen yang mengalami pertumbuhan adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto, Pengeluaran Konsumsi, Lembaga Nonprofit, dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah.

Tabel 2.197
EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR MAKRO KABUPATEN MINAHASA TENGGERA TAHUN 2023

No	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Persentase Capaian Tahun 2023	Status Capaian Target
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)X 100	8
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,50-6,00	4,50-6,00	5,38	119,5 – 89,67	Tercapai

 RKPD 2025 							
2	PDRB Perkapita ADHK	Juta	34,02	34,02	35,17	103,38	Melampaui
3	PDRB Perkapita ADHB	Juta	50,14	50,14	56,3	112,28	Melampaui
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,01	3,01	2,84	94,35	Melampaui
5	Persentase Penduduk Miskin	%	11,88	11,88	11,84	99,66	Melampaui
6	Indeks Pembangunan Manusia	Point	70,64	70,64	71,93	101,83	Melampaui
7	Indeks Gini	Point	0,31	0,31	0,32	103,23	Tidak tercapai
8	Inflasi	%	3 + 1	3 + 1	2,83	94,3	Tercapai

Sumber : Bappeda Minahasa Tenggara 2024 (diolah)

Hasil monitoring pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2023 yang bersumber dari hasil monitoring pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah, dapat lihat pada tabel 2.198 dibawah ini.

Tabel 2.198
Evaluasi Capaian Penyelenggaraan Urusan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2023

NO	URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN INDIKAT OR	TARGET AKHIR RPJMD 2018-2023	TARGET TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2023	STATUS CAPAIAN TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)x100	8	9
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
01.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							
1	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12	12	12.44	103.66	●	DINAS PENDIDIKAN
2	Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9.01	9.01	9.12	101.22	●	DINAS PENDIDIKAN
3	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	%	98	98	95	96.93	●	DINAS PENDIDIKAN
4	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	97	97	95	97.93	●	DINAS PENDIDIKAN
5	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	99	98	95	96.93	●	DINAS PENDIDIKAN
6	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pertama yang berpartisipasi dalam	%	100	100	97	97	●	DINAS PENDIDIKAN



NO	URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN INDIKAT OR	TARGET AKHIR RPJMD 2018-2023	TARGET TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2023	STATUS CAPAIAN TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)x100	8	9
	Pendidikan Kesetaraan							
7	Persentase Penyediaan Dokumen Kurikulum Muatan Lokal Dikdas	%	85	85	100	117.64		DINAS PENDIDIKAN
8	Persentase Penyediaan Dokumen Kurikulum Muatan Lokal PAUD dan Pendidikan Nonforlam Kesetaraan	%	90	90	25	27.77		DINAS PENDIDIKAN
9	Jumlah Kumulatif Guru Penggerak/Komunitas yang terampil menerapkan Pembelajaran Digital	Orang	60	60	14	23.33		DINAS PENDIDIKAN
10	Persentase Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat memiliki izin operasional	%	100	100	70	70		DINAS PENDIDIKAN
11	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	%	60	60	90	150		DINAS PENDIDIKAN
01.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							
1	Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran hidup	Angka	194/100000	194/100000	59,5/100000	30,67/100000		DINAS KESEHATAN
2	Cakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	87.9	87,90		DINAS KESEHATAN

NO	URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN INDIKAT OR	TARGET AKHIR RPJMD 2018-2023	TARGET TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2023	STATUS CAPAIAN TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)x100	8	9
3	Insidensi HIV Per 1.000 penduduk yang tidak rerinfeksi HIV	%	0.19	19	7	36,84	●	DINAS KESEHATAN
4	Insidensi TB Per 100.000 Penduduk	Angka	200/100.000	200/100000	206/100000	103	●	DINAS KESEHATAN
5	Penurunan Jumlah Kemaitan Ibu (AKI) Per Tahun	%	20	20	1	5	●	DINAS KESEHATAN
6	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	97	97	●	DINAS KESEHATAN
7	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	94	94	●	DINAS KESEHATAN
8	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan	%	100	100	99,70	99,70	●	DINAS KESEHATAN
9	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	100	100	94,69	94,69	●	DINAS KESEHATAN
10	Persentase Imunisasi Dasar Lengkap Pada Usia 12-23 Bulan	%	75	75	68,1	90,80	●	DINAS KESEHATAN
11	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin	%	100	100	74	74	●	DINAS KESEHATAN
12	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	%	100	100	90	90	●	DINAS KESEHATAN

NO	URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN INDIKATOR	TARGET AKHIR RPJMD 2018-2023	TARGET TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2023	STATUS CAPAIAN TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7 = $(6/5) \times 100$	8	9
13	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100	100		DINAS KESEHATAN
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100	100	100		DINAS KESEHATAN
15	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	111.93	111.93		DINAS KESEHATAN
16	persentase orang usai 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100		DINAS KESEHATAN
17	Persentase Penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100		DINAS KESEHATAN
18	Persentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100		DINAS KESEHATAN
19	Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan	%	100	100	100	100		DINAS KESEHATAN
20	Persentase RS Rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100	100	100	100		DINAS KESEHATAN



NO	URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN INDIKAT OR	TARGET AKHIR RPJMD 2018-2023	TARGET TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2023	STATUS CAPAIAN TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)x100	8	9
21	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	%	100	100	80	80	●	DINAS KESEHATAN
22	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	95,38	95,38	●	DINAS KESEHATAN
23	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	%	13	11	1.1	10	●	DINAS KESEHATAN
24	Prevalensi Wastin (Kurus dan Sangat Kurus Pada Balita	%	6	6	1.8	30	●	DINAS KESEHATAN
25	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	%	90	100	100	100	●	DINAS KESEHATAN
26	Temuan Kasus TB Baru Menggunakan Indiator SPM (terduga TB)	%	100	100	505	505	●	DINAS KESEHATAN
27	Kejadian Malaria per 1000 orang.	%	0,8	0,8	2.47	308,75	●	DINAS KESEHATAN
28	Angka kematian neonatal (per 1.000 kelahiran hidup)	%	11	97,27	10.7	97,27	●	DINAS KESEHATAN
29	Insidensi hepatitis B (persen)	%	1,24	1,24	1.13	91,13	●	DINAS KESEHATAN
30	Prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun (persen)	%	30	21,8	0,71	3,26	●	DINAS KESEHATAN



NO	URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN INDIKATOR	TARGET AKHIR RPJMD 2018-2023	TARGET TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2023	STATUS CAPAIAN TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)x100	8	9
31	Persentase tekanan darah tinggi	%	34,1	34,1	8.5	24,93		DINAS KESEHATAN
32	Jumlah Kecamatan yang mencapai eliminasi malaria	Kecamatan	12	12	0	0		DINAS KESEHATAN
33	Kejadian Kusta Per 1000 Orang	%	0,9	0,9	1.06	117,78		DINAS KESEHATAN
34	Persentase Sarana Air Minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar	%	100	100	85	85		DINAS KESEHATAN
35	Persentase Desa Kelurahan yang Melaksanakan STBM	%	100	100	87	87		DINAS KESEHATAN
36	Treatment Coverage pada Pasien TB	%	100	100	55,68	55,68		DINAS KESEHATAN
37	Persentase Puskesmas Dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	%	60	60	40	66,67		DINAS KESEHATAN
38	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	70	70		DINAS KESEHATAN
39	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang memenuhi standar dan	%	50	50	40	80		DINAS KESEHATAN



NO	URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN INDIKATOR	TARGET AKHIR RPJMD 2018-2023	TARGET TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2023	STATUS CAPAIAN TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7 = $(6/5) \times 100$	8	9
	Persyaratan Perizinan							
40	Persentase Sarana Produksi UMOT	%	70	70	50	71,43	●	DINAS KESEHATAN
41	Implementasi KTR Pada 9 Tempat (Pendidikan, Transportasi, Kesehatan, dll)	%	100	100	0	0	●	DINAS KESEHATAN
42	Persentase Puskesmas Melaksanakan Layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM)	%	50	50	0	0	●	DINAS KESEHATAN
43	Persentase Merokok Penduduk Usia 10-18 Tahun	%	6	6	0	0	●	DINAS KESEHATAN
01.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
1	Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah yang dibangun	Ha	30	30	24	80	●	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2	Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah yang direhabilitasi	Ha	1.771,75	400	394	94,17%	●	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3	Panjang infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai kewenangan daerah	Meter	4.580,92	1.000	780	78%	●	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN

NO	URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN INDIKATOR	TARGET AKHIR RPJMD 2018-2023	TARGET TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2023	STATUS CAPAIAN TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7 = $(6/5) \times 100$	8	9
	yang dibangun							RUANG
4	Persentase luas sawah beririgasi	%	78,50	80	79	98,75%		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	90	90	91,26	101,4		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6	Persentase PDAM Dengan Kinerja Sehat	%	66	66	86,07	130,41		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman	%	4	4	19,02	475,5		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum jaringan perpipaan	%	44	44	49,38	112,3		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	%	90	90	91,26	101,4		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



NO	URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN INDIKATOR	TARGET AKHIR RPJMD 2018-2023	TARGET TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2023	STATUS CAPAIAN TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)x100	8	9
10	Persentase angka BABS di tempat terbuka	%	2,5					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
11	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	%	89	89	89,91	101,02	●	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
12	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	%	70	70	70	100	●	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
13	Rasio Kepatuhan IMB/PBG Kabupaten	%	52	52	61	117,30	●	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
14	Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung	%	28	28	28	100	●	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
15	Presentase Kondisi Mantap Jalan Kabupaten/Kota	%	66,5	66,5	69,92	105,14	●	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
16	Rasio Proyek Yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi	%	0	100	100	100	●	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



NO	URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN INDIKATOR	TARGET AKHIR RPJMD 2018-2023	TARGET TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2023	STATUS CAPAIAN TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7 = $\frac{6}{5} \times 100$	8	9
17	Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisi Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	%	6	6	8,95	149,17		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
18	Pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR	Persetujuan Substansi	4	4	0	0		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
19	Penyelesaian Materi Teknis dari Bimbingan Teknis RDTR	Materi Teknis	2	2	0	0		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
20	Penyelesaian Materi Teknis dari Bimbingan Teknis RTRW	Materi Teknis	1	1	1	100		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
21	Penyelesaian Materi Teknis dari Bantuan Teknis RDTR	Materi Teknis	1	1	0	0		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
22	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	%	92	92	90	97,82		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
01.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							

NO	URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN INDIKATOR	TARGET AKHIR RPJMD 2018-2023	TARGET TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2023	STATUS CAPAIAN TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7 = $(6/5) \times 100$	8	9
23	Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	6,30	6,30	2,64	42 %	●	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
24	Persentase Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Memperoleh Rumah Layak Huni	%	100	100	0	0	●	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
25	Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	6,30	6,30	2,64	42 %	●	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
26	Luas Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	%	35	35	2,17	6,2 %	●	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
27	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman didukung dengan PSU	%	90	90	93	103,33	●	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
28	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	77.80	77.80	100	128,53	●	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
01.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							

NO	URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN INDIKATOR	TARGET AKHIR RPJMD 2018-2023	TARGET TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2023	STATUS CAPAIAN TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)x100	8	9
29	Persentase Perda Dan Perkada yang ditegakkan	%	90	90	100	111,11		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
30	Presentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
31	Presentase Pelayanan Pemadam dan Penyelamatan Kebakaran	%	100	100	80	80		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
32	Waktu Tanggap Darurat (Response Time) Penanganan Kebakaran	Menit	20	20	20	100		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
33	Persentase Penanganan Pasca Bencana	%	100	100	100	100		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34	Persentase Penanganan Pra bencana	%	100	100	100	100		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
35	Persentase Penanganan Tanggaap Darurat Bencana	%	100	100	100	100		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
36	Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan Sampai Dengan dinyatakan Sah / Legal	%	100	100	100	100		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
01.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG							

NO	URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN INDIKATOR	TARGET AKHIR RPJMD 2018-2023	TARGET TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2023	STATUS CAPAIAN TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7 = $\frac{7}{(6/5)} \times 100$	8	9
	SOSIAL							
37	Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti	%	100	50	25	50	●	DINAS SOSIAL
38	Persentase Gelandangan Dan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti	%	100	50	3	6	●	DINAS SOSIAL
39	Persentase Lanjut Usia Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti	%	100	50	25	50	●	DINAS SOSIAL
40	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti	%	100	50	25	50	●	DINAS SOSIAL
41	Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti	%	100	50	25	50	●	DINAS SOSIAL
42	Persentase Gelandangan Dan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti	%	100	50	3	6	●	DINAS SOSIAL
43	Persentase Lanjut Usia Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti	%	100	50	25	50	●	DINAS SOSIAL

NO	URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN INDIKATOR	TARGET AKHIR RPJMD 2018-2023	TARGET TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2023	STATUS CAPAIAN TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7 = $\frac{6}{5} \times 100$	8	9
44	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti	%	100	50	25	50	●	DINAS SOSIAL
45	Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti	%	100	50	25	50	●	DINAS SOSIAL
46	Persentase Gelandangan Dan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti	%	100	50	3	6	●	DINAS SOSIAL
47	Persentase Lanjut Usia Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti	%	100	50	25	50	●	DINAS SOSIAL
48	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti	%	100	50	25	50	●	DINAS SOSIAL
49	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kab/Kota	%	100	100	100	100	●	DINAS SOSIAL
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN							



NO	URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN INDIKATOR	TARGET AKHIR RPJMD 2018-2023	TARGET TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2023	STATUS CAPAIAN TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)x100	8	9
	PELAYANAN DASAR							
02.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							
1	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	100	100	100	●	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	Persentase Tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	%	100	100	100	100	●	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	Tingkat produktifitas tenaga kerja	%	100	100	100	100	●	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	●	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
5	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	100	100	100	100	●	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
02.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							





NO	URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN INDIKATOR	TARGET AKHIR RPJMD 2018-2023	TARGET TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2023	STATUS CAPAIAN TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7 = $(6/5) \times 100$	8	9
1	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	%	40	40	40	100		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	Rasio Kekerasan Terhadap Anak	%	0.1	0,1	0,1	100		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO	%	0.1	0,1	0,1	100		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4	Rasio Kekerasan Terhadap Anak	%	0.1	0,1	0,1	100		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5	Rasio Kekerasan Terhadap Anak	%	0.1	0,1	0,1	100		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan Termasuk TPPO	%	0.1	0,1	0,1	100		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



NO	URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN INDIKATOR	TARGET AKHIR RPJMD 2018-2023	TARGET TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2023	STATUS CAPAIAN TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7 = $(6/5) \times 100$	8	9
6	Rasio Kekerasan Terhadap Anak	%	0.1	0,1	0,1	100		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
7	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	0.1	0,1	0,1	100		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
02.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							
1	Skor Pola Pangan Harapan	%	92	92	85	92		DINAS KETAHANAN PANGAN
2	Persentase Pangan Segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	85					DINAS KETAHANAN PANGAN
3	Persentase Cadangan Pangan Masyarakat	%	100					DINAS KETAHANAN PANGAN
4	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	6,9					DINAS KETAHANAN PANGAN
5	Persentase Pangan Segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	100					DINAS KETAHANAN PANGAN



NO	URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN INDIKATOR	TARGET AKHIR RPJMD 2018-2023	TARGET TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2023	STATUS CAPAIAN TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)x100	8	9
02.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							
1	Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	80	3.980.000	3.300.128	82	●	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	Indeks Kualitas Air	%	48.28	48.28	50.00	103	●	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3	Indeks Kualitas Udara	%	90.32	90.32	94.20	104	●	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4	Indeks Tutupan Lahan	%	42.04	42.04	39.49	93	●	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5	Tersedianya data pengelolaan keanekaragaman hayati	%	100	26.763.450	20.047.000	74	●	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Limbah B3	%	100	1.821.000	1.750.064	96	●	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7	Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	100	30.000.400	53.329.600	177	●	DINAS LINGKUNGAN HIDUP



NO	URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN INDIKATOR	TARGET AKHIR RPJMD 2018-2023	TARGET TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2023	STATUS CAPAIAN TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)x100	8	9
	Kab/Kota							
8	Teridentifikasinya kelompok MHA, kearifan lokal dan hak MHA	%	100	100	-	-		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9	Terlaksananya pendidikan pelatihan dan penyuluhan	%	100	100	-	-		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
10	keikutsertaan dalam lomba penghargaan LH	%	100	100	-	-		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
11	Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	100	1.821.000	1.650.064	90	●	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
12	Jumlah penanganan timbulan sampah	%	72	73	9.207.13	53,76	●	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
13	Jumlah pengurangan timbulan sampah	%	27	26	1.021.14	5,96	●	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
02.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
1	Perekaman KTP Elektronik	%	100	100	94,16	94,16	●	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



NO	URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN INDIKATOR	TARGET AKHIR RPJMD 2018-2023	TARGET TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2023	STATUS CAPAIAN TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7 = $(6/5) \times 100$	8	9
2	Persentase anak usia 01-17 Tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	97	97	88,94	91,7		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3	Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada Anak Usia 0-17 Tahun	%	100	100	91,78	91,78		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4	Persentase cakupan kepemilikan Akta kematian dari peristiwa Kematian yang dilaporkan	%	100	100	74,93	74,93		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5	Persentase Cakupan Kepemilikan Akta perseraian pada semua Individu yang Perceraianya dilaporkan	%	100	100	100	100		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
6	Persentase Cakupan Kepemilikan Buku Nikah/Akta perkawinan pada Semua pasangan yang Perkawinannya dilaporkan	%	100	100	100	100		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
7	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	%	97	100	100	100		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
8	Persentase Penyajian Data Kependudukan	%	100	100	100	100		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
9	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama	%	100	100	100	100		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN INDIKATOR	TARGET AKHIR RPJMD 2018-2023	TARGET TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2023	STATUS CAPAIAN TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7 = $(6/5) \times 100$	8	9
02.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
1	Persentase Aparatur Desa yang berkinerja baik	%	100	80	85	106		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	Persentase Bumdes Sehat	%	100	30	35	116		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3	Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam proses penyelenggaraan membangun desa	%	100	100	100	100		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
4	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik	Angka	100	100	100	100		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
5	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah Desa	Angka	90	90	91	101		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
6	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	%	100	0	0	0		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN INDIKATOR	TARGET AKHIR RPJMD 2018-2023	TARGET TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2023	STATUS CAPAIAN TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7 = $(6/5) \times 100$	8	9
7	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	5	5	5	100		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
8	Persentase Aparatur Desa Yang Berkinerja Baik	%	100	80	85	106		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
9	Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	%	100	100	100	100		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
10	Persentase LPM Berprestasi	%	70	100	100	100		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
11	Persentase PKK Aktif	%	100	100	100	100		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
12	Persentase Posyandu Aktif	%	100	100	100	100		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
13	Persentasi LSM Aktif	%	70	5	5	100		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



NO	URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN INDIKAT OR	TARGET AKHIR RPJMD 2018-2023	TARGET TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2023	STATUS CAPAIAN TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)x100	8	9
14	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	Angka	87	500	500	500		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
15	Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	%	100	100	100	100		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
02.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
1	Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet need)	%	12.00	12.00	6.80	56,57		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate (MCPR)	%	88.80	88.80	88.65	99,83		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3	TFR (Angka Kelahiran Total)	Orang	2.80	2.80	2.26	80,71		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA





NO	URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN INDIKATOR	TARGET AKHIR RPJMD 2018-2023	TARGET TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2023	STATUS CAPAIAN TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)x100	8	9
4	Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet need)	%	12.00	12.00	6.80	56,57	●	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevelence Rate (MCPR)	%	88.80	88.80	88.65	99,83	●	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
6	TFR (Angka Kelahiran Total)	Orang	2.80	2.80	2.26	80,71	●	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
02.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Angka	3.54	3.54	3,36	94,92	●	DINAS PERHUBUNGAN
2	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten / Kota	%	55	55	54	18,18	●	DINAS PERHUBUNGAN
3	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10 ribu Keberangkatan	Angka	28.85	28.85	28,85	100	●	DINAS PERHUBUNGAN
4	Rasio Konektivitas Nasional	Angka	0.48	0.48	0,28	58,33	●	DINAS PERHUBUNGAN
5	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten / Kota	%	55	55	54	98,18	●	DINAS PERHUBUNGAN

NO	URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN INDIKATOR	TARGET AKHIR RPJMD 2018-2023	TARGET TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2023	STATUS CAPAIAN TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)x100	8	9
02.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
1	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten	%	100	70	60	85,71	●	DINAS KOMUNIKASI INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	%	50	50	40	80	●	DINAS KOMUNIKASI INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN
3	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Yang Terhubung Dengan Akses Internet Yang Disediakan Oleh Dinas KOMINFO	%	100	100	97,61	97,61	●	DINAS KOMUNIKASI INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN
02.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							
1	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	%	10.47	10.47	4,23	40	●	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDANGAN

NO	URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN INDIKATOR	TARGET AKHIR RPJMD 2018-2023	TARGET TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2023	STATUS CAPAIAN TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7 = $(6/5) \times 100$	8	9
2	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	%	10.47	10.47	4,23	40		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDANGAN
3	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	%	10.47	10.47	4,23	40		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDANGAN
4	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	%	10.47	10.47	4,23	40		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDANGAN
5	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	%	10.47	10.47	4,23	40		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDANGAN
6	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	%	90	90	1,56	2		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDANGAN

NO	URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN INDIKATOR	TARGET AKHIR RPJMD 2018-2023	TARGET TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2023	STATUS CAPAIAN TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7 = $(6/5) \times 100$	8	9
7	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	%	90	90	1,56	2		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDANGAN
02.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							
1	Jumlah Investor Berskala Nasional PMA/PMDN	Investor	55	55	566	1029,09		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	Jumlah Investasi Penanaman Modal	Rp.	96.794.200.000	6.000.000.000	275.632.887.268	4593,8		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3	Presentase Tingkat Kepuasan Masyarakat	%	75	75	96.137	128,1		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4	Presentase Kesesuaian Penyelesaian Perizinan sesuai dengan SOP	%	75	75	80	106,6		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN INDIKATOR	TARGET AKHIR RPJMD 2018-2023	TARGET TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2023	STATUS CAPAIAN TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7 = $(6/5) \times 100$	8	9
5	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Data dan informasi Penanaman Modal	%	75	75	80	106,6		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
02.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							
1	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	%	2.23	35	30	85,7%		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Masyarakat	%	27.00	50	50	100%		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3	Cakupan Pelatih yang Bersertifikat	%	77.08	61,53	61,53	100%		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
4	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	%	50.00	30	25	83,33%		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
5	Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali Emas	47	207	207	100%		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
6	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Masyarakat	%	27.00	50	50	100%		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN INDIKATOR	TARGET AKHIR RPJMD 2018-2023	TARGET TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2023	STATUS CAPAIAN TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7 = $\frac{6}{5} \times 100$	8	9
02.20.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							
1	Persentase OPD Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	%	100	100	100	100	●	DINAS KOMUNIKASI INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	Persentase Organisasi Perangkat Daerah Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	100	100	100	●	DINAS KOMUNIKASI INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN
02.21.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							
1	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	%	80	80	80	100	●	DINAS KOMUNIKASI INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN
02.22.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							
1	Presentase Apresiasi Terhadap Pelaku Seni dan Budaya	%	67	67	46	68	●	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO	URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN INDIKATOR	TARGET AKHIR RPJMD 2018-2023	TARGET TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2023	STATUS CAPAIAN TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7 = $(6/5) \times 100$	8	9
2	Terselesaikannya Cagar Budaya	%	67	67	46	68		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
02.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							
1	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik, dan kesejahteraan rakyat	%	65	65	65	100		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	65	65	65	100		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
02.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	%	60	60	60	100		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO	URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN INDIKATOR	TARGET AKHIR RPJMD 2018-2023	TARGET TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2023	STATUS CAPAIAN TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)x100	8	9
2	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	%	4.00	4	4	100		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
03.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							
1	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	129.950,79	30.000	28.488	95		DINAS PERIKANAN
2	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	16.776	3.600	3.611	100		DINAS PERIKANAN
3	Konsumsi Ikan	Ton	58	58	64	110		DINAS PERIKANAN
3	Nilai Tukar Nelayan	Angka	102	102	102	100		DINAS PERIKANAN
03.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							
1	Jumlah Pergerakan Wisatawan	Orang	77.834	42.000	37.171	88		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2	PAD Sektor Pariwisata	RP	146.203.000	100.000.000	26.957.000	27		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO	URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN INDIKATOR	TARGET AKHIR RPJMD 2018-2023	TARGET TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2023	STATUS CAPAIAN TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7 = $\frac{6}{5} \times 100$	8	9
3	Presentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang ke Kabupaten/Kota	%	25	25		70.6	●	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
4	Presentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara Per kebangsaan	%	10	10		89	●	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
5	Tingkat Hunian Akomodasi	%	30	30	25	83	●	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
6	Jumlah Pergerakan Wisatawan	Orang	11.000	42.000	37.171	88	●	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
7	PAD Sektor Pariwisata	Rp.	146.203.000	100.000.000	26.957.000	27	●	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
8	Presentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang ke Kabupaten/Kota	%	25	25		70.6	●	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
9	Presentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Kebangsaan	%	10	10		89	●	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
10	Tingkat Hunian Akomodasi	%	30	30	25	83	●	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
11	Jumlah Kegiatan Pengembangan Kemitraan	Kegiatan	5	5	1	20	●	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO	URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN INDIKATOR	TARGET AKHIR RPJMD 2018-2023	TARGET TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2023	STATUS CAPAIAN TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7 = $(6/5) \times 100$	8	9
12	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Rp.	12.835.673	N/A	N/A	N/A		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
03.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							
1	Jumlah produksi padi dan bahan pangan utama lainnya (jagung dan kedelai)	Ton	457.092	111.000	118.142,9	106,43	●	DINAS PERTANIAN
2	Jumlah produksi peternakan	Ton	6.272	1.200	1.599,92	133,32	●	DINAS PERTANIAN
3	Jumlah produksi tanaman perkebunan	Ton	131.532.56	20.000	29.525,49	147,62	●	DINAS PERTANIAN
4	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	%	6	6	5,13	85,5	●	DINAS PERTANIAN
5	Jumlah produksi padi dan bahan pangan utama lainnya (jagung dan kedelai)	Ton	457.092	111.000	118.142,9	106,43	●	DINAS PERTANIAN
6	Jumlah produksi peternakan	Ton	6.272	1.200	1.599,92	133,32	●	DINAS PERTANIAN
7	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	%	6	6	5,13	85,5	●	DINAS PERTANIAN
8	Jumlah produksi peternakan	Ton	6.272	1.200	1.599,92	133,32	●	DINAS PERTANIAN

NO	URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN INDIKATOR	TARGET AKHIR RPJMD 2018-2023	TARGET TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2023	STATUS CAPAIAN TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)x100	8	9
9	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	85	85	100	125	●	DINAS PERTANIAN
10	Cakupan pembinaan kelompok tani	%	5	5	3,60	72	●	DINAS PERTANIAN
11	Nilai Tukar Petani (NTP)	Angka	90	90	112,84	125,37	●	DINAS PERTANIAN
12	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	%	6	6	5,13	85,5	●	DINAS PERTANIAN
13	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus bencana pertanian	%	80	80	100	125	●	DINAS PERTANIAN
03.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							
1	Tertib Usaha	%	1.69	1.69	0	0	●	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDANGAN
2	Persentase Pembangunan/ revitalisasi Fasilitas Ekonomi Rakyat	%	100	100	0	0	●	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDANGAN

NO	URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN INDIKATOR	TARGET AKHIR RPJMD 2018-2023	TARGET TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2023	STATUS CAPAIAN TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7 = $(6/5) \times 100$	8	9
3	Presentase Barang Beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	49.5	14	14	100		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDANGAN
4	Presentase Kinerja Realisasi Pupuk	%	60	60	0,22	0		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDANGAN
5	Presentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan harga barang kebutuhan Pokok	%	15	15	14	93		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDANGAN
6	Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	%	1	1	0	0		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDANGAN
7	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	1.37	1.37	4,12	301		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDANGAN

NO	URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN INDIKATOR	TARGET AKHIR RPJMD 2018-2023	TARGET TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2023	STATUS CAPAIAN TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7 = $(6/5) \times 100$	8	9
8	Presentase Produk dalam Negeri yang dipasarkan di Pasar Rakyat dan Ritel Modern	%	70	70	0	0		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDANGAN
03.31.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							
1	Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah di kabupaten	%	19	19	3	16		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDANGAN
2	Presentase Jumlah Hasil Pemantuan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	10					DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDANGAN
3	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini	%	20	20	5	25		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDANGAN



NO	URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN INDIKATOR	TARGET AKHIR RPJMD 2018-2023	TARGET TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2023	STATUS CAPAIAN TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)x100	8	9
03.32.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI							
1	Jumlah Satuan Pemukiman yang di Bina	Kawasan	1	1	1	100		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							
04.01	SEKRETARIAT DAERAH							
1	Persentase Bahan Kebijakan Lingkup Kesejahteraan Rakyat Yang Ditindak Lanjuti	%	90	90	90	100		SEKRETARIAT DAERAH
2	Persentase Bahan Kebijakan Lingkup Pemerintahan dan Otonomi Daerah Yang Ditindak Lanjuti	%	90	90	90	100		SEKRETARIAT DAERAH
3	Persentase Bahan Kebijakan Lingkup Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Yang Ditindak Lanjuti	%	90	90	90	100		SEKRETARIAT DAERAH
4	Persentase Kepuasan Pelayanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	%	90	90	90	100		SEKRETARIAT DAERAH
5	Persentase Kerjasama Yang Ditindaklanjuti	%	90	90	50	55,5		SEKRETARIAT DAERAH



NO	URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN INDIKATOR	TARGET AKHIR RPJMD 2018-2023	TARGET TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2023	STATUS CAPAIAN TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7 = $(6/5) \times 100$	8	9
6	Persentase Penyelenggaraan kebijakan Daerah Dalam Pembentukan Hukum daerah, bantuan hukum dan HAM, Dokumentasi Hukum, Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum	%	90	90	85	94,4		SEKRETARIAT DAERAH
7	Persentase Perangkat Daerah Dengan Kinerja Yang Efektif dan Efisien	%	90	90	90	100		SEKRETARIAT DAERAH
8	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengimplementasikan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja	%	90	90	90	100		SEKRETARIAT DAERAH
9	Persentasi Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Perencanaan	%	90	90	90	100		SEKRETARIAT DAERAH
10	Kualifikasi dan Kompetensi SDM UKPBJ	%	95	7	1	14		SEKRETARIAT DAERAH
11	Level Maturitas UKPBJ	%	95	2	2	100		SEKRETARIAT DAERAH
12	Persentase BUMD Yang Masuk Kategori Sehat	%	100	100	100	100		SEKRETARIAT DAERAH
13	Persentase Jumlah Pengadaan Yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	%	100	55	45	82		SEKRETARIAT DAERAH



NO	URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN INDIKATOR	TARGET AKHIR RPJMD 2018-2023	TARGET TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2023	STATUS CAPAIAN TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7 = $(6/5) \times 100$	8	9
14	Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi Yang Di Bawah Ke Tahun Berikutnya Yang di Tandatangani di Kuartal Pertama	%	0	0	0	0		SEKRETARIAT DAERAH
15	Persentase Keselarasan Penyusunan Kebijakan dan Implementasi Kebijakan Lingkup Perekonomian dan Sumber Daya Alam	%	90	90	90	100		SEKRETARIAT DAERAH
16	Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Tepat Waktu	%	95	95	75	78,9		SEKRETARIAT DAERAH
17	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Pembangunan	%	95	95	95	100		SEKRETARIAT DAERAH
18	Persepsi Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Umum	%	95	95	95	100		SEKRETARIAT DAERAH
19	Rasio Nilai Belanja Yang Dilakukan Melalui Pengadaan	%	100	100	65	65		SEKRETARIAT DAERAH
20	Total Laba bersih BUMD	Juta	1800	1800	1500	83,3		SEKRETARIAT DAERAH
04.02	SEKRETARIAT DPRD							





NO	URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN INDIKAT OR	TARGET AKHIR RPJMD 2018-2023	TARGET TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2023	STATUS CAPAIAN TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)x100	8	9
1	Persentase Terintegrasi program - program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran setwan DPRD	%	90	90	100	111,11	●	SEKRETARIAT DPRD
2	Persentase terintegrasinya program - program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD)	%	90	90	100	111,11	●	SEKRETARIAT DPRD
5	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
05.01	5.01 PERENCANAAN							
1	Persentase Data Perangkat Daerah Yang Diverifikasi	%	100	100	100	100	●	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2	Persentase Sasaran dan Program RKPD Yang Konsistensi Dengan Sasaran dan Program RPJMD	%	100	100	100	100	●	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH





NO	URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN INDIKATOR	TARGET AKHIR RPJMD 2018-2023	TARGET TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2023	STATUS CAPAIAN TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)x100	8	9
3	Persentasi Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	●	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
4	Persentase Sasaran dan Program RKD Yang Konsistensi Dengan Program RPJMD bidang Infrastruktur	%	100	100	100	100	●	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	Persentase Sasaran dan Program RKPD Yang Konsistensi Dengan Program RPJMD bidang Ekonomi	%	100	100	100	100	●	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
6	Persentase Sasaran dan Program RKPD Yang Konsistensi Dengan Program RPJMD bidang Pembangunan Manusia	%	100	100	100	100	●	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
7	Persentase Sasaran dan Program RKPD Yang Konsistensi Dengan Program RPJMD bidang Kewilayahan	%	100	100	100	100	●	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
8	Persentase Sasaran dan Program RKPD Yang Konsistensi Dengan Program RPJMD bidang Pemerintahan	%	100	100	100	100	●	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
05.02	5.02 KEUANGAN							





NO	URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN INDIKAT OR	TARGET AKHIR RPJMD 2018-2023	TARGET TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2023	STATUS CAPAIAN TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)x100	8	9
1	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	100		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
2	Mangement Asset	Dokumen	15	3	3	100		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
3	Rasio PAD	%	1,5	1,5	1,8	120		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
05.03	KEPEGAWAIAN							
1	Persentase Capaian Hasil Kerja ASN	%	66	66	66	100		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2	Persentase Kedisiplinan ASN	%	40	40	40	100		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA





NO	URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN INDIKAT OR	TARGET AKHIR RPJMD 2018-2023	TARGET TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2023	STATUS CAPAIAN TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)x100	8	9
3	Rasio Keseluruhan Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar	%	60	60	60	100		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
4	Rasio Kompetensi ASN	%	50	50	50	100		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	%	85	85	508	597		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
05.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							
1	Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	%	17	17	18,91	111,24		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2	Rasio Kompetensi ASN	%	50	50	50	100		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

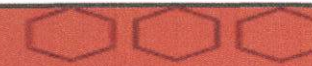




NO	URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN INDIKATOR	TARGET AKHIR RPJMD 2018-2023	TARGET TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2023	STATUS CAPAIAN TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7 = $\frac{6}{5} \times 100$	8	9
3	Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	%	50	50	13,5	26,92		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
05.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							
1	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	%	72	72	100	138,88		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
2	Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah	%	72	72	100	138,88		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
3	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	%	92.5	92,5	60	65,04		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
4	Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	%	30	30	30,23	100,77		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							
06.01	INSPEKTORAT DAERAH							
1	Level Maturitas Sistem Pengendalian Interen Pemerintah SPIP	Level	3	3	3	100		INSPEKTORAT



NO	URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN INDIKATOR OR	TARGET AKHIR RPJMD 2018-2023	TARGET TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2023 $\frac{7}{(6/5)} \times 100$	STATUS CAPAIAN TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7 =	8	9
2	Persentase tindak lanjut temuan	%	77,30	77,30	79,15	102		INSPEKTORAT
3	Level Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3	3	100		INSPEKTORAT
7	7 UNSUR KEWILAYAHAN							
07.01	7.01 KECAMATAN							
	KECAMATAN RATAHAN							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Kec. Ratahan)	Angka	77	77	77	100		KECAMATAN RATAHAN
2	Persentase Desa Yang Melaksanakan Musrenbang (Kec. Ratahan)	%	100	100	100	100		KECAMATAN RATAHAN
3	Persentase Desa Yang Memiliki BUMDES (Kec. Ratahan)	%	100	100	100	100		KECAMATAN RATAHAN
4	Persentase LPM Berprestasi (Kec. Ratahan)	%	23	23	23	100		KECAMATAN RATAHAN
5	Persentase Masyarakat Yang berpartisipasi di Musrenbang Kecamatan (Kec. Ratahan)	%	100	100	100	100		KECAMATAN RATAHAN



NO	URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN INDIKAT OR	TARGET AKHIR RPJMD 2018-2023	TARGET TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2023	STATUS CAPAIAN TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)x100	8	9
6	Persentase Pameran Pembangunan Yang Diikuti (Kec. Ratahan)	%	100	100	100	100		KECAMATAN RATAHAN
7	Persentase PKK Aktif (Kec. Ratahan)	%	100	100	100	100		KECAMATAN RATAHAN
8	Persentase Posyandu Aktif (Kec. Ratahan)	%	100	100	100	100		KECAMATAN RATAHAN
9	Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat (Kec. Ratahan)	%	100	100	100	100		KECAMATAN RATAHAN
10	Persentasi LSM Aktif (Kec. Ratahan)	%	100	100	100	100		KECAMATAN RATAHAN
11	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK (Kec. Ratahan)	Kelompok	4	4	4	100		KECAMATAN RATAHAN
12	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (Kec. Ratahan)	%	100	100	100	100		KECAMATAN RATAHAN
13	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Kec. Ratahan)	Angka	77	77	77	100		KECAMATAN RATAHAN
14	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (Kec. Ratahan)	%	100	100	100	100		KECAMATAN RATAHAN
	KECAMATAN BELANG							

NO	URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN INDIKATOR	TARGET AKHIR RPJMD 2018-2023	TARGET TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2023	STATUS CAPAIAN TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7 = $\frac{6}{5} \times 100$	8	9
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Kec. Belang)	Angka	77	77	77	100		KECAMATAN BELANG
2	Persentase Desa Yang Melaksanakan Musrenbang (Kec. Belang)	%	100	100	100	100		KECAMATAN BELANG
3	Persentase Desa Yang Memiliki BUMDES (Kec. Belang)	%	100	100	100	100		KECAMATAN BELANG
4	Persentase LPM Berprestasi (Kec. Belang)	%	70	70	70	100		KECAMATAN BELANG
5	Persentase Masyarakat Yang berpartisipasi di Musrenbang Kecamatan (Kec. Belang)	%	100	100	100	100		KECAMATAN BELANG
6	Persentase Pameran Pembangunan Yang Diikuti (Kec. Belang)	%	100	100	100	100		KECAMATAN BELANG
7	Persentase PKK Aktif (Kec. Belang)	%	100	100	100	100		KECAMATAN BELANG
8	Persentase Posyandu Aktif (Kec. Belang)	%	100	100	100	100		KECAMATAN BELANG
9	Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat (Kec. Belang)	%	100	100	100	100		KECAMATAN BELANG
10	Persentasi LSM Aktif (Kec. Belang)	%	70	70	70	100		KECAMATAN BELANG

NO	URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN INDIKATOR	TARGET AKHIR RPJMD 2018-2023	TARGET TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2023	STATUS CAPAIAN TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7 = $(6/5) \times 100$	8	9
11	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK (Kec. Belang)	Kelompok	4	4	4	100		KECAMATAN BELANG
12	"Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan), Kec. Belang	%	100	100	100	100		KECAMATAN BELANG
13	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Kec. Belang))	Angka	77	77	77	100		KECAMATAN BELANG
14	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (Kec. Belang)	%	100	100	100	100		KECAMATAN BELANG
KECAMATAN TOMBATU								
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Kec. Tombatu)	Angka	77	77	77	100		KECAMATAN TOMBATU
2	Presentase Desa yang Melaksanakan Musrenbang (Kec. Tombatu)	%	100	100	100	100		KECAMATAN TOMBATU
3	Presentase Desa yang Memiliki BUMDES (Kec. Tombatu)	%	100	100	50	50		KECAMATAN TOMBATU
4	Presentase LPM Berprestasi (Kec. Tombatu)	%	23	23	0	0		KECAMATAN TOMBATU



NO	URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN INDIKAT OR	TARGET AKHIR RPJMD 2018-2023	TARGET TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2023	STATUS CAPAIAN TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)x100	8	9
5	Presentase LSM Aktif (Kec. Tombatu)	%	100	100	0	0		KECAMATAN TOMBATU
6	Presentase Masyarakat yang Berpartisipasi di Musrenbang Kecamatan (Kec. Tombatu)	%	100	100	100	100		KECAMATAN TOMBATU
7	Presentase Pameran Pembangunan yang Diikuti (Kec. Tombatu)	%	100	100	0	0		KECAMATAN TOMBATU
8	Presentase PKK Aktif (Kec. Tombatu)	%	100	100	100	100		KECAMATAN TOMBATU
9	Presentase Posyandu Aktif (Kec. Tombatu)	%	100	100	100	100		KECAMATAN TOMBATU
10	Presentase Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat (Kec. Tombatu)	%	50	100	50	50		KECAMATAN TOMBATU
11	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Pkk (Kec. Tombatu)	Kelompok	4	4	4	100		KECAMATAN TOMBATU
12	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) (Kec. Tombatu)	%	100	100	80	80		KECAMATAN TOMBATU





NO	URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN INDIKATOR	TARGET AKHIR RPJMD 2018-2023	TARGET TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2023	STATUS CAPAIAN TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7 = $(6/5) \times 100$	8	9
13	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Kec. Tombatu)	Angka	77	77	77	77		KECAMATAN TOMBATU
14	Cakupan Sarana Prasarana perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik (Kec. Tombatu)	%	100	100	100	100		KECAMATAN TOMBATU
	KECAMATAN TOULUAAN							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Touluaan)	Angka	77	77	77	100		KECAMATAN TOULUAAN
2	Persentase Desa Yang Memiliki BUMDES (Touluaan)	%	100	100	80	80		KECAMATAN TOULUAAN
3	Persentase LPM Berprestasi (Touluaan)	%	23	23	30	130,43		KECAMATAN TOULUAAN
4	Persentase Masyarakat Yang berpartisipasi di Musrenbang Kecamatan(Touluaan)	%	100	100	100	100		KECAMATAN TOULUAAN
5	Persentase PKK Aktif (Touluaan)	%	100	100	100	100		KECAMATAN TOULUAAN
6	Persentase Posyandu Aktif (Touluaan)	%	100	100	100	100		KECAMATAN TOULUAAN
7	Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat (Touluaan)	%	50	60	65	108,33		KECAMATAN TOULUAAN





NO	URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN INDIKATOR	TARGET AKHIR RPJMD 2018-2023	TARGET TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2023	STATUS CAPAIAN TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)x100	8	9
8	Persentasi LSM Aktif (Touluaan)	%	100	80	0	0		KECAMATAN TOULUAAN
9	Presentase Pameran Pembangunan yang diikuti (Touluaan)	%	100	70	70	100		KECAMATAN TOULUAAN
10	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (Touluaan)	Kelompok	10	10	10	100		KECAMATAN TOULUAAN
11	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	Kelompok	4	4	4	100		KECAMATAN TOULUAAN
12	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (Touluaan)	%	100	80	80	100		KECAMATAN TOULUAAN
13	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Touluaan)	Angka	77	75	80	106,67		KECAMATAN TOULUAAN
14	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (Touluaan)	%	100	100	100	100		KECAMATAN TOULUAAN
KECAMATAN PUSOMAEN								
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Kec. Posumaen)	Angka	77	77	77	100		KECAMATAN PUSOMAEN
2	Persentase Desa Yang Melaksanakan Musrenbang (Kec.Posumaen)	%	100	100	100	100		KECAMATAN PUSOMAEN



NO	URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN INDIKAT OR	TARGET AKHIR RPJMD 2018-2023	TARGET TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2023	STATUS CAPAIAN TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)x100	8	9
3	Persentase Desa Yang Memiliki BUMDES (Kec. Pusomaen)	%	100	100	100	100	●	KECAMATAN PUSOMAEN
4	Persentase LPM Berprestasi (Kec. Pusomaen)	%	23	0	0	0	●	KECAMATAN PUSOMAEN
5	Persentase Masyarakat Yang berpartisipasi di Musrenbang Kecamatan (Kec. Pusomaen)	%	100	100	100	100	●	KECAMATAN PUSOMAEN
6	Persentase Pameran Pembangunan Yang Diikuti (Kec. Pusomaen)	%	100	100	100	100	●	KECAMATAN PUSOMAEN
7	Persentase PKK Aktif (Kec. Pusomaen)	%	100	100	100	100	●	KECAMATAN PUSOMAEN
8	Persentase Posyandu Aktif (Kec. Pusomaen)	%	100	100	100	100	●	KECAMATAN PUSOMAEN
9	Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat (Kec. Pusomaen)	%	100	100	100	100	●	KECAMATAN PUSOMAEN
10	Persentasi LSM Aktif (Kec. Pusomaen)	%	100	100	100	100	●	KECAMATAN PUSOMAEN
11	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK (Kec. Pusomaen)	Kelompok	4	3	3	100	●	KECAMATAN PUSOMAEN
12	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (Kec. Pusomaen)	%	100	100	100	100	●	KECAMATAN PUSOMAEN

NO	URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN INDIKATOR	TARGET AKHIR RPJMD 2018-2023	TARGET TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2023	STATUS CAPAIAN TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7 = $(6/5) \times 100$	8	9
13	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Kec. Pusomaen)	Angka	77	77	77	100		KECAMATAN PUSOMAEN
14	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (Kec. Pusomaen)	%	100	100	100	100		KECAMATAN PUSOMAEN
KECAMATAN RATATOTOK								
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (kec. Ratatotok)	Angka	77	77	77	100		KECAMATAN RATATOTOK
2	Persentase Desa Yang Melaksanakan Musrenbang (Kec. Ratatotok)	%	100	100	100	100		KECAMATAN RATATOTOK
3	Persentase Desa Yang Memiliki BUMDES (Kec. Ratatotok)	%	100	100	100	100		KECAMATAN RATATOTOK
4	Persentase LPM Berprestasi (Kec. Ratatotok)	%	23	23	23	100		KECAMATAN RATATOTOK
5	Persentase Masyarakat Yang berpartisipasi di Musrenbang Kecamatan (Kec. Ratatotok)	%	100	100	100	100		KECAMATAN RATATOTOK
6	Persentase Pameran Pembangunan Yang Diikuti (Kec. Ratatotok)	%	100	100	100	100		KECAMATAN RATATOTOK
7	Persentase PKK Aktif (Kec. Ratatotok)	%	100	100	100	100		KECAMATAN RATATOTOK



NO	URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN INDIKAT OR	TARGET AKHIR RPJMD 2018-2023	TARGET TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2023	STATUS CAPAIAN TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)x100	8	9
8	Persentase Posyandu Aktif (Kec. Ratatotok)	%	100	100	100	100		KECAMATAN RATATOTOK
9	Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat (Kec. Ratatotok)	%	100	100	100	100		KECAMATAN RATATOTOK
10	Persentasi LSM Aktif (Kec. Ratatotok)	%	100	100	100	100		KECAMATAN RATATOTOK
11	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK (Kec. Ratatotok)	Kelompok	4	4	4	100		KECAMATAN RATATOTOK
12	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (Kec.Ratatotok)	%	100	100	100	100		KECAMATAN RATATOTOK
13	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Kec. Ratatotok)	Angka	77	77	77	100		KECAMATAN RATATOTOK
14	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik(kec. ratatotok)	%	100	100	100	100		KECAMATAN RATATOTOK
	KECAMATAN RATAHAN TIMUR							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Kec. Ratahan Timur)	Angka	77	77	77	100		KECAMATAN RATAHAN TIMUR





NO	URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN INDIKAT OR	TARGET AKHIR RPJMD 2018-2023	TARGET TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2023	STATUS CAPAIAN TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)x100	8	9
2	Persentase Desa Yang Melaksanakan Musrenbang (Kec. Ratahan Timur)	%	100	100	100	100	●	KECAMATAN RATAHAN TIMUR
3	Persentase Desa Yang Memiliki BUMDES (Kec. Ratahan Timur)	%	100	100	100	100	●	KECAMATAN RATAHAN TIMUR
4	Persentase LPM Berprestasi (Kec. Ratahan Timur)	%	23	23	23	100	●	KECAMATAN RATAHAN TIMUR
5	Persentase Masyarakat Yang berpartisipasi di Musrenbang Kecamatan (Kec. Ratahan Timur)	%	100	100	100	100	●	KECAMATAN RATAHAN TIMUR
6	Persentase Pameran Pembangunan Yang Diikuti (Kec. Ratahan Timur)	%	100	100	100	100	●	KECAMATAN RATAHAN TIMUR
7	Persentase PKK Aktif (Ratahan Timur)	%	100	100	100	100	●	KECAMATAN RATAHAN TIMUR
8	Persentase Posyandu Aktif (Kec. Ratahan Timur)	%	100	100	100	100	●	KECAMATAN RATAHAN TIMUR
9	Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat (Ratahan Timur)	%	100	100	100	100	●	KECAMATAN RATAHAN TIMUR
10	Persentasi LSM Aktif (Kec. Ratahan Timur)	%	100	100	100	100	●	KECAMATAN RATAHAN TIMUR
11	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK (Kec. Ratahan Timur)	Kelompok	4	4	4	100	●	KECAMATAN RATAHAN TIMUR



NO	URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN INDIKATOR	TARGET AKHIR RPJMD 2018-2023	TARGET TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2023	STATUS CAPAIAN TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7 = $(6/5) \times 100$	8	9
12	"Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (Kec. Ratahan Timur)	%	100	100	100	100		KECAMATAN RATAHAN TIMUR
13	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Kec. Ratahan Timur)	Angka	77	77	77	100		KECAMATAN RATAHAN TIMUR
14	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (Kec. Ratahan Timur)	%	100	100	100	100		KECAMATAN RATAHAN TIMUR
KECAMATAN TOMBATU TIMUR								
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Kec. Tombatu Timur)	Angka	77	77	77	100		KECAMATAN TOMBATU TIMUR
2	Presentase Desa yang melaksanakan Musrenbang (Kec. Tombatu Timur)	%	100	100	100	100		KECAMATAN TOMBATU TIMUR
3	Presentase Desa yang Memiliki BUMDES (Kec. Tombatu Timur)	%	100	100	100	100		KECAMATAN TOMBATU TIMUR
4	Presentase LPM Berprestasi (Kec. Tombatu Timur)	%	23	23	23	100		KECAMATAN TOMBATU TIMUR
5	Presentase LSM Aktif (Kec. Tombatu Timur)	%	100	100	100	100		KECAMATAN TOMBATU TIMUR



NO	URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN INDIKAT OR	TARGET AKHIR RPJMD 2018-2023	TARGET TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2023	STATUS CAPAIAN TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)x100	8	9
6	Presentase Masyarakat yang berpartisipasi di Musrenbang Kecamatan (Kec. Tombatu Timur)	%	100	100	100	100	●	KECAMATAN TOMBATU TIMUR
7	Presentase Pameran Pembangunan yang diikuti (Kec. Tombatu Timur)	%	100	100	100	100	●	KECAMATAN TOMBATU TIMUR
8	Presentase PKK Aktif (Kec. Tombatu Timur)	%	100	100	100	100	●	KECAMATAN TOMBATU TIMUR
9	Presentase Posyandu Aktif (Kec. Tombatu Timur)	%	100	100	100	100	●	KECAMATAN TOMBATU TIMUR
10	Presentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat (kec. Tombatu Timur)	%	50	50	50	100	●	KECAMATAN TOMBATU TIMUR
11	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK (Kec. Tombatu Timur)	Kelompok	4	4	4	100	●	KECAMATAN TOMBATU TIMUR
12	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) (Kec. Tombatu Timur)	%	100	100	100	100	●	KECAMATAN TOMBATU TIMUR
13	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Kec. Tombatu Timur)	Angka	77	77	77	100	●	KECAMATAN TOMBATU TIMUR
14	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik (Kec.	%	100	100	100	100	●	KECAMATAN TOMBATU TIMUR



NO	URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN INDIKAT OR	TARGET AKHIR RPJMD 2018-2023	TARGET TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2023	STATUS CAPAIAN TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)x100	8	9
	Tombatu Timur)							
	KECAMATAN TOMBATU UTARA							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan Pemerintah (Kec. Tombatu Utara)	Angka	77	77	77	100	●	KECAMATAN TOMBATU UTARA
2	Presentase Desa yang melaksanakan Musrenbangara (Kec. Tombatu Utara)	%	100	100	100	100	●	KECAMATAN TOMBATU UTARA
3	Presentase Desa yang Memiliki BUMDES (Kec. Tombatu Utara)	%	100	100	40	40	●	KECAMATAN TOMBATU UTARA
4	Presentase LPM Berprestasi (Kec. Tombatu Utara)	%	23	23	0	0	●	KECAMATAN TOMBATU UTARA
5	Presentase LSM Aktif (Kec. Tombatu Utara)	%	100	100	0	0	●	KECAMATAN TOMBATU UTARA
6	Presentase Masyarakat yang Berpartisipasi di Musrenbang Kecamatan (Kec. Tombatu Utara)	%	100	100	100	100	●	KECAMATAN TOMBATU UTARA
7	Presentase Pameran Pembangunan yang Diikuti (Tombatu Utara)	%	100	100	0	0	●	KECAMATAN TOMBATU UTARA
8	Presentase PKK Aktif (Kec. Tombatu Utara)	%	100	100	100	100	●	KECAMATAN TOMBATU UTARA





NO	URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN INDIKATOR	TARGET AKHIR RPJMD 2018-2023	TARGET TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2023	STATUS CAPAIAN TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)x100	8	9
9	Presentase Posyandu Aktif (Kec. Tombatu Utara)	%	100	100	100	100		KECAMATAN TOMBATU UTARA
10	Presentase Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat (Kec. Tombatu Utara)	%	50	50	50	100		KECAMATAN TOMBATU UTARA
11	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK (Kec. Tombatu Utara)	Kelompok	4	4	4	100		KECAMATAN TOMBATU UTARA
12	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan (Kec. Tombatu Utara)	%	100	100	80	80		KECAMATAN TOMBATU UTARA
13	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Kec. Tombatu Utara)	Angka	77	77	80	80		KECAMATAN TOMBATU UTARA
14	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang baik (Kec. Tombatu Utara)	%	100	100	80	80		KECAMATAN TOMBATU UTARA
	KECAMATAN SILIAN RAYA							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Silian)	Kategori	BB	BB	BB	BB		KECAMATAN SILIAN RAYA
2	Persentase Desa Yang Memiliki BUMDES (Silian)	%	S	100	100	100		KECAMATAN SILIAN RAYA



NO	URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN INDIKAT OR	TARGET AKHIR RPJMD 2018-2023	TARGET TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2023	STATUS CAPAIAN TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)x100	8	9
3	Persentase LPM Berprestasi (Silian)	%	23	23	25	108,7		KECAMATAN SILIAN RAYA
4	Persentase Masyarakat Yang berpartisipasi di Musrenbang Kecamatan (Silian)	%	100	100	100	100		KECAMATAN SILIAN RAYA
5	Persentase Pameran pembangunan yang diikuti (Silian Raya)	%	100	100	0	0		KECAMATAN SILIAN RAYA
6	Persentase PKK Aktif (Silian)	%	100	100	100	100		KECAMATAN SILIAN RAYA
7	Persentase Posyandu Aktif (Silian)	%	100	100	100	100		KECAMATAN SILIAN RAYA
8	Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat (Silian)	%	50	50	60	120		KECAMATAN SILIAN RAYA
9	Persentasi LSM Aktif (Silian)	%	100	100	0	0		KECAMATAN SILIAN RAYA
10	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (Silian)	Kelompok	10	10				KECAMATAN SILIAN RAYA
11	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	Kelompok	4	4	4	100		KECAMATAN SILIAN RAYA



NO	URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN INDIKATOR	TARGET AKHIR RPJMD 2018-2023	TARGET TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2023	STATUS CAPAIAN TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7 = $\frac{6}{5} \times 100$	8	9
12	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (Silian)	%	100	100	80	80		KECAMATAN SILIAN RAYA
13	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Silian)	Angka	77	77	80	103,9		KECAMATAN SILIAN RAYA
14	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (Silian)	%	100	100	80	80		KECAMATAN SILIAN RAYA
KECAMATAN TOULUAAN SELATAN								
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Touluaan Selatan)	Angka	77	77	77	100		KECAMATAN TOULUAAN SELATAN
2	Persentase Desa Yang Memiliki BUMDES (Touluaan Selatan)	%	100	100	100	100		KECAMATAN TOULUAAN SELATAN
3	Persentase LPM Berprestasi (Touluaan Selatan)	%	23	23	25	108,7		KECAMATAN TOULUAAN SELATAN
4	Persentase Masyarakat Yang berpartisipasi di Musrenbang Kecamatan Touluaan Selatan)	%	100	100	100	100		KECAMATAN TOULUAAN SELATAN
5	Persentase Pameran Pembangunan Yang Diikuti (Touluaan Selatan)	%	100	100	0	0		KECAMATAN TOULUAAN SELATAN
6	Persentase PKK Aktif (Touluaan Selatan)	%	100	100	100	100		KECAMATAN TOULUAAN SELATAN



NO	URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN INDIKATOR	TARGET AKHIR RPJMD 2018-2023	TARGET TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2023	STATUS CAPAIAN TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)x100	8	9
7	Persentase Posyandu Aktif (Touluaan Selatan)	%	100	100	100	100		KECAMATAN TOULUAAN SELATAN
8	Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat (Touluaan Selatan)	%	50	50	60	120		KECAMATAN TOULUAAN SELATAN
9	Persentasi LSM Aktif (Touluaan Selatan)	%	100	100	0	0		KECAMATAN TOULUAAN SELATAN
10	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	Kelompok	4	4	4	100		KECAMATAN TOULUAAN SELATAN
11	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) Touluaan Selatan	%	100	100	80	80		KECAMATAN TOULUAAN SELATAN
12	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Touluaan Selatan)	Angka	77	77	80	103,9		KECAMATAN TOULUAAN SELATAN
13	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (Touluaan Selatan)	%	100	100	80	80		KECAMATAN TOULUAAN SELATAN
KECAMATAN PASAN								
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Kec. Pasan)	Angka	77	77	77	100		KECAMATAN PASAN
2	Persentase Desa Yang Melaksanakan	%	100	100	100	100		KECAMATAN PASAN



NO	URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN INDIKATOR	TARGET AKHIR RPJMD 2018-2023	TARGET TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2023	STATUS CAPAIAN TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7 = $\frac{6}{5} \times 100$	8	9
	Musrenbang (Kec. Pasan)							
3	Persentase Desa Yang Memiliki BUMDES (Kec. Pasan)	%	100	100	100	100	●	KECAMATAN PASAN
4	Persentase LPM Berprestasi (Kec. Pasan)	%	23	23	23	100	●	KECAMATAN PASAN
5	Persentase Masyarakat Yang berpartisipasi di Musrenbang Kecamatan (Kec. Pasan)	%	100	100	100	100	●	KECAMATAN PASAN
6	Persentase Pameran Pembangunan Yang Diikuti (Kec. Pasan)	%	100	100	100	100	●	KECAMATAN PASAN
7	Persentase PKK Aktif (Kec. Pasan)	%	100	100	100	100	●	KECAMATAN PASAN
8	Persentase Posyandu Aktif (Kec. Pasan)	%	100	100	100	100	●	KECAMATAN PASAN
9	Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat (Kec. Pasan)	%	100	100	100	100	●	KECAMATAN PASAN
10	Persentasi LSM Aktif (Kec. Pasan)	%	100	100	100	100	●	KECAMATAN PASAN
11	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK (Kec. Pasan)	Kelompok	4	4	4	100	●	KECAMATAN PASAN



NO	URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN INDIKAT OR	TARGET AKHIR RPJMD 2018-2023	TARGET TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2023	STATUS CAPAIAN TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)x100	8	9
12	"Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (Kec. Pasan)	%	100	100	100	100		KECAMATAN PASAN
13	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Kec. Pasan)	Angka	77	77	77	100		KECAMATAN PASAN
14	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (Kec. Pasan)	%	100	100	100	100		KECAMATAN PASAN
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							
08.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							
1	Tingkat Ketahanan Ideologi dan Karakteristik Kebangsaan	%	87	87	85	98		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2	Tingkat Pembinaan Politik	%	87	87	85	98		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3	Tingkat Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	%	87	87	85	98		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4	Tingkat Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	%	87	87	85	98		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK





NO	URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN INDIKAT OR	TARGET AKHIR RPJMD 2018-2023	TARGET TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2023	STATUS CAPAIAN TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)x100	8	9
5	Tingkat Kewaspadaan Daerah dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	%	87	87	85	98		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X								
X.XX								
X.XX. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
X.XX. 01	Nilai LKIP Perangkat Daerah	Kategori	BB	BB				SEMUA PERANGKAT DAERAH

Keterangan : Capaian Kurang Dari 100%

Capaian 100%

Capaian Melebihi 100%



Berdasarkan rekapitulasi hasil telaah evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2023 menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun 2023, secara umum disajikan pada Tabel 2.199 berikut.

Tabel 2.199
Rekapitulasi Evaluasi Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan dan Kinerja Hasil Program Tahun 2023

NO	Jenis Pencapaian Indikator Kinerja	Program (indikator kinerja)	
		Jumlah	%
1	Realisasi indikator kinerja yang tidak memenuhi target yang direncanakan (capaian kurang dari 100%)	158	35,34
2	Realisasi indikator kinerja yang telah memenuhi target yang direncanakan (capaian 100%)	223	49,88
3	Realisasi indikator kinerja yang melebihi target yang direncanakan (capaian lebih dari 100%)	66	14,76

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara sasaran pembangunan yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan pembangunan dilaksanakan. Untuk meminimalisir kesenjangan tersebut, maka diperlukan perumusan yang tepat terkait analisis permasalahan daerah. Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, serta kesepakatan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah, maka diketahui permasalahan utama Kabupaten Minahasa Tenggara yakni **"Belum optimalnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara"**. Permasalahan utama pembangunan Kabupaten Minahasa Tenggara tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 5 (Lima) pokok permasalahan berikut:

1. Kualitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan;
2. Inovasi dan daya saing meningkatkan nilai tambah dan produktivitas dibarengi efisiensi pada sektor perekonomian masih perlu ditingkatkan;
3. Pembangunan tata ruang dan penyediaan infrastruktur dasar perlu ditingkatkan;

4. Penanganan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana perlu ditingkatkan;
dan
5. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) perlu ditingkatkan.

Untuk lebih memahami secara mendalam maka keterkaitan permasalahan pokok dengan permasalahan utama dapat ditunjukkan pada gambar 2.14.



Gambar 2.14
Permasalahan Utama dan Permasalahan Pokok
Pembangunan Kabupaten Minahasa Tenggara

Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Minahasa Tenggara diidentifikasi melalui kajian data dan informasi pembangunan daerah khususnya data strategis pembangunan. Berikut penjabaran permasalahan pembangunan Kabupaten Minahasa Tenggara berdasarkan gambaran umum kondisi pembangunan daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara:

1. **Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Masih Perlu Ditingkatkan**

Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan **Kualitas Sumber Daya Manusia yang Masih Perlu Ditingkatkan** dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.200
Rumusan Permasalahan Yang Berhubungan Dengan Kualitas Sumber
Daya Manusia yang Masih Perlu Ditingkatkan

Permasalahan	Akar Masalah
1) Belum optimalnya kualitas	Belum optimalnya penyelenggaraan

Permasalahan	Akar Masalah
pelayanan pendidikan	pendidikan dasar 9 tahun
	Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana Pendidikan
	Masih perlunya peningkatan pendidikan pembentukan karakter
2) Masih rendahnya kualitas kesehatan masyarakat	Belum optimalnya budaya perilaku hidup sehat pada masyarakat
	Belum optimalnya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
	Belum optimalnya kompetensi tenaga medis dan non medis
	Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana Kesehatan
3) Masih belum optimal penanganan perlindungan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Masih kurang optimal peran masyarakat dalam penanganan PMKS
	PMKS yang memperoleh bantuan sosial dan terlayani masih kurang
4) Masih tingginya beban pengeluaran warga miskin	Belum optimalnya cakupan masyarakat miskin yang terlayani jaminan kesehatan
5) Pelestarian kekayaan dan keragaman budaya masih perlu ditingkatkan	Belum optimalnya pelestarian seni dan budaya yang berbasis kearifan lokal
6) Rendahnya minat generasi muda untuk berusaha di bidang pertanian, perkebunan dan perikanan	Kurangnya pelatihan-pelatihan untuk generasi muda di bidang pertanian, perkebunan dan Perikanan serta kewirausahaan
7) Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih perlu ditingkatkan	Kecenderungan penurunan peran serta masyarakat dalam pembangunan
	Peran dan fungsi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan masih perlu dioptimalkan
	Masih perlu dioptimalkannya koordinasi lintas sektor untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat

2. Inovasi dan daya saing meningkatkan nilai tambah dan produktivitas dibarengi efisiensi pada sektor perekonomian masih perlu ditingkatkan;

Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan **Inovasi dan daya saing meningkatkan nilai tambah dan produktivitas dibarengi efisiensi pada sektor perekonomian masih perlu ditingkatkan** dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.201
Rumusan Permasalahan : Inovasi dan daya saing meningkatkan nilai tambah dan produktivitas dibarengi efisiensi pada sektor perekonomian masih perlu ditingkatkan

Permasalahan	Akar Masalah
1) Kurang	Belum optimalnya upaya pengembangan dan

Permasalahan	Akar Masalah
berkontribusinya sektor-sektor lainnya dalam perekonomian daerah dan Mulai menurunnya kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian daerah	pengelolaan objek dan daya tarik wisata
	Harga Produk Pertanian, Perkebunan dan Perikanan yang tidak stabil dibandingkan ongkos produksi yang mahal
	Mulai beralihnya tenaga kerja pertanian, Perkebunan dan Perikanan ke sektor lain sehingga upah tenaga kerja menjadi lebih tinggi yang mengakibatkan ongkos produksi meningkat
	Terjadinya Alih Fungsi Lahan pertanian, Perkebunan dan Perikanan Produktif ke peruntukan lainnya
	Sulitnya Usaha Pertanian, Perkebunan dan Perikanan untuk mendapat modal usaha dari Perbankan
2) Masih belum optimalnya nilai investasi	Pengelolaan bahan baku yang belum maksimal
	Promosi investasi produk unggulan yang dilakukan masih lemah serta sarana dan prasarana pendukung investasi yang masih kurang
	Kemudahan dalam berinvestasi perlu ditingkatkan
3) Daya saing dan Inovasi UMKM yang rendah	Akses permodalan dan pasar serta Manajemen Industri Kecil Menengah (IKM) masih terbatas
	Masih kurangnya sentra usaha / produk ekonomi local
	Belum optimalnya hubungan kerjasama usaha antara IKM dengan industri besar
	Akses permodalan dan pasar Industri Kecil Menengah (IKM) masih terbatas
4) Ketahanan pangan masyarakat masih perlu ditingkatkan	Masih kurangnya variasi keanekaragaman pangan masih tergantung pada pangan utama

3. **Belum Optimalnya Pembangunan Tata Ruang dan Penyediaan Infrastruktur Dasar**

Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan **Belum Optimalnya Pembangunan tata ruang dan Penyediaan Infrastruktur Dasar** dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.202
Rumusan Permasalahan: Belum Optimalnya Pembangunan Tata Ruang dan Penyediaan Infrastruktur Dasar

Permasalahan	Akar Masalah
1) Masih diperlukan peningkatan pengelolaan tata ruang	Belum optimalnya kesesuaian tata ruang
	Belum Memiliki Rencana Detail Tata Ruang Daerah
	Pengembangan kawasan yang mendukung perwujudan tata ruang yang berdaya guna perlu dioptimalkan
2) Belum seluruh permukiman memiliki sarana dan prasarana dasar yang berkualitas	Masih terdapat kondisi lingkungan permukiman yang buruk
	Masih perlunya pengoptimalan upaya peningkatan pelayanan pengelolaan air minum dan air limbah
	Ketersediaan sanitasi untuk rumah tangga perlu ditingkatkan.
	Masih terdapatnya kawasan perumahan kumuh
3) Belum optimalnya aksesibilitas dan	Masih perlunya pengoptimalan Integrasi jaringan jalan dan fasilitas jalan

konektivitas kawasan-kawasan strategis	Masih perlunya pengoptimalan Pengelolaan sarana dan prasarana transportasi
4) Belum Optimalnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Perkantoran dan Pelayanan Publik	Belum Tersedianya Renstra Pengembangan Teknologi dan Informasi
	Belum mantapnya Infrastruktur Teknologi dan Informasi di Perkantoran dan Fasilitas Pelayanan Publik
	Belum Optimalnya SDM Pengelola Komunikasi dan Informatika

4. Belum Optimalnya Penanganan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan **Belum Optimalnya Penanganan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana** dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.203
Rumusan Permasalahan: Belum Optimalnya Penanganan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Permasalahan	Akar Masalah
1) Pengelolaan kualitas lingkungan hidup yang masih belum optimal	Belum Optimalnya Pengelolaan Persampahan
2) Masih terjadinya Banjir Bandang, Genangan Banjir, ROB dan Tanah Longsor	Infrastruktur pengendali Rob dan Banjir belum terbangun secara menyeluruh
	Saluran drainase belum terintegrasi secara menyeluruh
3) Belum optimalnya ketangguhan bencana	Masih kurangnya sistem peringatan dini bencana

5. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) Masih Belum Optimal dan Masih tingginya gangguan ketentraman dan ketertiban Masyarakat

Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) Masih Belum Optimal dan Masih tingginya gangguan ketentraman dan ketertiban Masyarakatdapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.204
Rumusan Permasalahan: Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) Masih Belum Optimal dan Masih tingginya gangguan ketentraman dan ketertiban Masyarakat

Permasalahan	Akar Masalah
1) Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik	Belum optimalnya penyusunan dan penerapan SOP, SP dan SPM
	Belum optimalnya sarana prasarana pelayanan publik sesuai standar

Permasalahan	Akar Masalah
	Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik
	Belum tersedianya sarana dan prasarana untuk kaum disabilitas di setiap fasilitas pelayanan publik
	Belum optimalnya budaya kerja aparatur
2) Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah daerah	Belum optimalnya Implementasi SPIP dan Kapabilitas APIP
	belum optimalnya sistem manajemen SDM aparatur
	belum optimalnya kinerja dan ketatalaksanaan Perangkat Daerah
	Belum optimalnya pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah
	Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan dan aset daerah
	Belum optimalnya integrasi sistem perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pengelolaan keuangan dan aset daerah
	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah
	Belum optimalnya tingkat kesesuaian perencanaan pembangunan
3) Masih tingginya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan perundangan
	Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga ketertiban dan ketentraman
	Masih adanya ancaman dan gangguan , kerawanan sosial politik terhadap masyarakat

2.3.2. Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

Berdasarkan evaluasi dan analisis terhadap permasalahan dari perangkat Daerah yang ada maka Permasalahan pembangunan Kabupaten Minahasa Tenggara per bidang urusan adalah sebagai berikut:

Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

- a) Angka rata-rata lama bersekolah (9,13 tahun) belum memenuhi program wajib belajar pendidikan menengah 12 tahun;
- b) Masih terdapat penduduk buta huruf (0,9 %).
- c) Masih terdapat usia sekolah yang belum atau tidak bersekolah pada jenjangnya.
- d) Distribusi guru belum merata.
- e) Masih terdapat siswa miskin.
- f) Akses pendidikan belum maksimal.
- g) Terdapat anak usia sekolah yang kurang gizi.

- h) Derajat daya saing siswa tingkat provinsi dan nasional belum optimal.
- i) Capaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan belum sesuai harapan.

2. Kesehatan

- a) Angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi masih ada.
- b) Angka Kehamilan, melahirkan dan pernikahan usia remaja cukup tinggi.
- c) Belum ada Rumah Sakit Pratama (Tahun depan akan diadakan)
- d) Masih tingginya angka penyakit menular utamanya AIDS, Malaria, TBC, Rabies, Sementara penyakit tidak menular atau degenerative mulai meningkat, disamping itu telah timbul pula berbagai penyakit baru (*new and re-emerging diseases*). Penanggulangan penyakit Malaria, HIV/AIDS dan TB masih perlu mendapat perhatian dan penanganan.
- e) Disparitas status kesehatan yang berbeda antara Kabupaten/kota masih cukup lebar terutama di DTPK.
- f) Penyebaran SDM Kesehatan belum merata. Tenaga-tenaga kesehatan masih terpusat di daerah perkotaan. Dibeberapa daerah Kabupaten/kota masih terdapat kekurangan tenaga dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis terutama Kabupaten kota pemekaran. Upaya yang telah dilakukan sampai saat ini yaitu adanya pemenuhan melalui program dokter / dokter gigi / dokter spesialis PTT. Program pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan untuk daerah terpencil, tertinggal, dan perbatasan juga telah diupayakan.
- g) Jumlah Sarana dan prasarana yang kesehatan belum memadai.
- h) Kasus balita gizi kurang masih ada.
- i) Biaya kesehatan meningkat secara signifikan sehingga menyulitkan masyarakat "hampir miskin" yang tidak mendapatkan fasilitas jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) untuk mengakses pelayanan kesehatan yang baik.
- j) Alokasi Jamkesmas sering belum tepat sasaran sehingga banyak masyarakat yang berhak tidak memperolehnya, sebaliknya masyarakat yang tidak berhak mendapatkannya.
- k) Minat tenaga medis, khusus tenaga ahli untuk ditempatkan di daerah-daerah kecil atau terpencil masih kurang.

- l) Berbagai jenis penyakit baru muncul sebagai akibat perubahan gaya hidup dan pencemaran lingkungan makin meningkat (PTM).
- m) Kesadaran akan pola hidup sehat dan sanitasi lingkungan pada sebagian masyarakat masih rendah.
- n) Pengembangan Desa Siaga Aktif belum optimal dikarenakan kurangnya biaya operasional.
- o) Sarana dan prasarana promosi kesehatan (promkes) belum tersedia.
- p) Pengembangan KTR (Kawasan Tanpa Rokok) belum maksimal.
- q) Pemanfaatan obat-obat tradisional mulai, padahal kearifan lokal penting sebagai alternatif pengobatan (Mulai berkurangnya obat-obat tradisional karena mulai langka dan tidak dikembangkan).
- r) Masih ada Puskesmas yang belum memiliki rumah dinas medis dan paramedis.
- s) Masih ada puskesmas yang perlu direlokasi dikarenakan lokasi tidak memenuhi syarat.(Puskesmas Ratatotok).
- t) Bahan pangan lokal yang bergizi belum dimanfaatkan secara optimal (Penganekaragaman makanan lokal yang kurang).
- u) Masih banyak masyarakat yang belum memahami cara hidup sehat. (masih ada masyarakat yang tidak menggunakan jamban yang tersedia (pesisir pantai) karena prilaku/kebiasaan masyarakat dan prilaku hidup bersih dan sehat yang rendah).

3. Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;

- a) Rendahnya aksesibilitas dan mobilitas
- b) Terdapatnya kerusakan jalan, jembatan, bangunan pelengkap jalan
- c) Masih rendahnya sistem drainase akibat belum adanya drainase
- d) Masih kurangnya sarana dan prasarana keninamargaan yang menunjang pelaksanaan kegiatan peningkatan, pemeliharaan, jalan jembatan
- e) Terdapat defisit imbalanced air irigasi pada beberapa daerah irigasi dimusim kemarau serta bangunan irigasi yang sudah berumur
- f) Belum sepenuhnya masyarakat mendapatkan akses terhadap air minum dan sanitasi yang memadai

**4. Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman**

- a) Adanya rumah tidak layak huni (RTLH) yang dimiliki oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di dalam Kawasan Kumuh.
- b) Adanya rumah tidak layak huni (RTLH) yang dimiliki oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di luar Kawasan Kumuh.
- c) Adanya rumah yang berada di lokasi Rawan Bencana.
- d) Adanya lingkungan perumahan belum didukung oleh Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) yang memadai seperti PJU, drainase dan jalan lingkungan serta ruang terbuka non hijau baik yang berada di dalam maupun di luar Kawasan Kumuh.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat

- a) Masih adanya penyimpangan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- b) Masih kurangnya sosialisasi atau penyuluhan tentang peraturan daerah kepada Masyarakat.
- c) Masih belum mencukupinya sarana dan prasarana (alat komunikasi dan peralatan).
- d) Peningkatan SDM Aparatur.
- e) Kecenderungan meningkatnya angka kriminalitas.

6. Penanggulangan Bencana

- a) Masih rendahnya memanfaatkan kearifan lokal dalam penanganan bencana.
- b) Belum optimalnya dan pemanfaatan potensi SDM untuk meningkatkan komitmen para pemangku dalam upaya peningkatan penanganan bencana.
- c) Perlunya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan SDM aparatur.
- d) Masih rendahnya kualitas pelayanan publik melalui penyediaan data yang akurat.

7. Sosial

- a) Prosentase angka kemiskinan yang ada di daerah Kabupaten Minahasa Tenggara masih tinggi.





- b) Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) masih belum efektif.
- c) Data penyandang disabilitas (penyandang cacat) belum akurat, penyaluran bantuan kelompok usaha bersama (KUBE) masih tidak tepat sasaran serta peningkatan kesejahteraan lansia terlantar dan anak terlantar yang belum sesuai dengan peruntukan.

Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

- a) Masih adanya Traffiking illegal di Kabupaten Minahasa Tenggara (Perekrutan dan Pengiriman Tenaga kerja Indonesia secara illegal).
- b) Pengusaha masih belum sepenuhnya sadar akan kewajibannya terhadap pekerja/Buruh.
- c) Masih adanya Perusahaan yang belum melaksanakan Wajib Laporkan Ketenagakerjaan.
- d) Masih belum maksimal pelaksanaan pelatihan-pelatihan baik pelatihan yang berbasis Kompetensi ,Masyarakat maupun yang berbasis Kewirausahaan dikarenakan keterbatasan anggaran.
- e) Belum adanya PPTKIS yang mendirikan kantor cabang di Kabupaten Minahasa Tenggara.
- f) Masih Kurangnya Data Lowongan Pekerjaan yang ada.

2. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

- a) Perlunya penguatan peran, kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan lembaga-lembaga penggiat dan pemerhati perempuan dan anak.
- b) Perlunya penguatan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan sinergi lintas SKPD dan Focal Group Discussion.
- c) Perlunya fasilitasi penyusunan, Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) atas kebijakan program/kegiatan SKPD.
- d) Perlunya penyediaan data terkait perkembangan PUG, PP dan PA termasuk penyusunan profil data terpilah gender dan anak.





- e) Perlunya pengembangan materi Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Pengarusutamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- f) Perlunya pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program/kegiatan PUG, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- g) Perlunya fasilitasi/penanganan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan melalui pusat pelayanan terpadu.
- h) Perlunya peningkatan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi di bidang perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak dengan instansi dan lembaga layanan.
- i) Perlunya penyediaan data terkait penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
- j) Perlunya pelaksanaan kebijakan/program dan kegiatan terkait penyelenggaraan pengarusutamaan dan pemenuhan hak anak.
- k) Perlunya peningkatan kerjasama lintas sektor/lintas SKPD dalam rangka kebijakan Kabupaten Layak Anak.
- l) Perlunya evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas urusan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- m) Perlunya peningkatan kualitas hidup perempuan yang termasuk kelompok rentan melalui sosialisasi, bimbingan, keterampilan dan berbagai upaya pemberdayaan.
- n) Perlunya peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi berbagai kegiatan pemberdayaan perempuan dan capaian tingkat keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan perempuan secara makro.
- o) Perlunya peningkatan kerjasama lintas sektor dan lintas lembaga peningkatan kapasitas dan pemberdayaan perempuan.
- p) Perlunya program perempuan pengembang ekonomi lokal melalui pemberdayaan ekonomi perempuan.
- q) Perlunya program peningkatan peran perempuan dalam peningkatan kesejahteraan keluarga.
- r) Perlunya evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas urusan Pemberdayaan Perempuan.





- s) Perlunya peningkatan kualitas hidup anak melalui fasilitasi kebijakan Kabupaten Layak Anak.
- t) Perlunya penguatan Forum anak/kelompok anak di tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
- u) Perlunya pengembangan Materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi.
- v) Perlunya sinkronisasi program dan kegiatan lintas SKPD.
- w) Perlunya penguatan Pokja Kabupaten Minahasa Tenggara Layak Anak.
- x) Perlunya evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas urusan perlindungan dan peningkatan kualitas hidup anak.

3. Pangan

- a) Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi yang sangat penting bagi upaya meningkatkan ketahanan pangan khususnya tingkat lokal sehingga membutuhkan dukungan penuh dan konkrit dari semua pihak dengan mengoptimalkan keterlibatan dan tanggung jawab yang jelas kepada masyarakat dalam mengelola ketahanan pangan lokal.
- b) Sistem cadangan dan distribusi pangan belum terlaksana dengan baik sehingga diperlukan pengelolaan dengan melibatkan kelompok tani dan gapoktan untuk melakukan pengadaan cadangan pangan dibarengi dengan dukungan modal, juga melalui pengembangan lumbung pangan masyarakat.
- c) Kemitraan dan peran pemerintah, organisasi, LSM dan masyarakat masih rendah terhadap penganeekaragaman pangan yang menyebabkan diversifikasi pangan masih minim dilakukan melalui kegiatan penyuluhan penganeekaragaman konsumsi pangan baik di masyarakat, posyandu maupun sekolah-sekolah sehingga pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki tentang pentingnya konsumsi pangan dan gizi yang cukup masih rendah.
- d) Belum tersedianya deteksi dini yang dilengkapi indikator-indikator dalam mengantisipasi kerawanan pangan dan gizi.
- e) Pengawasan terhadap produk pangan olahan baik industri rumah tangga maupun menengah dan besar masih terbatas dilakukan terkait dengan kesadaran produsen dalam masalah mutu dan kebersihan produk. Standarisasi yang berkaitan dengan mutu keamanan pangan segar dan olahan diperlukan sosialisai kepada masyarakat.



**4. Pertanahan**

- a) Masih banyaknya bidang tanah yang belum bersertifikat.

5. Lingkungan Hidup

- a) Isu lingkungan belum ditempatkan sebagai peluang pembangunan ekonomi.
- b) Kepedulian masyarakat yang masih harus ditingkatkan, didukung dengan perilaku budaya yang ramah lingkungan.
- c) Sumber daya manusia dan kelembagaan lingkungan hidup di daerah yang masih harus ditingkatkan.
- d) Kurangnya Sumber Daya Manusia dalam Pelestarian Lingkungan.
- e) Perlu penambahan Armada Pengangkut Sampah.
- f) Perlunya fasilitas sarana dan prasarana pengujian kualitas air, udara, dan tutupan lahan.
- g) Perlunya penambahan dan penataan ruang terbuka hijau.

6. Kependudukan Dan Catatan Sipil

- a) Masih adanya penduduk yang belum memiliki KTP-el.
- b) Masih adanya pemegang Kartu Keluarga Lama.
- c) Masih adanya penduduk yang belum mengurus atau memiliki akte kelahiran.
- d) Kurangnya kualitas data kependudukan.
- e) Sulitnya aksesibilitas sebagian penduduk, karena pelayanan terpusat di Kabupaten Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap menurunnya keinginan penduduk untuk mengurus kelengkapan dokumen kependudukan yang belum dimiliki.

7. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

- a) Kompetensi aparatur pemerintah desa/kelurahan terbatas karena tingkat pendidikan rendah dan masih kurangnya diklat pemerintahan desa/kelurahan.
- b) Kesejahteraan aparatur pemerintah desa/kelurahan masih rendah disebabkan keterbatasan dana APBD juga jumlah perangkat desa/kelurahan yang banyak.





- c) Produk hukum desa yang disusun bersama pemerintah desa dan BPD sangat minim karena pemahaman terhadap mekanisme penyusunan masih terbatas.
- d) Pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan belum optimal karena bantuan pembangunan yang terbatas, tingkat partisipasi rendah dan nilai-nilai mapalus atau gotong royong mulai menurun.
- e) Lembaga kemasyarakatan belum dapat memfasilitasi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa melalui pengembangan potensi sumber daya desa karena terbatasnya sumber daya manusia dan pemahaman terhadap tugas dan fungsi.
- f) Sinergitas pemerintah, masyarakat dan pihak swasta dalam pembangunan belum optimal, sehingga pembangunan desa/kelurahan hanya bergantung pada APBD/APBN.
- g) BUMDes yang diharapkan dapat menggerakkan usaha ekonomi masyarakat, belum dapat berfungsi dengan baik karena terbatasnya kemampuan manajerial dalam mengoptimalkan potensi sumber daya perdesaan.
- h) Produktifitas usaha ekonomi masyarakat pedesaan masih rendah, antara lain karena keterbatasan modal yang disebabkan oleh tidak berfungsinya lembaga keuangan mikro atau UED-SP.
- i) Pendayagunaan teknologi pedesaan dalam usaha ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam kurang optimal disebabkan kurangnya dukungan modal juga kualitas SDM untuk mengembangkan potensi TTG.

8. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

- a) Masih terjadinya perkawinan dini dikalangan remaja.
- b) Migrasi penduduk dari daerah lain yang disebabkan oleh ketertarikan terhadap perkembangan ekonomi meningkat.
- c) Porsi penduduk berusia lanjut meningkat sebagai akibat keberhasilan mengendalikan tingkat kelahiran sehingga membutuhkan jaminan sosial yang lebih besar



9. Perhubungan

- a) Belum terbangunnya Pelabuhan-pelabuhan untuk menunjang kelancaran transportasi di bidang Perhubungan Laut.
- b) Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang mumpuni dalam bidang Pengujian Kendaraan, Perparkiran, Lalu Lintas, Pengukuran Kapal
- c) Ketersediaan sarana dan prasarana Jalan Raya, meningkatkan kesadaran pengguna Jalan Untuk Taat Berlalu Lintas

10. Komunikasi Dan Informatika

- a) Belum optimalnya pemanfaatan website milik pemerintah daerah maupun Perangkat Daerah untuk penyebarluasan informasi pembangunan kepada masyarakat luas.
- b) Kurangnya sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi.
- c) Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang jaringan internet.
- d) *Data base* pemerintah daerah relatif belum memadai.
- e) Belum adanya peralatan persandian yang memadai.
- f) Belum adanya SDM di Bidang Persandian.

11. Koperasi Dan UMKM

- a) Belum tersebarnya Industri Kecil dan Menengah secara merata.

12. Penanaman Modal Daerah

- a) Pengembangan sistem layanan perizinan secara elektronik yang belum tersedia.
- b) Belum diadakan penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM).
- c) Belum adanya kajian potensi dan peluang investasi daerah.
- d) Belum adanya profil pemetaan dan direktori di daerah.
- e) Kurangnya peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi dan promosi investasi.
- f) Kurangnya koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha.

13. Kepemudaan Dan Olahraga

- a) Pelayanan kepemudaan belum optimal mengingat besarnya jumlah pemuda usia 16-30 tahun dengan berbagai permasalahan seperti besarnya jumlah pemuda yang putus sekolah, pengangguran, dan terlibat penggunaan narkoba dan pergaulan bebas.
- b) Pelayanan kepemudaan belum maksimal mengingat belum adanya fasilitas gedung pemuda sebagai tempat bertukar pikiran dan kegiatan kepemudaan lainnya.
- c) Pelayanan keolahragaan dalam hal pembinaan, manajemen dan pemasyarakatan olahraga belum maksimal mengingat semakin banyak cabang olahraga dan klub olahraga yang terbentuk dibarengi dengan bertambahnya jumlah atlet yang direkrut baik oleh cabang olahraga maupun klub olahraga yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara tidak sesuai dengan ketersediaan anggaran yang memadai.
- d) Pelayanan keolahragaan belum optimal mengingat semakin banyak jumlah penduduk di Kabupaten Minahasa Tenggara yang gemar berolahraga tetapi tidak seimbang dengan jumlah gedung/tempat/lapangan olahraga yang tersedia.
- e) Kurangnya kuantitas ASN yang berlatar belakang pendidikan olahraga dalam melaksanakan kegiatan keolahragaan.
- f) Kurangnya kualitas ASN yang memahami tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
- g) ketidakakuratan data kepemudaan dan keolahragaan yang berpengaruh pada penetapan dan pencapaian target kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
- h) kurangnya kerjasama dan perhatian dari pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara untuk penyediaan data kepemudaan dan keolahragaan yang akurat, sehingga mempengaruhi kinerja perangkat daerah baik dalam mengusulkan pendanaan pada APBD maupun APBN.

14. Statistik

- a) Belum lengkapnya data yang disajikan dalam buku statistik daerah sesuai dengan kebutuhan informasi pembangunan daerah.



- b) Buku statistik dirilis terlambat setelah dokumen perencanaan di buat (RKPD, KUA PPAS).
- c) Penggunaan data dan informasi pembangunan dengan menggunakan sistim informasi pembangunan daerah (SIPD) masih belum optimal.

15. Kebudayaan

- a) Belum tersedianya Gedung Kesenian/ sarana dan prasarana yang representatif untuk menampung aktivitas seni.
- b) Masih sedikitnya jumlah dan kualitas kegiatan penyelenggaraan seni tradisi dan budaya.
- c) Minat generasi muda untuk menggali, mengelola dan melestarikan kekayaan budaya dan kearifan local relative rendah. Hal ini ditunjukkan dengan semakin sulitnya anak-anak menggunakan bahasa daerah, mencintai kuliner asli dan budaya seni keadaerahan.

16. Perpustakaan

- a) Rendahnya Minat Baca Masyarakat.
- b) Sistem Teknologi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan.
- c) Lokasi Kantor Kurang Strategis

17. Kearsipan

- a) Rendahnya Sumber Daya Manusia Aparatur.
- b) Koordinasi Antar Instansi Belum Sinergis.
- c) Keterbatasan Sarana dan Prasarana Perpustakaan.
- d) Belum Termanfaatkannya Teknologi Informasi secara Maksimal.
- e) Rendahnya Pemahaman Peraturan Perundang-Undangan Kearsipan.

Layanan Urusan Pilihan

1. Kelautan Dan Perikanan

- a) Armada penangkapan ikan masih sedikit dan kapasitasnya kecil.
- b) Nelayan masih menggunakan alat tangkap tradisional dan belum ramah lingkungan.
- c) Semakin berkurangnya lahan usaha budidaya perikanan.
- d) Infrastruktur untuk menunjang aktivitas perikanan perlu ditingkatkan.





- e) Sistem budidaya perikanan masih dilakukan secara tradisional.
- f) Belum diterapkannya CBIB oleh pembudidaya ikan.
- g) Kurangnya ketersediaan benih ikan unggul di BBI dan UPR/HSRT.
- h) Jenis komoditi budidaya perlu ditingkatkan.
- i) Maraknya IUU Fishing dan lemahnya kapasitas kelembagaan pengawasan dan penegakkan hukum.
- j) Belum optimalnya kinerja Balai Benih Ikan Air Tawar Pasan.
- k) Belum optimalnya kinerja Tempat Pelelangan Ikan Belang.
- l) Tingginya biaya operasional budidaya karena harga pakan yang mahal.
- m) Tingginya biaya opsional nelayan saat melaut dan faktor alam menyebabkan nelayan alih profesi.
- n) Diversifikasi usaha rumah tangga daerah pesisir khususnya nelayan sangat kurang.
- o) Diversifikasi produk olahan hasil perikanan perlu ditingkatkan.
- p) Masih ada Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan.
- q) Bantuan permodalan untuk kegiatan perikanan masih minim dengan persyaratan yang tidak berpihak pada pelaku usaha perikanan.
- r) Kualitas SDM pelaku usaha perikanan perlu ditingkatkan dengan pelatihan ataupun studi banding.

2. Pariwisata

- a) Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata yang berdaya saing.
- b) Kurangnya tenaga profesional di bidang pariwisata.
- c) Belum terbangunnya infrastruktur pariwisata dan sarana dan prasarana Pariwisata.
- d) Masih rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD.

3. Pertanian

- a) Pemantapan ketersediaan pangan.
- b) Pengoptimalan pengelolaan lahan pertanian/perkebunan.
- c) Alih teknologi pertanian/perkebunan yang masih rendah.





- d) Keterbatasan dan penurunan kapasitas sumber daya pertanian/perkebunan.
- e) Kualitas dan ketrampilan petani masih kurang.
- f) Meningkatkan daya saing pemasaran usaha olahan pertanian/perkebunan.
- g) Masih adanya potensi penyebaran penyakit menular ternak.

4. Perdagangan

- a) Masih lemahnya Penguatan Pasar Dalam Daerah dan Nasional.
- b) Masih lemahnya Perebutan Pangsa Pasar Ekspor.

5. Perindustrian

- a) Masih lemahnya Daya Saing Industri daerah.
- b) Belum tersedianya Penguasaan Teknologi dan Kualitas SDM Industri.
- c) Belum terfasilitasinya Industri Hulu dan Industri Antara yang berbasis Sumber Daya Alam.
- d) Belum tersedianya Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri.
- e) Masih lemahnya Daya Saing Industri Daerah.

Penunjang Urusan

1. Perencanaan Pembangunan

- a) Sinkronisasi dan konsistensi dokumen perencanaan antar SKPD dengan dokumen perencanaan di tingkat kabupaten.
- b) Kualitas sumberdaya manusia perencana di PD dan Bappeda yang masih perlu ditingkatkan.
- c) Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi yang ada di Sistim Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) yang akan menjadi data dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan.

2. Keuangan

- a) SPJ fungsional yang disampaikan oleh masing-masing Perangkat Daerah masih sering terlambat.





- b) Masih ada PPK-Perangkat Daerah yang belum memahami tugas-tugasnya sehingga pelaksanaan verifikasi SPJ masih belum dilakukan secara tertib.
- c) Masih ada Perangkat Daerah yang tidak konsisten dengan rencana anggaran yang telah disusun.
- d) Pelaksanaan tugas-tugas kebendaharaan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah belum dilakukan secara maksimal sesuai pedoman Pengelola Keuangan Daerah sehingga SPJ masing-masing Perangkat Daerah masih harus di verifikasi ulang oleh staf Bidang Perbendaharaan, hal ini berdampak pada proses penerbitan SP2D.
- e) Belum tertibnya penyampaian laporan hasil pengadaan barang dan pemeliharaan barang dari unit kerja.

3. Kepegawaian

- a) Belum adanya kualifikasi standar kompetensi Jabatan.
- b) Aplikasi SIMPEG (Sistem Informasi Kepegawaian) belum dapat diandalkan.
- c) Kurangnya pemahaman PNS tentang peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

4. Inspektorat Daerah

- a) Lemahnya koordinasi dikalangan APIP yang pada gilirannya menimbulkan stigma yang kurang menguntungkan kewibawaan kelembagaan APIP dimata auditan dan masyarakat.
- b) Kurang didukung dengan Sumber Daya Manusia (*SDM*) dan pembiayaan yang memadai bila dibandingkan dengan objek pemeriksaan yang ada.
- c) Keberadaan APIP yang melekat pada struktur eksekutif yang dapat menghalangi APIP untuk mampu bekerja secara obyektif.
- d) Kurangnya tenaga fungsional Auditor.

5. Sekretariat Daerah

- a) Penguatan Kapasitas Birokrasi dalam rangka Reformasi Birokrasi.
- b) Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Kerakyatan.





- c) Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia yang masih terbatas.
- d) Penyediaan Sarana dan Prasarana yang masih belum optimal.
- e) Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.
- f) Lemahnya kapasitas kelembagaan di tingkat kelurahan/desa yang menyebabkan kurang optimalnya proses koordinasi sehingga berdampak padakualitas produk rencana pembangunan tahunan.
- g) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan Pembangunan.
- h) Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan.
- i) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan belum padunya dokumen-dokumen perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan.
- j) Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi dalam perencanaan maupun penganggaran.
- k) Ketidaksesuaian indikator-indikator yang ada didalam dokumen perencanaan sehingga mempengaruhi secara keseluruhan dari proses perencanaan pembangunan daerah itu sendiri.

6. Sekretariat DPRD

- a) Agenda kegiatan DPRD yang dinamis sehingga mempengaruhi pelaksanaan fungsi dan tugas Sekretariat DPRD;
- b) Koordinasi pembahasan rapat DPRD dengan mitra kerja belum optimal;
- c) Masih kurangnya tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan administrasi dan dukungan fasilitasi yang diberikan;
- d) Kuantitas dan kualitas SDM yang belum sesuai kebutuhan.
- e) Penyediaan Sarana dan Prasarana yang masih belum optimal.
- f) Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.



**h) Penelitian Dan Pengembangan**

- a. Penempatan personil belum sesuai dengan pendidikan
- b. Kurangnya mengikuti kegiatan bimtek, diklat atau kursus terkait dengan penelitian/kajian/analisis dan pengembangan
- c. Anggaran yang belum maksimal
- d. Keterbatasan peralatan kerja
- e. Masih kurangnya tenaga/personil yang membantu kegiatan penelitian, kajian/analisis.

2.4. Isu-Isu Strategis

Pernyataan isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah karena pengaruhnya yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada pembangunan masa mendatang. Isu-isu strategis merupakan isu-isu yang jika diprioritaskan antisipasi dan penanganannya maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Namun jika isu-isu strategis ini tidak ditangani dengan serius, maka hal yang sebaliknya akan terjadi yakni tujuan dan sasaran menjadi sulit tercapai.

Suatu isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai isu internasional, nasional, dan regional. Berdasarkan identifikasi dari berbagai isu tersebut dapat ditentukan isu strategis yang akan ditangani dalam lima tahun ke depan.

2.4.1 Isu Internasional

Isu strategis internasional merupakan suatu kondisi yang dialami secara global oleh seluruh negara di dunia dimana isu tersebut merupakan prioritas utama setiap negara dalam penyusunan rumusan kebijakan di negaranya masing-masing. Isu strategis internasional sebagian besar mengusung perihal degradasi kualitas lingkungan hidup hingga ancaman menipisnya sumber daya tak terbarukan yang merupakan bahan bakar untuk energi.





Sebagai kabupaten yang telah dan didorong untuk menjadi Isu strategis di tingkat internasional yang relevan bagi perencanaan pembangunan masa mendatang bagi Kabupaten Minahasa Tenggara antara lain: pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainable Development Goals* (SDGs), kondisi perekonomian global yang berpengaruh ke perekonomian nasional dan daerah, mitigasi perubahan iklim global (*global warning/climate change*), serta kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang semakin pesat.

a. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah bentuk integrasi ekonomi regional yang direncanakan untuk dicapai pada Tahun 2015. Tujuan utama MEA adalah menjadikan Asean sebagai pasar tunggal dan basis produksi, yang mana terjadi arus barang, jasa investasi dan tenaga terampil yang bebas aliran modal yang lebih bebas. Keterlibatan semua pihak diseluruh negara anggota ASEAN termasuk Indonesia mutlak diperlukan agar dapat mewujudkan Asean sebagai kawasan yang kompetitif bagi kegiatan investasi dan perdagangan bebas yang pada gilirannya dapat memberikan manfaat bagi seluruh negara ASEAN. Bagi Indonesia MEA akan menjadi kesempatan yang baik karena hambatan perdagangan akan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Hal ini akan berdampak pada peningkatan ekspor yang pada akhirnya akan meningkatkan PDB Indonesia. Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) memiliki 4 pilar Cetak-Biru/*Blue Print* MEA yang akan memberikan peluang termasuk Indonesia yaitu :

1. Pasar Transit dan Basis Produksi Regional;
2. Kawasan berdaya saing tinggi;
3. Kawasan dengan pembangunan Ekonomi yang Merata; dan
4. Integrasi dengan Perekonomian Dunia.

Strategi menghadapi MEA melalui Kemendag sudah mempersiapkan langkah-langkah jitu untuk memperkuat produksi dalam negeri. Produksi Indonesia yang berdaya saing tinggi dimana berdasarkan data BPS 2014, neraca perdagangan Indonesia dengan ASEAN khususnya untuk non migas sudah mengalami defisit sebesar USD 0,26 miliar. Total export non migas nasional ke negara-negara anggota Asean mencapai USD 20,27 miliar, sedangkan impor non migas sedikit lebih tinggi yaitu sebesar USD 20,53 miliar.





b. *Sustainable Development Goals (SDG's)*

Indonesia menjadi salah satu negara yang menandatangani sebuah isu strategis internasional yakni *Millenium Development Goals (MDGs)*. Komitmen bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan MDGs mencerminkan upaya untuk menyejahterakan rakyat sekaligus menyumbangkan dukungan terhadap kesejahteraan masyarakat internasional. *Millenium Development Goals (MDGs)* memiliki konsep jelas dan indikator pencapaian terukur dalam komitmen memerangi kemiskinan, kelaparan, penyakit, buta huruf, degradasi kualitas lingkungan hidup dan diskriminasi terhadap perempuan. Target pencapaian MDGs tersebut diharapkan tercapai pada tahun 2015 sebagai bagian dari kesepakatan bersama menuju pembangunan global.

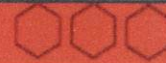
Tahun 2015 telah dilewati dan tentu saja evaluasi berbagai capaian MDGs sudah mencapai puncaknya. Capaian bangsa Indonesia pada target MDGs cukup beragam dimana terdapat 13 indikator sudah memenuhi target yang diharapkan sebelum tahun 2015 berakhir, sedangkan 36 indikator diperkirakan akan tercapai pada tahun 2015. Selain itu, terdapat 14 indikator MDGs yang masih memerlukan kerja keras dan kerja cerdas untuk mencapai target sesuai kesepakatan internasional.

Program MDGs yang berakhir pada tahun 2015 ini, diteruskan dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang disahkan di Sidang Umum PBB akhir September di New York, Amerika Serikat. SDGs tidak terpisah dari MDGs dan merupakan penyempurnaan dari MDGs. Bentuk penyempurnaan dilakukan melalui sejumlah pendekatan yang dipandang perlu dengan tetap melibatkan peran aktif warga dunia bagi terciptanya kepentingan global yang lebih luas. Tahun 2016 merupakan tahun pertama implementasi agenda pembangunan dunia Post-2015 (SDGs).

Sidang Umum PBB pada 4 Desember 2014 telah menyetujui platform agenda pembangunan dunia Post-2015 berdasar pada hasil *Open Working Group (OWG) on Sustainable Development Goals* yang akan menjadi target dan tujuan pembangunan dunia sampai 2030. Rumusan SDG terdiri dari 17 tujuan dan 169 target dimana pencapaian lebih terukur untuk menciptakan masyarakat dunia 2030 jauh lebih baik dari saat ini. Ke-17 tujuan SDGs tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menghapus segala bentuk kemiskinan dimana pun berada;





2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan *gender* dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan dari air dan sanitasi untuk semua;
7. Memastikan seluruh penduduk mendapat akses untuk energi yang terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan;
8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak untuk semua secara berkelanjutan;
9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif berkelanjutan, dan inovasi asuh;
10. Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara-negara;
11. Membuat pemukiman kota dan pemukiman manusia yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
12. Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Pelestarian dan pemanfaatan samudera, laut dan sumber daya kelautan berkelanjutan dalam rangka pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, memulihkan dan mempromosikan pemanfaatan ekosistem darat, lestari mengelola hutan, memerangi penggusuran, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
16. Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; serta





17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Target pembangunan universal yang tertuang dalam SDGs membutuhkan dukungan dari semua elemen masyarakat dunia, termasuk dari pemerintahan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat. Di setiap negara, tidak hanya negara miskin dan berkembang tetapi juga negara maju, rumusan SDGs merupakan sumber penting untuk menyelaraskan strategi dan kebijakan demi membuat kehidupan di muka bumi menjadi lebih baik. Di Indonesia khususnya Kabupaten Minahasa Tenggara, rumusan SDGs dan target pencapaian dapat menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional maupun daerah.

c. Ancaman Krisis Ekonomi Global

Pada awal tahun 2016, Bank Indonesia memberikan indikasi bahwa kelesuan ekonomi dunia yang telah terjadi dalam beberapa tahun akan membaik. Namun sampai dengan pertengahan tahun 2016, tak banyak sentimen positif yang diharapkan dapat menggairahkan (kembali) ekonomi dunia. Bahkan, fenomena "Brexit" atau keluarnya Inggris dari Uni Eropa semakin meningkatkan kecemasan atas masa depan ekonomi dunia, berdampingan dengan isu-isu terorisme global, rasis di Amerika dan gejala global pada umumnya, termasuk perang di Timur Tengah yang antara lain menyisakan permasalahan tak kalah serius atas jutaan pengungsi yang belum jelas masa depannya.

Ketidakpastian ekonomi global juga sama terjadi di Kawasan Asia-Pasifik. China sebagai salah satu tujuan ekspor Indonesia dalam beberapa tahun ini juga mengalami kelesuan, tak terkecuali juga dengan Jepang. Beberapa indikasi lain mengkonfirmasi dalam beberapa tahun ke depan akan banyak tekanan ekonomi dunia yang berimbas baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Indonesia maupun Kabupaten Minahasa Tenggara yang berpengaruh pada perlambatan pemulihan ekonomi.



d. Antisipasi Perubahan Iklim Global (*global warming/climate change*)

Perkembangan lingkungan pada era globalisasi pembangunan sekarang ini menunjukkan penurunan. Hal ini disebabkan pembangunan yang mengesampingkan faktor kelestarian lingkungan hidup sehingga menyebabkan kelestarian hidup yang buruk dengan akibat ancaman *global warming*. *Global warming* merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam yang dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, hingga banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama dalam adanya bencana alam.

Perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi *global warming*. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mempunyai strategi dalam menerapkan pembangunan yang ramah lingkungan. Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek *global warming* dapat diminimalisir atau dapat dihindari namun tetap terlaksana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

e. Era Digital dan Revolusi Industri 4.0

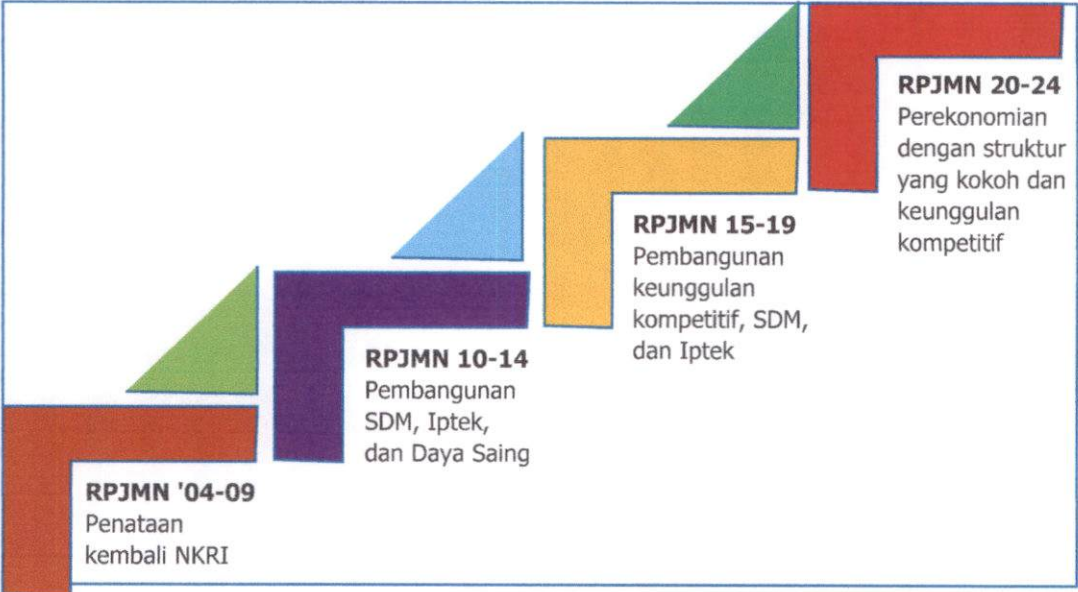
Era Digital dan Revolusi Industri 4.0 merupakan Fase periode Revolusi Industri dari tahun 2000 sampai sekarang diharapkan kegiatan manufaktur terintegrasi melalui penggunaan teknologi, *wireless* dan *big data* secara masif. Terdapat 4 pilar Perubahan dalam Era tersebut yang bertujuan untuk peningkatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat dan bangsa dimana saat ini berbagai macam kebutuhan manusia telah banyak menerapkan dukungan internet dan dunia digital sebagai wahana interaksi dan transaksi.

2.4.2 Isu atau Kebijakan Nasional

1) Telaahan RPJPN Tahun 2005-2025

Isu-isu secara nasional yang memiliki potensi besar untuk memengaruhi arah pembangunan Kabupaten Minahasa Tenggara pada masa mendatang adalah kebijakan dari pemerintah pusat. Dokumen perencanaan tingkat nasional merupakan salah satu sumber kebijakan yang memiliki kepastian tinggi dan dalam amanat peraturan perundangan harus diikuti karena penyusunan RPJMD harus berpedoman pada RPJMN. Mengingat periodisasi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara mengikuti periode RPJMN

III dan RPJMN IV, maka arah kebijakan RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara menyelaraskan dengan periode RPJMN III (2015-2019) dan RPJMN IV (2020 – 2024) yang mengacu pada RPJPN tahap ketiga (2015-2019) dan RPJPN Tahap Keempat (2020 - 2024).



Gambar 2.15
Fokus Kebijakan Setiap Tahapan dalam RPJPN 2005-2025

Arah kebijakan untuk RPJMN tahap III ditekankan pada pembangunan daya saing industri nasional untuk meningkatkan nilai tambah SDA, pembangunan kualitas SDM untuk meningkatkan produktivitas, dan penguasaan IPTEK untuk melahirkan inovasi. Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM tahap III, RPJM tahap III ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Kualitas sumber daya manusia terus mengalami perubahan positif yang ditandai oleh meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya tumbuh kembang optimal serta kesejahteraan dan perlindungan anak; tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang; serta mantapnya budaya dan karakter bangsa.

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan semakin efektif dan efisien yang dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan



pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari; terus membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup; meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat terhadap lingkungan hidup; serta semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di seluruh wilayah Indonesia.

Daya saing perekonomian Indonesia semakin kuat dan kompetitif dengan semakin terpadunya industri manufaktur dengan pertanian, kelautan, dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan; terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha; makin selarasnya pembangunan pendidikan, industri, ilmu pengetahuan dan teknologi; serta terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan, dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian.

Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi; terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat tercapai; mulai dimanfaatkannya tenaga nuklir untuk pembangkit listrik dengan mempertimbangkan faktor keselamatan secara ketat; terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern guna terciptanya masyarakat informasi Indonesia; terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air dan pengembangan sumber daya air; serta terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Wilayah perdesaan merupakan titik vital pembangunan masyarakat ekonomi lemah. Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur perdesaan harus terus dikembangkan terutama untuk mendukung pembangunan pertanian. Selain itu, pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi sarana prasarana pendukung kehidupan bagi seluruh masyarakat harus terus ditingkatkan dengan didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang, berkelanjutan, efisien, dan akuntabel. Diharapkan, dengan terpenuhinya kondisi tersebut semakin mendorong terwujudnya kabupaten/kota tanpa permukiman kumuh.





Berdasarkan telaahan RPJPN tahap III (2015-2019), maka pembangunan Kabupaten Minahasa Tenggara harus selaras dengan arahan RPJPN tahap III dengan menyesuaikan karakteristik lokal seperti:

- a. Meningkatkan daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat;
- b. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang semakin mantap dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari;
- c. Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan didukung oleh meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat; serta
- d. Semakin terpadunya industri manufaktur dengan pertanian, kelautan, dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan untuk mendukung daya saing perekonomian Indonesia yang semakin kuat dan kompetitif.

2) Telaahan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih

Dalam merumuskan dan merealisasikan berbagai komitmen Presiden dan Wakil Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpilih pada periode ini, serta berdasarkan kajian maupun analisis mengenai permasalahan dan isu strategis nasional yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima tahun ke depan, termasuk dalam penyelarasan dengan sasaran-sasaran pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJP Nasional tahun 2005-2025, maka untuk memajukan Negara Indonesia ke depan ditetapkan visi RPJM Nasional tahun 2020-2024 sebagai berikut:

"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Gotong royong merupakan intisari dari ideologi Pancasila. Tanggung jawab untuk membangun bangsa harus dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat dalam memutuskan suatu perihal dan gotong royong dalam bekerja. Kekuatan rakyat adalah gotong royong, dimana rakyat selalu bahu-membahu





dan bekerjasama menyelesaikan berbagai hambatan dan tantangannya ke depan.

Berdaulat adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi bangsanya sendiri. Oleh karena itu, pembangunan selain sebagai usaha untuk mewujudkan kedaulatan sebagai negara merdeka, pembangunan juga merupakan upaya membangun kemandirian. Bangsa yang berdaulat dan mandiri adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Oleh karena itu, untuk membangun kemandirian diperlukan kekuatan dan kemampuan nasional di segala lini baik bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Kemandirian suatu bangsa tercermin antara lain pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya; kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; kemampuan untuk memenuhi pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri yang makin kokoh dan berkurangnya ketergantungan kepada sumber luar negeri; dan kemampuan memenuhi kebutuhan pokok.

Kemandirian dalam kebudayaan harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan baik hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan. Kemandirian dan kemajuan suatu bangsa tidak boleh hanya diukur dari perkembangan ekonomi semata, namun kemandirian dan kemajuan juga tercermin dalam kelembagaan, pranata-pranata, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik dan sosial. Secara lebih mendasar lagi, kemandirian sesungguhnya mencerminkan sikap seseorang atau sebuah bangsa mengenai jati dirinya, masyarakatnya, serta semangatnya dalam menghadapi berbagai tantangan.

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui Misi sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;

